

RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
2025–2045



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024





GUBERNUR SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 ini dapat disusun dan ditetapkan. Dokumen ini merupakan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang yang akan menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. RPJPD Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, potensi lokal, serta tantangan global yang semakin kompleks. Penyusunan dokumen ini juga telah melalui proses partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap. Dengan penetapan Perda ini, diharapkan seluruh elemen pembangunan dapat bergerak secara terarah, sinergis, dan konsisten menuju pencapaian visi daerah pada tahun 2045.

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Oleh karena itu, komitmen kuat, kerja sama lintas sektor, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik akan menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJPD ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap dinamika yang berkembang guna memastikan keberlanjutan dan relevansi dokumen ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan hingga penetapan Perda RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan strategis dalam membangun masa depan Sulawesi Barat yang lebih baik, maju, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Mamuju, 12 Desember 2024

Pj. Gubernur Sulawesi Barat



Bahtiar Baharuddin

DAFTAR SINGKATAN

ADMINDUK	: Administrasi Kependudukan
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DDDTLH	: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EIP	: <i>Eco Industrial Park</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IID	: Indeks Inovasi Daerah
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKLHD	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
IKN	: Ibukota Nusantara
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KIPP	: Kawasan Inti Pusat Perikanan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KUKAR	: Kutai Kartanegara
Matabe	: Mamuju, Tampapadang dan Belang-Belang
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRB ADHB	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB ADHK	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
PERDA	: Peraturan Daerah
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
PKNp	: Pusat Kegiatan Nasional Promosi
PKWp	: Pusat Kegiatan Wilayah Promosi
PPI	: Pusat Pelelangan Ikan
PPU	: Penajam Paser Utara
Renja-PD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra-PD	: Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SD	: Sekolah Dasar
SDGS	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia

SEZ	: <i>Special Economic Zone</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
AHH	: Angka Harapan Hidup
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Daftar Singkatan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Dasar Hukum	5
1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	7
1.5. Kerangka Logik RPJPD	9
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	12
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	12
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	89
2.3. Aspek Daya Saing.....	123
2.4. Aspek Pelayanan Umum	152
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	161
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	178
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	190
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	198
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	198
3.2. Isu-Isu Strategis	207
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	235
4.1. Visi Daerah.....	235
4.2. Misi Daerah	238
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	246
5.1. Arah Kebijakan	246
5.2. Sasaran Pokok	265
5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah	298
BAB VI PENUTUP	309
6.1. Kaidah Pelaksanaan.....	309
6.2. Pembiayaan Pembangunan	312

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas dan Proporsi Wilayah Administasi Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (2023)	14
Tabel 2.2.	Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat	20
Tabel 2.3.	Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	27
Tabel 2.4.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten dan Topografi.....	33
Tabel 2.5.	Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat	36
Tabel 2.6.	Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat	41
Tabel 2.7.	Kebijakan Pengelolaan DAS-DAS Utama di Provinsi Sulbar	44
Tabel 2.8.	Kondisi Kekritisn DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015	45
Tabel 2.9.	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2023.....	47
Tabel 2.10.	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (ha), 2023	50
Tabel 2.11.	Perbandingan Pola Ruang dengan Penutup Lahan 2021	54
Tabel 2.12.	Kesesuaian Rencana Pola Ruang	55
Tabel 2.13.	Luas Tipe Penutupan Lahan Tahun 1990, 2000, 2010, 2019 dan 2022	58
Tabel 2.14.	Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2023	66
Tabel 2.15.	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2023.....	67
Table 2.16.	Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten dan Kejadian Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Jiwa)	67
Tabel 2.17	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	72
Tabel 2.18	Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat	77

Tabel 2.19	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Tahun 2017-2023	85
Tabel 2.20	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Tahun 2017-2023	88
Tabel 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2012 – 2023.....	91
Tabel 2.22	Pertumbuhan IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2023 (%).....	102
Tabel 2.23	Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2022	109
Tabel 2.24	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Persen)	112
Tabel 2.25	Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat menurut Dimensi Tahun 2018-2022	120
Tabel 2.26	Indikator Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat Tahun 2023	130
Tabel 2.27	Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024	132
Tabel 2.28	Angka Literasi/Numerasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024	133
Tabel 2.29	Rekapitulasi UPLM per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023	135
Tabel 2.30	Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022	137
Tabel 2.31	Indeks Infrastruktur menurut Komposit Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023	140
Tabel 2.32	Proporsi Kejadian Kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Tahun 2022.....	143
Tabel 2.33	Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek 2019–2023	145
Tabel 2.34	Proporsi Kejadian Kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Tahun 2022.....	148
Tabel 2.35	Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2023.....	152
Tabel 2.36	Matriks Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025	166

Tabel 2.37	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat	179
Tabel 2.38	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat	179
Tabel 2.39	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat.....	180
Tabel 2.40	Proyeksi Kebutuhan Rumah Provinsi Sulawesi Barat	183
Tabel 2.41	Kebutuhan Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter)	184
Tabel 2.42	Proyeksi Kebutuhan Listrik 2025 – 2050.....	186
Tabel 2.43	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	187
Tabel 2.44	Standar Pelayanan Kesehatan berdasarkan populasi dan radius pelayanan.....	188
Tabel 2.45	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	189
Tabel 2.46	Tabel Perhitungan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	190
Tabel 2.47	Proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan.....	190
Tabel 4.1	Penyelarasan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat	237
Tabel 4.2	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat	237
Tabel 4.3	Penyelarasan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat	244
Tabel 5.1.	Penyelarasan Arah Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat	246
Tabel 5.2.	Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat.....	247
Tabel 5.3.	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok.....	265
Tabel 5.4.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Transformasi Sosial...	282
Tabel 5.5.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Transformasi Ekonomi	288
Tabel 5.6.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Transformasi Tata Kelola	290
Tabel 5.7.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	292
Tabel 5.8.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	297

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan 2045 ..	21
Grafik 2.2.	Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan Tahun 2045	28
Grafik 2.3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2009-2023	61
Grafik 2.4.	Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Udara Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023	62
Grafik 2.5.	Nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2015-2023	64
Grafik 2.6.	Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2023	65
Grafik 2.7.	Nilai indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019-2023	73
Grafik 2.8.	Bauran Energi di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019-2023	74
Grafik 2.9.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2023	78
Grafik 2.10.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Antara Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Penduduk 2020 Tahun 2023	80
Grafik 2.11.	Proporsi Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 (%)	81
Grafik 2.12.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Jiwa)	82
Grafik 2.13.	Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023	83
Grafik 2.14.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2023	85
Grafik 2.15.	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2023.....	87
Table 2.16.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2011 – 2023.....	89
Grafik 2.17	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2023	90

Grafik 2.18	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2007-2023	92
Grafik 2.19	Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Periode Tahun 2006-2023 (Persen).....	93
Grafik 2.20	Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Persen)	94
Grafik 2.21	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2023 (Ribu Rupiah)	94
Grafik 2.22	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2023.....	95
Grafik 2.23	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2023.....	96
Grafik 2.24	Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023.....	97
Grafik 2.25	Jumlah Penduduk Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (Ribu Jiwa)	97
Grafik 2.26	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Persen)	98
Grafik 2.27	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Ribu Jiwa).....	98
Grafik 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2006 – 2023.....	99
Grafik 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	100
Grafik 2.30	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023.....	102
Grafik 2.31	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2010-2023.....	104
Grafik 2.32	Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023	105
Grafik 2.33	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023	105
Grafik 2.34	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023.....	106

Grafik 2.35	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023	106
Grafik 2.36	Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 - 2023 (%).....	111
Grafik 2.37	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	114
Grafik 2.38	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	115
Grafik 2.39	Hasil capaian IPA menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022.....	115
Grafik 2.40	Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023	116
Grafik 2.41	Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023	117
Grafik 2.42	Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023	117
Grafik 2.43	Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat Tahun 2015-2023	119
Grafik 2.44	Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat Tahun 2018-2022	120
Grafik 2.45	Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (%).....	122
Grafik 2.46	Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi Tahun 2023.....	122
Grafik 2.47	Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023	124
Grafik 2.48	Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023	125
Grafik 2.49	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 – 2023.....	125
Grafik 2.50	Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2005 – 2023 (Juta Rupiah)	127
Grafik 2.51	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2010-2022.....	128
Grafik 2.52	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2023	129
Grafik 2.53	Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat Tahun 2019-2023	131

Grafik 2.54	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Barat Tahun 2022-2023.....	135
Grafik 2.55	Skor IPLM menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2023 .	136
Grafik 2.56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sulawesi Barat Tahun 2017-2023	138
Grafik 2.57	Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2023	139
Grafik 2.58	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Polda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2022.....	141
Grafik 2.59	Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2022.....	142
Grafik 2.60	Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2009–2023 (Persen).....	144
Grafik 2.61	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Polda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2022.....	147
Grafik 2.62	Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2022.....	147
Grafik 2.63	Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023.....	150
Grafik 2.64	Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022-2023 ..	151
Grafik 2.65	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2023	154
Grafik 2.66	Indeks Pelayanan Publik Sulawesi Barat Tahun 2021-2023	156
Grafik 2.67	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023.....	156
Grafik 2.68	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023	157
Grafik 2.69	Indeks Inovasi Daerah Berdasarkan Provinsi Tahun 2023.....	158
Grafik 2.70	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2023	160
Grafik 3.1	Kesempatan Emas Demografi Indonesia 2020 – 2035	222

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
Gambar 1.2.	Kerangka Logik RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025- 2045	9
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat	15
Gambar 2.2.	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat (Kepulauan)	16
Gambar 2.3.	Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	22
Gambar 2.4.	Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045	23
Gambar 2.5.	Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	24
Gambar 2.6.	Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045	25
Gambar 2.7.	Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022.....	29
Gambar 2.8.	Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2045.....	30
Gambar 2.9.	Peta Status Pangan Tahun 2022.....	31
Gambar 2.10.	Peta Status Pangan Tahun 2045.....	32
Gambar 2.11.	Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat.....	34
Gambar 2.12.	Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat	39
Gambar 2.13.	Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat	43
Gambar 2.14.	Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.....	51
Gambar 2.15.	Peta Penutupan Lahan 2022	59
Gambar 2.16.	Peta Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat	71
Gambar 3.1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	208
Gambar 3.2.	Proses Perubahan Iklim	210
Gambar 3.3.	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi	231
Gambar 3.4.	Peta Rawan Bencana Tsunami	232



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Selain disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPJPD disusun dengan memperhatikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kajian lingkungan hidup strategis, serta dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD terdiri dari:
 - a. bab kesatu pendahuluan;
 - b. bab kedua gambaran umum kondisi daerah
 - c. bab ketiga permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab keempat visi dan misi daerah;
 - e. bab kelima arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab keenam penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 yaitu Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif”

Pasal 6

Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

- a. terwujudnya transformasi sosial;
- b. terwujudnya transformasi ekonomi
- c. terwujudnya transformasi tata kelola;
- d. menciptakan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
- e. menguatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- f. terwujudnya konektivitas antar wilayah, aspek sosial, ekonomi untuk menunjang ibu kota nusantara;
- g. mengutamakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- h. menjaga kesinambungan pembangunan.

Pasal 7

RPJPD menjadi pedoman untuk:

- a. perumusan visi, misi dan program calon Gubernur dan wakil Gubernur.
- b. penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Ketentuan mengenai rencana pembangunan Daerah yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Masa berlaku RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 10

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Desember 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

AMUJIB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AFRISAL, S.H
Pangkat : Penata Tk. I/III.d
NIP. : 19811214 201101 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan secara geografis letaknya sangat strategis yaitu terletak diantara 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung baik di darat maupun di laut dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik dalam lingkup Provinsi maupun koordinasi antar Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Penyusunan RPJPD ini mengacu pada RPJPN dan RTRW Provinsi. Salah satu arahan penting adalah periodisasi RPJPD harus disesuaikan dengan periodisasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045. Ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan. Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Dari segi muatan, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan (2025-2045). sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 dilakukan guna memberikan

arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan sesuai karakteristik dan potensi daerah. RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif dicapai. Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam 20 tahun ke depan, dengan memasukkan peran sub wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

RPJPD merupakan dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan lahir dari sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif, RPJPD menjadi pedoman bagi segenap pihak dalam pelaksanaan pembangunan agar Visi Provinsi Sulawesi Barat dapat secara bertahap dicapai oleh segenap pihak secara bersama-sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 126

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 DESEMBER 2024
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang berlangsung secara berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat banyak kemajuan pada berbagai dimensi pembangunan. Terhitung sejak terbentuknya provinsi ini pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, provinsi ini telah menunjukkan banyak pencapaian pembangunan yang cukup signifikan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB-ADHB) meningkat lebih dari 13 kali lipat sepanjang periode 2005–2023. PDRB Per Kapita meningkat lebih dari tujuh kali lipat pada periode yang sama. Begitu pula tingkat kemiskinan terpankas hampir setengah selama kurun waktu 2006–2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun hampir tiga perlima selama kurun waktu 2006–2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bergerak naik dari kriteria rendah ($IPM < 60$) menjadi kriteria sedang ($60 < IPM < 70$) dari 2010 ke 2023 (dengan menggunakan metode baru perhitungan IPM).

Semua pencapaian positif ini harus dipastikan terus berlanjut dalam jangka panjang 20 tahun ke depan. Seluruh pencapaian pembangunan yang telah diraih hingga saat ini harus lebih diakselerasi di tahun-tahun mendatang dengan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan. Dalam kaitan itulah, pembangunan Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan *guideline* yang akan menuntun arah pembangunan daerah ke depan. *Guideline* dimaksud harus mengacu pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut undang-undang ini bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.



Sesuai dengan arahan undang-undang ini, seluruh desain perencanaan pembangunan daerah harus dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pemerintah daerah wajib menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka satu tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Menyangkut RPJPD, alasan utama penyusunannya adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah. Secara substansial, RPJPD merupakan dokumen yang lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan dan fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Dari segi muatan, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, yaitu tahun 2025–2045.

Penting ditegaskan bahwa proses penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 yang saat ini sedang dalam revisi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian karena disusun dalam rentang waktu yang sama. RTRW merupakan arahan spasial dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 tahun ke depan. Pada saat yang sama, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 juga mengakomodasi Kajian Hidup Lingkungan Strategis (KLHS) untuk menjamin dan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun.



Proses penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 berpedoman pada amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang mengatur penyusunan RPJPD, tahapan Penyusunan RPJPD, Sistematika Penulisan RPJPD dan Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sehingga secara keseluruhan proses penyusunan RPJPD Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 berpedoman kepada Inmendagri tersebut. Penyusunan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah Pusat, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 adalah pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi substansi. Dari sisi proses, penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan dari sisi substansi, penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial.

Sebagai sebuah dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan lahir dari sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif dan partisipatif, RPJPD ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya mengenai kesepakatan terhadap Visi, Misi, dan Sasaran Pokok yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan. Visi Provinsi Sulawesi Barat dapat tercapai melalui agenda pembangunan yang dilaksanakan untuk tercapainya Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif. Misi pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. 3 transformasi Indonesia yakni transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. 2 landasan transformasi yakni menciptakan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro serta menguatkan ketahanan



sosial budaya dan ekologi. Dan yang terakhir 3 kerangka implementasi transformasi terdiri dari konektivitas antar wilayah, aspek sosial, ekonomi untuk menunjang IKN, mengutamakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta menjaga kesinambungan pembangunan.

Secara teknis, proses penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah. RPJPD menjadi peta jalan bagi arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), dokumen perencanaan jangka pendek daerah (RKPD), dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
2. Sebagai acuan bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun Visi, Misi, dan Program yang akan ditawarkan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) setiap lima tahun sekali.



1.3. Dasar Hukum

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 menggunakan berbagai peraturan perundangan sebagai dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102).
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, mengingat ketentuan pasal 3 pada Perpres tersebut mengatur bahwa dalam rangka mendukung percepatan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126).
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149).
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.

1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk memastikan adanya sinkronisasi dengan arahan kebijakan yang bersifat *top-down* dari pemerintah pusat. Visi, Misi, Sasaran Utama, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan yang merupakan muatan RPJPN 2025–2045 menjadi acuan di dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045.

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 juga mempertimbangkan dimensi spasial (keruangan). Oleh karena itu, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 tahun ke depan.

Untuk memastikan bahwa desain perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), maka penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan

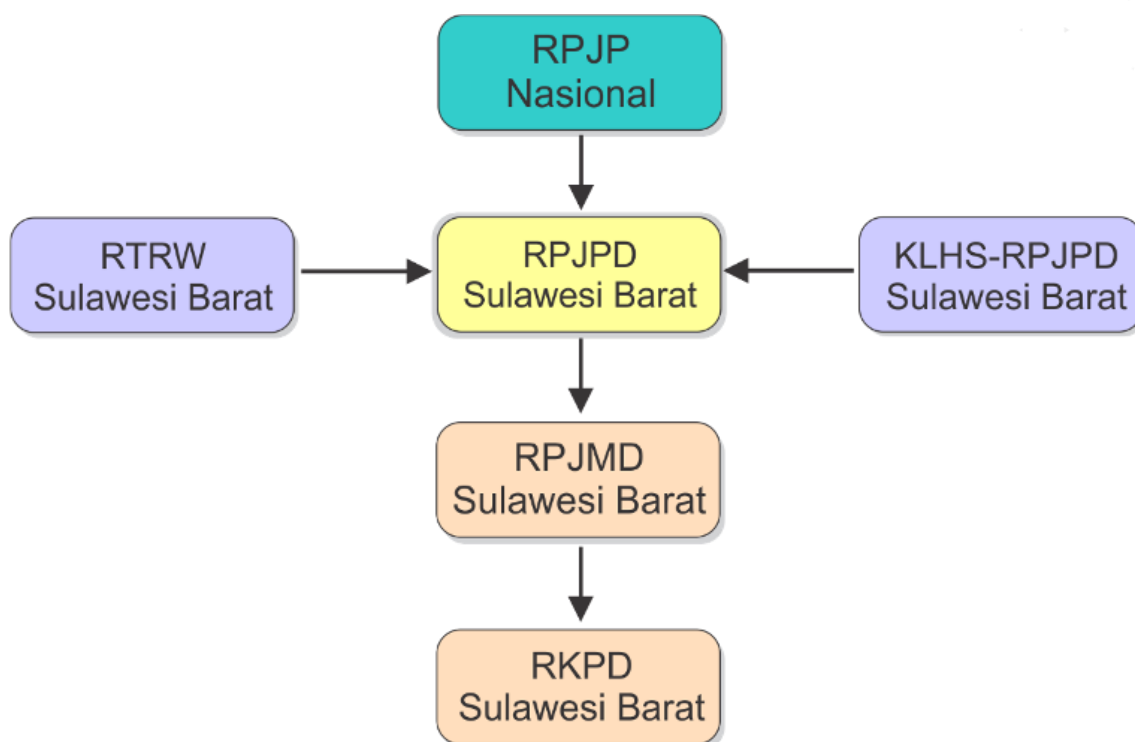


analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sejumlah substansi yang terdapat di dalam dokumen KLHS-RPJPD, seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, serta rekomendasi, dipastikan terakomodir di dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045.

Mengingat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berdimensi waktu jangka panjang, maka dokumen ini harus dijabarkan secara bertahap ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Dengan demikian, RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat untuk periode lima tahun sesuai dengan masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya RPJMD tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Bagi Perangkat Daerah, RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk periode lima tahun. Renstra-PD selanjutnya menjadi bahan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun.

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. Kerangka Logik RPJPD

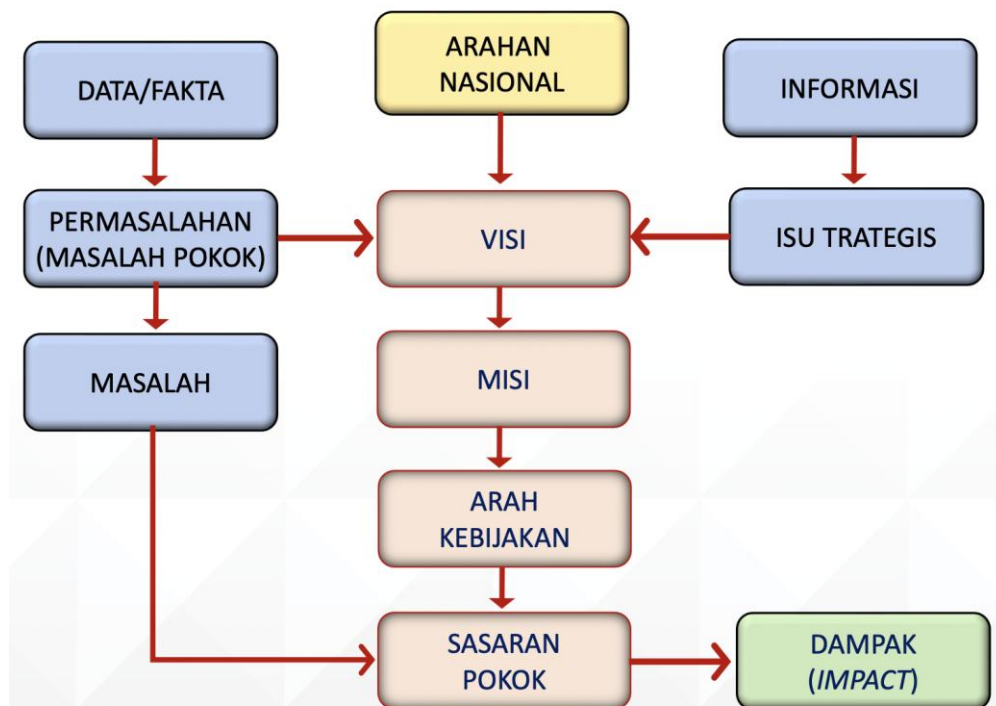
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 disusun dengan mengikuti kerangka logik (*logical framework*) yang disajikan secara skematik seperti pada Gambar 1.2.

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang dapat menggambarkan mengenai kondisi faktual dan capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam satu-dua dekade terakhir. Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk menemukan permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan penyelesaian di masa depan. Pada saat yang sama, juga diidentifikasi berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, baik isu global dan nasional, maupun isu regional Pulau Sulawesi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan serta isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di masa depan, maka dirumuskan Visi pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan. Perumusan Visi pembangunan jangka panjang

daerah juga harus memperhatikan arahan kebijakan Nasional yang termuat di dalam dokumen RPJP Nasional Tahun 2025–2045. Di dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Gambar 1.2 Kerangka Logik RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045



Untuk mencapai Visi pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan, maka ditetapkan Misi pembangunan jangka panjang daerah. Di dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Selanjutnya, Visi dan Misi pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sejumlah Sasaran Pokok yang bersifat makro daerah, berdimensi jangka panjang, dan dinyatakan secara kuantitatif. Suatu Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran Pokok tersebut disertai dengan indikator kinerja terukur dan target kinerja kuantitatif dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.

Untuk mencapai Sasaran Pokok maka dirumuskan berbagai Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan pedoman untuk menentukan



tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja Sasaran Pokok.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 terdiri atas 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan uraian mengenai latar belakang penyusunan dan penetapan RPJPD ini, dasar hukum yang dijadikan dasar penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan antara RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, kerangka logik RPJPD dan sistematika penyusunan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi deskripsi mengenai kondisi faktual Provinsi Sulawesi Barat dalam 4 (empat) aspek diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Selain menyajikan data dan hasil analisis terkait 4 aspek tersebut, juga disajikan Evaluasi hasil RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, berisi deskripsi mengenai berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi dan isu-isu strategis yang berpengaruh bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Bab IV Visi dan Misi Daerah, yang menguraikan Visi Daerah dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 tahun ke depan.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, yang menguraikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 20 tahun ke depan. Bab ini juga memuat pentahapan pembangunan Daerah lima tahunan selama periode 2025–2045.

Bab VI Penutup, menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 dengan Ibu kota adalah Kabupaten Mamuju. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat Pulau Sulawesi, terletak pada posisi geografis $0^{\circ}12'$ - $03^{\circ}38'$ Lintang Selatan (LS) dan $118^{\circ}43'15''$ - $119^{\circ}54'3''$ Bujur Timur (BT) menurut data BPS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Posisi ini menempatkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah strategis yang dikenal dengan “silang segitiga emas” antara Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang menjadi modal geografis pembangunan daerah kedepannya karena posisinya dekat dengan jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional. Sebelah Utara Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Tahun 2016, BPS Provinsi Sulawesi Barat merilis data luas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat mencapai $37.129,18 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 54,79 persen wilayah laut (20.342 km^2) dan 45,21 persen ($16.787,18 \text{ km}^2$) daratan. Namun, angka tersebut berubah di tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat berkurang menjadi $16.594,74 \text{ km}^2$. Karena didominasi oleh laut, panjang garis pantai Provinsi Sulawesi Barat mencapai 677 km dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40 pulau, menunjukkan bahwa potensi besar Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya berada di wilayah laut, sehingga penting bagi pemerintah daerah mempertimbangkan wilayah laut dalam rancangan pembangunan jangka panjang.



Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terbagi-bagi menjadi enam kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan, dan 576 desa. Setelah didirikan, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan pemerintahan yang signifikan. Pada awalnya provinsi ini hanya terdiri dari 5 (lima) kabupaten, tetapi di tahun 2013 terjadi pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat saat ini menjadi enam kabupaten. Letak dan posisi geografis kabupaten-kabupaten tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 20 38' 45" LS - 30 38' 15" LS dan 1180 45' 00" BT - 1190 4' 45" LS, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
2. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 30 4' 10" LS - 30 32' 00" LS dan 1180 40' 27" BT - 1190 29' 41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
3. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 20 39' 216" LS - 30 19' 288" LS dan 1190 0' 216" BT - 1190 38' 144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.
4. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 20 8' 7" LS - 20 57' 50" LS dan 1170 3' 57" BT - 1190 51' 17" BT.
5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 00 40' 10" LS - 10 50' 12" LS dan 1190 25' 26" BT - 1190 50' 20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km
6. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 10 43' 33" LS - 20 18' 54" LS dan 1190 7' 35" BT - 1190 52' 18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

Sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Mamuju memiliki wilayah paling luas dengan proporsi 29,78 persen atau setara dengan 4.942,25 km², kemudian Kabupaten Mamasa dengan proporsi 18,17 persen atau 3.015,95 km², dan Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah masing-masing 17,49 persen dan 16,62 persen. Kabupaten Majene dan Polewali Mandar menjadi daerah dengan luas wilayah yang relatif paling kecil, yaitu hanya 900,92 km² atau 5,43 persen dan 2.074,12 km² atau 12,50 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 2.1 Luas dan Proporsi Wilayah Administrasi Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

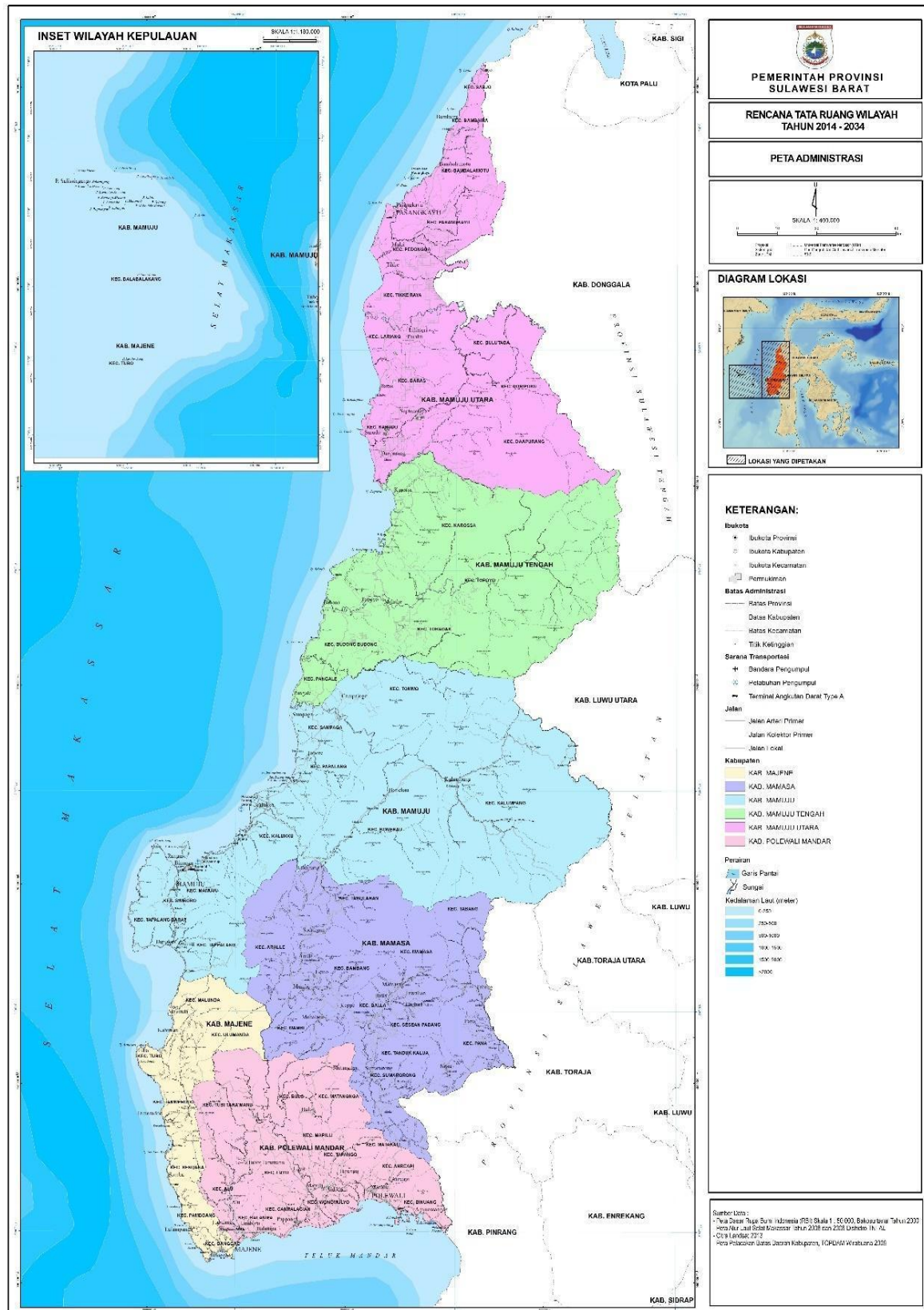
Kabupaten	Luas Wilayah (Km ²)	Proporsi (%)
Majene	900,92	5,43
Polewali Mandar	2.074,12	12,50
Mamasa	3.015,95	18,17
Mamuju	4.942,25	29,78
Pasangkayu	2.903,18	17,49
Mamuju Tengah	2.758,34	16,62
Total	16.594,76	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat

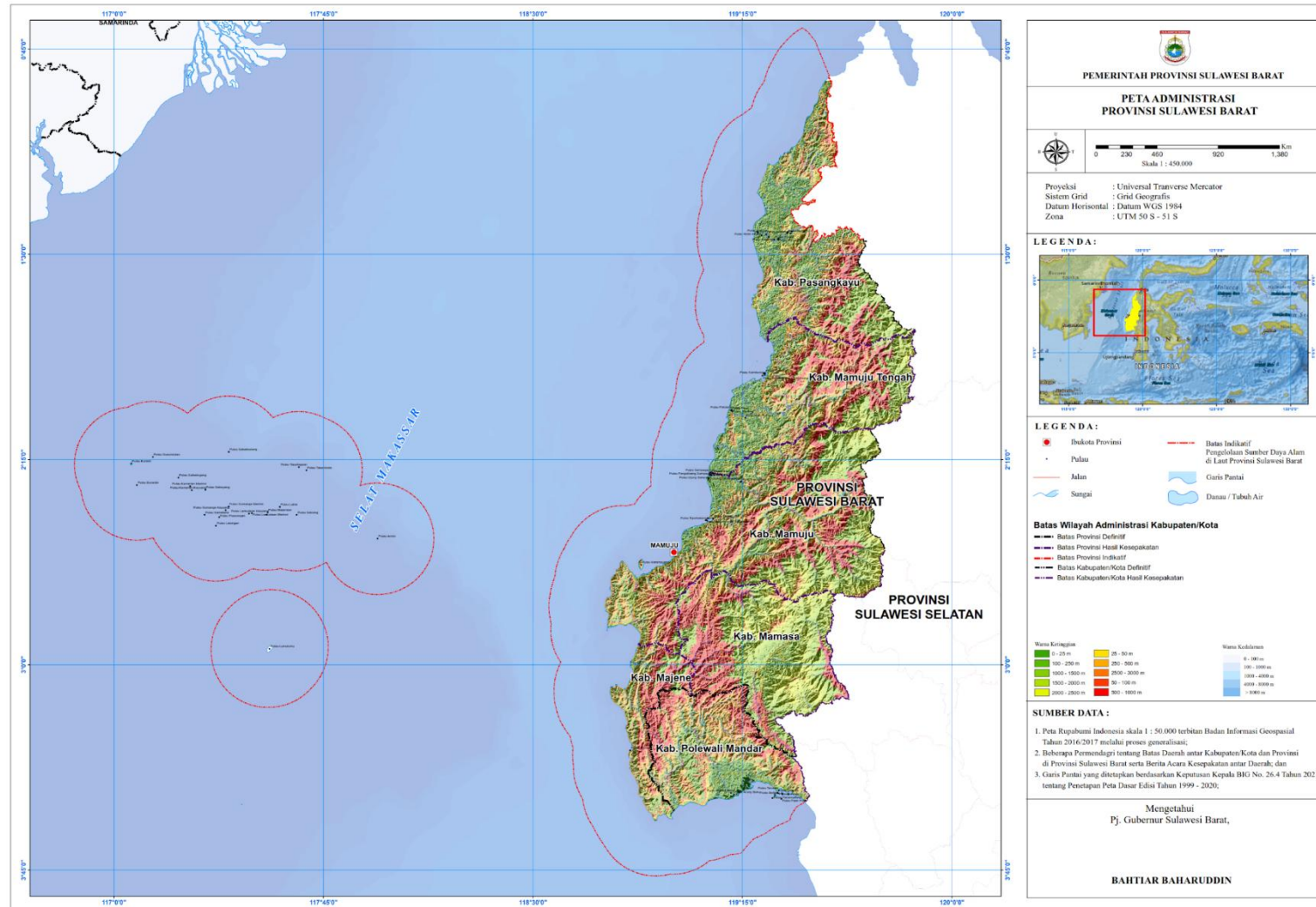


Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Gambar 2.2 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat (Kepulauan)





Provinsi Sulawesi Barat, yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk gugusan kepulauan yang mempesona. Wilayah ini dihiasi oleh pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Laut Sulawesi, masing-masing menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa.

Salah satu kepulauan yang terkenal di Sulawesi Barat adalah Kepulauan Balabalakang. Terletak di lepas pantai barat provinsi ini, kepulauan ini terdiri dari beberapa pulau kecil yang indah dengan pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. Balabalakang adalah surga bagi para penyelam dan pecinta snorkeling karena terumbu karangnya yang masih alami dan kaya akan kehidupan laut.

Selain Kepulauan Balabalakang, terdapat pula Kepulauan Totoli yang memiliki pesona alam yang tak kalah menawan. Pulau-pulau di gugusan ini dikelilingi oleh laut biru yang tenang dan sering kali menjadi tujuan para wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Kehidupan bawah laut di sekitar Kepulauan Totoli juga sangat beragam, dengan berbagai jenis ikan, karang, dan biota laut lainnya.

Kepulauan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan alam. Kehidupan masyarakat di pulau-pulau ini biasanya bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian utama, seperti nelayan tradisional yang menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Mereka juga sering kali terlibat dalam kegiatan konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di sekitar mereka.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah memprioritaskan Kepulauan Bala-balakang menjadi teras depan atau wajah Sulawesi Barat khususnya dalam menopang Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Disamping sebagai teras terdepan kepulauan Bala-balakang juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Sulawesi Barat sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.

Semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki area laut, kecuali Kabupaten Mamasa, namun daerah dengan wilayah laut terluas berada di Kabupaten Majene, Mamuju, dan Polewali Mandar. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Barat dan data BPS Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat jumlah desa tepi laut paling banyak

berada di ketiga daerah ini, memberikan gambaran bahwa sebagian besar wilayah laut Provinsi Sulawesi Barat berada di tiga kabupaten ini. Ketiganya berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan jalur ALKI II. ALKI II memiliki banyak potensi karena merupakan jalur lalu-lintas barang ke luar negeri. Jalur ALKI II merupakan jalur transportasi laut nasional melalui Selat Makassar yang menghubungkan arus angkutan barang (tengker, peti kemas) dan pelayaran internasional sehingga memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi di daerah tersebut. Persoalannya kemudian, daerah-daerah yang termasuk dalam ALKI II belum sepenuhnya memiliki kapasitas produksi untuk terlibat dalam perdagangan internasional, termasuk Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.1.2. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung

Esensi dasar dari identifikasi daya dukung dan daya tampung adalah bahwa kemampuan ekosistem menyediakan jasa lingkungan hidup (supply side) adalah terbatas, sementara kebutuhan jasa lingkungan hidup (demand side) bisa tidak terbatas. Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan, sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka pemanfaatan lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika aspek ketersediaan (supply) diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (demand) akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung. Status daya dukung dikatakan terlampaui apabila supply lebih kecil dari demand, demikian pula sebaliknya. Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah pada laporan ini daya dukung disusun berdasarkan jasa lingkungan. Dalam Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat beberapa penilaian yang diuraikan diantaranya kondisi status daya dukung penyediaan air dan status pangan Adapun kajiannya daya dukung air Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut.

a. Daya Dukung Air

Daya dukung penyediaan air (*water supply capacity*) adalah kemampuan sistem atau infrastruktur air untuk memasok air bersih yang cukup dan berkualitas kepada populasi yang membutuhkannya. Kemampuan ini penting untuk memastikan ketersediaan air yang memadai untuk rumah tangga, komersial, industri, pertanian, dan lainnya dalam suatu wilayah. Perhitungan status daya dukung penyediaan air dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi potensi air yang didasarkan pada data potensi wilayah Sungai. Nilai Potensi Tersebut kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air untuk mendistribusikan potensi air pada setiap grid.

Pendekatan Grid ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi sejauh mana wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dan keperluan lahan. Selanjutnya, data distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan air penduduk. Dalam perhitungan ini, digunakan standar nilai kebutuhan air sebesar 800 m³/tahun/kapita, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009. Hasil dari perhitungan ini akan menciptakan peta kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat, yang memberikan informasi tentang seberapa besar kebutuhan air penduduk di berbagai wilayah.

Selain itu, perhitungan juga mencakup kebutuhan air untuk lahan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh bukan hanya mengenai kebutuhan air manusia, tetapi juga kebutuhan air untuk keperluan pertanian, industri, dan sektor lainnya. Ini membantu pemerintah dan pengambil kebijakan untuk merencanakan alokasi air yang efisien dan berkelanjutan.

Analisis ini, juga dilakukan perhitungan terkait status daya dukung daya tampung wilayah. Ini berguna untuk mengetahui batas maksimal populasi penduduk yang dapat didukung oleh sumber daya air alamiah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Informasi ini menjadi dasar untuk merencanakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan memastikan bahwa ketersediaan air terjaga sesuai dengan karakteristik geografis dan lingkungan .



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

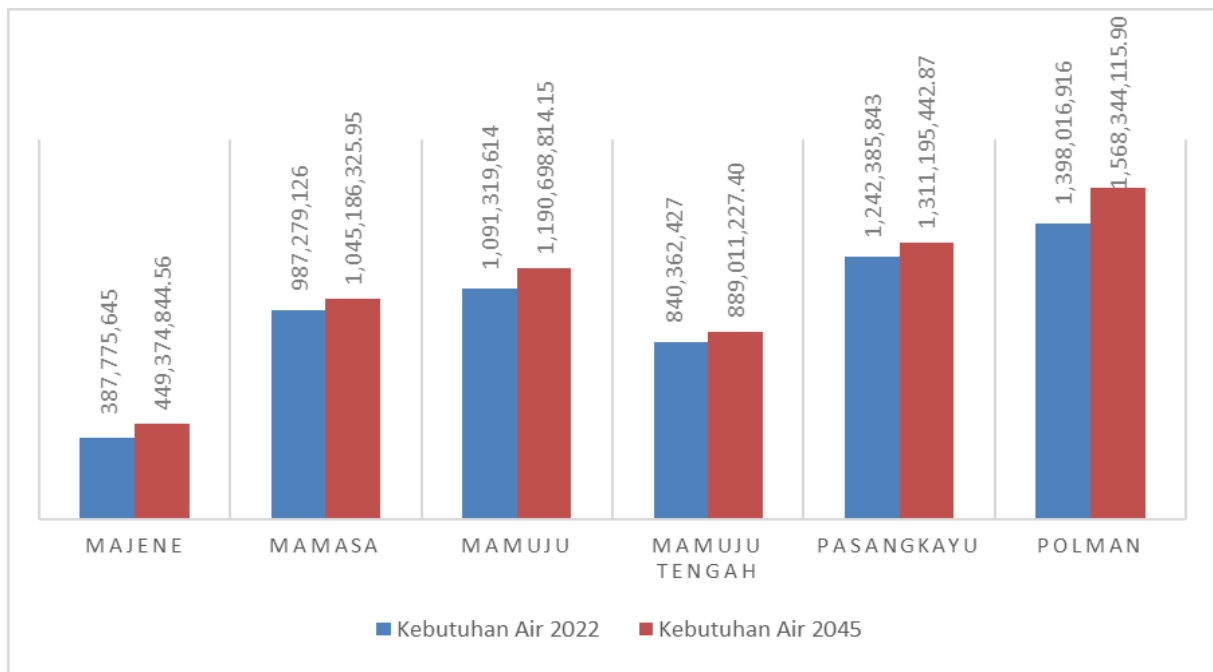
Tabel 2.2 Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten / Kota	Penduduk Tahun (Jiwa)		Ketersediaan m3/tahun/kapita	Kebutuhan m3/tahun/kapita		Ketersediaan-Kebutuhan m3/tahun/kapita		Ambang Batas m3/tahun/kapita		
	2022	2045		2022	2045	2022	2045	Ambang batas	2022	2045
Majene	177,387.00	254,386.00	779,824,583.19	387,775,644.56	449,374,844.56	392,048,938.63	330,449,738.63	667,424.00	490,037.00	413,038.00
Mamasa	166,444.00	238,828.00	2,175,502,705.63	987,279,125.95	1,045,186,325.95	1,188,223,579.67	1,130,316,379.67	1,651,509.00	1,485,065.00	1,412,681.00
Mamuju	285,496.00	409,720.00	3,954,322,266.34	1,091,319,614.15	1,190,698,814.15	2,863,002,652.19	2,763,623,452.19	3,863,830.00	2,148,196.00	3,454,110.00
Mamuju Tengah	139,950.00	200,761.00	2,558,738,009.70	840,362,427.40	889,011,227.40	1,718,375,582.31	1,669,726,782.31	2,288,146.00	1,860,458.00	2,087,385.00
Pasangkayu	198,574.00	284,586.00	2,730,431,080.44	1,242,385,842.87	1,311,195,442.87	1,488,045,237.57	1,419,235,637.57	2,059,032.00	766,166.00	1,774,446.00
Polman	490,400.00	703,309.00	2,011,118,652.15	1,398,016,915.90	1,568,344,115.90	613,101,736.26	442,774,536.26	1,256,566.00	10,328,256.00	553,257.00
SULAWESI BARAT	1,458,251.00	2,091,590.00	14,209,937,297.45	5,947,139,570.83	6,453,810,770.83	8,262,797,726.62	7,756,126,526.62	11,786,507.00	10,328,256.00	9,694,917.00

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel, kemudian digunakan untuk menghitung status daya dukung penyediaan air terlampaui atau tidak terlampaui. Adapun perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 dan tahun Proyeksi 2045 dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Grafik 2.1 Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan 2045

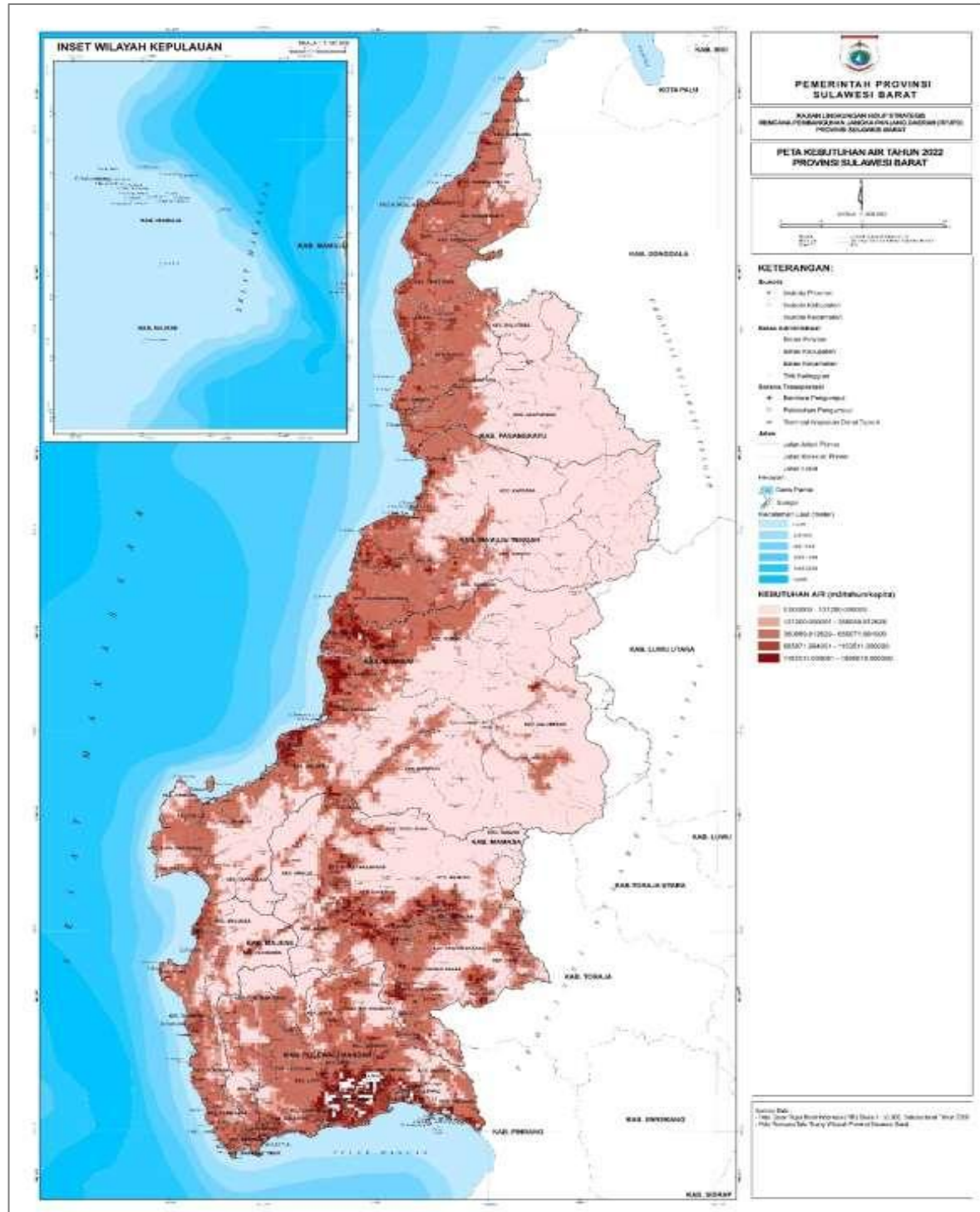


Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

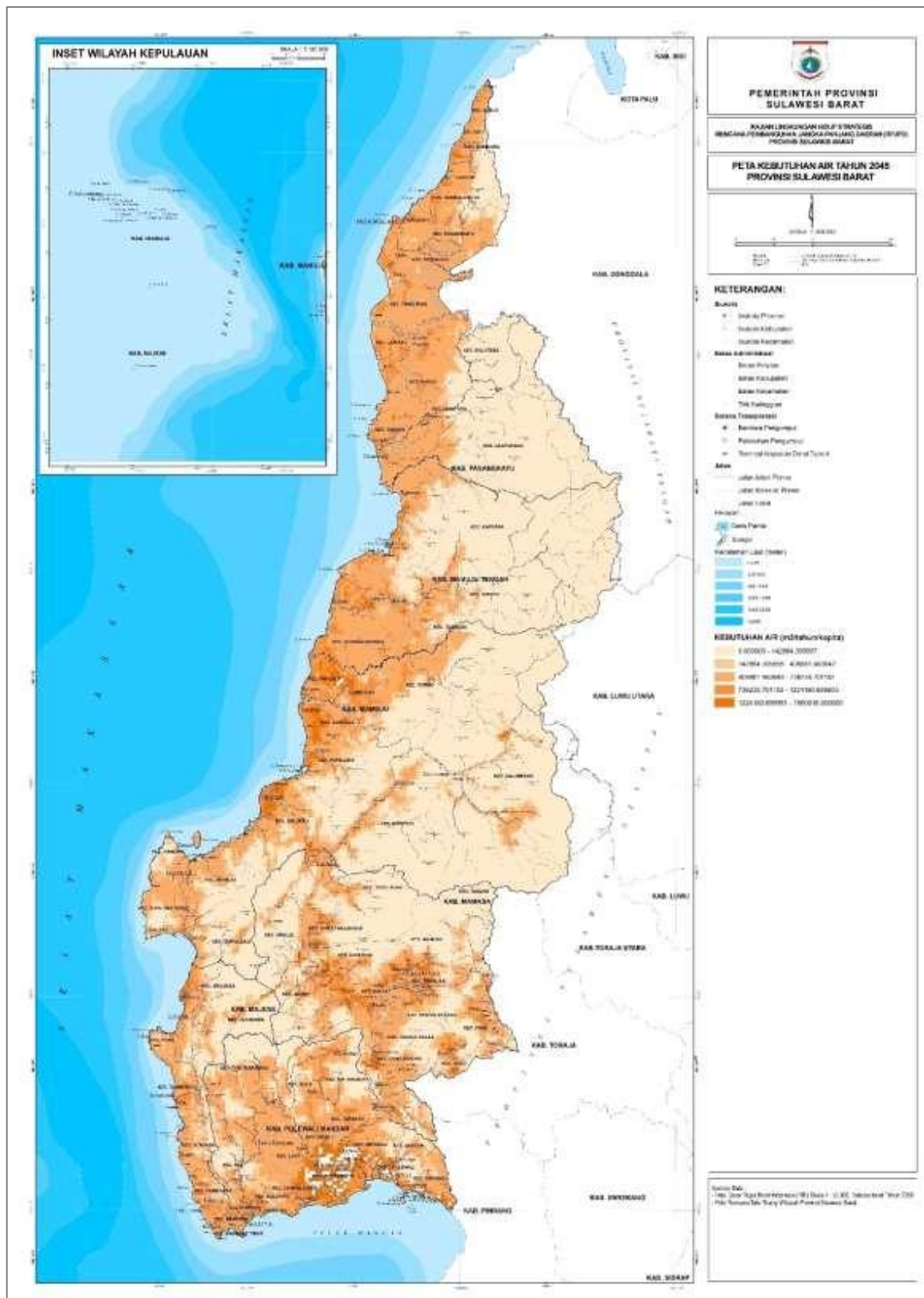
Grafik diatas memberikan pandangan yang cukup menarik tentang tren kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2045. Analisis data ini mengungkap bahwa secara keseluruhan, kebutuhan air di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Namun, ada dua kabupaten yang menonjol dengan proyeksi peningkatan kebutuhan air yang signifikan pada tahun 2045, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar.

Proyeksi peningkatan kebutuhan air di kedua kabupaten ini menjadi perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, atau perubahan dalam kebutuhan air di sektor-sektor tertentu.

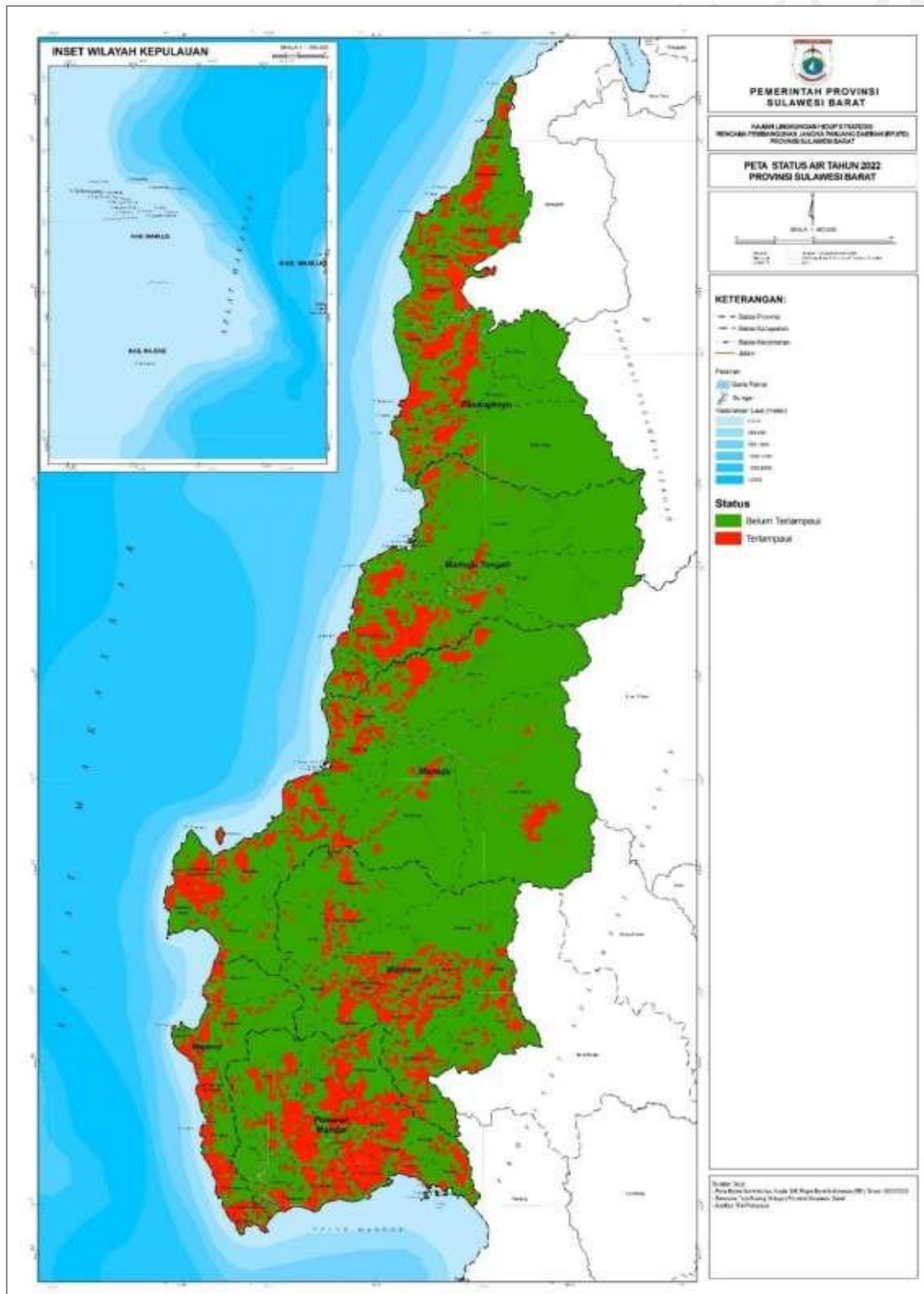
Gambar 2.3 Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022



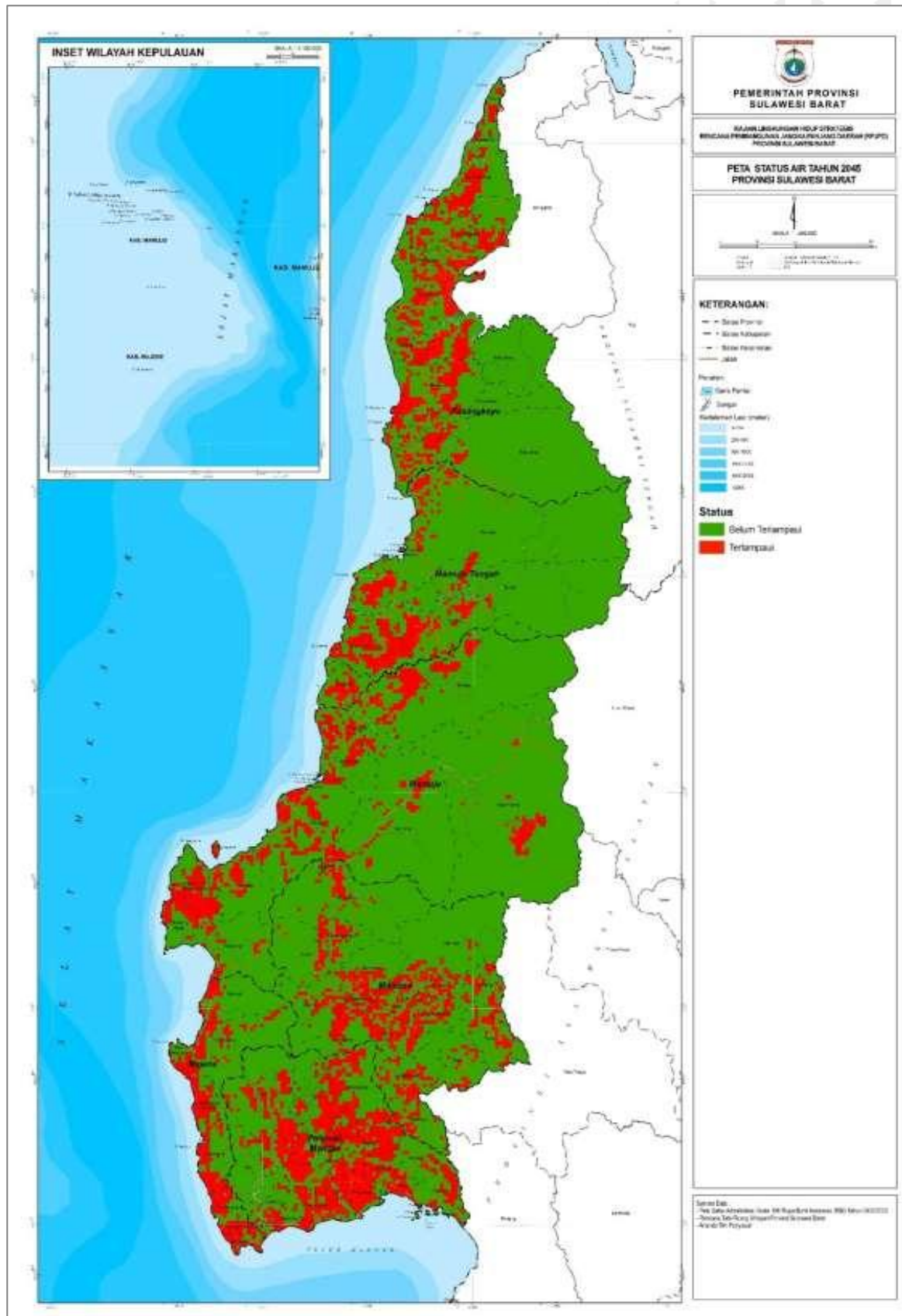
Gambar 2.4 Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045



Gambar 2.5 Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022



Gambar 2.6 Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045



b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung penyediaan pangan merujuk pada kapasitas suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Ini melibatkan berbagai aspek seperti produksi pertanian, keberlanjutan ekologi, ketersediaan lahan pertanian, dan kebijakan pangan. Daya dukung ini sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengatasi masalah kelaparan.

Daya dukung penyediaan pangan dapat diukur dengan melihat sejauh mana produksi pangan dalam wilayah tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Ini mencakup jenis pangan yang dihasilkan, tingkat produktivitas pertanian, dan kualitas pangan yang tersedia. Selain itu, aspek konservasi lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam daya dukung penyediaan pangan. Pertanian yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam sangat diperlukan agar wilayah tersebut dapat terus memproduksi pangan yang cukup untuk masa depan. Analisis tentang Daya dukung penyediaan pangan suatu wilayah sangat penting diketahui untuk melihat kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan.

Analisis ini dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap grid yang digunakan dalam menghitung status daya dukung lingkungan hidup. Jumlah penduduk yang terdapat pada setiap kecamatan didistribusikan secara spasial ke grid yang digunakan sehingga diketahui sebaran jumlah populasi per setiap grid. Distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat pada setiap grid digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan pangan individu dengan memperhatikan standar angka kecukupan energi (AKE) sebesar 2.150 kalori per hari per kapita. Selanjutnya, hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Provinsi Sulawesi Barat digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat kelebihan atau kekurangan pasokan pangan dalam wilayah tersebut. Selain itu, perhitungan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi batas maksimal populasi penduduk yang dapat diberdayakan oleh sumber daya alam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memperhitungkan karakteristik wilayah dan ketersediaan pangan, penjelasan secara rinci berdasarkan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

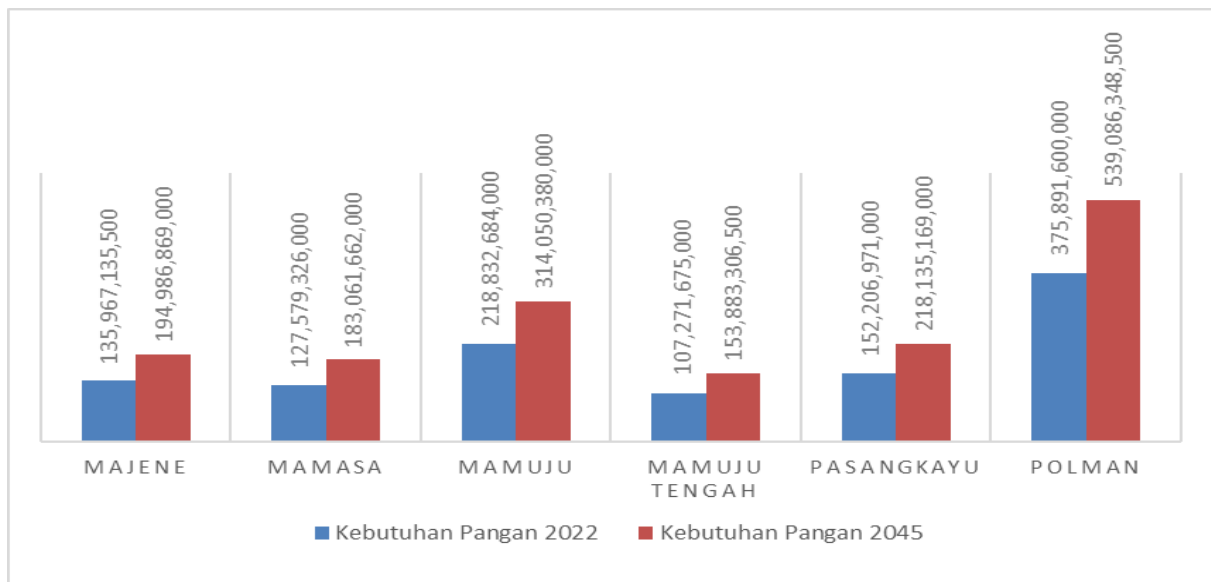
Tabel 2.3 Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

KABUPATEN	Penduduk Tahun		KETERSEDIAAN (hari/kapita)	Kebutuhan (hari/kapita)		Ketersediaan-Kebutuhan (hari/kapita)		Ambang Batas (hari/kapita)		
	2022	2045		2022	2045	2022	2045	AMBANG BATAS	2022	2045
Majene	177,387	254,386	60,664,484,813.14	135,967,135,500.00	194,986,869,000.00	-75,302,650,686.89	-134,322,384,186.90	79,267.00	-98,120.00	-175,119.00
Mamasa	166,444	238,828	190,376,652,439.49	127,579,326,000.00	183,061,662,000.00	62,797,326,439.48	7,314,990,439.50	248,371.00	81,927.00	9,543.00
Mamuju	285,496	409,720	299,947,759,156.62	218,832,684,000.00	314,050,380,000.00	81,115,075,156.59	-14,102,620,843.48	392,094.00	106,598.00	-17,626.00
Mamuju Tengah	139,950	200,761	182,427,940,764.31	107,271,675,000.00	153,883,306,500.00	75,156,265,764.30	28,544,634,264.29	237,988.00	98,038.00	37,227.00
Pasangkayu	198,574	284,586	192,713,041,167.73	152,206,971,000.00	218,135,169,000.00	40,506,070,167.70	-25,422,127,832.30	251,540.00	52,966.00	-33,046.00
Polewali Mandar	490,400	703,309	162,567,745,502.36	375,891,600,000.00	539,086,348,500.00	-213,323,854,497.67	-376,518,602,997.77	212,358.00	-278,042.00	-490,951.00
SULAWESI BARAT	1,458,251	2,091,590	1,088,697,623,843.64	1,117,749,391,500.00	1,603,203,735,000.00	-29,051,767,656.49	-514,506,111,156.66	1,421,618.00	-36,633.00	-669,972.00

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Mamasa dan Mamuju Tengah yang masih belum Terlampaui. Analisis terkait perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan pada setiap kecamatan sangat diperlukan untuk mengukur berapa ambang batas penyediaan, mengingat pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kebutuhan, yang mana masa yang akan datang dapat menyebabkan terlampauinya daya dukung wilayah.

Grafik 2.2 Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan Tahun 2045

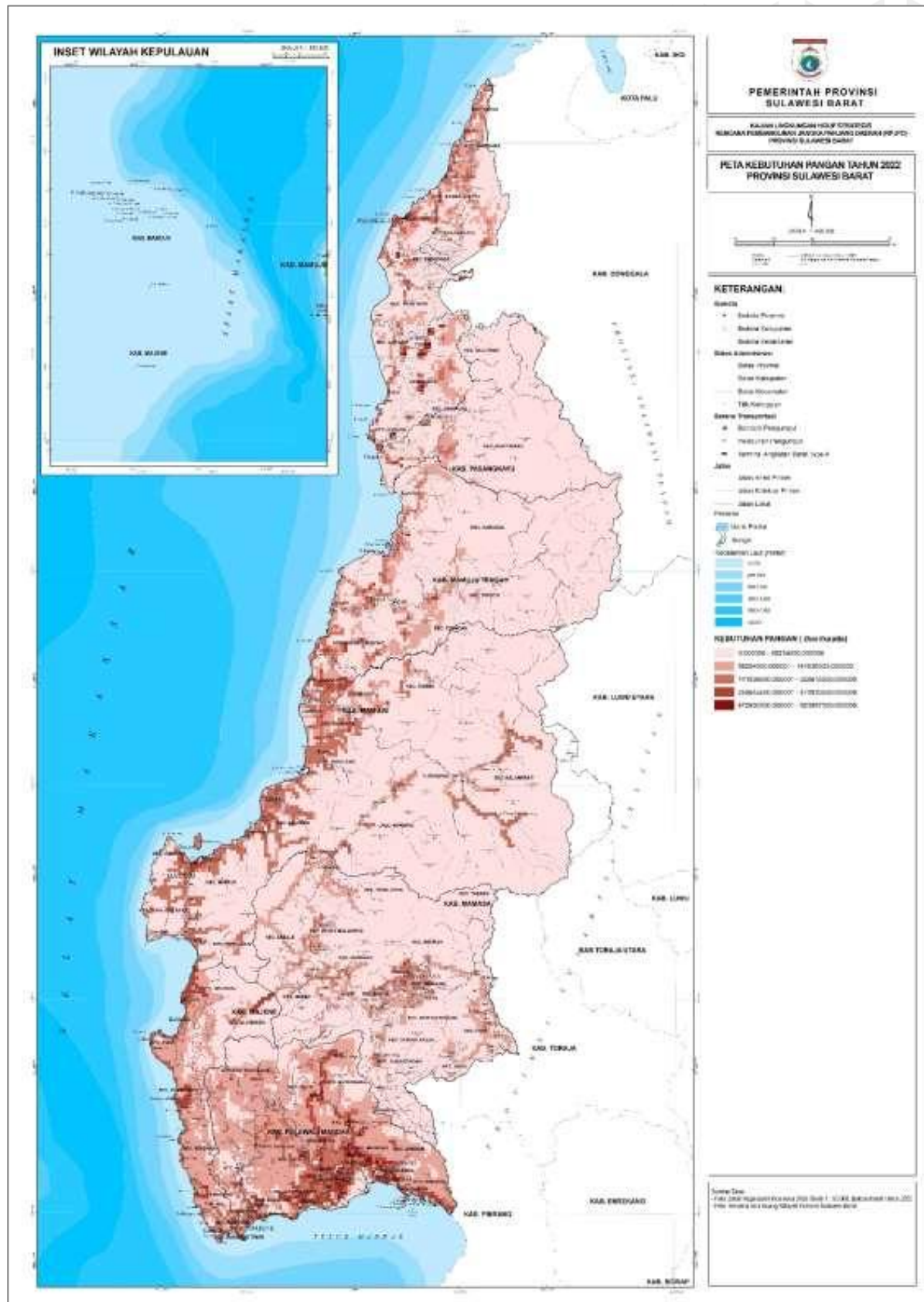


Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

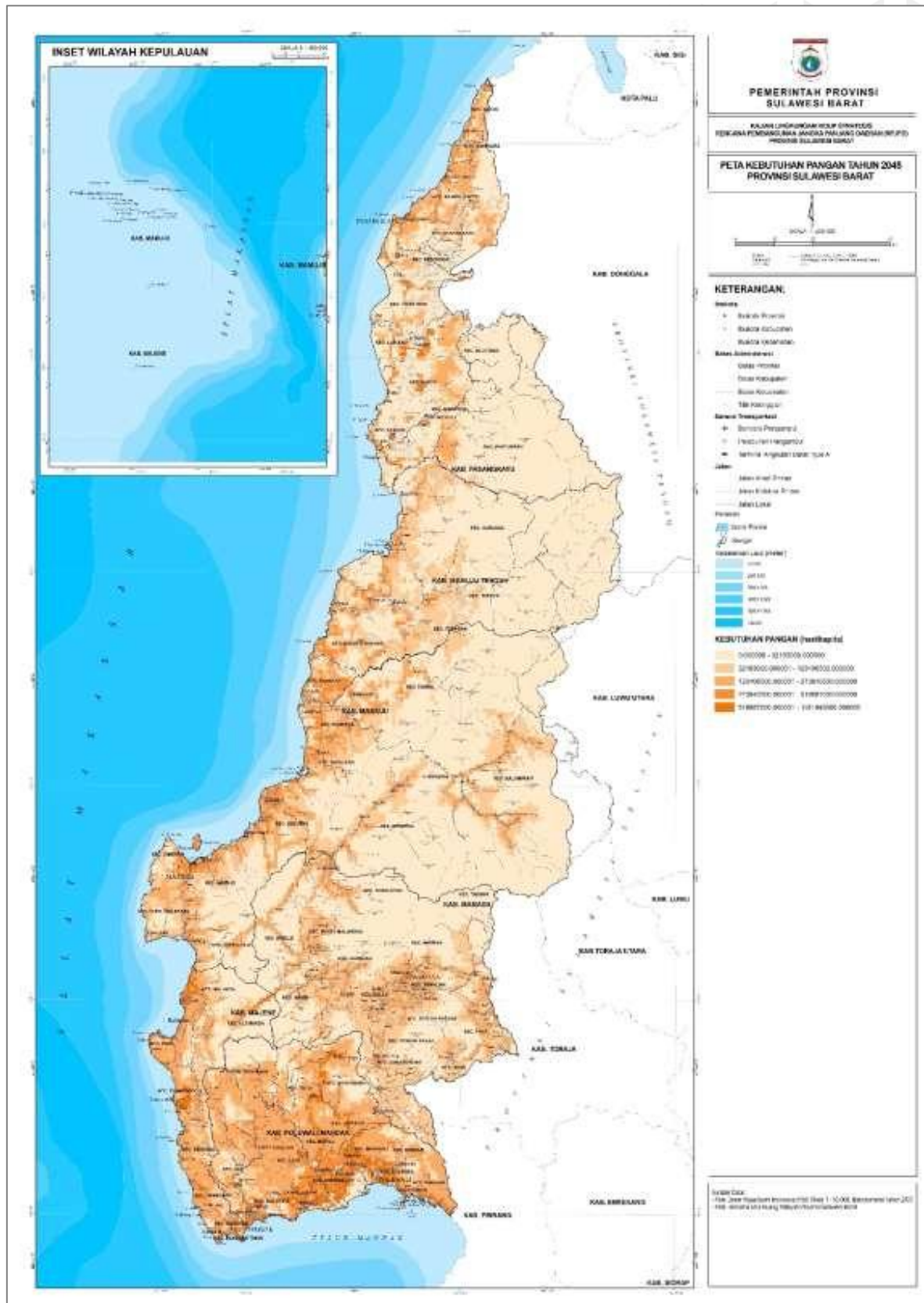
Proyeksi peningkatan kebutuhan pangan di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar pada tahun 2045 menandakan potensi tantangan yang perlu diatasi dalam konteks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat. Data ini memberikan wawasan penting bagi perencanaan strategis guna memastikan ketersediaan pangan yang memadai di masa depan.

Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar mungkin menghadapi peningkatan kebutuhan pangan yang signifikan karena beberapa faktor. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan dinamika ekonomi lokal dapat menjadi pendorong utama di balik tren ini. Peningkatan kebutuhan pangan juga dapat mencerminkan potensi pengembangan sektor pertanian dan agribisnis di kedua kabupaten tersebut.

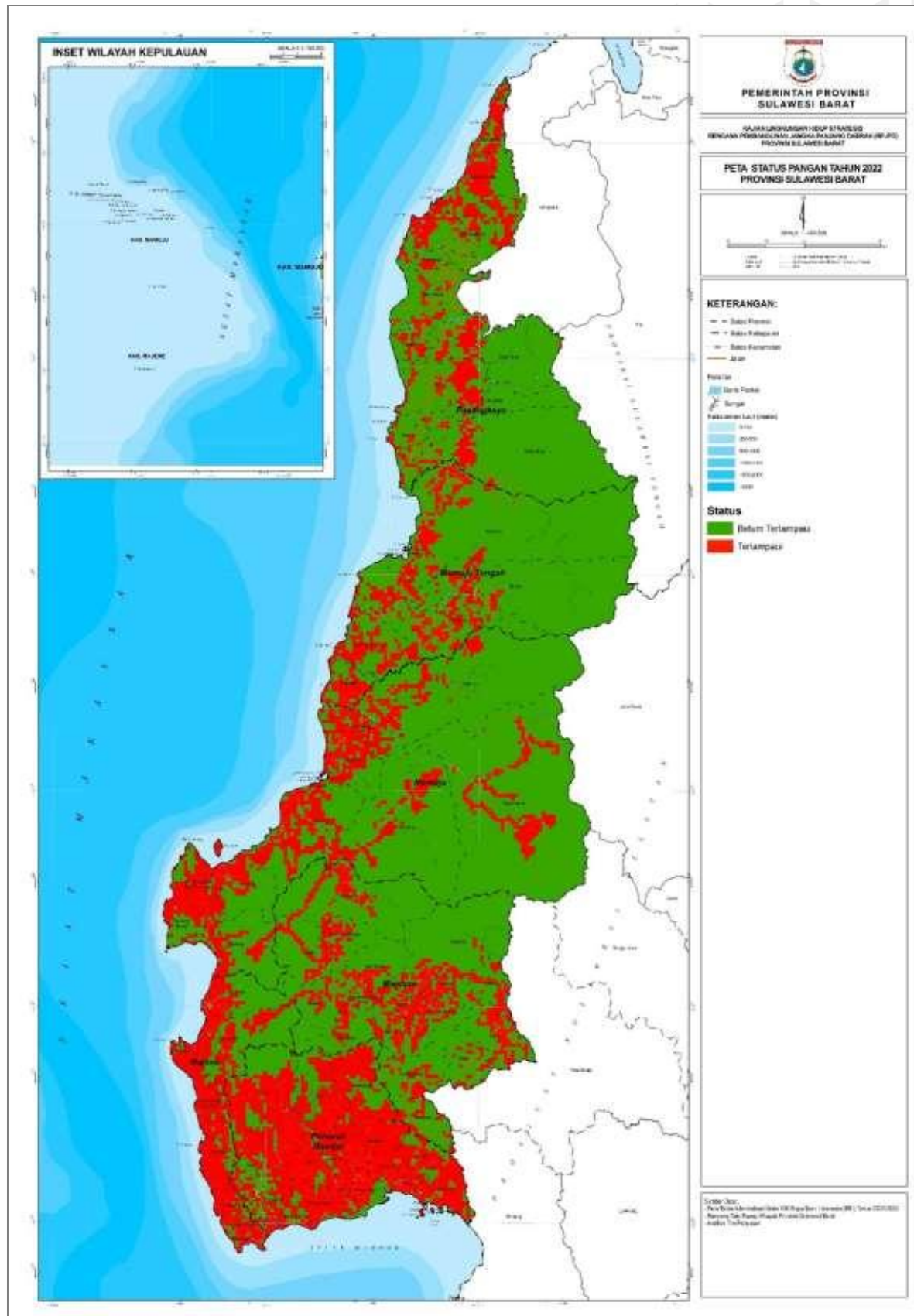
Gambar 2.7 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022



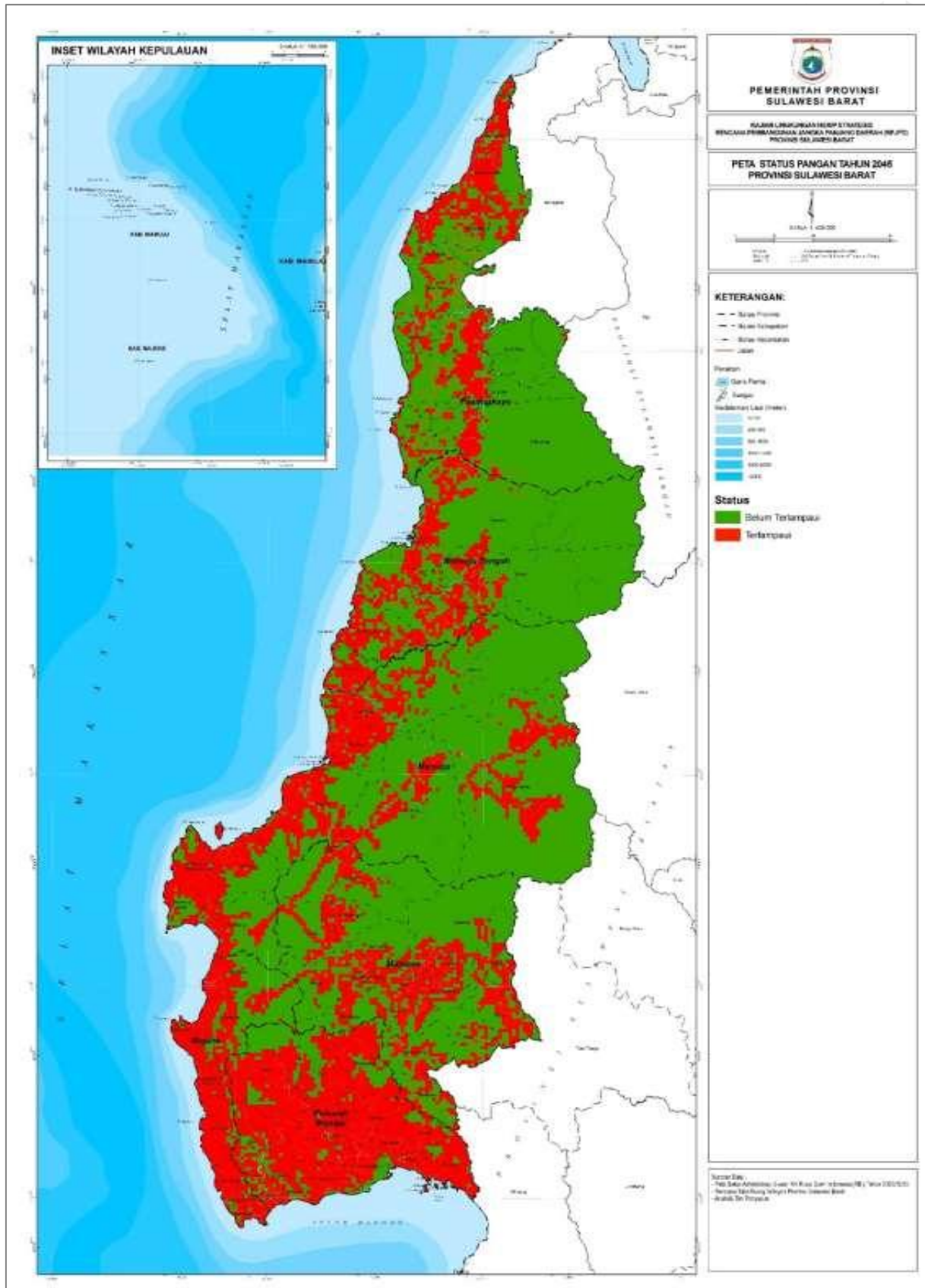
Gambar 2.8 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2045



Gambar 2.9 Peta Status Pangan Tahun 2022



Gambar 2.10 Peta Status Pangan Tahun 2045



2.1.1.3. Topografi

Provinsi Sulawesi Barat memiliki topografi yang beragam, dari datar, berbukit sampai bergunung. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu memiliki topografi datar, sedangkan Kabupaten Mamuju, Majene, dan Mamasa memiliki topografi berbukit sampai bergunung. Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar yang dapat dikembangkan karena banyaknya gunung. Aliran sungai memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Provinsi Sulawesi Barat bisa memanfaatkan potensi aliran sungai misalnya digunakan untuk irigasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA), jalur transportasi, terutama di daerah yang sulit diakses oleh jalan raya.

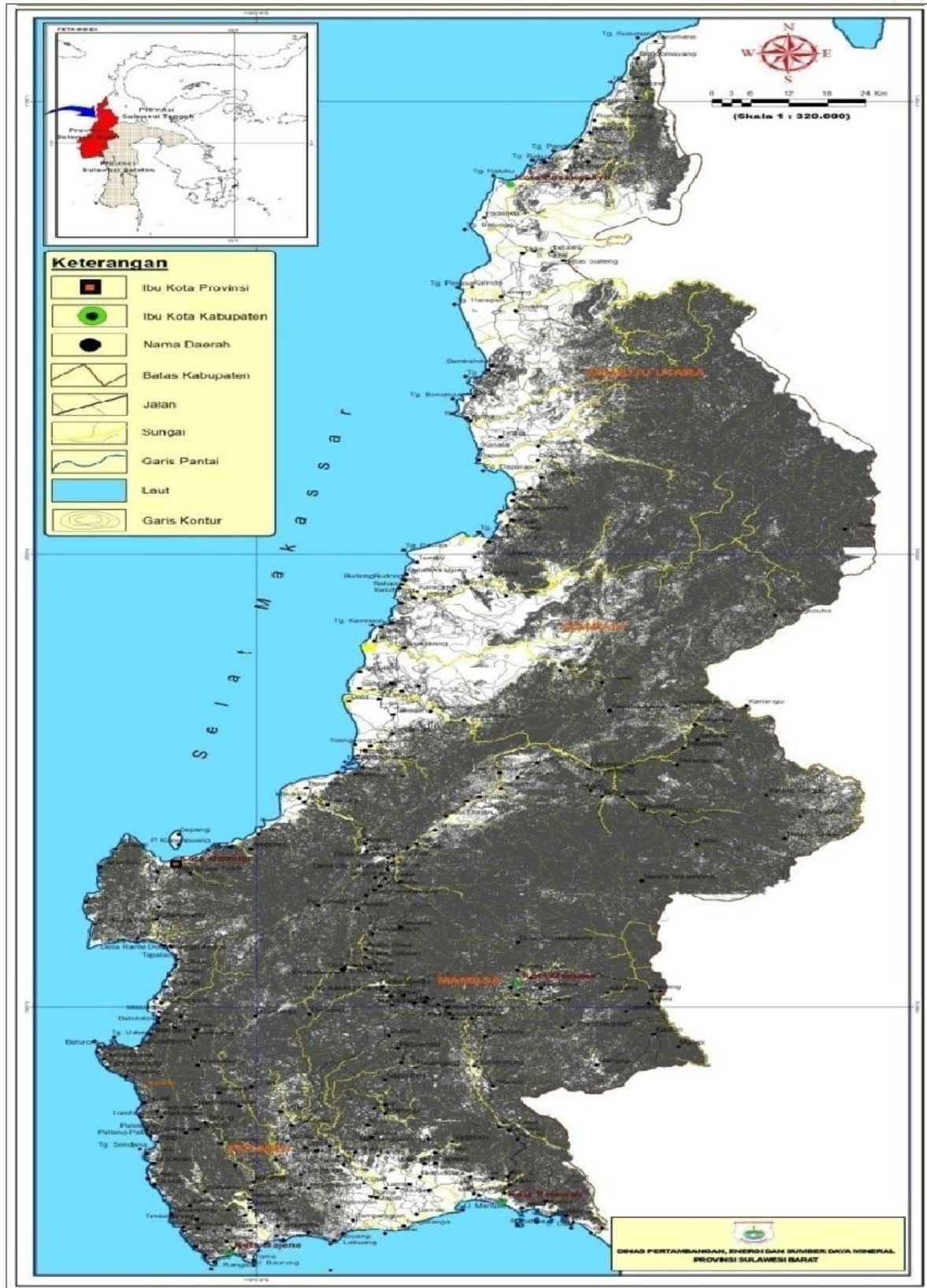
Tabel 2.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten dan Topografi

Kabupaten	Lembah	Lereng	Dataran
Majene	-	57	25
Polewali Mandar	3	86	78
Mamasa	-	180	1
Mamuju	-	77	24
Pasangkayu	1	21	41
Mamuju Tengah	-	23	33
Sulawesi Barat	4	444	202

Sumber: Sulawesi Barat dalam Angka 2024

Berdasarkan data BPS, ada empat desa di Provinsi Sulawesi Barat yang secara topografi berada di daerah Lembah tahun 2021, satu desa berada di Kabupaten Pasangkayu dan tiga desa ada di Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah ini sebenarnya berubah dibandingkan 10 tahun lalu. Tahun 2014, BPS mencatat total desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat yang berada di daerah Lembah mencapai 93 desa/kelurahan, terbanyak ada di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Empat tahun kemudian, jumlahnya berkurang menjadi 40 desa/kelurahan, Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar tetap yang terbanyak. Tahun 2021, Kabupaten Mamasa tercatat tak lagi memiliki desa yang berada di Lembah, sementara Kabupaten Polewali Mandar tersisa tiga desa.

Gambar 2.11 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat





Berbeda dengan desa/kelurahan lembah, jumlah desa/kelurahan yang berada di lereng justru bertambah. Sebagian besar desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 berada di wilayah lereng, dengan total sebanyak 444 desa/kelurahan. Dari seluruh desa/kelurahan tersebut, 180 desa/kelurahan berada di Kabupaten Mamasa yang memang dominan daerah pegunungan, 86 desa/kelurahan ada di Polewali Mandar, 77 desa/kelurahan di Kabupaten Mamuju, dan sisanya ada di Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Desa yang berada di lereng, memiliki beberapa hambatan, terutama bagi Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Kemiringan lereng yang curam dapat menyulitkan petani melakukan kegiatan pertanian, seperti pengolahan tanah, penanaman, dan pemanenan. Selain itu, erosi akibat tingginya curah hujan sangat berpotensi terjadi di daerah lereng.

Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki cukup banyak desa/kelurahan yang berada di kontur daratan. Tahun 2021, terdapat 202 desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat yang berada di daratan, dimana Sebagian besar ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 78 desa/kelurahan, kemudian di Kabupaten Pasangkayu 41 desa/kelurahan, Mamuju Tengah 33 desa/kelurahan, sementara sisanya berada di Kabupaten Majene, Mamuju, dan Mamasa.

Sebagai daerah yang dominan lereng, Provinsi Sulawesi Barat memiliki beberapa gunung yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi Masyarakat. Dalam beberapa hal, gunung memiliki banyak fungsi seperti pengendali sumber air, habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga dapat mengurangi pemanasan global, dan beberapa fungsi vital lainnya. Berdasarkan data, sekitar 193 gunung masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat, dimana Gunung Ganda Dewata merupakan gunung tertinggi dengan elevasi 3.037 meter di atas permukaan laut yang berada di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas, yang mencakup sekitar 70% dari total luas. Itu biasanya terletak di bagian tengah ke timur dan memanjang dari utara ke selatan, membentuk lembah yang curam.

Tabel 2.5 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian (meter)
1.	Majene	11	Seteng	1.001
2.	Polewali Mandar	28	Tetuho	1.448
3.	Mamasa	31	Mambulilling	2.873
4.	Mamuju	109	Ganda Dewata	3.037
5.	Pasangkayu	14	Pandabatu	284

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Tak hanya menyimpan sumber daya alam, wilayah laut dan gunung Provinsi Sulawesi Barat juga berpotensi menjadi sumber bencana alam, terutama jika aktivitas eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu sebabnya, wajar jika Provinsi Sulawesi Barat ditempatkan sebagai provinsi kedua di Indonesia yang masuk dalam wilayah daftar rawan bencana. Menurut indeks risiko bencana yang dirilis oleh BNPB, Provinsi Sulawesi Barat termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan kedua paling rentan terhadap bencana, dan dari 528 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, Majene berada di urutan kedua terburuk di Indonesia. Itu sebabnya, dalam desain rencana pembangunan jangka panjang, kerawanan bencana mestinya perlu menjadi salah satu pertimbangan.

2.1.1.4. Geologi

Geologi di Provinsi Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuartar. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batu sabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasangkayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) di bagian timur memanjang utara-selatan wilayah Provinsi Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai

Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasangkayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.

Miosen Awal, yang merupakan batuan gunung api beranggotakan batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunungapi Talaya. Batuan Gunungapi Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini mempunyai anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal.

Sedangkan pada bagian barat wilayah Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batupasir dan batu lempung. Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

Batuan Gunungapi Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batu pasir gampingan, napal tukaan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batu gamping koral, batugamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batupasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal.

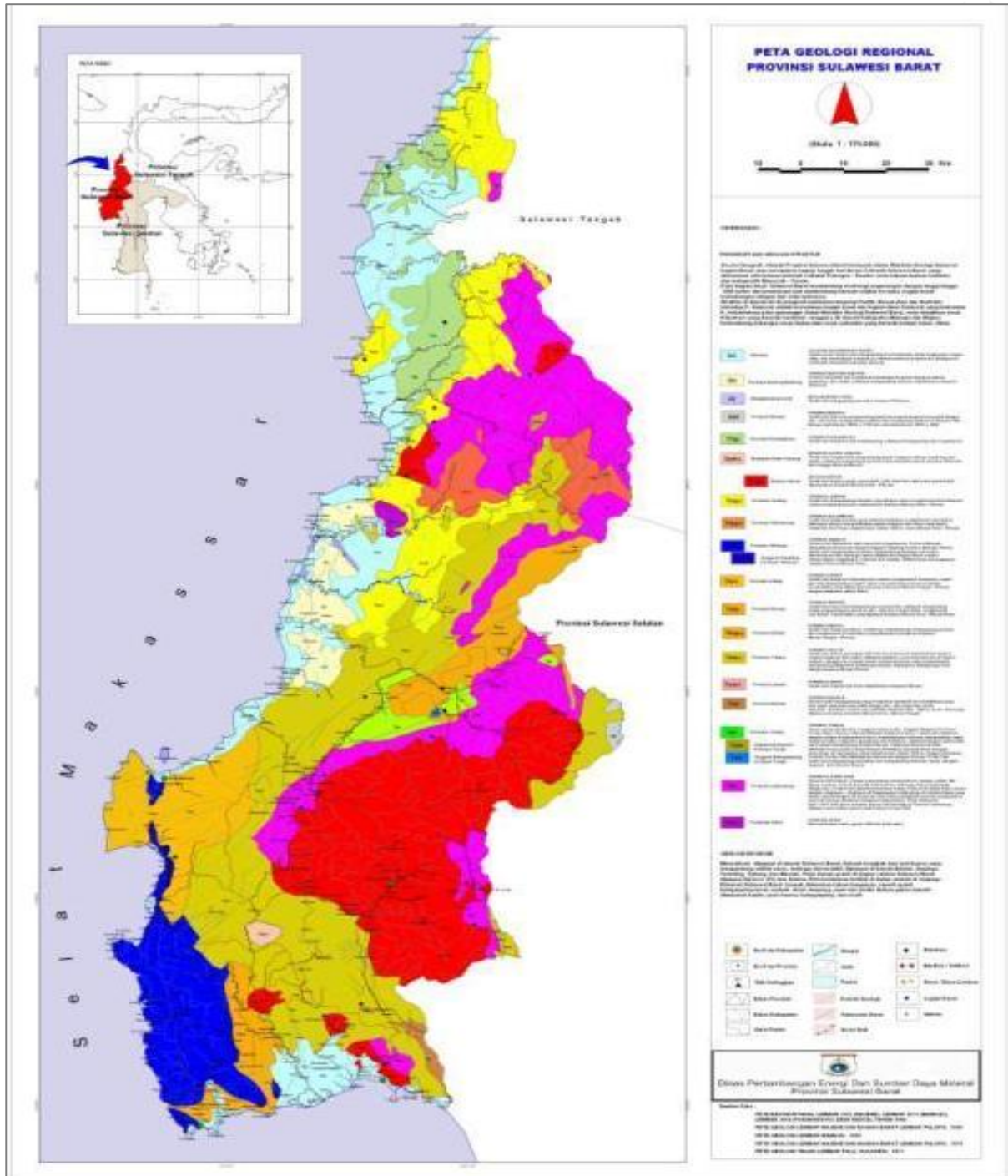


Pada bagian timur wilayah Provinsi Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Ke arah tenggara wilayah Mamasa, batuanannya didominasi oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batupasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmvp) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Di Wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian barat wilayah Provinsi Sulawesi barat pada umumnya disusun oleh endapan sedimenter dimana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budong Budong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batupasir, batu lempung dan batu gamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batupasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah – Pliosen.

Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Provinsi Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga menyebabkan perlipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Gambar 2.12 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala di Provinsi Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan plysch Formasi Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemulihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari

1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas . Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dn diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu:

1. Foldbelt aktif dimana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke Selat Makassar.
2. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basemen, paparan karbonat dan batuan sedimen klasti yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
3. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen.

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batu lempung, batubara, batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Di atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batu gamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan.

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut dimana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistesen dan didominasi oleh

konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesis ke arah timur.

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologis Provinsi Sulawesi Barat memberikan gambaran tentang aliran sungai, Hujan dan Pola Hujan, dan aspek lainnya yang pada dasarnya menunjukkan potensi dan tantangan dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat dialiri oleh beberapa sungai-sungai besar, dengan 5 (lima) aliran terbanyak berada di Kabupaten Polewali Mandar. Sungai terpanjang adalah Sungai Saddang, yang melewati Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, dan Polewali Mandar kemudian Sungai Karama, yang mengalir ke Mamuju, dengan panjang masing-masing sekitar 150 km. Selain dua sungai tersebut, ada beberapa aliran sungai lain seperti Sungai Matakali, Mambi, Mandar, Manyamba, Malunda, dan Kaluku dengan panjang di bawah 100 km.

Tabel 2.6 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi
1.	Saddang	150	Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
2.	Matakali	28	Polewali Mandar
3.	Mambi	95	Polewali Mandar
4.	Mandar	90	Polewali Mandar
5.	Manyamba	28	Majene
6.	Malunda	38	Majene
7.	Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar
8.	Karama	150	Mamuju

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat adalah ekosistem yang sangat penting dan penting. Ini terjadi karena bagian besar Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari daerah bergunung-gunung dengan curah hujan tinggi yang dikelilingi oleh banyak sungai besar. Di sisi lain, daerah datar yang merupakan pusat perekonomian masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah yang terkena dampak banjir dan sedimentasi sungai besar. Akibatnya, ekosistem dan daya dukung daerah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya, sehingga, jelas bahwa arahan untuk pengembangan ekologi DAS harus dirancang dengan baik.



Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumberdaya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Gambar 2.13 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 2.7 Kebijakan Pengelolaan DAS-DAS Utama di Provinsi Sulawesi Barat

Nama DAS atau Kelompok DAS	Luas DAS (ha)	Areal kritis (ha)	Ekstensi kekritisian (% areal)	Frekuensi banjir di hilir	Fungsi dan peran DAS								Arahan kebijakan		
					PLTA (MW)	Irigasi	Air baku	Pertumbuhan dan Perkembangan	Wallacea Ecoregion	Ecotourism	Keragaman ekosistem	Stabilitas ekosistem	Konservasi	Preservasi	Urutan Prioritas
Budong-Budong /Topoyo	326.579	65.756	20.1	Tinggi, pengaruhi jalan negara	124	ü	Beşar	Beşar	Sangat penting	potensial	tinggi	penting	ü	ü	I
Karama	344.899	84.659	24.5	Tinggi	115++	ü	Beşar	Beşar	penting	potensial	Sangat tinggi	Sangat penting	ü	ü	I
Karossa /Benggaulu	151.395	10.024	6.6	Sedang	ü	ü	Beşar	Beşar	penting	Sangat potensial	Sangat tinggi	penting	ü	ü	II
Lariang /Pasangkayu	1.671.587	11.688	7.0	Sedang	ü	ü	Beşar	Beşar	Sangat penting	Potensial	Sangat tinggi	penting	ü	ü	II
Malunda	67.767	1.549	2.3	Sedang	x	x	Kecil	Sedang	Penting	Potensial	Sedang	Penting		ü	III
Mamasa	89.106	13.872	15.6	Wii.hulu DAS	ü	x	Beşar	Sedang	Penting	Sangat potensial	Tinggi	penting	ü		II
Mamuju	149.487	67.067	44.9	Sedang	x	x	Beşar	Sedang	penting	Sangat potensial	Tinggi	penting	ü	ü	I
Mandar	93.462	36.656	39.2	Sedang	x	x	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Sedang	Penting	ü		III
Mapilli	229.644	77.983	34.0	Tinggi	174	ü	Beşar	Beşar	Sangat penting	Sangat potensial	Tinggi	penting	ü	ü	I
Saddang (hulu)	71.856	19.448	27.1	Wii.hulu DAS	x	ü	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Tinggi	penting	ü		III
Total	1.691.780	388.702	23.0												

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Kondisi kekritisitas DAS utama di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah Mamuju dengan besaran 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2 persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1 persen. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terluas dengan luas 344.899 ha juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yaitu 24,54 persen dari total wilayah DAS Karama. Adapun data kekritisitas Daerah-daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Kondisi Kekritisitas DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

DAS	Tidak Kritis (ha)	% DAS	Kritis (ha)	% DAS	Total DAS (ha)	Persen (%)
DAS Budong-Budong	260.823	80	65.756	20	326.579	19,3
DAS Karama	260.240	75	84.659	25	344.899	20,4
DAS Karossa	141.362	93	10.024	7	151.386	8,9
DAS Lariang	155.897	93	11.688	7	167.585	9,9
DAS Malunda	66.218	98	1.549	2	67.767	4,0
DAS Mamasa	75.234	84	13.872	16	89.106	5,3
DAS Mamuju	82.415	55	67.066	45	149.481	8,8
DAS Mandar	56.772	61	36.656	39	93.428	5,5
DAS Mapilli	151.659	66	77.983	34	229.643	13,6
DAS Saddang	52.401	73	19.448	27	71.850	4,2
Total	1.303.022	77	388.701	23	1.691.723	100,0

Sumber: RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014-2034

Pengembangan DAS yang akan datang harus diprioritaskan untuk mengendalikan lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, penghijauan, pembinaan pertanian berbasis konservasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Ini juga harus melindungi hutan dari pengrusakan melalui pengawasan ketat terhadap penebangan liar dan pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau lembaga yang akan mengelola hutan. DAS yang sangat penting adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa, dan Mapilli.

2.1.1.6. Klimatologi

Provinsi Sulawesi Barat masih mengandalkan pertanian sebagai sektor pendorong perekonomian daerah dan mayoritas masyarakat masih menggantungkan penghidupan mereka pada sektor primer. Ketergantungan perekonomian daerah Terhadap sektor pertanian secara langsung membuat ekonomi Provinsi Sulawesi Barat bergantung pada kondisi iklim. Jika kondisi iklimnya baik, maka produktivitas sektor pertanian akan meningkat, begitupun sebaliknya. Persoalannya kemudian, iklim, termasuk variabel yang sampai saat ini belum mampu dikendalikan, itu yang membuat ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori rawan.

Karena dilalui oleh garis khatulistiwa dan memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi, Provinsi Sulawesi Barat umumnya memiliki iklim tropis. Suhu udara di Provinsi Sulawesi Barat bergantung pada musim angin laut karena berada di pinggir pantai dan berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Dalam tiga tahun terakhir, suhu paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat 20,60°C dan paling tinggi 35°C. Suhu minimum tersebut menunjukkan bahwa pada posisi suhu paling rendah, suhu Provinsi Sulawesi Barat masih relatif hangat (tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi). Namun untuk suhu maksimumnya menunjukkan suhu yang cukup tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu 35°C keatas sudah masuk dalam kategori cukup panas. Dibandingkan angka tahun 2015, terjadi perubahan suhu. Suhu paling rendah tahun 2015 berada pada rentan 20°C hingga 24°C (hanya satu bulan yang suhunya 20°C), sementara di tahun 2022 angkanya cenderung lebih rendah yaitu 20,60°C. Untuk suhu maksimum, terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2015 yang rerata hanya 33,42°C naik menjadi 35°C. Perubahan suhu ini merupakan salah satu penanda bahwa Provinsi Sulawesi Barat tidak lepas dari perubahan iklim.

Perubahan suhu sejalan dengan perubahan kelembaban udara. Dalam tiga tahun terakhir, angka minimum dan rerata kelembaban udara di Provinsi Sulawesi Barat cenderung naik. Tahun 2020, kelembaban di Provinsi Sulawesi Barat masih diangka 46 persen, kemudian naik jadi 48 persen tahun 2021, dan mencapai 50 persen tahun 2022. Secara rata-rata, angka kelembaban juga mengalami kenaikan, dari 79 persen ke 81,50 persen, dan kemudian 84,50 persen. Kelembaban maksimum Provinsi Sulawesi Barat bahkan mencapai angka 100 persen. Jika kelembaban

mencapai 100%, itu berarti udara dalam kondisi tersebut telah mencapai titik jenuh kelembaban yang berarti bahwa udara mengandung sebanyak mungkin uap air yang dapat diabsorpsi pada suhu dan tekanan tertentu.

Pada unsur kecepatan angin, angka paling rendah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam tiga tahun terakhir adalah calm atau tidak ada angin atau nilai kecepatan anginnya 0, sementara angka maksimumnya mencapai 26 m/det. Jika diambil reratanya, ada penurunan angka kecepatan angin tahun 2022 dari sebelumnya 3,30 m/det menjadi 2,30 m/det. Angka 2,30 m/det menunjukkan bahwa angin bergerak dengan kecepatan 2,30 meter setiap detik. Ini adalah ukuran kecepatan linier, yang berarti sejauh mana angin bergerak secara fisik dalam interval waktu yang sangat singkat (1 detik). Kecepatan angin 2,30 m/det tidak terlalu cepat. Ini dapat dianggap sebagai angin ringan hingga sejuk, tergantung pada konteksnya. Kecepatan angin ini bisa terjadi dalam berbagai situasi cuaca.

Perubahan suhu dan cuaca berpengaruh pada perubahan tekanan udara. Selama tahun 2020 hingga 2022, angka tekanan udara di Provinsi Sulawesi Barat secara rata-rata meningkat dari 1.006,50 mbar menjadi 1.006,30 mbar, dan 1.005,90 mbar. Tekanan udara adalah salah satu faktor kunci yang digunakan oleh meteorologis untuk membuat prakiraan cuaca. Perubahan dalam tekanan atmosfer dapat mengindikasikan perubahan cuaca yang akan datang. Tekanan rendah sering kali terkait dengan cuaca hujan dan badai, sementara tekanan tinggi dapat mengindikasikan cuaca cerah dan stabil. Selain itu, tekanan udara dapat mempengaruhi suhu dan kecepatan angin di wilayah tertentu. Variasi tekanan udara memainkan peran dalam pembentukan pola cuaca lokal seperti angin kencang, gelombang panas, atau musim hujan.

Tabel 2.9 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2023

Unsur Iklim	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Suhu (°C)				
Minimum/Minimum	20,60	20,40	20,60	21,00
Rata-rata/Average	28,10	27,70	27,40	28,12
Maksimum/Maximum	35,00	34,10	35,00	35,20
Kelembaban (%)				
Minimum/Minimum	46,00	48,00	50,00	39,00



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Unsur Iklim	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Rata-rata/Average	79,00	81,50	84,50	81,29
Maksimum/Maximum	100,00	100,00	100,00	100,00
Kecepatan Angin (m/det)				
Minimum/Minimum*	calm	calm	calm	Calm
Rata-rata/Average	1,95	3,30	2,30	4,10
Maksimum/Maximum	20,56	26,00	na	24,00
Tekanan Udara (mbar)				
Minimum/Minimum	1.000,90	1.000,30	999,60	988,60
Rata-rata/Average	1.006,50	1.006,30	1.005,90	1.006,95
Maksimum/Maximum	1.011,60	1.011,40	1.011,30	1.012,70
Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	1.413,20	2.270,80	2.395,80	1.242,90
Jumlah Hari Hujan (hari)	201	217	168	152
Penyinaran Matahari**	75,00	5,90	6,00	6,90

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Keterangan:

- *Calm = tidak ada angin atau nilai kecepatan anginnya 0
- **Tahun 2020 satuan persen, tahun 2021-2022 satuan jam

Unsur iklim yang lainnya juga mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Jumlah curah hujan Provinsi Sulawesi Barat cenderung naik, jumlah hari hujannya mengalami penurunan, sementara penyinaran matahari mengalami kenaikan. Angka curah hujan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 mencapai 1.242,90 mm/tahun, menunjukkan bahwa jumlah air hujan yang jatuh selama satu tahun, mencapai 1.242,90 milimeter. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang 2.395,80 mm/tahun. Perubahan curah hujan mempengaruhi jumlah hari hujan. Hari hujan merujuk pada hari-hari ketika curah hujan tercatat dalam sebagian besar wilayah tersebut. Ini bisa berarti hujan deras, gerimis, atau hujan ringan. Tahun 2023, jumlah hari hujan Provinsi Sulawesi Barat turun dari 168 hari ke 152 hari, menunjukkan bahwa dalam periode tertentu, wilayah tersebut mengalami hujan pada 152 hari yang berbeda atau menggambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat semakin jarang hujan. Variabel ini pula yang mempengaruhi angka penyinaran matahari yang mencapai 6 jam per hari. Jumlah jam penyinaran matahari Provinsi Sulawesi Barat dapat bervariasi sepanjang tahun dan tergantung pada musim. Musim panas seringkali memiliki lebih banyak jam penyinaran matahari daripada musim dingin.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Provinsi Sulawesi Barat mengalami banyak perubahan dalam luasan Kawasan hutan seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 sebesar 1.092.431 ha. Delapan tahun kemudian, luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat berkurang seluas 22.442 ha menjadi 1.069.989 ha. Perubahan tersebut merujuk pada Kepmen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021).

Komposisi kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat juga ikut berubah salah satunya karena pengajuan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri. Perubahan luasan kawasan hutan salah satunya disebabkan karena permintaan pemerintah provinsi yang mengajukan perubahan status kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Mamuju dan hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi di Kabupaten Polewali Mandar. Itu sebabnya luasan Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamuju turun dari 132.765 ha tahun 2015 menjadi 128.691 ha di tahun 2023 atau berkurang 4.074 ha. Tak hanya Kabupaten Mamuju, beberapa Kabupaten lain juga mengalami penurunan luasan Kawasan hutan lindung seperti Majene yang mengalami pengurangan luasan sebesar 39 ha dan Kabupaten Pasangkayu seluas 93.096 ha. Permintaan untuk melakukan konversi luasan hutan lindung menjadi Kawasan yang dapat dikelola untuk mendorong pemanfaatan sumber daya. Namun penting menjadi perhatian pemerintah daerah bahwa mengalih fungsikan Kawasan hutan lindung menjadi APL secara berlebihan bisa memicu munculnya persoalan lingkungan di masa depan sebab berdasarkan definisi, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jika hutan lindung terus-menerus dikonversi menjadi APL, maka bencana seperti yang disebutkan tersebut di masa akan lebih sering dialami oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.10 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (ha), 2023

Kabupaten	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha)					Total
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	
Majene	44.405,18	-	7.590,28	6,33	-	52.001,79
Polewali Mandar	70.217,27	778,98	23.030,94	-	-	94.027,19
Mamasa	86.308,93	68.047,54	49.359,56	-	417,12	204.133,15
Mamuju	140.509,00	74.646,67	101.749,70	44.282,62	10.801,76	371.989,75
Pasangkayu	98.283,37	195,43	55.463,11	2.335,02	8.795,10	165.072,03
Mamuju Tengah	16.583,79	44.449,35	94.432,83	24.319,73	1.224,38	181.010,08
Sulawesi Barat	456.307,54	188.117,97	331.626,42	70.943,70	21.238,36	1.069.233,99

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021)

Luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 450.639,13 ha jika merujuk pada RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 (Perda No. 1 Tahun 2014), namun angka tersebut mengalami perubahan menjadi 366.456 ha tahun 2021. Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung Nasional merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

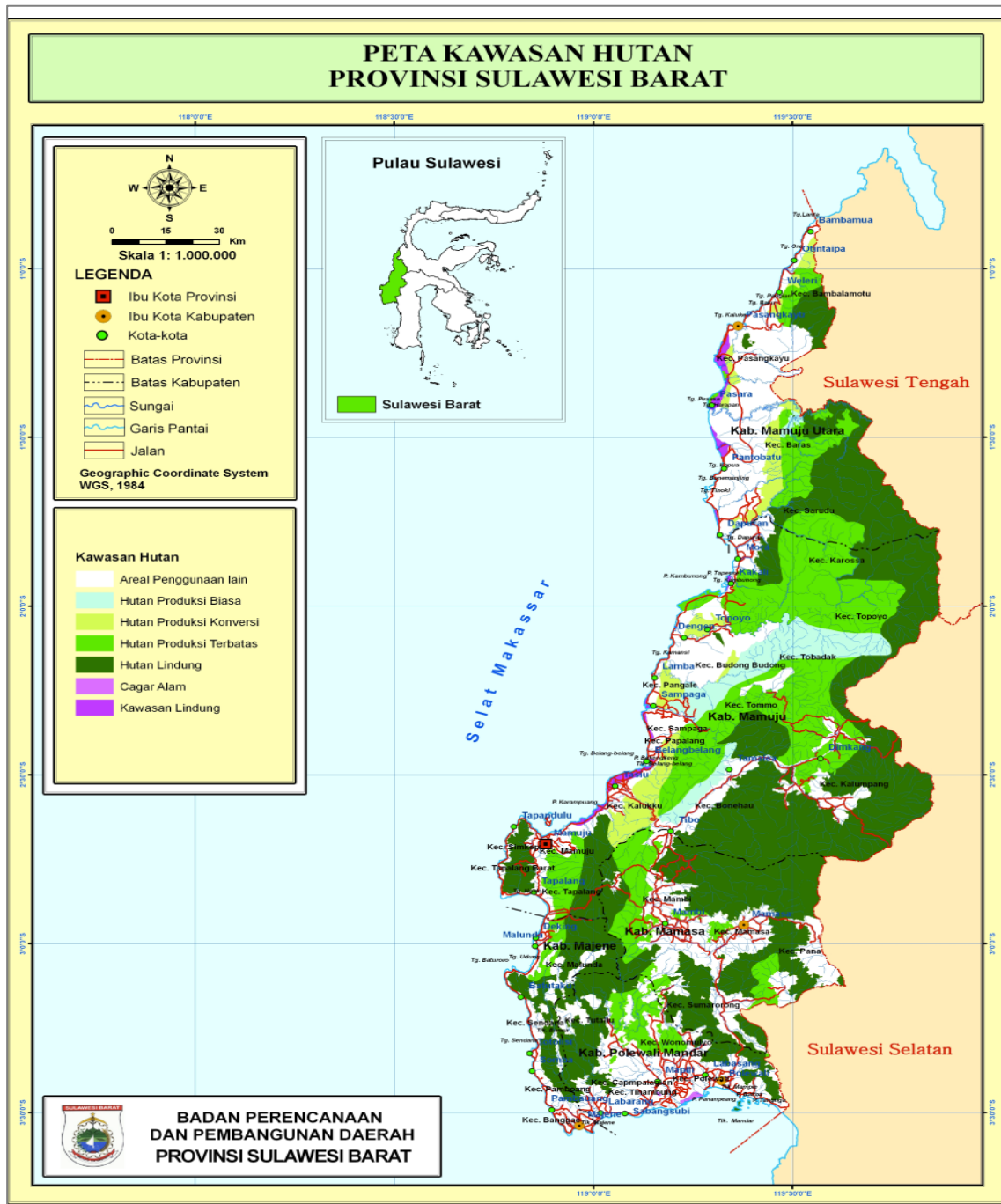
Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah provinsi rencana akan memanfaatkan Kawasan hutan lindung menjadi:

1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
2. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
3. Apabila ada jalan raya yang terpaksa memasuki kawasan hutan lindung, maka dilakukan pelepasan secara parsial dan tidak diperkenankan membangun atau

memanfaatkan lahan di sepanjang jalan yang mengganggu fungsi kawasan lindungnya;

4. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Gambar 2.14 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034



Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju, Hutan Lindung Mamuju Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung Majene, Hutan Lindung Polewali Mandar, Hutan Lindung Mamasa. Kawasan Perlindungan setempat dengan arah pemanfaatan ruang meliputi sempadan pantai sepanjang kurang lebih 781 km di beberapa kabupaten, kawasan pantai berhutan bakau primer, sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter serta kawasan sekitar DAM.

Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang di RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Ganda Dewata, Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA), Taman wisata alam laut Balabalakang, Taman wisata Goa alam.

Pemerintah daerah juga menetapkan daerah rawan bencana dalam dokumen RTRW. Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

1. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju; Kabupaten Mamuju Tengah; Kabupaten Polewali Mandar); Kabupaten Pasangkayu; Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar;
2. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
3. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar;
4. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju; Mamuju Tengah, Majene dan Polewali Mandar;
5. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
6. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat.

Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis provinsi yang dapat dikembangkan. Dimana kawasan budidaya Provinsi meliputi: Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan



Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman, dan; Kawasan peruntukan lainnya.

2.1.1.8. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Adapun pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Proses analisis kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW sebelumnya merupakan salah satu bagian dari poin pengendalian untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Permasalahan mendasar sesungguhnya adalah perubahan pemanfaatan atau penyimpangan/deviasi peruntukan lahan ini sering tidak sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dan menimbulkan dampak negatif secara fisik, sehingga perlunya mengetahui simpangan antara rencana tata ruang wilayah dengan tutupan lahan saat ini.

Untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034, dilakukan pertampalan antara rencana pola ruang dengan penutup lahan yang diinterpretasi berdasarkan citra terbaru yang menghasilkan luas seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11 Perbandingan Pola Ruang dengan Penutup Lahan 2021

Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Penutup Lahan 2021	Luas (Ha)
Hutan Lindung	459.462,62	Bangunan Bukan Permukiman	107,43
		Bangunan Permukiman/Campuran	856,88
		Danau/Telaga Alami	1,89
		Hamparan Batuan/Pasir Alami	22,42
		Hamparan Pasir Pantai	101,68
		Hutan Lahan Kering	354.105,19
		Hutan Mangrove	845,25
		Lahan Terbuka Alami Lain	485,76
		Perairan Laut	15,71
		Perkebunan	9.788,96
		Rawa Pedalaman	86,97
		Sabana	2.239,07
		Semak dan Belukar	59.539,70
		Sungai	1.075,27
		Tambak	5.823,35
		Tanaman Semusim Lahan Basah	731,38
		Tanaman Semusim Lahan Kering	18.463,65
		Waduk dan Danau Buatan	3,05
		(blank)	5.169,02
Hutan Produksi	77.013,90	Bangunan Permukiman/Campuran	115,31
		Hamparan Batuan/Pasir Alami	2,06
		Hutan Lahan Kering	50.688,39
		Lahan Terbuka Alami Lain	99,93
		Perkebunan	3.469,50
		Rawa Pedalaman	20,50
		Sabana	1.053,57
		Semak dan Belukar	17.099,57
		Sungai	221,92
		Tanaman Semusim Lahan Basah	268,38
		Tanaman Semusim Lahan Kering	2.906,56
		(blank)	1.068,21
Hutan Produksi Konversi	27.481,94	Bangunan Permukiman/Campuran	204,76
		Danau/Telaga Alami	6,02
		Hamparan Batuan/Pasir Alami	5,70
		Hutan Lahan Kering	10.067,43

Berdasarkan tabel di atas, diketahui pada setiap rencana pola ruang terdapat beberapa penutup lahan, seperti pada rencana Kawasan Hutan Rakyat yang terdiri dari sepuluh jenis penutup lahan yaitu permukiman dan campuran, hamparan pasir, hutan lahan kering, hutan mangrove, hutan rawa, lahan terbuka, perkebunan, semak

dan belukar, sungai, dan tambak. Beberapa jenis penutup lahan tersebut sudah sesuai dengan rencana pola ruang dan beberapa lainnya tidak termasuk dalam klasifikasi pola ruang RTRW.

Perbedaan delineasi kawasan terjadi pada data RTRW tahun 2014 dengan data penggunaan lahan tahun 2021. Perbedaan tersebut didasarkan karena berubahnya batas administrasi beberapa kabupaten baik yang bersifat definitif maupun indikatif. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah yang direncanakan pada tahun 2014 tidak lagi menjadi bagian dari wilayah yang ditetapkan dengan administrasi baru. Begitupula sebaliknya dimana pada beberapa titik terdapat bagian wilayah yang tidak termuat dalam pola ruang namun terakomodir pada tahun 2021.

Untuk mengetahui kesesuaian rencana pola ruang dengan penggunaan lahan, dilakukan perhitungan persentase kesesuaian yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Kesesuaian Rencana Pola Ruang

No.	Rencana Pola Ruang	Kesesuaian (%)
1	Kawasan Perikanan	60,97
2	Kawasan Perkebunan	35,11
3	Kawasan Permukiman	43,76
4	Kawasan Pertanian	28,82
5	Kawasan Tambak	76,55
6	Perairan	32,70

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari tabel di atas, diketahui tingkat kesesuaian tertinggi berada pada rencana kawasan tambak dengan persentase kesesuaian sebesar 76,55 persen. Berdasarkan penggunaan lahan 2021, kawasan tambak eksisting seluas 3.959,46 hektar dan luas total perencanaan 5.171,79 hektar. Kawasan perikanan menjadi wilayah rencana dengan kesesuaian tertinggi kedua dengan persentase 60,97 persen. Pada kawasan perencanaan permukiman terdapat sebesar 6.344,66 hektar permukiman eksisting dari total 14.497,44 hektar perencanaan permukiman. Di kawasan tersebut masih banyak tersedia lahan untuk pengembangan permukiman. Adapun kawasan perkebunan memiliki persentase kesesuaian sebesar 35,11 persen, perairan sebesar 32,70 persen, dan kawasan

pertanian memiliki persentase paling rendah yaitu sebesar 28,82 persen. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak terjadi simpangan antara rencana pola ruang dengan keadaan eksisting di lapangan. Tingkat kesesuaian tersebut masih dapat bertambah seiring berjalannya waktu.

2.1.1.9. Persentase Alih Fungsi Lahan

Penggunaan lahan adalah refleksi dari interaksi kompleks antara manusia dan lingkungannya. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas manusia yang memanfaatkan atau mengubah wujud lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Dari pedesaan hingga perkotaan, penggunaan lahan mencerminkan pola kehidupan dan intervensi manusia di permukaan bumi.

Penting untuk memahami kompleksitas penggunaan lahan di berbagai konteks, baik di pedesaan maupun perkotaan. Perbedaan dalam kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi alam, budaya, ekosistem, dan sistem produksi. Pengetahuan mendalam tentang penutupan lahan dan penggunaan lahan merupakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait dengan permukaan bumi.

Klasifikasi yang tepat dalam pemetaan penutupan lahan dan penggunaan lahan sangat krusial. Skema klasifikasi yang dipilih harus dirancang dengan cermat sesuai dengan tujuan tertentu. Ini menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pemetaan, karena penggunaan lahan memiliki dampak langsung pada berbagai aspek kehidupan manusia. Keberlanjutan dalam penggunaan lahan menjadi kunci penting. Pendekatan yang mencakup pemenuhan kebutuhan saat ini sekaligus konservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang sangat diperlukan. Upaya produksi dan konservasi harus seimbang untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan masa depan dan generasi mendatang.

Contoh penerapan konsep ini dapat ditemukan dalam tata guna lahan DAS. Keberlanjutan penggunaan lahan di daerah hilir sangat tergantung pada cara lahan dikelola di daerah hulu. Penataan ruang menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya air, di mana fungsi konservasi dan budidaya lahan harus diatur secara seimbang. Pemantauan perubahan lahan setiap tahunnya juga penting untuk memahami dampak intervensi manusia di Provinsi Sulawesi Barat.



Selama periode 1990 hingga 2022, terlihat perubahan signifikan dalam penutupan lahan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada dekade pertama, dari 1990 hingga 2000, terjadi penurunan yang drastis pada hutan lahan kering primer, mengalami penurunan sebesar 34.39% pada tahun 2000. Sementara itu, penutupan lahan kering sekunder mengalami peningkatan sebesar 24.44% selama periode yang sama. Pada tingkat spasial, terjadi perubahan dinamis dalam pertanian lahan kering campur semak, meskipun luasannya tidak mengalami penurunan signifikan dari tahun 1990 hingga 2022.

Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap kelestarian ekosistem alami. Konversi lahan dari hutan ke fungsi lainnya menyebabkan degradasi lahan, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas lahan di masa depan. Hal ini dapat memicu erosi tanah dan banjir di daerah tangkapan air yang kritis. Pertumbuhan pesat pembangunan, khususnya peningkatan areal perkerasan, juga berkontribusi pada percepatan kenaikan suhu permukaan bumi. Kenaikan suhu global hingga 1oC dapat menyebabkan kepunahan 30% spesies, serta meningkatkan suhu permukaan air laut hingga 27°C yang berisiko memicu badai tropis.

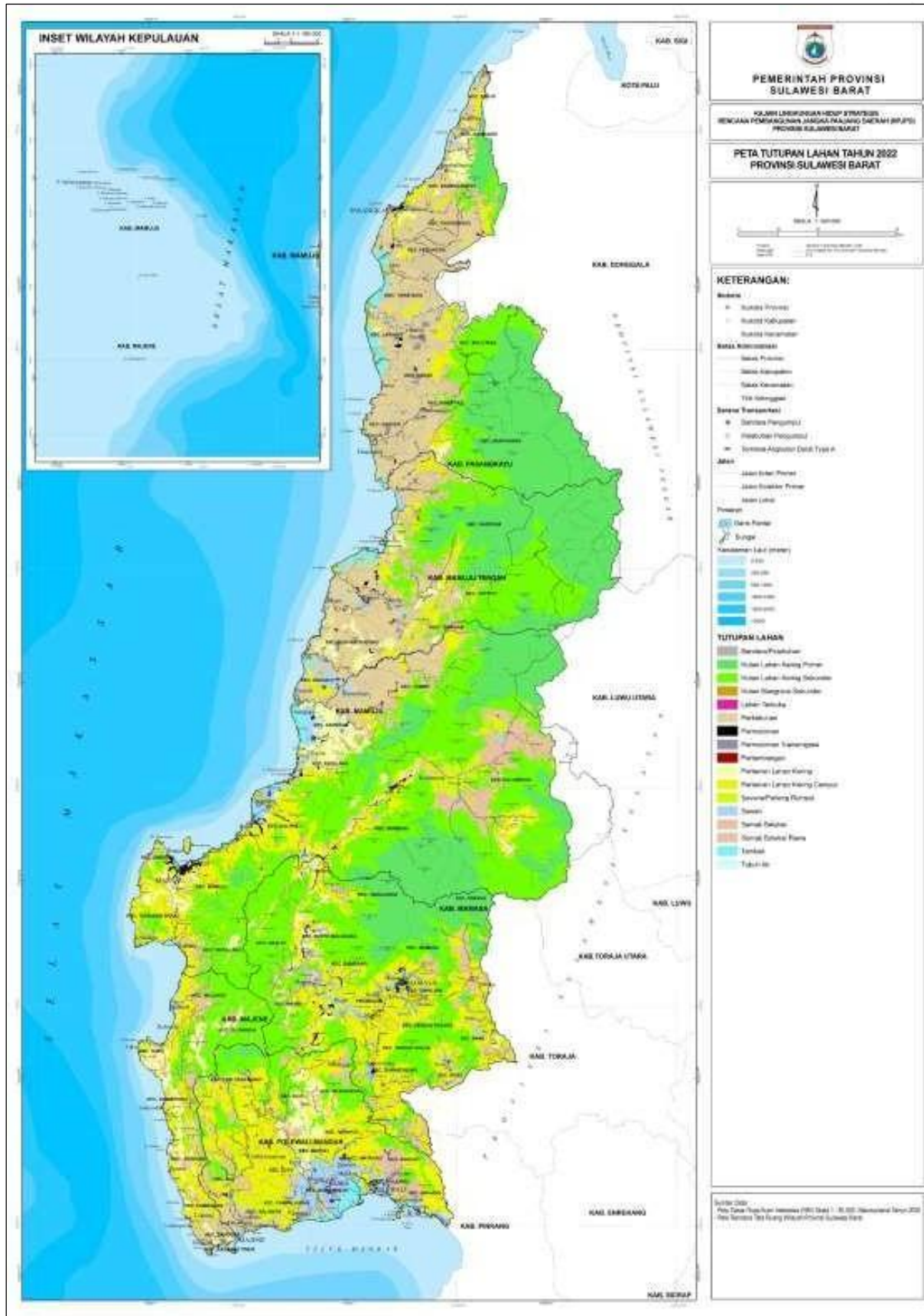
Salah satu kontributor signifikan terhadap perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca, yang sebagian besar dihasilkan oleh deforestasi. Pada tahun 1990, emisi gas rumah kaca akibat deforestasi mencapai 17%, memberikan kontribusi besar terhadap perubahan iklim secara global. Dengan demikian, pemahaman dan penanganan perubahan penutupan lahan menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.



Tabel 2.13 Luas Tipe Penutupan Lahan Tahun 1990, 2000, 2010, 2019 dan 2022

Tipe Penutupan Lahan	Tahun (ha)				
	1990	2000	2010	2019	2022
Hutan Lahan Kering Primer	934,540.17	352,832.39	350,281.80	343,685.72	322,009.70
Hutan Lahan Kering Sekunder	44,765.80	553,990.15	480,137.84	458,246.93	486,745.35
Hutan Mangrove Primer	3,016.11	37.67	37.67	-	-
Hutan Mangrove Sekunder	11,886.78	7,075.67	5,766.66	3,997.58	4,139.80
Hutan Rawa Primer	3,171.93	-	-	-	-
Hutan Rawa Sekunder	9,945.61	2,226.62	591.71	-	-
Padang Rumput	5,086.79	4,044.17	32,958.50	22,371.75	23,515.34
Perkebunan	26,694.06	50,243.39	61,676.32	200,276.30	207,693.37
Permukiman	4,192.65	4,379.36	4,491.92	21,662.02	21,297.33
Pertanian Lahan Kering	31,891.48	37,844.49	58,553.73	53,287.84	88,448.78
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	382,634.49	404,433.57	405,609.11	345,044.92	298,278.93
Sawah	31,227.06	39,287.06	63,136.42	37,508.12	46,377.45
Semak Belukar	130,712.95	142,657.97	161,553.96	141,992.81	137,969.33
Semak Belukar Rawa	2,126.36	3,917.17	2,455.08	474.79	288.40
Tambak	9,740.14	11,806.39	16,798.70	19,654.22	19,903.59
Tanah Terbuka	26,231.03	42,843.34	13,379.28	9,432.72	606.82
Transmigrasi	3,383.12	3,611.17	3,743.85	3,621.90	3,046.64
Tubuh Air	8,195.89	8,211.83	8,269.88	8,165.77	9,115.82
Pertambangan	-	-	-	19.04	5.79
PROVINSI SULAWESI BARAT (ha)	1,669,442.43	1,669,442.43	1,669,442.43	1,669,442.43	1,669,442.43

Gambar 2.15 Peta Penutupan Lahan 2022



2.1.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

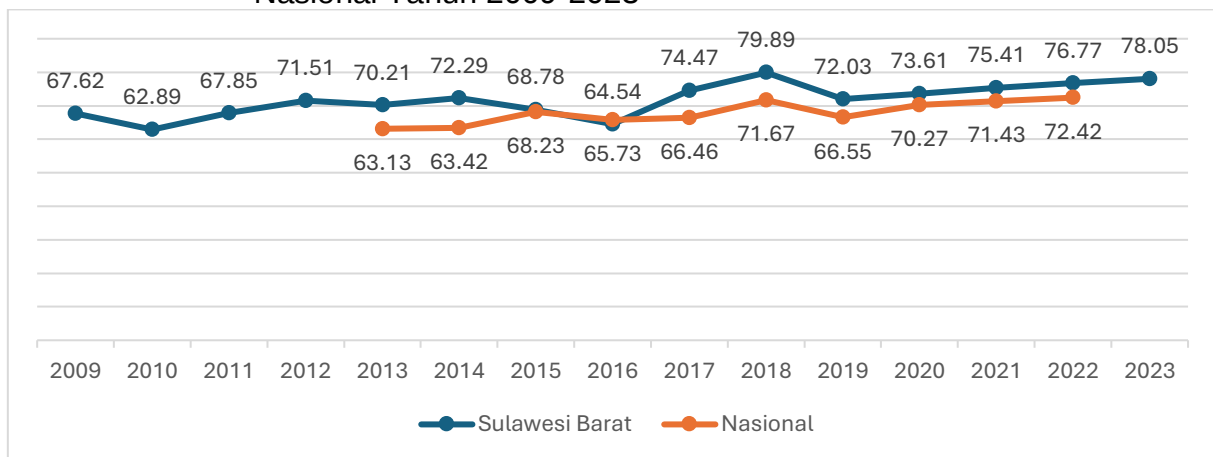
Selama periode RPJPD pertama (20 tahun terakhir), Provinsi Sulawesi Barat mencatat beberapa kemajuan, terutama pada aspek Pembangunan ekonomi. Setidaknya ada tiga sektor yang mendominasi struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yaitu pertanian dengan kontribusi di atas 40 persen, industri pengolahan di atas 10 persen dan perdagangan juga rata-rata 10 persen. Pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat adalah capaian positif, namun bukan berarti tanpa konsekuensi. Dalam berbagai literatur, pembangunan ekonomi seringkali berseberangan dengan pembangunan lingkungan karena sumber daya alam yang disediakan lingkungan menjadi bahan baku bagi aktivitas ekonomi. Semakin progresif pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, maka potensi kerusakan lingkungannya juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Itu sebabnya dalam beberapa dekade terakhir, isu keberlanjutan didorong sebagai isu global yang saat ini kita kenal dengan istilah tujuan Pembangunan berkelanjutan atau SDGS agar Pembangunan ekonomi tak menyebabkan bencana lingkungan di masa depan.

Sama halnya dengan banyak daerah, Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami persoalan lingkungan akibat semakin majunya Pembangunan daerah. Namun dilihat dari parameter kualitas lingkungan, Provinsi Sulawesi Barat masih relatif lebih baik dibandingkan banyak provinsi di Indonesia. Dalam 13 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Barat cenderung naik, namun cukup fluktuatif di beberapa tahun. Sepanjang tahun 2011 sampai 2014, IKLH Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan. Sempat turun dari 67,62 tahun 2009 ke 62,89, tahun 2011 naik ke 67,85. Kenaikan tersebut berlanjut di tahun 2012 hingga mencapai angka 71,51, sebelum sedikit menurun di tahun 2013 ke 70,21 dan naik kembali di angka 72,29. Pada tahun 2013 dan 2014, IKLH Sulawesi Barat sudah berada di atas IKLH Nasional yang saat itu berada pada level 63,13 dan 63,42. Provinsi Tahun 2015 dan 2016 menjadi periode penurunan IKLH Provinsi Sulawesi Barat, dimana angkanya anjlok masing-masing menjadi 68,78 dan 64,54, sementara di level Nasional polanya juga sama, IKLH Nasional turun di tahun 2016 dari 68,23 ke 65,73.

Penurunan IKLH Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 lebih tajam dibandingkan Nasional, sehingga menyebabkan IKLH Sulawesi Barat berada di bawah Nasional pada tahun tersebut. Provinsi Sulawesi Barat kembali mengalami pertumbuhan IKLH

di tahun 2017 dan 2018 masing-masing mencapai 74,47 dan 79,89. Angka tahun 2018 sekaligus menjadi angka tertinggi yang pernah dicapai Provinsi Sulawesi Barat dalam 13 tahun terakhir, karena setelah itu IKLH terkoreksi lebih rendah masing-masing 72,03 tahun 2019, 73,61 tahun 2020, 75,41 tahun 2021, 76,77 pada tahun 2022 dan 78,05 pada tahun 2023. Meski begitu, IKLH Provinsi Sulawesi Barat masih lebih tinggi Nasional yang juga menunjukkan kenaikan di empat tahun terakhir, hingga angkanya sampai di 72,42 tahun 2022. Pencapaian IKLH Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 menempatkan kualitas lingkungan hidup pada kategori “baik”.

Grafik 2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2009-2023



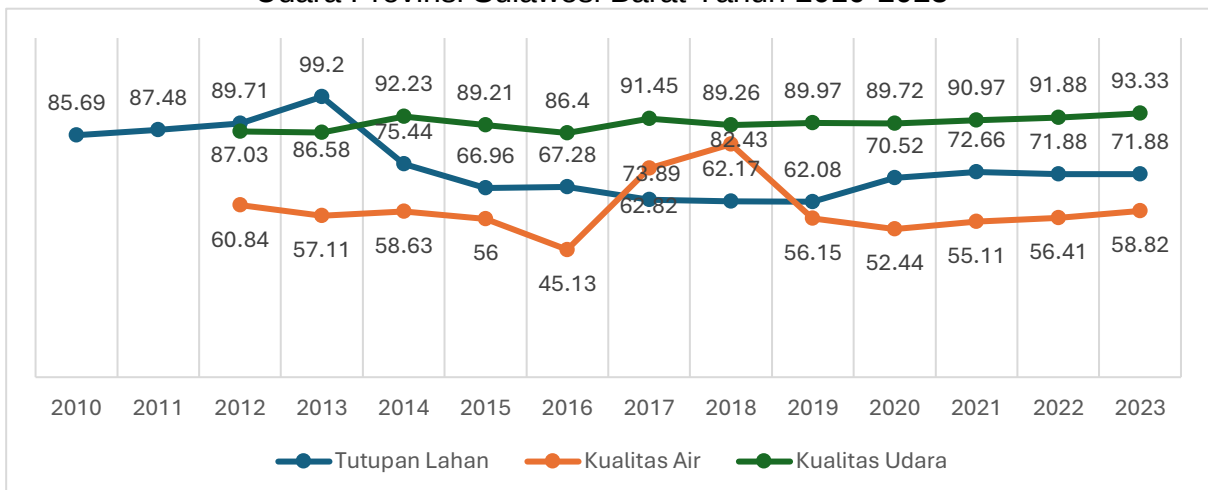
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari tiga komponen IKLH, yang menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi Barat adalah indeks kualitas air yang masih rendah. Dalam dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Barat, isu kualitas air juga merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat. Dari ketiga indeks tersebut, kualitas air Provinsi Sulawesi Barat paling rendah. Tahun 2012 hingga 2016, indeks kualitas air Provinsi Sulawesi Barat terus menurun, dari 60,84, kemudian 58,63, ke 56, dan akhirnya anjlok ke angka paling rendah dalam 11 tahun terakhir yaitu 45,13. Angka tersebut termasuk dalam kategori “kurang”, hanya satu level di atas kategori “sangat kurang”. Sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2017 dan 2018, hingga mencatatkan angka 62,82 dan 82,43, tapi memasuki tahun 2019, anjlok lagi ke 56,15. Tiga tahun terakhir, angkanya memang menunjukkan tren naik dari 52,44 tahun 2020 ke 55,11 tahun 2021, dan tahun 2022 sebesar 56,41. Walaupun naik, angka 56,41

masih termasuk dalam kategori “sedang” dan nampaknya butuh upaya serius pemerintah daerah untuk mendorong naik hingga bisa mencapai kategori “baik”.

Rendahnya indeks kualitas air menunjukkan tingginya tingkat pencemaran air sungai di Provinsi Sulawesi Barat. Pencemaran air sungai disebabkan oleh dua hal yang dikemukakan dalam dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Barat yaitu Masuknya sampah plastik ke wilayah perairan dan pencemaran bahan organik (terutama dari pengolahan kelapa sawit) ke perairan. Pencemaran air akibat limbah kelapa sawit dibuktikan melalui studi Syamriati (2021) yang diuraikan dalam tesisnya berjudul Kajian Dampak Industri Limbah Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Perairan Sungai Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat. Ia menemukan bahwa status kualitas air Sungai Budong-Budong pada Outlet dan IPAL melebihi baku mutu air limbah industri kelapa sawit, sementara pada perairan sebelum dan sesudah perusahaan dan badan sungai dikategorikan tercemar ringan. Jenis sedimen perairan umumnya bertekstur Liat, sementara nilai Indeks Keanekaragaman cenderung tercemar berat menurut kriteria kualitas air berdasarkan keanekaragaman, sedangkan Keseragaman, Dominansi *makrozoobenthos* menunjukkan kondisi perairan tidak stabil, tertekan dan dominasi tinggi. Limbah cair industri minyak kelapa sawit mengandung bahan pencemar yang sangat tinggi yang mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran yang ada di dalam air dimana *Total Suspended Solid* (TSS) terkecil pada pencampuran limbah *effluent* dengan air hulu yaitu 5473 mg/L. (Putra dan putra 2014).

Grafik 2.4 Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Udara Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tantangan lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat adalah kualitas tutupan lahan. Data Indeks Tutupan Lahan (ITL) Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan setidaknya dalam kurun waktu 2010 hingga 2023. Provinsi Sulawesi Barat sempat mengalami tren positif pada ITL pada kurun waktu 2010 hingga 2013. Selama periode itu ITL terus meningkat mulai dari 85,69, naik ke 87,48, kemudian mencapai 89,71, dan akhirnya mencatat angka tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir sebesar 99,20. Dengan angka tersebut, ITL Provinsi Sulawesi Barat sudah masuk kategori paling tinggi yaitu “sangat baik”. Persoalannya kemudian, capaian tersebut tak bisa dipertahankan dalam jangka panjang, karena memasuki tahun 2014, angkanya terpuruk cukup signifikan ke level 75,44. Sejak penurunan tersebut, ITL Provinsi Sulawesi Barat tak pernah lagi mencapai angka di atas 90, bahkan di tahun 2023 angkanya hanya 71,88 atau termasuk kategori “baik”.

Salah satu penyebabnya adalah deforestasi kawasan hutan. Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat bahwa luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 332.761,72 Ha dengan kerusakan hutan. Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Penyebabnya adalah tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, dan perubahan iklim (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat).

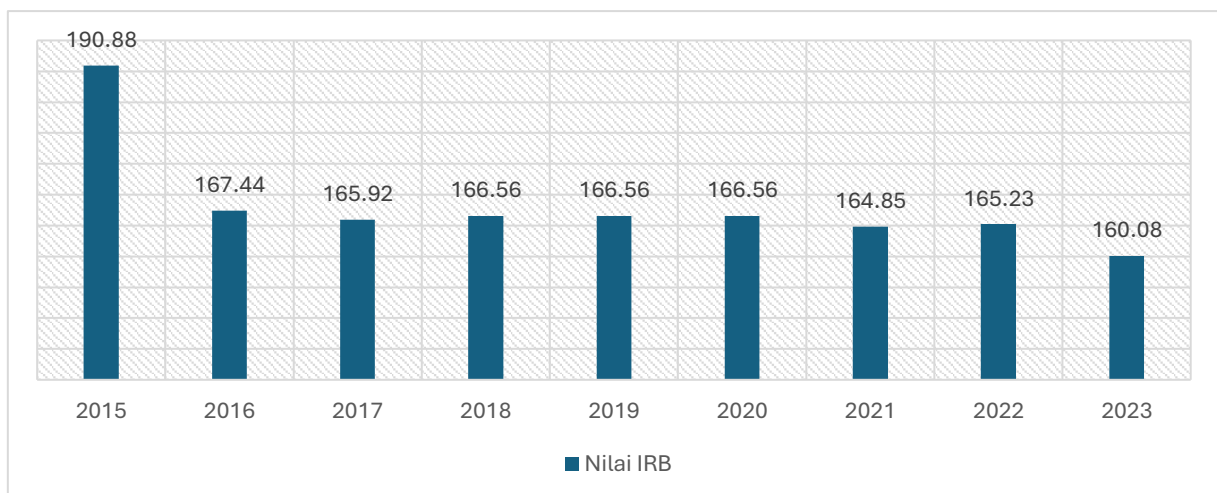
Satu-satunya komponen IKLH Provinsi Sulawesi Barat yang cukup stabil adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Dalam 11 tahun terakhir, IKU Provinsi Sulawesi Barat pernah mencapai angka tertinggi yaitu 92,23 tahun 2014. Walau setelah itu mengalami penurunan dua tahun berturut-turut ke angka 89,21 tahun 2015 dan 86,40 tahun 2016, tapi di tahun 2017 naik kembali ke 91,45. Lima tahun selanjutnya, IKU Provinsi Sulawesi Barat tetap mengalami perubahan (naik-turun) tapi angkanya relatif stabil, hingga di tahun 2023 mencatatkan angka 93,33. Angka itu menempatkan kualitas udara Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori “sangat baik”.

Kualitas udara Provinsi Sulawesi Barat yang masuk kategori sangat baik disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya masih rendahnya kendaraan bermotor dan masih terbatasnya jumlah industri yang limbahnya mencemari udara. Di Satu sisi, meski mengalami degradasi, tapi Provinsi Sulawesi Barat masih memiliki tutupan lahan di kawasan hutan yang memadai untuk menyerap polusi udara, baik itu dari transportasi maupun aktivitas industri.

2.1.1.11. Indeks Risiko Bencana

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini, seperti yang terjadi pada Tahun 2021 di mana gempa mengakibatkan tidak hanya kerusakan signifikan pada bangunan, namun juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks risiko 160.08 (tinggi) dan merupakan skor IRBI tertinggi secara Nasional.

Grafik 2.5 Nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2015-2023

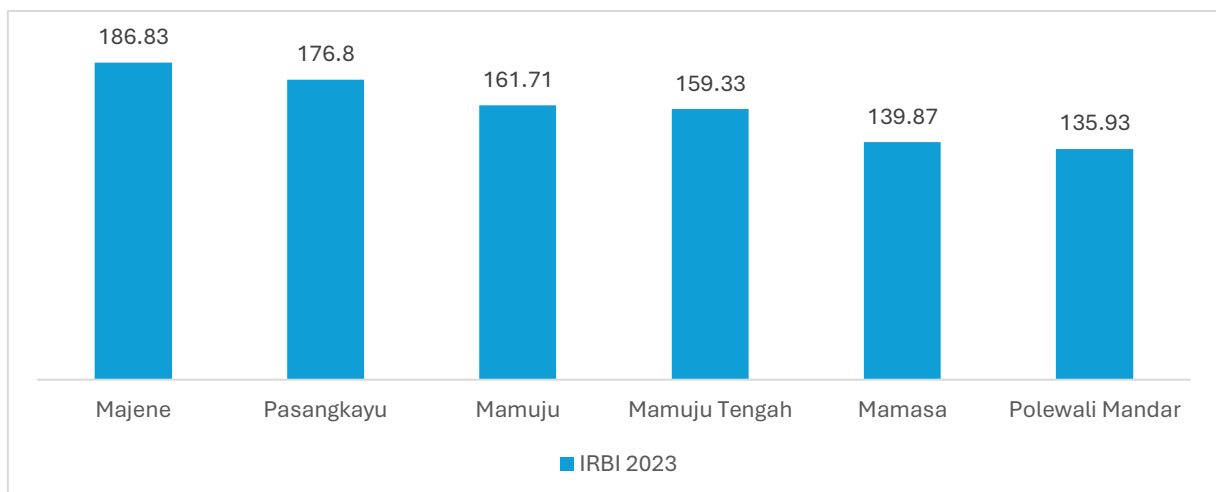


Sumber: Buku IRBI Tahun 2023

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki skor IRBI yang cukup tinggi. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2020, skor IRBI Sulawesi Barat adalah 166,49 Poin, mengalami penurunan menjadi 164,85 Poin pada Tahun 2021. Pada 2023 skor IRBI Sulawesi Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,15 poin menjadi 160,08 Poin. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya mitigasi bencana di provinsi tersebut. IRBI mengukur risiko berdasarkan tiga komponen utama: Bahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity). Penurunan skor ini bisa jadi hasil dari peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pengurangan kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Secara keseluruhan 6 Kabupaten di Sulawesi Barat memiliki skor IRBI yang tinggi, mencerminkan kerentanannya terhadap berbagai jenis bencana alam. Upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah Sulawesi Barat.

Grafik 2.6 Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2023



Sumber: Buku IRBI Tahun 2023

Berdasarkan Grafik diatas bahwa Kabupaten Majene memiliki skor IRBI tertinggi, yaitu 186,83 poin dan masuk dalam kategori risiko tinggi. Majene rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Kabupaten Pasangkayu memiliki skor IRBI sebesar 176,80 poin juga dalam kategori risiko tinggi. Pasangkayu rentan terhadap



banjir dan gempa bumi. Kabupaten Mamuju memiliki skor IRBI sebesar 161,71 poin masuk dalam kategori risiko tinggi. Mamuju sering mengalami gempa bumi. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki skor IRBI sebesar 159,33 poin juga dalam kategori risiko tinggi. Wilayah ini rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Kabupaten Mamasa memiliki skor IRBI sebesar 139,87 poin masuk dalam kategori risiko sedang. Tanah longsor menjadi perhatian utama di wilayah ini. Kabupaten Polewali Mandar memiliki skor IRBI sebesar 135,93, juga dalam kategori risiko sedang. Banjir dan tanah longsor mempengaruhi skor IRBI di Polewali Mandar.

Tabel 2.14 Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2023

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
Majene	221.20	221.20	221.20	216.08	216.08	216.08	217.62	208.30	186.83	Tinggi
Pasangkayu	176.80	176.80	176.80	176.80	176.80	176.80	176.80	176.80	176.80	Tinggi
Mamuju Tengah							161.71	161.71	159.33	Tinggi
Mamuju	200.40	137.03	136.13	145.13	145.13	145.13	145.13	161.71	161.71	Tinggi
Mamasa	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	147.02	147.02	139.87	Sedang
Polewali Mandar	202.00	148.20	141.48	140.81	140.81	140.81	140.81	135.81	135.93	Sedang

Sumber: Buku IRBI Tahun 2023



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 2.15 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Kabupaten	Gempa Bumi	Tsunami	Gempa Bumi dan Tsunami	Letusan Gunung Api	Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan	Cuaca Ekstrem	Gelombang Pasang
Majene	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
Polewali Mandar	–	–	–	–	1	4	–	–	12	–
Mamasa	–	–	–	–	16	1	–	–	1	–
Mamuju	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Pasangkayu	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–
Mamuju Tengah	–	–	–	–	–	5	1	–	2	–
Sulawesi Barat	–	–	–	–	17	14	1	–	20	–

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Tabel 2.16 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten dan Kejadian Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Jiwa)

Kabupaten	Gempa Bumi			Tanah Longsor			Banjir			Cuaca Ekstrem		
	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Menderita dan Mengungsi
Majene	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Polewali Mandar	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	4
Mamasa	–	–	–	2	1	239	–	–	–	–	–	–
Mamuju	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
Pasangkayu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mamuju Tengah	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
Sulawesi Barat	–	–	–	2	4	244	3	–	–	–	–	4

Sumber: Badan Penanganan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat



Berdasarkan pengalaman kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah provinsi memetakan wilayah rawan bencana dalam RTRW, yaitu;

1. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Singkep, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Limboro, Balanipa, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali).
2. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala Balakang, Simkep, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
3. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simkep, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar (Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulu).
4. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).
5. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simkep,



Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).

6. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene

Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka sepuluh Tahun (Tahun 2014–2024) atau dua puluh Tahun mendatang (Tahun 2014–2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan (misalnya) berupa:

1. Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir;
2. Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur);
3. Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan sumberdaya manusia.

Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-Budong, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi, Tappalang, Mamuju, Kalukku, Singkep, Bonehau, Belang-Belang, Papalang, Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS Saddang.

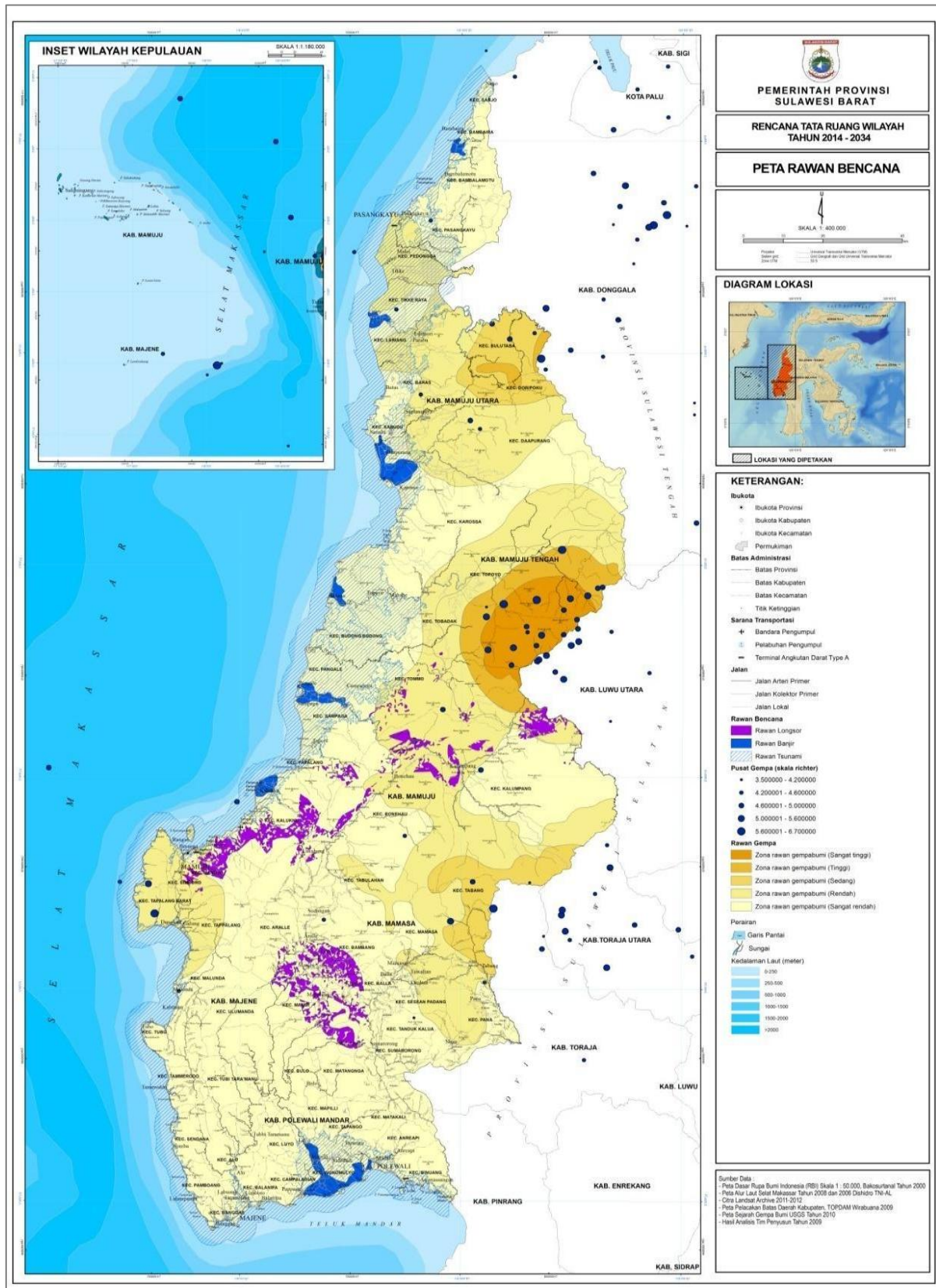
Curah hujan yang tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup dominan, tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan sumberdaya lahan yang ada, kawasan tertentu di Provinsi Sulawesi Barat tergolong



rentan terhadap longsor. potensi kekritisian, erosi dan longsor di Provinsi Sulawesi Barat dirinci berdasarkan DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan longsor yang luas. Karena itu, sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini, prasarana pengamanan dan evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana longsor.

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas.

Gambar 2.16 Peta Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.1.12. Indeks Ketahanan Daerah

Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan bencana sejak Tahun 2016 adalah pelaksanaan survei penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah yang; terdiri dari: 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Tabel 2.17 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,2	0,2	Rendah
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,2		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,2		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,2		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,2		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,2		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,2		

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat 2022 - 2026

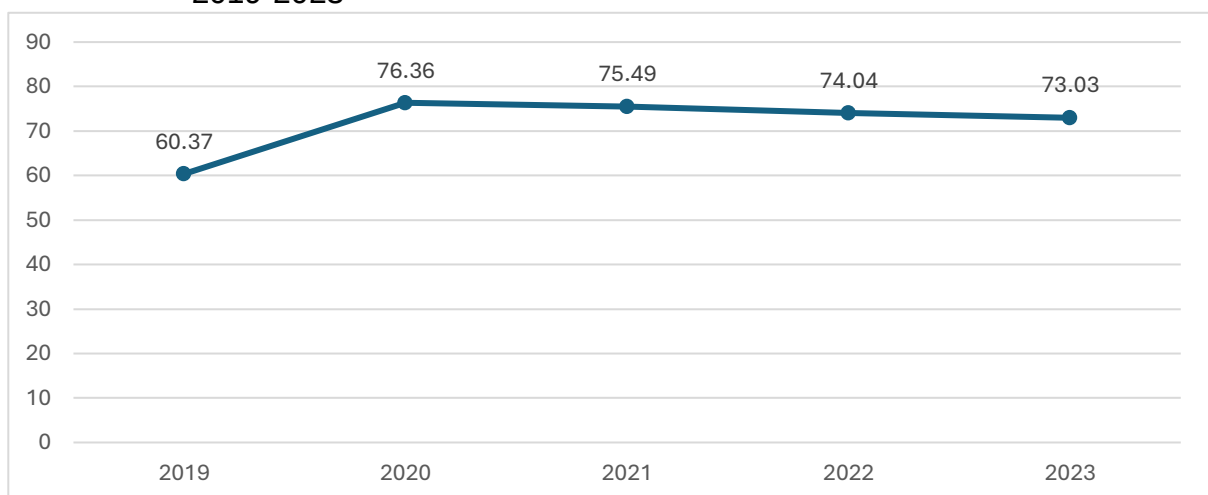
Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,20 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan

kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

2.1.1.13. Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat 5 tahun terakhir, didapatkan rata rata pencapaian nilai Wilayah yang masuk ke dalam kelompok tahan dan sangat tahan dimana pada tahun 2019 sebagai awal perhitungan, memperoleh nilai sebesar 60,37 dengan kualifikasi kelompok 4 (>57,11-65,96) dan masuk dalam wilayah yang memiliki ketahanan pangan agak tahan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan poin 76,36 dengan pencapaian paling tinggi selama lima tahun terakhir, dan masuk dalam kualifikasi kelompok 6 (>74,40) yang merupakan provinsi dengan memiliki ketahanan pangan paling baik atau sangat tahan. Hasil perhitungan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan nilai setiap tahunnya, namun tetap berada dalam kategori 6 (Sangat Tahan) dan kategori 5 (Tahan). Pada tahun 2021, nilai tercatat sebesar 75,49; pada tahun 2022 sebesar 74,04; dan pada tahun 2023 sebesar 73,03. Meskipun terjadi penurunan, provinsi ini tetap termasuk dalam kategori 5 (Tahan) dan menunjukkan ketahanan pangan yang baik.

Grafik 2.7 Nilai indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019-2023

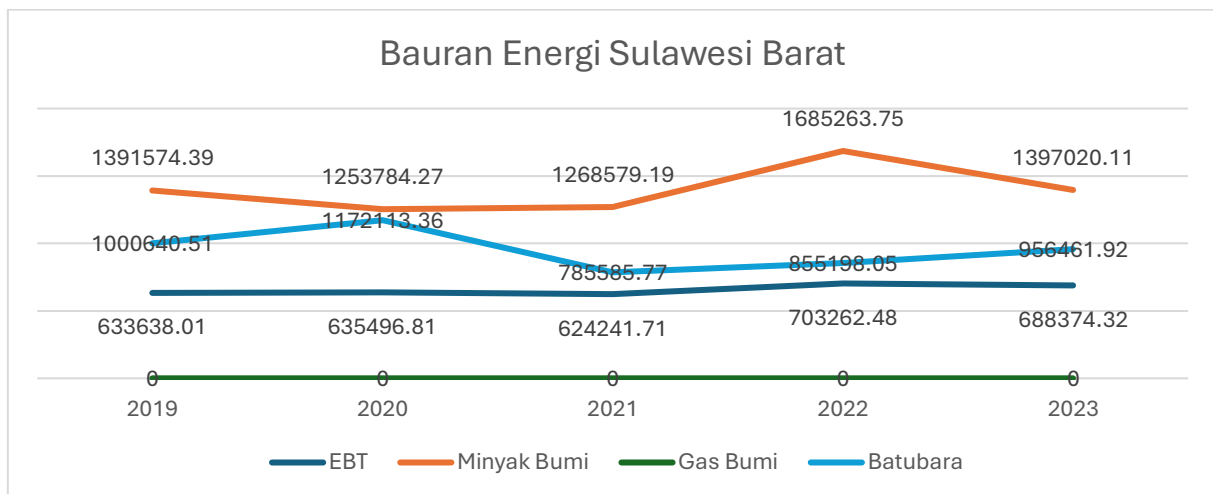


Sumber: Badan Pangan Nasional

2.1.1.14. Indeks Bauran Energi

Indeks Bauran Energi adalah indikator yang menggambarkan proporsi penggunaan berbagai sumber energi dalam total konsumsi energi suatu negara atau wilayah. Bauran energi mengacu pada kombinasi dari berbagai jenis energi yang digunakan, termasuk energi fosil (seperti minyak, batu bara, dan gas), energi terbarukan (seperti tenaga surya, angin, air, dan biomassa), dan energi nuklir. Tujuan dari Indeks Bauran Energi adalah untuk menilai seberapa beragam dan berkelanjutan sumber energi yang digunakan dalam suatu wilayah, serta untuk membantu mendorong transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Bauran energi yang ideal adalah bauran yang berkelanjutan, dengan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan dan memiliki dampak lingkungan yang tinggi.

Grafik 2.8 Bauran Energi di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019-2023



Berdasarkan perhitungan terhadap bauran energi Provinsi Sulawesi Barat total konsumsi energi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebesar 3041856.34 BOE, turun 6,22 persen dari tahun sebelumnya, dimana Bahan Bakar Minyak menjadi konsumsi terbesar yaitu 45.93 persen atau 1397020.11BOE, selanjutnya terbesar kedua adalah batubara untuk Provinsi Sulawesi Barat konsumsi Batu Bara sebanyak 956461.92 BOE atau 31.44 persen, batubara ini digunakan sebagai energi Perimer PLTU Mamuju dengan kapasitas 2x25 MW, sedangkan untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) capaian porsi EBT pada bauran energi Sulawesi Barat adalah 22.63 persen dengan energi total 688374.31 BOE meningkat 0.95 persen dibanding capaian tahun

2022 sebesar 21.68 persen meskipun demikian masih ada harapan meningkatkan porsi bauran dengan selesainya beberapa pembangunan PLTS terpusat dan Pembangunan PLTMH sandapan kabupaten Mamuju sedang dalam proses pembangunan, walaupun sulit mencapai target 45.89 persen pada tahun 2025 dikarenakan beberapa proyek dalam perencanaan pembangunan pembangkit PLN yang rencana COD antara tahun 2023-2025 tidak lagi tertuang dalam RUPTL PLN terbaru.

2.1.1.15. Indeks Ketahanan Air

Daya dukung penyediaan air (*water supply capacity*) adalah kemampuan sistem atau infrastruktur air untuk memasok air bersih yang cukup dan berkualitas kepada populasi yang membutuhkannya. Kemampuan ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang memadai untuk keperluan rumah tangga, komersial, industri, pertanian, dan lainnya dalam suatu wilayah.

Perhitungan status daya dukung penyediaan air dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi potensi air yang didasarkan pada data potensi wilayah Sungai. Nilai potensi tersebut kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air untuk air setiap grid. Pendekatan Grid ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi sejauh mana wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dan keperluan lahan. Selanjutnya, data distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan air penduduk. Dalam perhitungan ini, digunakan standar nilai kebutuhan air sebesar 800 m³/tahun/kapita, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009. Hasil dari perhitungan ini akan menciptakan peta kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat, yang memberikan informasi tentang seberapa besar kebutuhan air penduduk di berbagai wilayah.

Selain itu, perhitungan juga mencakup kebutuhan air untuk lahan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh bukan hanya mengenai kebutuhan air manusia, tetapi juga kebutuhan air untuk keperluan pertanian, industri, dan sektor lainnya. Ini



membantu pemerintah dan pengambil kebijakan untuk merencanakan alokasi air yang efisien dan berkelanjutan.

Analisis ini, juga dilakukan perhitungan terkait status daya dukung daya tampung wilayah. Ini berguna untuk mengetahui batas maksimal populasi penduduk yang dapat didukung oleh sumber daya air alamiah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Informasi ini menjadi dasar untuk merencanakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan memastikan bahwa ketersediaan air terjaga sesuai dengan karakteristik geografis dan lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 2.18 Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat

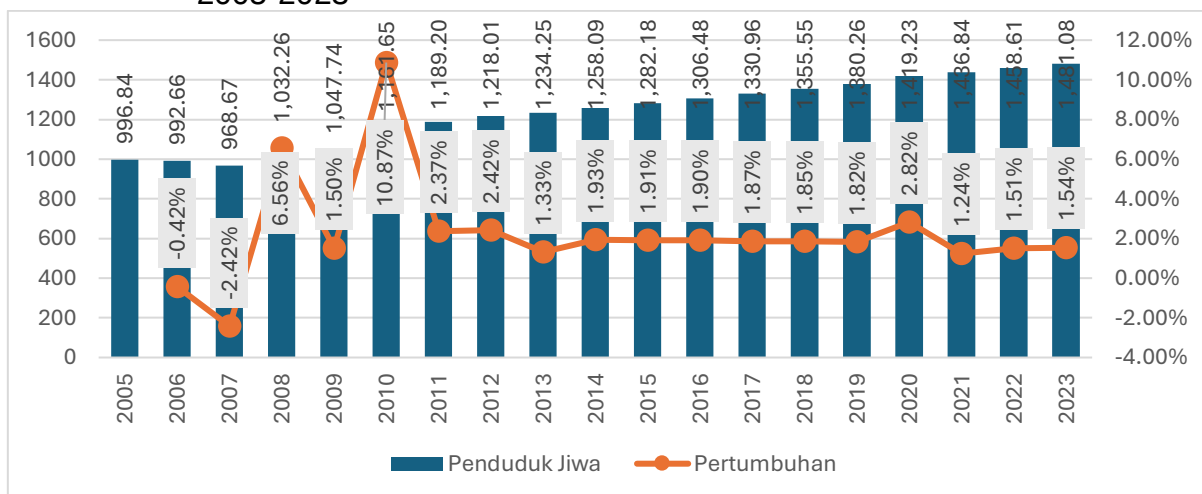
KABUPATEN	Penduduk Tahun (Jiwa)		KETERSEDIAAN m3/tahun/kapita	Kebutuhan m3/tahun/kapita		Kebutuhan-Ketersediaan m3/tahun/kapita		Ambang Batas m3/tahun/kapita		
	2022	2045		2022	2045	2022	2045	AMBANG BATAS	2022	2045
Majene	177,387.00	254,386.00	779,824,583.19	387,775,644.56	449,374,844.56	392,048,938.63	330,449,738.63	667,424.00	490,037.00	413,038.00
Mamasa	166,444.00	238,828.00	2,175,502,705.63	987,279,125.95	1,045,186,325.95	1,188,223,579.67	1,130,316,379.67	1,651,509.00	1,485,065.00	1,412,681.00
Mamuju	285,496.00	409,720.00	3,954,322,266.34	1,091,319,614.15	1,190,698,814.15	2,863,002,652.19	2,763,623,452.19	3,863,830.00	3,578,334.00	3,454,110.00
Mamuju Tengah	139,950.00	200,761.00	2,558,738,009.70	840,362,427.40	889,011,227.40	1,718,375,582.31	1,669,726,782.31	2,288,146.00	2,148,196.00	2,087,385.00
Pasangkayu	198,574.00	284,586.00	2,730,431,080.44	1,242,385,842.87	1,311,195,442.87	1,488,045,237.57	1,419,235,637.57	2,059,032.00	1,860,458.00	1,774,446.00
Polewali Mandar	490,400.00	703,309.00	2,011,118,652.15	1,398,016,915.90	1,568,344,115.90	613,101,736.26	442,774,536.26	1,256,566.00	766,166.00	553,257.00
SULAWESI BARAT	1,458,251.00	2,091,590.00	14,209,937,297.45	5,947,139,570.83	6,453,810,770.83	8,262,797,726.62	7,756,126,526.62	11,786,507.00	10,328,256.00	9,694,917.00

2.1.2. Aspek Demografi

2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Provinsi Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah yang memasuki fase bonus demografi, sebuah peluang besar untuk mendorong pembangunan daerah karena sumber daya manusia didominasi oleh penduduk usia produktif. Bonus demografi Provinsi Sulawesi Barat terjadi karena keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Selama periode RPJPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025, pertumbuhan penduduk stabil pada rentang 1-2 persen berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat (catatan: data penduduk BPS adalah hasil estimasi). Fluktuasi yang cukup tajam hanya terjadi di tahun 2005 hingga 2010, saat itu pertumbuhan penduduk diproyeksi turun 0,42 persen dan 2,42 persen, setelah itu naik signifikan menjadi 6,56 persen pada tahun 2008 dan mencapai 10,87 persen pada tahun 2010. Angka tahun 2010 merupakan angka hasil sensus penduduk, dimana BPS mencatat jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat saat itu mencapai 1.161.650 jiwa. Setelah sensus penduduk 2010, BPS kembali memproyeksi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang terus bertambah, tapi dengan tren pertumbuhan relatif konstan di atas 1 persen. Saat sensus penduduk dilakukan lagi tahun 2020, BPS mencatat populasi Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1.419.230 jiwa, bertambah 22,17 persen dibandingkan dengan populasi saat sensus penduduk tahun 2010.

Grafik 2.9 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2023



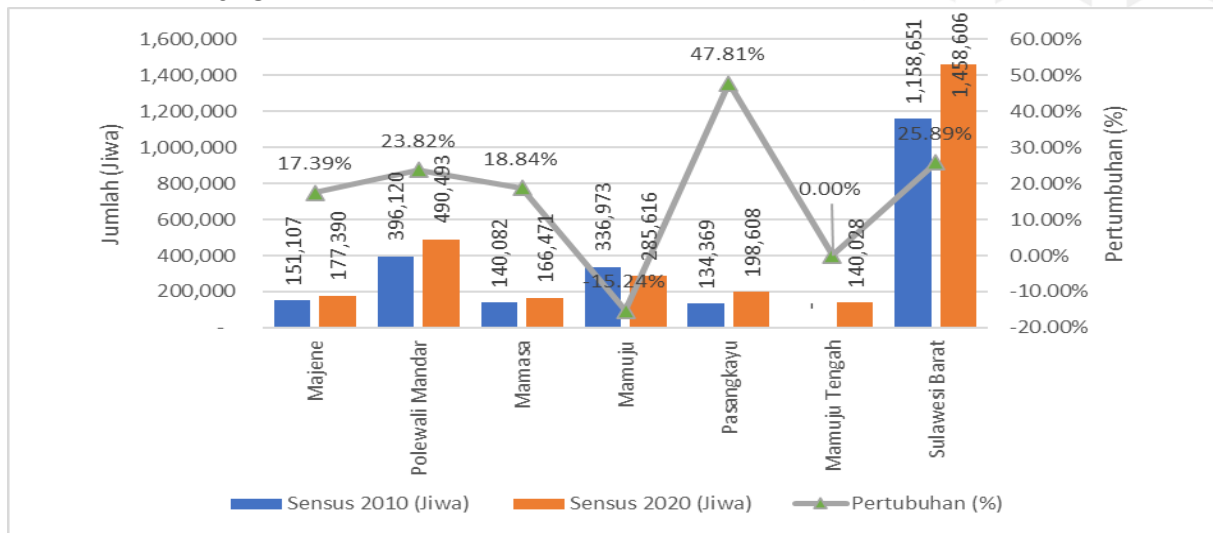
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat



Setelah sensus penduduk 2020, BPS melakukan sensus *long form*. Pendataan *Long Form* SP2020 dilakukan untuk mendapatkan parameter demografi yang akurat dimana pendataannya dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga terkait pendidikan, disabilitas, maupun perumahan. Hasil sensus *long form* tersebut mengidentifikasi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.458.610 jiwa, lebih tinggi 39.380 jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 2020.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat tak lepas dari dinamika penduduk kabupaten. Perubahan penduduk kabupaten terlihat jika membandingkan antara hasil sensus penduduk tahun 2010 dan sensus 2020. Perbandingan tersebut menunjukkan hampir semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan penduduk positif, satu-satunya daerah yang mengalami penurunan penduduk adalah Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju berkurang jumlah penduduknya dari 336.973 jiwa pada sensus penduduk tahun 2010 menjadi 285.616 jiwa di sensus penduduk tahun 2020. Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu 47,81 persen, kemudian Kabupaten Polewali Mandar 23,82 persen. Kabupaten Mamasa dan Majene masing-masing tumbuh 18,84 persen dan 17,39 persen, sementara Mamuju Tengah saat sensus penduduk tahun 2010 dilakukan masih bergabung dengan Kabupaten Mamuju. Perubahan jumlah penduduk kabupaten membuat Penduduk Provinsi Sulawesi Barat naik 25,89 persen, dari sensus 2010 sebanyak 1.158.651 jiwa menjadi 1.458.606 jiwa saat sensus penduduk tahun 2020. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Polewali Mandar relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain, sekaligus menempatkannya sebagai daerah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat, disusul dengan Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, Mamasa, dan Mamuju Tengah.

Grafik 2.10 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Antara Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Penduduk 2020 Tahun 2023

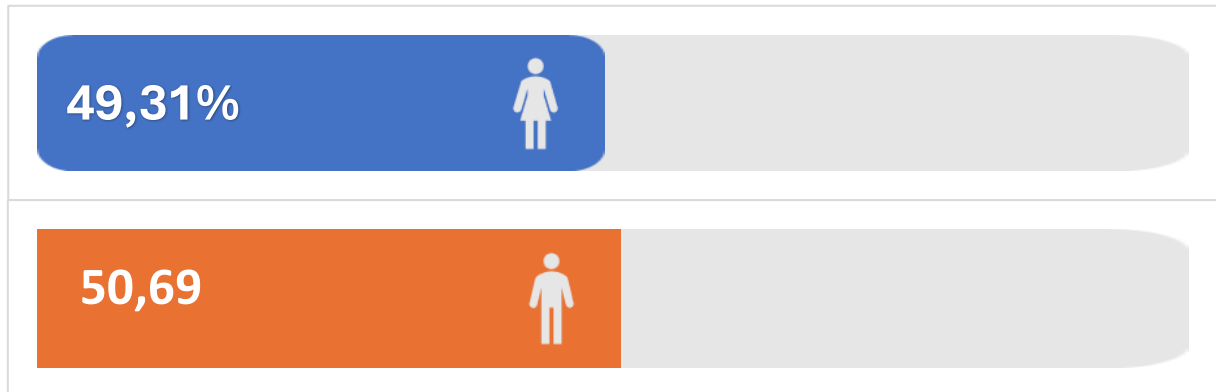


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenis kelamin lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat pada tahun 2022 proporsi penduduk laki-laki mencapai 50,71 persen atau setara dengan 739.649 jiwa, sementara penduduk perempuan mencapai 49,29 persen atau 718.957 jiwa. Angka tersebut membuat rasio jenis kelamin mencapai 102,88, menunjukkan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki per 100 penduduk Perempuan. Struktur penduduk semacam ini sejalan dengan struktur penduduk Indonesia yang menurut BPS rasionya mengalami kenaikan setiap tahun. Menurut BPS jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen dan penduduk perempuan sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen. Jika dibandingkan dengan sensus-sensus penduduk sebelumnya, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Bagi Nasional, rasio penduduk di atas 100 merupakan fenomena pergeseran demografi karena pada sensus tahun 2010, angka rasio penduduk di bawah 100, menunjukkan penduduk Perempuan lebih dominan. Tapi bagi Provinsi Sulawesi Barat, angka tersebut sama kondisinya dengan sensus 2010, dimana saat itu rasio jenis kelamin mencapai 100,76 karena proporsi penduduk laki-laki 50,19 persen, sedangkan perempuan 49,81 persen.

Grafik 2.11 Proporsi Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

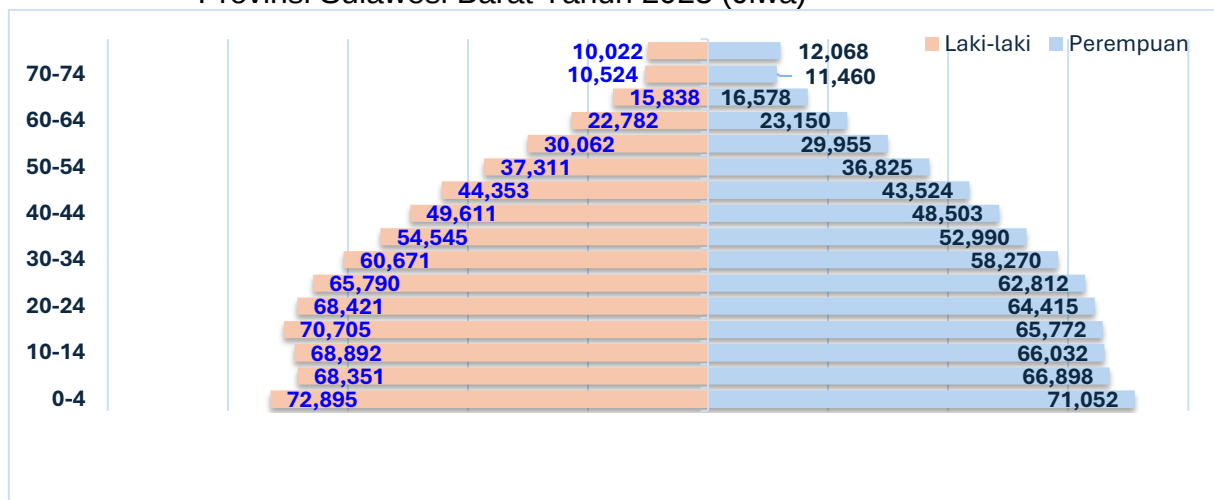
Meski tak banyak berubah komposisi penduduk perempuan dan laki-laki, namun yang menarik dicermati oleh pemerintah daerah adalah penduduk berdasarkan usia karena dari komposisi inilah Provinsi Sulawesi Barat diklaim memasuki fase bonus demografi. Bonus demografi adalah situasi demografis yang menunjukkan proporsi penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan usia yang belum dan tidak produktif. Usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, usia belum produktif 0-14 tahun, dan usia tidak produktif 65 tahun ke atas. Besaran proporsi penduduk usia produktif dapat dilihat pada Gambar piramida penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang angkanya lebih besar di bagian tengah Gambar, sementara di bagian paling bawah dan paling puncak piramida jumlahnya relatif rendah. Semua akademisi dan peneliti sepakat bahwa negara/daerah yang memasuki fase bonus demografi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena mereka memiliki surplus faktor produksi tenaga kerja.

Tahun 2023, jumlah penduduk berusia belum produktif mencapai 409.475 jiwa, yang terdiri dari 210.138 jiwa penduduk laki-laki dan 203.982 jiwa penduduk Perempuan. Berdasarkan kelompok umur, jumlah populasi berusia 0-4 tahun lebih banyak yaitu 143.947 jiwa, penduduk berusia 5-9 tahun mencapai 135.249 jiwa, dan penduduk 10-14 tahun sebanyak 134.924 jiwa. Jika diproporsikan dengan total penduduk Provinsi Sulawesi Barat, maka penduduk usia belum produktif 27,96 persen dari total populasi.

Jumlah penduduk usia tidak produktif lebih rendah dari penduduk berusia belum produktif. Total penduduk usia tidak produktif Provinsi Sulawesi Barat sebanyak

76.490 jiwa, 32.416 jiwa berusia 65-69 tahun, 21.984 jiwa berada pada rentan usia 70-74 tahun, dan 22.090 jiwa termasuk dalam kategori usia 75 tahun ke atas. Jika di kelompok usia belum produktif, proporsi penduduk laki-laki lebih banyak, di kelompok usia tidak produktif didominasi oleh penduduk perempuan, angkanya 5,16 persen dari total penduduk tidak produktif.

Grafik 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

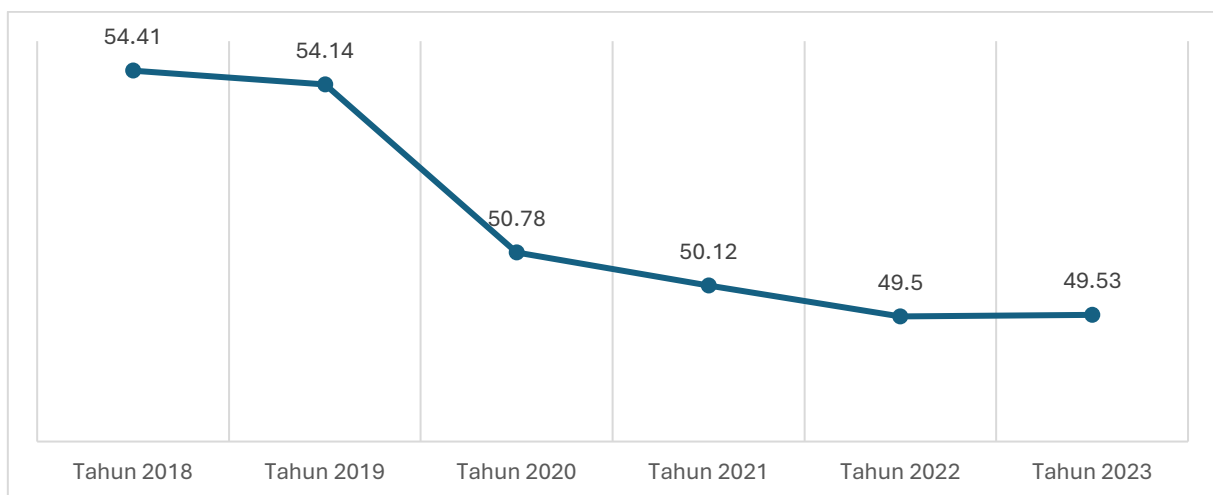
Penduduk usia produktif Provinsi Sulawesi Barat mencapai 857.631 jiwa atau setara dengan 57,90 persen dari total populasi Provinsi Sulawesi Barat. Penduduk usia produksi Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk berusia 15-19 tahun dan 20-24 tahun, semakin bertambah usianya, semakin kecil jumlah populasinya. Komponen penduduk usia produktif yang lebih banyak pada usia sangat muda menunjukkan bahwa bonus demografi Provinsi Sulawesi Barat masih akan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih dominan dibandingkan usia belum dan tidak produktif berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya disebabkan karena angka beban tanggungan yang relatif rendah.

Upaya memaksimalkan pemanfaatan Bonus Demografi juga sangat terkait dengan konsep Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang dapat dicapai ketika Total Fertility Rate (TFR) mencapai 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1. Dalam hal ini diharapkan Provinsi Sulawesi Barat dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk

yang ideal agar kuantitas penduduk terkendali sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penduduk Tumbuh Seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara umum. Keseimbangan antara kuantitas (jumlah penduduk) dan peningkatan kualitasnya merupakan faktor pendukung utama dalam mendorong keberhasilan Pembangunan.

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun). Angka ini menjadi parameter penting untuk mengukur seberapa besar beban penduduk usia produktif dalam menanggung kehidupan penduduk usia belum dan tidak produktif. Tahun 2018, Provinsi Sulawesi Barat mencatat angka beban tanggungan yang cukup tinggi mencapai 54,41 persen, menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif, angka beban tanggungan turun ke 54,14 persen tahun 2019, kemudian jadi 50,78 persen tahun 2020. Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023, beban tanggungan penduduk usia produktif turun ke 50,12 persen, 49,50 persen dan 49,53 persen.

Grafik 2.13 Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

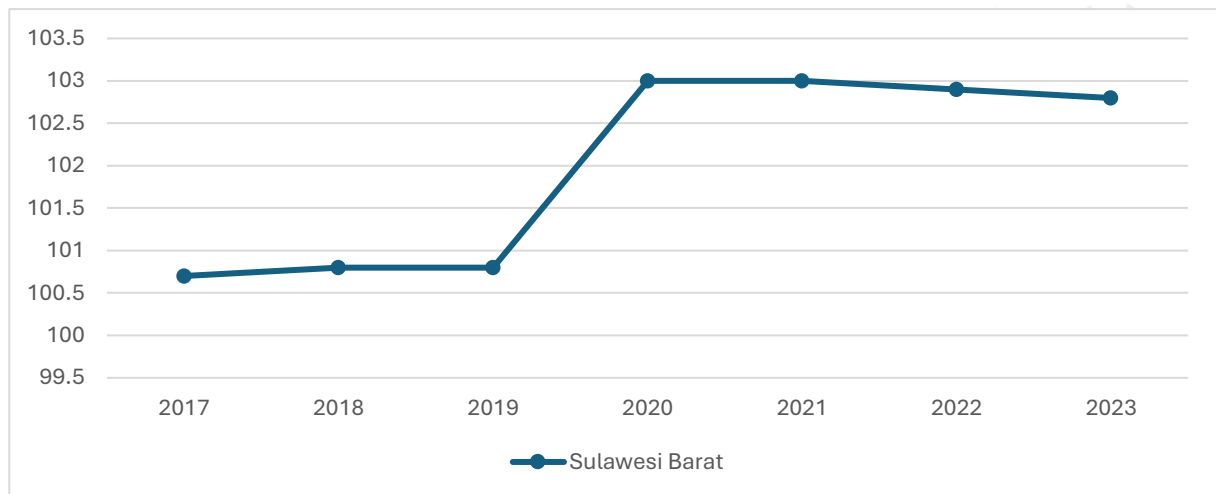
Rasio ketergantungan yang rendah diinginkan oleh semua negara/daerah karena itu menunjukkan bahwa ada proporsional lebih banyak orang dewasa usia kerja yang dapat mendukung penduduk yang belum atau tak lagi bekerja (pensiun). Hal ini pada gilirannya menguntungkan sistem perawatan kesehatan dan program pensiun negara-negara dengan beban ketergantungan rendah. Selain itu, beban tanggungan juga berbanding terbalik dengan produktivitas penduduk usia kerja, semakin rendah beban tanggungan maka semakin tinggi produktivitas.

Pemerintah daerah harus memanfaatkan dengan baik bonus demografi sebelum periodenya selesai. Pemerintah memprediksi bonus demografi akan berakhir di tahun 2030-2040. Keberhasilan memanfaatkan bonus demografi ibarat tabungan bagi Provinsi Sulawesi Barat untuk menghadapi fase demografis selanjutnya yaitu fase populasi tua (*aging population*). Jika Provinsi Sulawesi Barat berhasil memanfaatkan bonus demografi dan secara individu penduduk usia produktif juga dapat memanfaatkan periode usia produktifnya untuk bekerja dan memiliki investasi, maka Provinsi Sulawesi Barat dapat meminimalisir dampak negatif dari populasi yang menua. Tapi, jika bonus demografi berlalu tanpa berhasil mengambil manfaat, maka Provinsi Sulawesi Barat akan berhadapan dengan konsekuensi yang jauh lebih berat dimasa depan.

2.1.2.3. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan fluktuasi yang menarik dalam kurun waktu 2017 hingga 2023. Rasio jenis kelamin ini menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam setiap wilayah di Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, provinsi ini mengalami sedikit fluktuasi dengan kecenderungan yang relatif stabil di sekitar angka 100. Pada tahun 2017, rasio jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 100,7, yang berarti jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Angka ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,0, menunjukkan kecenderungan jumlah penduduk laki-laki yang lebih dominan.

Grafik 2.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Setelah itu, rasio jenis kelamin Sulawesi Barat sedikit menurun, dengan angka 102,9 pada tahun 2022, dan sedikit lagi menjadi 102,8 pada tahun 2023. Meskipun demikian, proporsi penduduk laki-laki masih tetap sedikit lebih tinggi daripada penduduk perempuan dalam periode tersebut.

Tabel 2.19 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Tahun 2017-2023

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	95.6	96.1	95.8	99.6	99.5	99.4	99.9
Polewali Mandar	96.3	96.3	96.7	99.2	99.1	99	99.3
Mamasa	102.3	102.7	102.3	105.6	105.5	105.5	106.2
Mamuju	103.5	103.2	103.2	105.5	105.4	105.3	104.7
Pasangkayu	107.8	107.5	107.2	107.8	107.7	107.6	106.7
Mamuju Tengah	106.6	106.3	106.1	106.9	106.9	106.8	106.1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Melihat data dari kabupaten di Sulawesi Barat, ada variasi yang cukup signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, Kabupaten Majene menunjukkan angka yang relatif stabil dengan rasio jenis kelamin yang hampir setara setiap tahunnya, meskipun ada sedikit penurunan dari 95,6 pada 2017 menjadi 99,9 pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah laki-laki dan perempuan di Majene semakin seimbang.

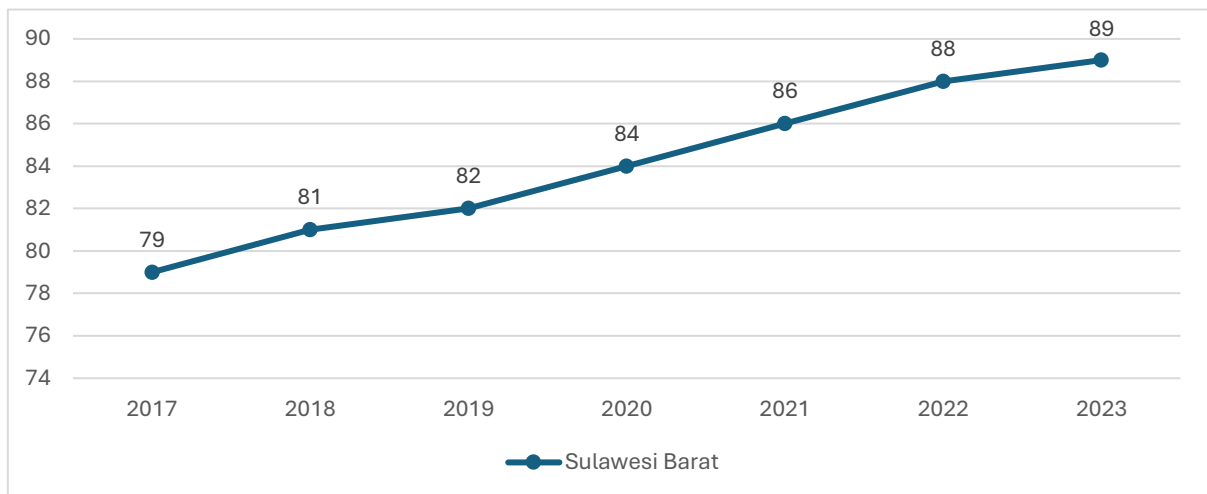
Di sisi lain, Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan tren yang serupa, dengan sedikit fluktuasi dan angka yang cenderung mendekati keseimbangan, yakni 96,3 pada 2017 dan 99,3 pada 2023. Ini menunjukkan adanya pergeseran jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi di awal periode, namun semakin mendekati kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Berbeda dengan Majene dan Polewali Mandar, beberapa kabupaten seperti Mamasa dan Pasangkayu mencatatkan angka rasio jenis kelamin yang lebih tinggi dari 100, yang menunjukkan dominasi jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar. Pada tahun 2023, Kabupaten Mamasa tercatat dengan rasio jenis kelamin 106,2, sementara Kabupaten Pasangkayu menunjukkan angka 106,7, meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah juga mencatatkan angka rasio jenis kelamin yang lebih tinggi dari 100, meskipun tren fluktuatif sedikit lebih stabil. Mamuju, misalnya, memiliki rasio jenis kelamin 104,7 pada 2023, sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencatatkan rasio lebih tinggi, seperti 105,5 pada tahun 2020. Di Mamuju Tengah, rasio jenis kelamin sedikit menurun menjadi 106,1 pada 2023, setelah sebelumnya berada di angka 106,6 pada 2017.

2.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk per kilometer persegi (km^2) di Provinsi Sulawesi Barat mengalami perkembangan yang bervariasi antar kabupaten dalam kurun waktu 2017 hingga 2023. Kepadatan penduduk ini memberikan gambaran tentang seberapa padatnya sebuah wilayah dalam jumlah penduduk yang dihuni, serta dapat dijadikan indikator untuk memahami tingkat urbanisasi, distribusi penduduk, dan kebutuhan infrastruktur. Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari 79 orang per km^2 pada tahun 2017 menjadi 89 orang per km^2 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah yang lebih merata.

Grafik 2.15 Kepadatan Penduduk per km persegi (km²) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Jika melihat data per kabupaten, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepadatan penduduk antara satu daerah dengan daerah lainnya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, ekonomi, dan sosial.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Majene menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Majene memiliki kepadatan 178 orang per km², dan pada tahun 2023, kepadatannya meningkat menjadi 201 orang per km². Kenaikan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Majene mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, dengan urbanisasi yang semakin terasa. Faktor-faktor seperti perkembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan adanya pusat-pusat kegiatan ekonomi menjadi pendorong utama tingginya kepadatan penduduk di wilayah ini. Kabupaten Polewali Mandar memiliki salah satu tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Sulawesi Barat. Pada tahun 2017, kepadatannya tercatat sebesar 214 orang per km², dan pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 239 orang per km². Meskipun ada fluktuasi, tren jangka panjang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Polewali Mandar masih relatif tinggi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan adanya pusat-pusat pemerintahan serta perdagangan yang berkembang di wilayah ini. Pada 2021, tercatat lonjakan signifikan menjadi 273 orang per km², yang kemudian sedikit menurun pada tahun berikutnya.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa cenderung stabil dan lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pada tahun 2017, kepadatannya adalah 54

orang per km² dan tidak mengalami perubahan besar, tetap berada di kisaran 54 hingga 56 orang per km² hingga 2023. Meskipun ada sedikit kenaikan dalam kepadatan penduduk, Mamasa tetap menjadi salah satu daerah dengan kepadatan rendah di Provinsi Sulawesi Barat, yang menunjukkan bahwa wilayah ini mungkin lebih banyak dihuni oleh kawasan perdesaan dengan potensi agraris yang kuat. Mamuju, sebagai ibu kota provinsi, mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, kepadatannya tercatat sebesar 56 orang per km², dan pada 2023, meningkat menjadi 59 orang per km². Meskipun angkanya relatif moderat, Mamuju mengalami perkembangan infrastruktur dan urbanisasi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Dengan adanya pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan, Mamuju menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lain di Sulawesi Barat.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 54 orang per km² pada 2017 menjadi 69 orang per km² pada 2023. Wilayah ini juga mengalami urbanisasi, seiring dengan meningkatnya sektor pertanian, perdagangan, dan infrastruktur yang semakin berkembang. Kenaikan yang cukup signifikan dalam kepadatan penduduk menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pola migrasi penduduk ke wilayah ini.

Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah, meskipun ada peningkatan yang konsisten selama periode 2017 hingga 2023. Pada 2017, kepadatannya adalah 42 orang per km², dan pada 2023, tercatat menjadi 52 orang per km². Kenaikan ini mencerminkan adanya perkembangan di sektor-sektor tertentu, meskipun wilayah ini lebih banyak dihuni oleh kawasan pedesaan.

Tabel 2.20 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Tahun 2017-2023

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	178	181	183	184	185	197	201
Polewali Mandar	214	246	249	237	273	236	239
Mamasa	54	53	54	56	55	55	56
Mamuju	56	57	59	56	56	58	59
Pasangkayu	54	56	57	62	63	68	69
Mamuju Tengah	42	43	44	45	46	51	52

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

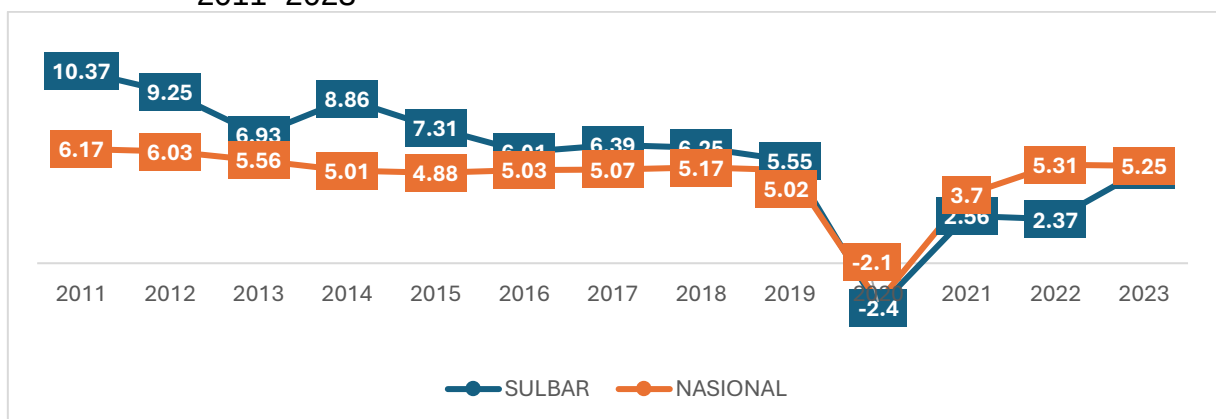
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun masih berfluktuasi setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Sejak tahun 2011 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat berfluktuasi dengan kecenderungan tren yang menurun. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata Nasional hingga tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami kontraksi sebesar -2,40 persen lebih besar dari kontraksi yang dialami Indonesia sebesar -2,10 persen. Perlahan namun pasti pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat mulai mengalami peningkatan hingga tahun 2023 namun masih perlu mengejar ketertinggalan dimana saat ini posisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat di bawah rata-rata Nasional sebesar 5,25 persen.

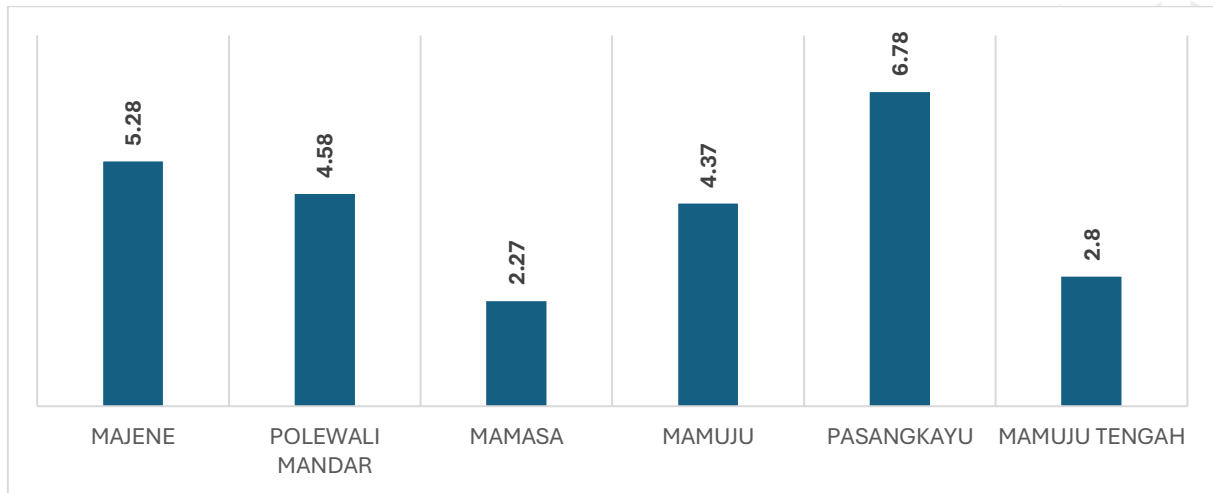
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun masih tumbuh dengan positif. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kabupaten–kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif kecuali Kabupaten Mamasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,72 persen. Kabupaten Pasangkayu memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara kabupaten lainnya yakni sebesar 6,78 persen disusul Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, dan Mamasa.

Grafik 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2011–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Grafik 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sektoral berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan penopang PDRB mengalami penurunan pertumbuhan dimana pada tahun 2012 sebesar 7,32 persen dan di tahun 2023 sebesar 4,24 persen. Hal yang sama juga terjadi di sektor pertambangan dan penggalian dengan penurunan yang cukup tajam dimana pada tahun 2012 sebesar 11,77 persen menjadi 3,03 persen di tahun 2023. Lain halnya untuk sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 sebesar 5,39 persen menjadi 10,47 persen di tahun 2023. Begitupun sektor penyedia akomodasi dan makan dan minum yang bertumbuh dari 7,48 persen di tahun 2012 menjadi 10,47 persen di tahun 2023. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran dalam lapangan usaha penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2012 – 2023

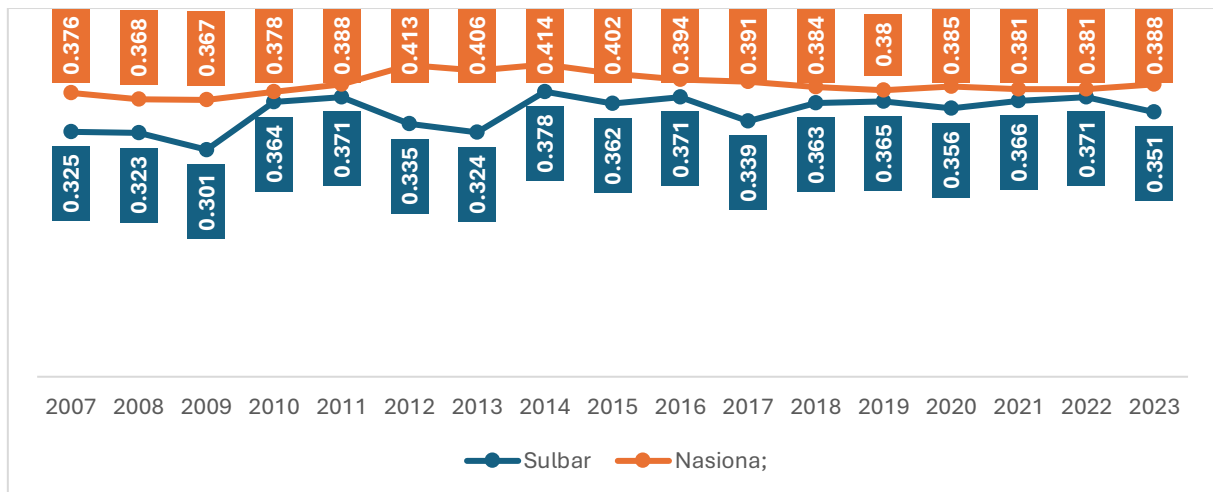
LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,32	5,71	5,93	5,74	4,08	6,9	6,11	4,62	0,54	1,16	3,35	4.24
Pertambangan dan Penggalian	11,77	10,6	8,04	8,06	10,89	7,35	8,25	5,28	-4,9	9,08	0,58	3.03
Industri Pengolahan	6,79	7,09	35,92	11,15	-2,46	8,15	7,51	5,13	-3,51	5,89	-0,64	14.46
Pengadaan Listrik, Gas	17,28	13,15	10,55	8,29	19,66	9,59	7,19	8,29	6,85	2,17	7,16	10.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	12,4	12,77	6,46	9,23	6,24	10,05	8,81	9,61	1,63	-0,31	-0,25	4.95
Konstruksi	7,74	10,09	8,11	8,84	10,85	6,82	4,99	6,65	-13,31	11,63	-1,6	3.75
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,71	8,15	7,1	5,22	5,02	5,61	6,16	5,13	-2,66	3,57	1,68	5.50
Transportasi dan Pergudangan	5,39	6,37	7,39	7,2	5,78	5,87	5,66	4,69	-7	1,68	8,37	10.30
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	7,48	7,61	6,53	4,69	9,33	1,55	7,92	9,69	-7,19	4,43	11,91	10.47
Informasi dan Komunikasi	9,89	11,11	7,2	10,87	9,26	9,97	7,86	12,54	5,73	-0,39	2,37	9.48
Jasa Keuangan	1,53	5,4	3,77	6,36	14,9	8,61	4,6	3,36	6,76	6,01	-1,26	-4.13
Real Estate	2,79	4,38	4,14	5,01	5,94	4,59	6,31	7,28	1,9	-1,27	5,24	5.00
Jasa Perusahaan	6,86	7,16	3,01	7,63	4,62	5,33	3,06	7,49	-5,42	1,47	4,11	7.81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,37	7,15	6,16	11,05	13,04	3,08	6,79	3,53	-7,68	0,13	1,68	1.57
Jasa Pendidikan	16,77	6,94	4,02	6,29	10,9	6,2	4,22	8,17	-6,65	-1,8	3,65	2.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,59	5,63	6,05	6,01	11,83	6,17	7,43	4,23	2,36	-0,28	8,26	0.31
Jasa Lainnya	9,27	6,72	8,92	7,14	8,9	8,36	5,75	10,53	-5,08	3,58	5,04	4.80
PERTUMBUHAN PDRB	9,25	6,93	8,86	7,31	6,01	6,62	6,26	5,56	-2,34	2,57	2,3	5.25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

2.2.1.2. Indeks Gini

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini atau rasio gini. Indeks gini Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007 sebesar 0,325 persen kemudian meningkat menjadi 0,351 persen pada tahun 2023. Meskipun kenaikannya relatif kecil, namun setiap terjadi kenaikan indeks gini selalu menunjukkan kian melebarnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Namun catatan positifnya bahwa angka indeks gini Provinsi Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 0,38 persen. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terjadi kenaikan indeks gini selama periode 2007-2023, namun pemerataan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat masih relatif lebih baik ketimbang rata-rata Nasional. Pola perkembangan indeks gini Provinsi Sulawesi Barat tampak berjalan paralel dengan pola perkembangan indeks gini Nasional.

Grafik 2.18 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2007-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

2.2.1.3. Angka Kemiskinan

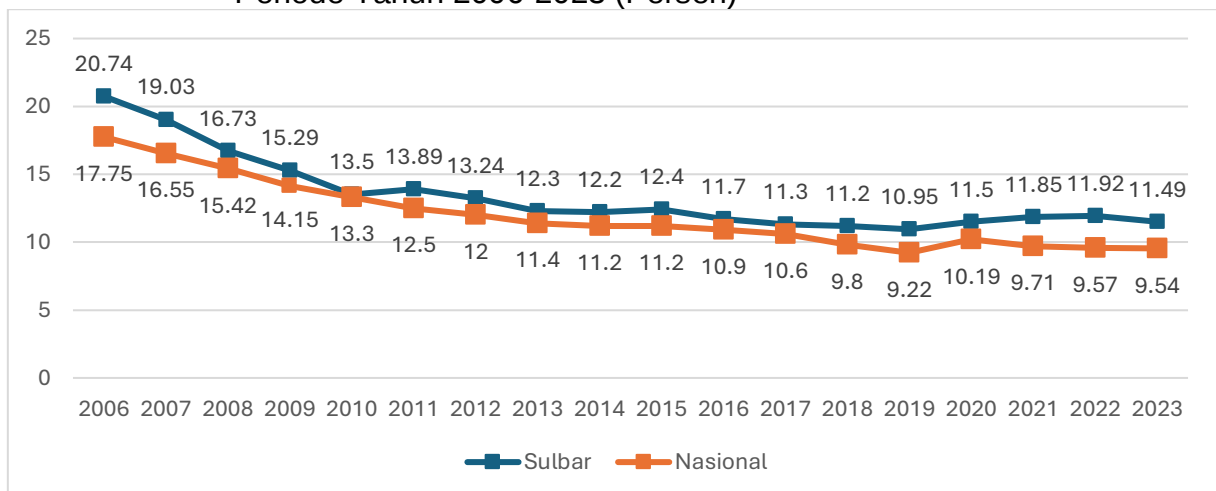
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan

kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluaran perkapitanya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

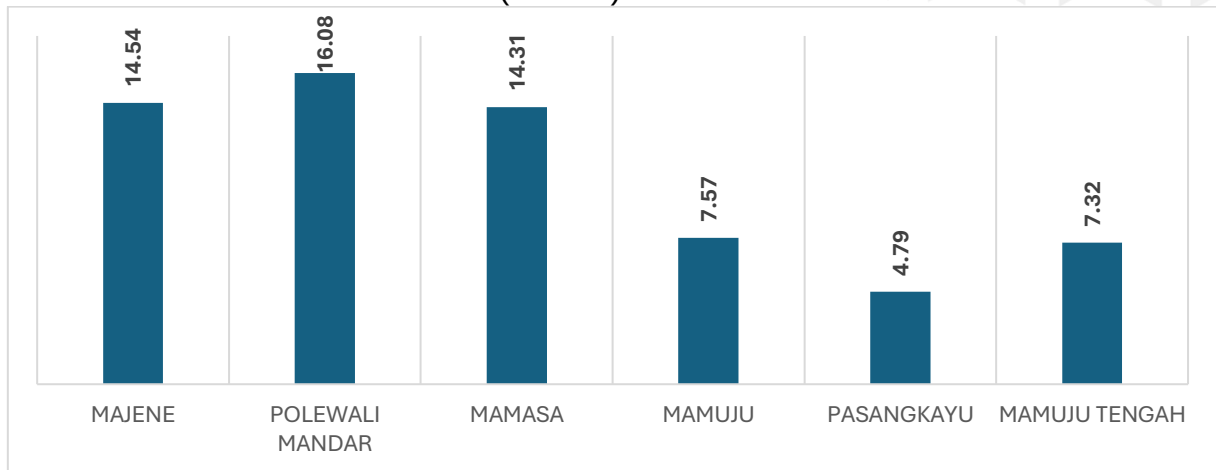
Presentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2006 sampai dengan 2023 terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 20,74 persen pada tahun 2006 menjadi 11,49 persen pada tahun 2023. Pencapaian tersebut merupakan hal yang menggembirakan namun masih berada di bawah persentase Nasional yakni sebesar 9,54 persen di tahun 2023. Rata-rata penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0.54 point persentase per tahun sedangkan Nasional sebesar 0,33 point persentase per tahun.

Grafik 2.19 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Periode Tahun 2006-2023 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

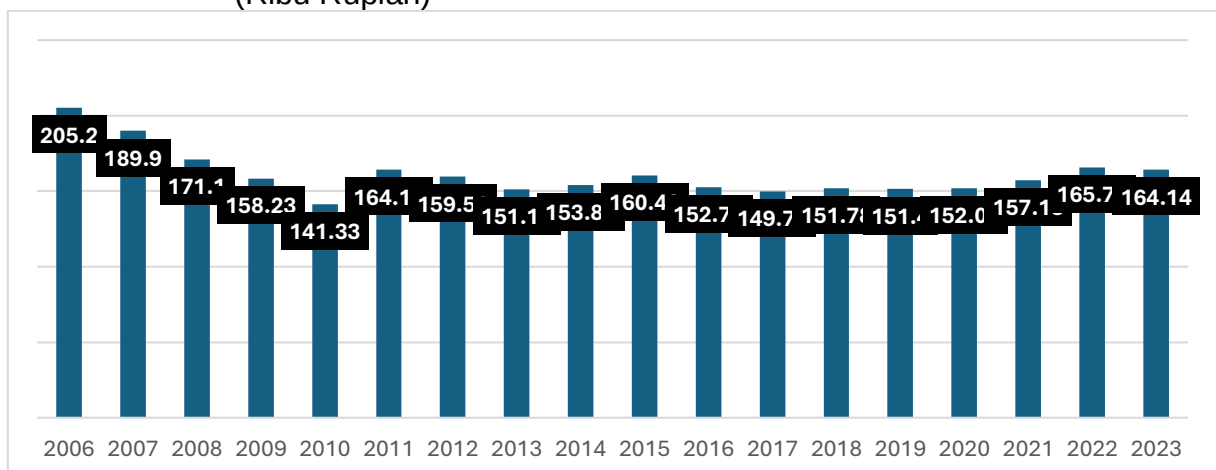
Grafik 2.20 Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

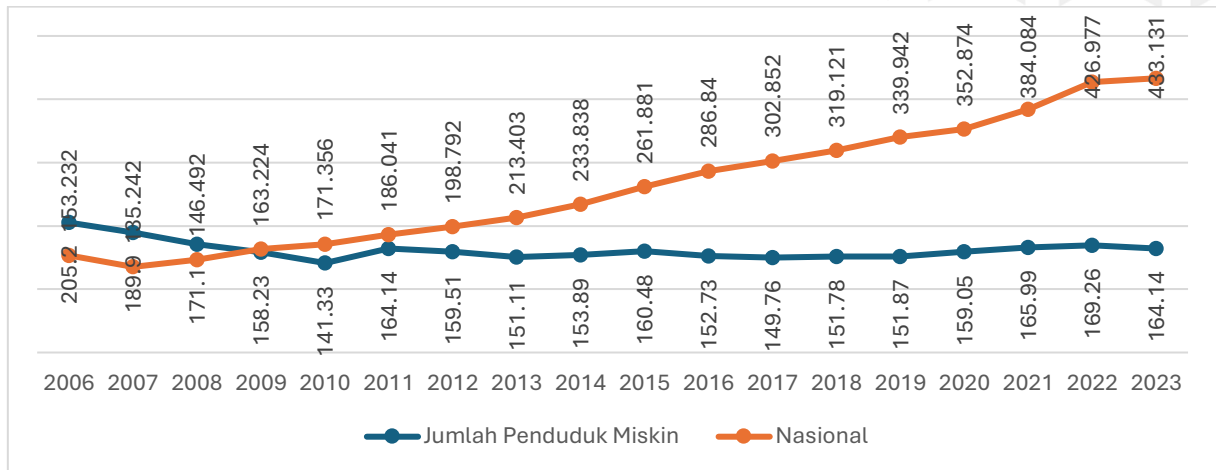
Di tahun 2023 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 16,08 persen dan terendah berada di Kabupaten Pasangkayu sebesar 4,79. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonominya dimana di tahun 2023 Kabupaten Pasangkayu mengalami kontraksi. Hal yang sama juga terlihat pada Kabupaten Polewali Mandar dimana persentase kemiskinan juga berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu menekan persentase kemiskinan.

Grafik 2.21 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2023 (Ribu Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Grafik 2.22 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 - 2023

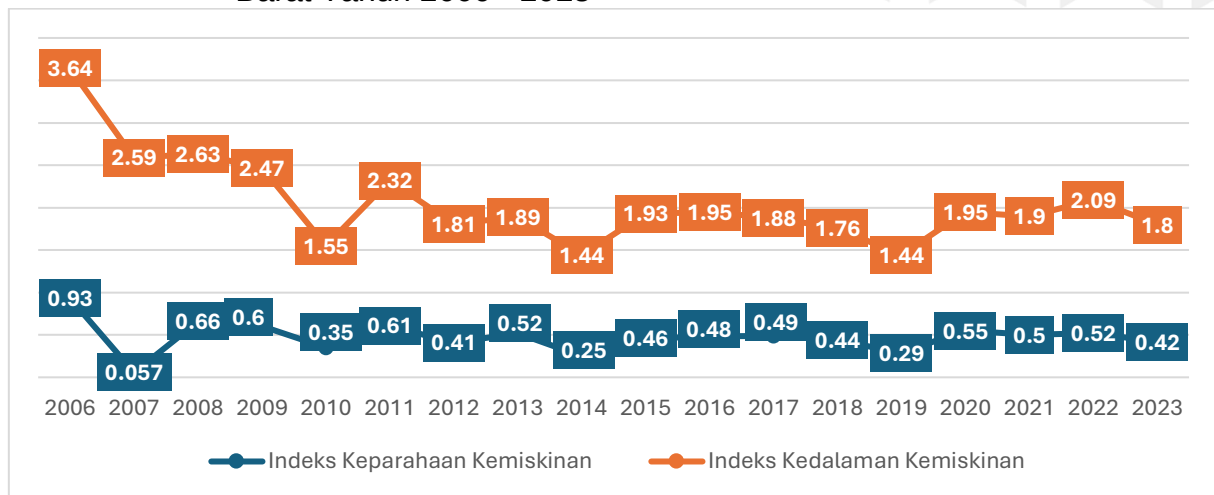


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk miskin perdesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen penduduk miskin berada di pedesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan berada di Pedesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang juga mengalami kenaikan.

Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 garis kemiskinan sebesar Rp 153.232 per kapita per bulan, naik pada tahun 2023 sebesar Rp 433.131 per kapita per bulan. Angka ini menjadi suatu capaian positif terlebih lagi pada saat yang bersamaan jumlah penduduk mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 205.200 jiwa menjadi 164.14 jiwa pada tahun 2023. Kenaikan garis kemiskinan dan dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat mulai meningkat.

Grafik 2.23 Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 - 2023

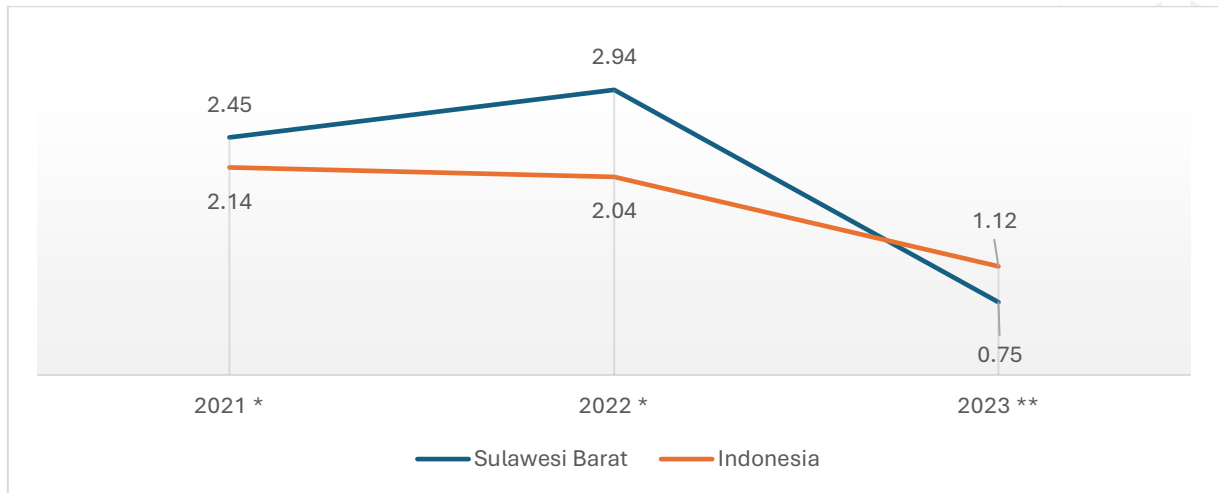


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,8 di tahun 2023 atau menurun 1,84 poin dibandingkan tahun 2006, sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,42 di tahun 2023 atau menurun 0,51 poin dibandingkan tahun 2006. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada September 2016 rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin menyempit.

Persentase penduduk miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat pertama kali muncul di Tahun 2021 dengan Persentase 2,45 Persen yang masih berada di atas Persentase Nasional. Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,94 Persen dengan jumlah Peningkatan 0,49 Persen, tetapi pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan persentase 0,75 Persen dengan jumlah penurunan 2,19 Persen lebih rendah dibandingkan dengan persentase Nasional.

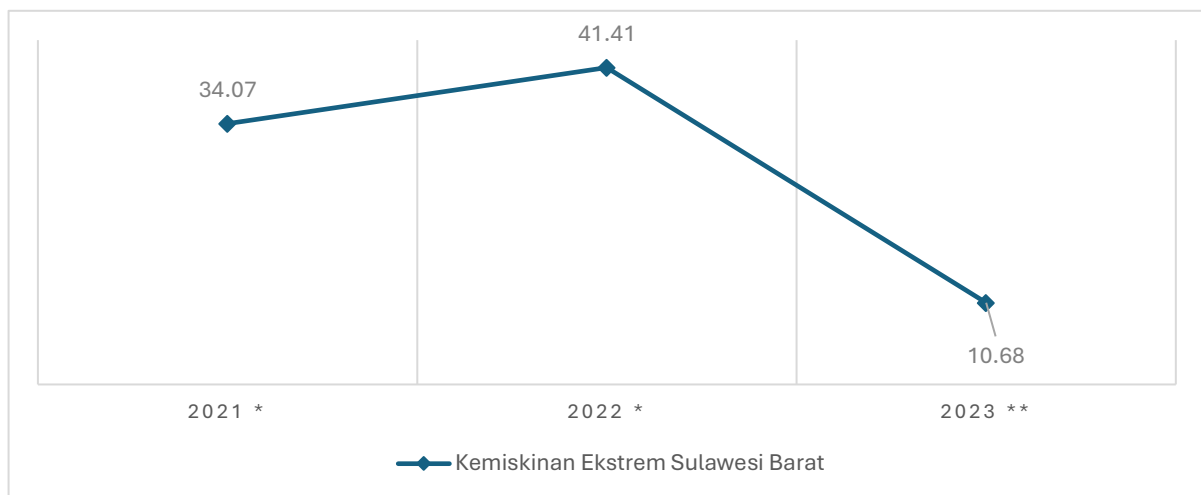
Grafik 2.24 Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik
** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

Jumlah penduduk miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2021 dengan Jumlah 34.07 Ribu Jiwa, yang mengalami Peningkatan pada Tahun 2022 sebesar 41.41 Ribu Jiwa. Namun Pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan Jumlah 10.68 Ribu Jiwa.

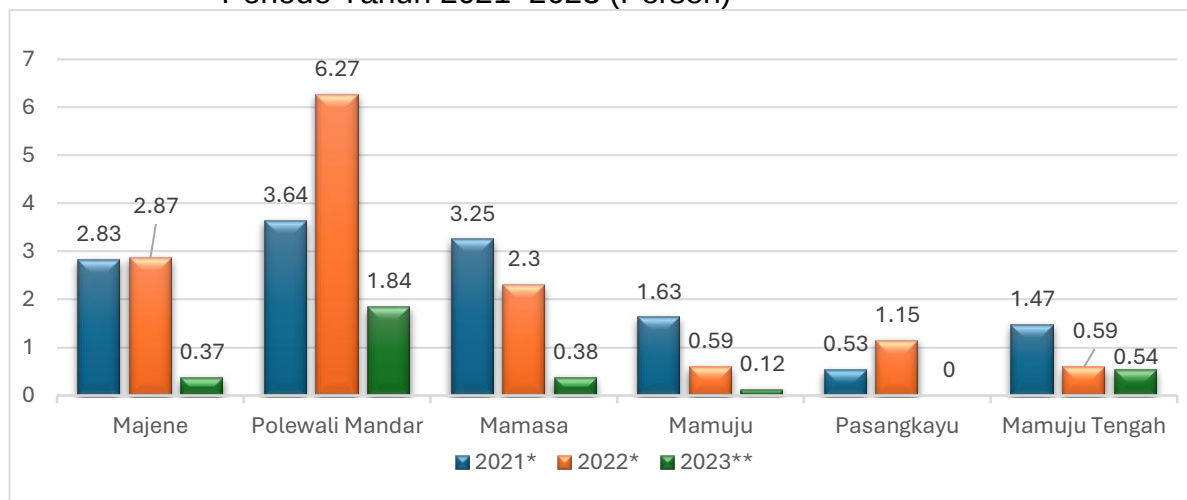
Grafik 2.25 Jumlah Penduduk Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (Ribu Jiwa)



Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik
** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

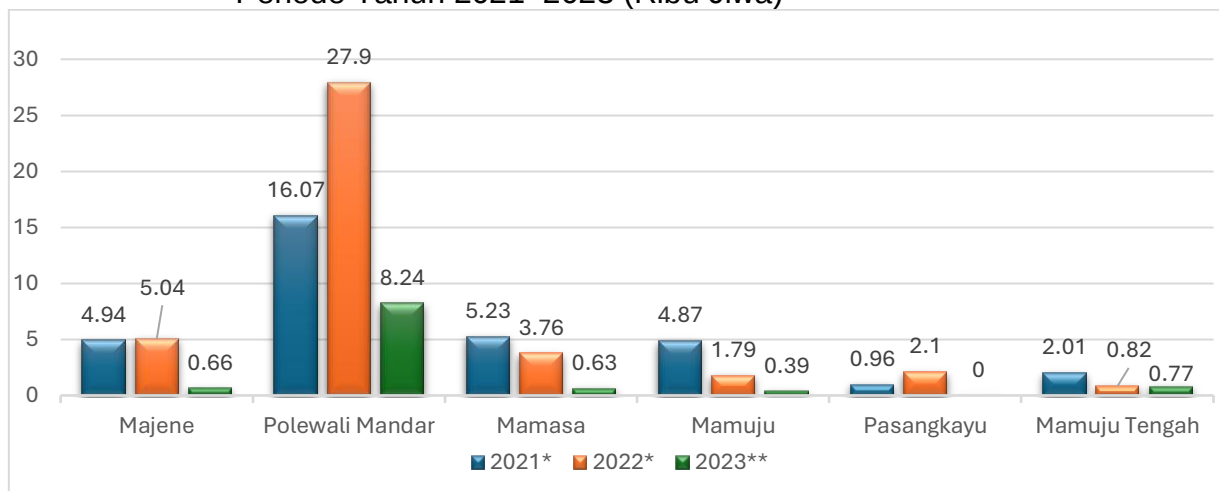
Kinerja penurunan kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat sudah sangat baik, berdasarkan data Tahun 2023 menunjukkan hanya ada 1 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin Ekstrem lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu Kabupaten Polewali Mandar.

Grafik 2.26 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Persen)



Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik
** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

Grafik 2.27 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat Periode Tahun 2021–2023 (Ribu Jiwa)



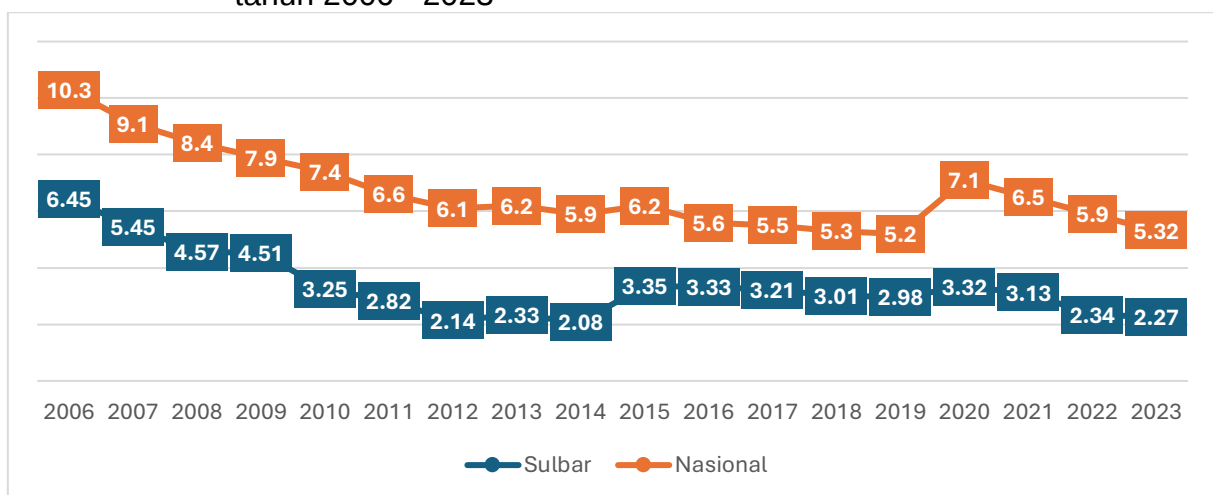
Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik
** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Grafik 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2006 - 2023

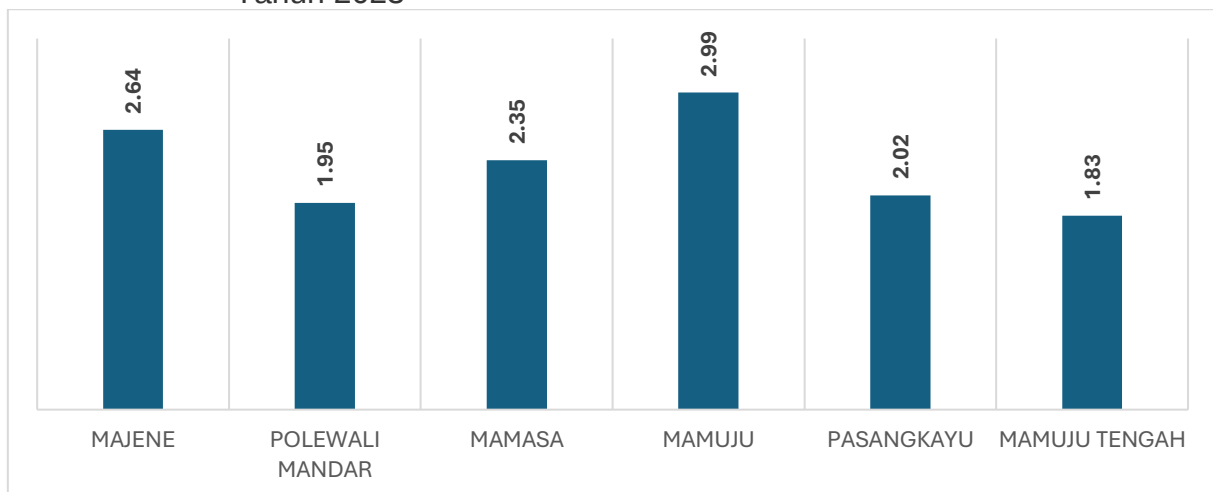


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan dari tahun 2006 ke tahun 2023 dimana tingkat pengangguran terbuka

di tahun 2006 sebesar 6,45 persen menurun menjadi 2,27 persen di tahun 2023. Walaupun di tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan menjadi 3,35 persen. Secara Nasional tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Barat lebih baik dibandingkan Nasional. Dengan rendahnya angka tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021 terdapat 23.835 perusahaan industri mikro dan kecil di Provinsi Sulawesi Barat dan menyerap 43.031 tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka untuk kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah yaitu sebesar 1,83 persen sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki tingkat pengangguran terbesar yaitu 2,99 persen.

Grafik 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar untuk melakukan akselerasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Fase bonus demografi yang saat ini dinikmati oleh Provinsi Sulawesi Barat tidak akan bermanfaat bagi pembangunan daerah jika sebagian besar populasinya tidak memiliki kualitas mumpuni untuk berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Justru, jika mayoritas penduduknya tak berkualitas, maka bonus demografi akan berubah menjadi bencana

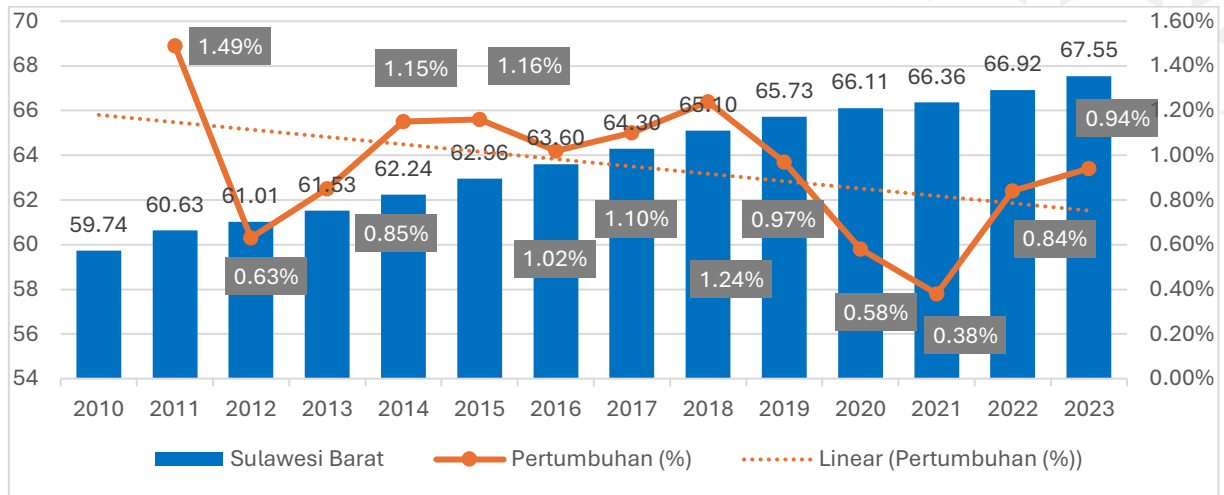


demografi dimasa depan. Agar Provinsi Sulawesi Barat bisa memanfaatkan momentum bonus demografi, maka satu-satunya cara adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam 13 tahun terakhir, kualitas sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Barat belum menunjukkan kinerja kurang baik, terlihat dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung melambat. Secara nominal, IPM Provinsi Sulawesi Barat memang meningkat. Tahun 2010, IPM Provinsi Sulawesi Barat berada diangka 59,74, kemudian naik ke 60,63 tahun pada tahun 2011. Provinsi Sulawesi Barat hanya butuh waktu dua tahun untuk menaikkan IPM dari rentan 61 ke 62 dan 62-63. Bahkan untuk menaikkan IPM dari 63 ke 64, Provinsi Sulawesi Barat hanya butuh setahun saja. Tahun 2018 dan 2019, IPM Provinsi Sulawesi Barat sudah berada di angka 66 dan dalam periode 2020-2023 berada pada posisi 66. Meskipun mengalami kenaikan, tapi kinerja pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan IPM tertinggi yang pernah dicapai Provinsi Sulawesi Barat adalah 1,49 persen tahun 2011, setelah itu anjlok ke 0,63 persen dan 0,85 persen masing-masing di tahun 2012 dan 2013. Angkanya bisa mencapai di atas 1 persen di tahun 2014 dan bertahan hingga tahun 2018. Memasuki tahun 2019 hingga 2023, pertumbuhannya kembali lambat di bawah 1 persen, bahkan tahun 2021 merupakan pertumbuhan paling rendah dalam 13 tahun terakhir hanya 0,38 persen.

Capaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 yaitu 67,55 masih termasuk kategori IPM “sedang”, hanya satu tingkat dari IPM “rendah”. Status IPM sedang belum cukup mampu membuat Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan momentum bonus demografi karena pada level ini masih banyak penduduk usia sekolah yang belum bersekolah, derajat kesehatan masyarakat masih relatif rendah, dan tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk masih pada taraf rata-rata. Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan IPM kategori “sangat tinggi” agar bonus demografi dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Grafik 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Lambatnya pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Barat tentu tak lepas dari kinerja pertumbuhan masing-masing kabupaten. Kinerja pertumbuhan IPM semua kabupaten memang melambat, namun beberapa daerah menunjukkan kinerja lebih lambat dari daerah lainnya, salah satunya adalah Kabupaten Majene. Dalam 12 tahun terakhir, pertumbuhan IPM Kabupaten Majene di atas 1 persen hanya terjadi di dua tahun yaitu tahun 2011 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 1,44 persen dan 1,04 persen, selebihnya tumbuh di bawah 1 persen. Kabupaten-Kabupaten lain menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif sama yaitu mengalami perlambatan di tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 2.22 Pertumbuhan IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2023 (%)

Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	1,44	0,80	0,41	0,66	1,04	0,62	0,93	0,93	0,88	0,48	0,57	0,82	68,62
Polewali Mandar	1,43	0,62	1,11	1,38	1,30	1,05	1,37	1,27	0,95	0,16	0,61	0,87	65,59
Mamasa	0,94	0,81	1,00	0,45	0,51	0,54	0,65	1,16	1,02	1,07	0,92	0,87	67,83
Mamuju	1,02	1,54	1,47	0,84	0,59	0,86	1,02	1,19	0,91	0,63	0,25	0,82	69,61
Pasangkayu	1,53	1,24	1,21	0,44	1,01	0,74	0,77	1,42	1,01	0,77	0,35	0,85	69,11
Mamuju Tengah	Na	Na	Na	0,70	1,20	1,08	1,19	1,24	1,04	0,94	0,72	1,07	67,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

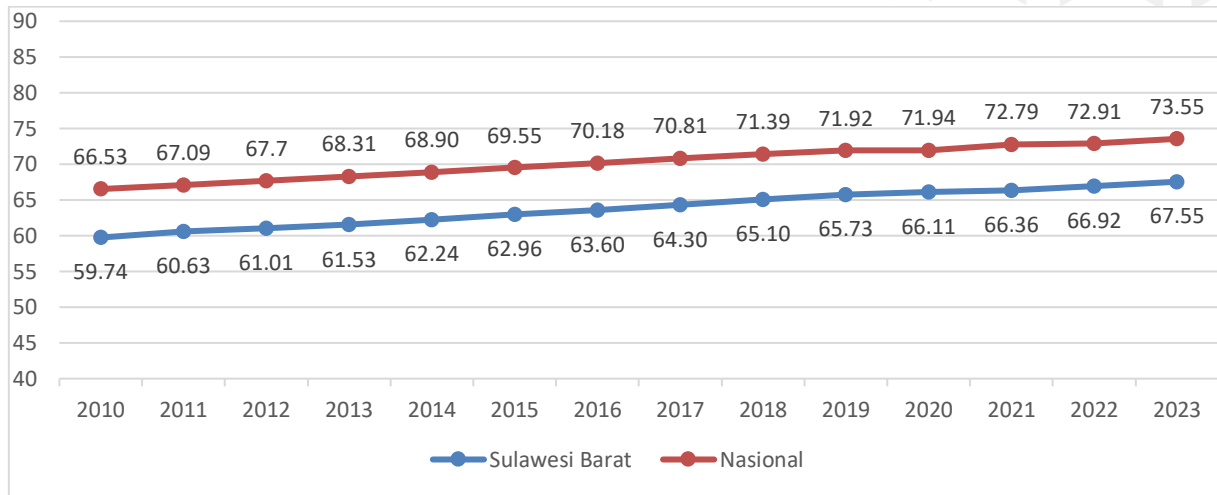


Kinerja pertumbuhan IPM yang melambat membuat Provinsi Sulawesi Barat tertinggal dari IPM Indonesia, meski pertumbuhan IPM Indonesia sebenarnya lebih lambat dari Provinsi Sulawesi Barat (dalam 13 tahun pertumbuhannya selalu di bawah 1 persen). Dalam 13 tahun terakhir, IPM Provinsi Sulawesi Barat selalu berada di bawah IPM Indonesia. Saat IPM Provinsi Sulawesi Barat masih berada di angka 60-an, IPM Indonesia sudah mencapai angka 70-an, bahkan tahun 2023 sudah di angka 67,55. Ketertinggalan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari Nasional sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan IPM yang lebih progresif dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat.

Tahun 2010 (saat jumlah provinsi masih 33, belum ada pemekaran Kalimantan Utara), IPM Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat 30 dari 33 provinsi. Saat itu, IPM Provinsi Sulawesi Barat hanya lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Setelah 13 tahun berlalu, tahun 2023, IPM Provinsi Sulawesi Barat tidak mengalami perubahan, berada di peringkat 31 dari 34 provinsi (Wilayah Papua masih terdiri dari dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua). IPM Provinsi Sulawesi Barat hanya lebih tinggi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Dibandingkan dengan progres provinsi lain di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat termasuk paling lambat. Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, di tahun 2010, IPM-nya berada di peringkat 15 dari 33 provinsi, kemudian di tahun 2023 naik ke peringkat 11 dari 34 provinsi. Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2010 berada di peringkat 7, naik satu tingkat menjadi peringkat 6 tahun 2023.

Tantangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menaikkan IPM salah satunya adalah ada di aspek Kesehatan. Selama 13 tahun terakhir, derajat Kesehatan penduduk Provinsi Sulawesi Barat memang terus membaik dilihat dari kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH) yang konsisten setiap tahun. Selain menjadi pilar utama IPM, AHH juga merupakan salah satu indikator pembangunan kesehatan. Semakin tinggi AHH, maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat tersebut. AHH juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi AHH, maka semakin sejahtera masyarakat tersebut. Tahun 2010, AHH Provinsi Sulawesi Barat hanya 62,50 tahun. Angka tersebut terus meningkat, hingga di tahun 2023 mencapai 66,31 tahun, menunjukkan bahwa rerata penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang lahir di tahun 2023 akan menjalani kehidupan mereka rerata 65 tahun.

Grafik 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2010-2023



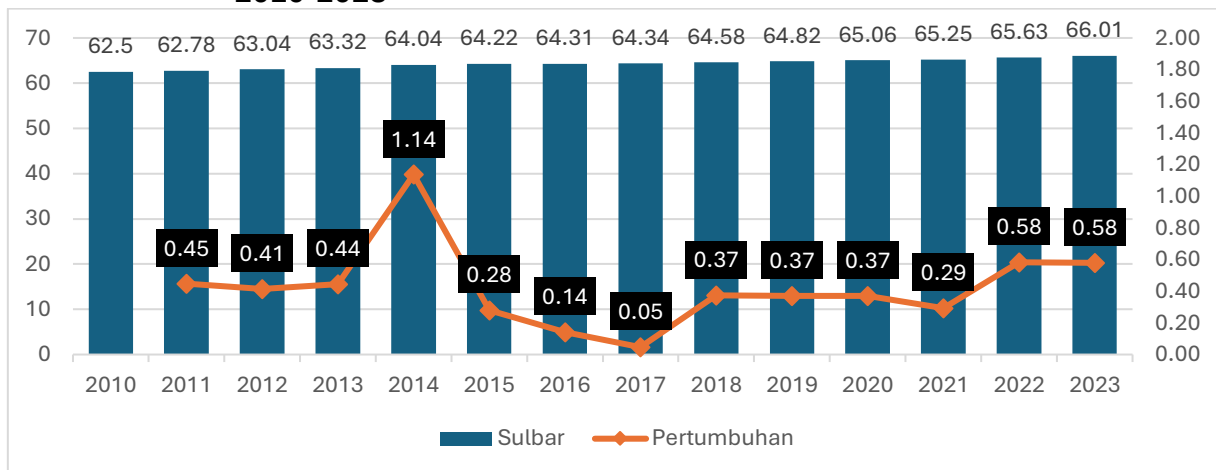
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Namun, pemerintah daerah perlu memperhatikan angka pertumbuhannya yang cenderung melambat. Untuk menaikkan AHH dari 62 tahun ke 63 tahun, Provinsi Sulawesi Barat hanya butuh waktu dua tahun (tahun 2010 dan 2011), begitupun untuk menaikkan dari 63 tahun ke 64 tahun. Pemerintah provinsi mulai mengalami kesulitan menaikkan AHH dari 64 tahun ke 65 tahun, karena setidaknya butuh waktu enam tahun. Diperkirakan, Provinsi Sulawesi Barat akan butuh waktu yang lebih lama untuk menaikkan AHH satu tahun, dari 65 tahun ke 66 tahun. Hal itu disebabkan karena kinerja pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan tertinggi hanya dicapai tahun 2014 yaitu 1,14 persen, sebelum dan setelah tahun tersebut, AHH Provinsi Sulawesi Barat tumbuh di bawah 1 persen, dimana pertumbuhan paling rendah adalah 0,05 persen tahun 2017. Selain aspek kesehatan, aspek kualitas keluarga dan peran/fungsi keluarga juga berpengaruh dalam mendukung pembentukan sumberdaya manusia berkualitas. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga juga mempengaruhi kualitas keluarga. Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2023 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Keluarga di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 55.15. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Barat juga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai Indeks Pembangunan Keluarga yang lebih baik.

Lebih lanjut, aspek kesehatan, kualitas sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Barat juga masih bermasalah di aspek pendidikannya. Kualitas manusia pada aspek

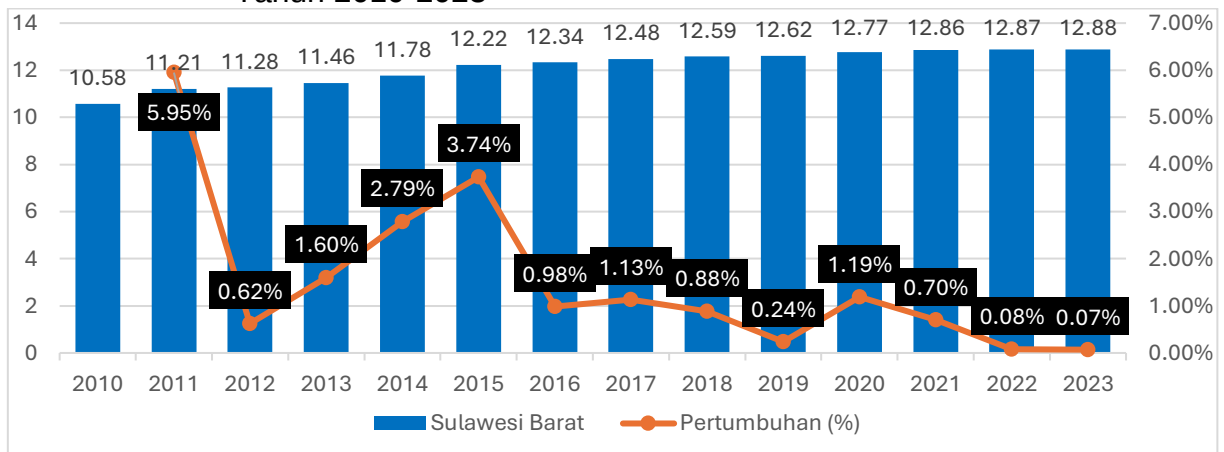
Pendidikan diukur dengan dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah jika ingin mendorong IPM lebih cepat. Setelah berhasil mencatat angka pertumbuhan tertinggi yaitu 5,95 persen tahun 2011, tahun 2012 angkanya anjlok ke 0,62 persen. Setelah itu, perlahan kinerja pertumbuhannya membaik, mulai naik ke 1,60 persen tahun 2013, 2,79 persen tahun 2014, dan bisa tumbuh 3,74 persen tahun 2015. Namun, semakin dekat dengan angka HLS ideal, nampaknya semakin lambat pertumbuhannya. Tahun 2016 hingga 2023, pertumbuhan HLS Provinsi Sulawesi Barat cenderung di bawah 1 persen.

Grafik 2.32 Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

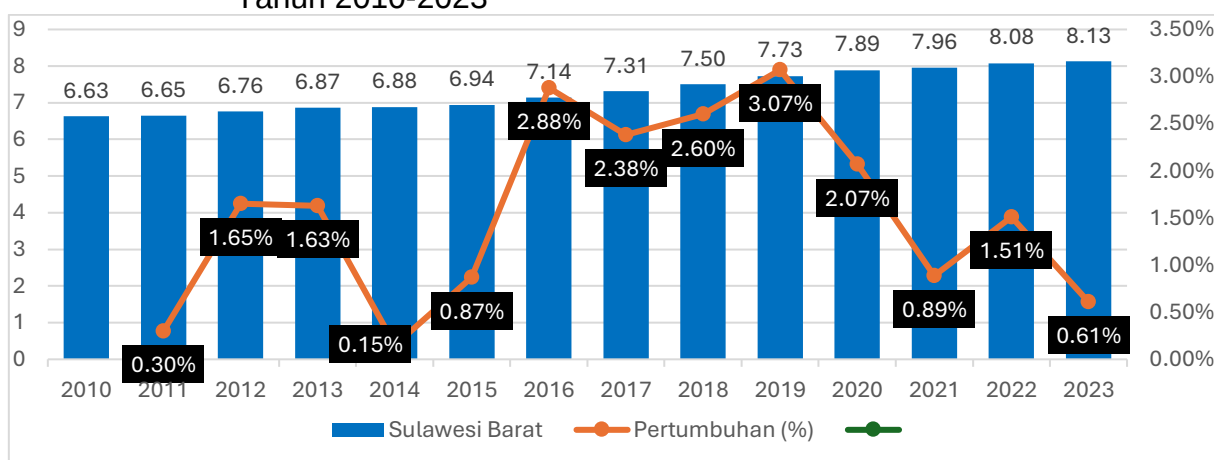
Grafik 2.33 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

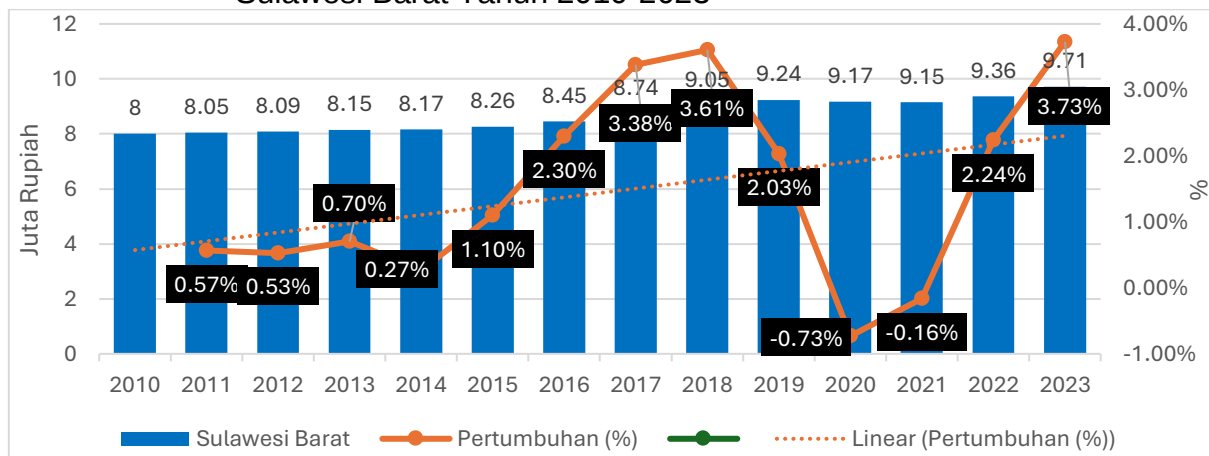
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Barat relatif lebih dibandingkan HLS-nya, meski angka pertumbuhannya juga masih lambat. Jika dilihat tren pertumbuhan RLS, dalam 12 tahun terakhir cenderung meningkat. Hanya beberapa tahun saja angka pertumbuhannya di bawah 1 persen yaitu tahun 2011 sebesar 0,30 persen, tahun 2014 hanya 0,15 persen, tahun 2015 0,87 persen, dan tahun 2021 0,89 persen. Beberapa tahun lainnya mencatat pertumbuhan RLS di atas 1 persen, bahkan di tahun 2016 hingga 2019, angkanya di atas 2 persen. Tahun 2023, RLS Provinsi Sulawesi Barat mencapai 8,13 tahun, menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rerata hanya mengenyam pendidikan SMP/Sederajat kelas II.

Grafik 2.34 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Grafik 2.35 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Tren perkembangan aspek kesejahteraan yang diukur dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan juga masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, meski kecenderungannya menaik dalam 13 tahun terakhir. Kinerja pertumbuhan terbaik pengeluaran per kapita riil disesuaikan Provinsi Sulawesi Barat terjadi di tahun 2015 hingga 2018, karena dalam periode ini Gambar pertumbuhan menanjak naik dengan mencatat angka pertumbuhan 3,61 persen. Namun tahun 2019 hingga 2021, menjadi periode terburuk karena pengeluaran per kapita riil mencatat pertumbuhan negatif akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023, pertumbuhannya rerata pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat naik 3,73 persen hingga mencapai angka Rp 9,71 juta.

Upaya meningkatkan IPM harus dilakukan secara komprehensif yang fokus pada ketiga aspek yaitu kesehatan, Pendidikan, dan daya beli Masyarakat. Intervensi pemerintah provinsi perlu diarahkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi ketiga dimensi tersebut. Analisis IPM yang dilakukan oleh BPS mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan ketiga dimensi IPM dan menentukan fluktuasi indikator Kesehatan, Pendidikan, dan pengeluaran. Variabel-variabel tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel indikator yang terkait dengan dimensi pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Barat.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan indikator yang berpengaruh pada masing-masing dimensi IPM. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dipengaruhi oleh tujuh indikator yaitu rumah tangga dengan sumber air minum bersih; rumah tangga yang memiliki akses air minum layak; rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar; morbiditas; perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dengan perkawinan pertama ≤ 16 tahun; perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan; dan perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari ketujuh indikator ini, beberapa diantaranya memang belum menunjukkan kinerja optimal seperti rumah tangga dengan sumber air minum bersih yang angkanya masih 69,32 persen, menunjukkan masih ada beberapa rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak memiliki sumber air bersih. Selain itu, indikator rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar juga masih cukup tinggi, mencapai 12,45 persen tahun 2022.



Pada dimensi pengetahuan, ada sembilan indikator yang berpengaruh yaitu angka partisipasi sekolah 7-12 tahun; angka partisipasi sekolah 13-15 tahun; angka partisipasi sekolah 16-18 tahun; angka partisipasi sekolah 19-24 tahun; angka tidak bersekolah 7-12 tahun; angka tidak bersekolah 13-15 tahun; angka tidak bersekolah 16-18 tahun; angka melanjutkan/transisi ke SMP/ sederajat; dan angka melanjutkan/transisi ke SMA/ sederajat. Dari semua indikator tersebut, ada empat indikator yang perlu mendapat serius pemerintah provinsi yaitu Angka Partisipasi Sekolah 19-24 Tahun yang hanya 23,43 persen tahun 2022, Angka Tidak Bersekolah 7-12 Tahun, Angka Tidak Bersekolah 13-15 Tahun, dan Angka Tidak Bersekolah 16-18 Tahun yang angka masing-masing cukup tinggi yaitu 2,00 persen, 12,63 persen, dan 26,44 persen.

Dimensi standar hidup layak termasuk membutuhkan intervensi pemerintah provinsi, terutama pada beberapa aspek yang pengaruh yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku; PDRB per Kapita Atas dasar harga konstan 2010; jumlah penduduk bekerja; persentase pekerja formal; tingkat pengangguran terbuka; penduduk miskin; persentase penduduk miskin; dan gini rasio. Prioritas pemerintah provinsi perlu diarahkan pada variabel jumlah Penduduk miskin dan persentase kemiskinan yang ditahun 2022 masih relatif tinggi. Selain itu, isu ketimpangan pendapatan juga perlu mendapat perhatian untuk memastikan hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh semua pelaku pembangunan.

Menaikkan IPM hingga mencapai kategori IPM tinggi tentu membutuhkan keseriusan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi tak punya banyak waktu karena dalam waktu dekat bonus demografi akan segera berakhir. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan IPM sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 2.23 Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	63,55	63,70	70,33	69,32	
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	71,50	72,75	78,35	78,98	79,86
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	16,39	15,88	12,22	12,45	17,06
Morbiditas	%	15,60	14,67	13,26	14,12	
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	16,65	18,43	16,65	16,70	
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	Na	Na	83,24	88,84	
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	Na	Na	91,28	93,77	
Dimensi Pengetahuan						
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	98,34	98,33	98,19	98,40	98,31
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	89,92	90,07	90,12	89,39	89,47
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	69,31	69,84	71,22	70,85	71,57
Angka Partisipasi Sekolah 19-24 Tahun	%	23,64	23,24	23,80	23,43	23,98
Angka Tidak Bersekolah 7-12 Tahun	%	Na	Na	1,19	2,00	
Angka Tidak Bersekolah 13-15 Tahun	%	Na	Na	11,78	12,63	
Angka Tidak Bersekolah 16-18 Tahun	%	Na	Na	25,72	26,44	
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	Na	Na	89,74	92,11	
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMA/Sederajat	%	Na	Na	91,07	89,70	
Dimensi Standar Hidup Layak						
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	33.587	32.675	35.192	37.070	35.040
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	Na	Na	22.896	23.073	22.880
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	660.481	672.986	686.544	731.902	743.007
Persentase Pekerja Formal	%	28,09	27,37	27,20	22,75	-
Persentase Pekerja Informal ¹	%	71,91	72,63	72,80	77,25	-
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.210.165	2.068.690	2.200.963	2.340.502	
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27
Penduduk Miskin ²	ribu orang	151,40	152,02	157	166	164,14



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Miskin ³	ribu orang	151,87	159,05	166	169	-
Persentase Penduduk Miskin 2	%	11,02	10,87	11,29	11,75	11,49
Persentase Penduduk Miskin 3	%	10,95	11,50	11,85	11,92	-
Gini Rasio ²	Rasio	0,370	0,364	0,356	0,362	0,351
Gini Rasio ³	Rasio	0,365	0,356	0,366	0,371	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Catatan:

Tahun 2019-2020:

- 1 Kondisi Maret
- 2 Kondisi September
- 3 Kondisi Agustus

Tahun 2021-2022:

- 1 Kondisi Agustus
- 2 Kondisi Maret
- 3 Kondisi September

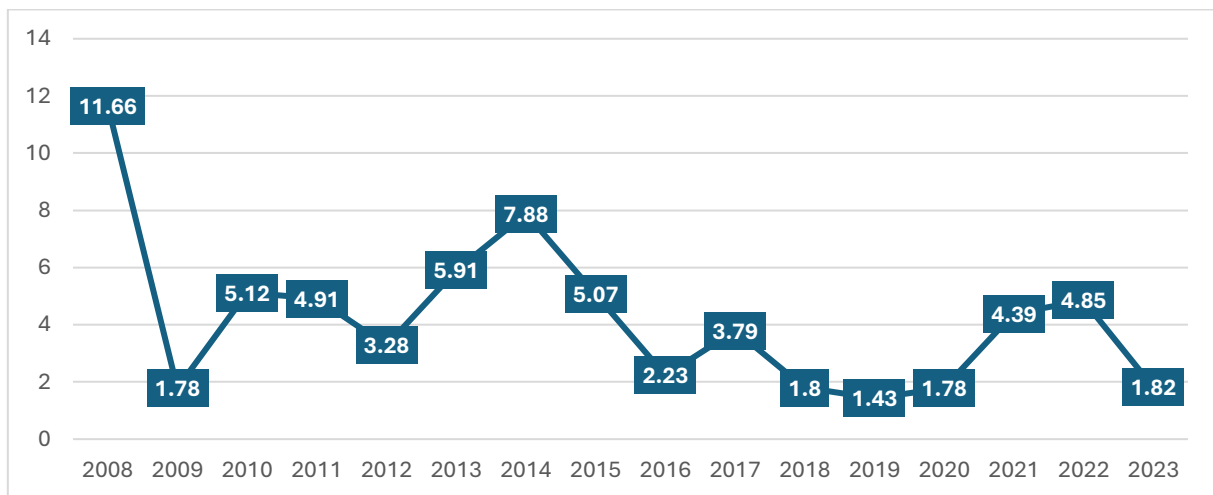
2.2.1.6. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu: (1) Inflasi Inti, dimana cenderung menetap/persisten (*persistent component*). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh: (i) interaksi permintaan dan penawaran, (ii) lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditas internasional, dan inflasi mitra dagang, (iii) ekspektasi inflasi dan pedagang dan konsumen; (2) Inflasi Non Inti, volatilitasnya tinggi, yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental diantaranya: (i) *volatile food* (dipengaruhi oleh shock karena panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik), (ii) *administered price* (dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll).

Perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Barat cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2008 - 2023. Di tahun 2008, inflasi Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi yakni 11,66 persen dan merupakan yang tertinggi selama 15 tahun terakhir. Inflasi terendah berada pada tahun 2009 dan 2020 yakni sebesar 1,78 persen. Selama 3 tahun terakhir inflasi di Provinsi Sulawesi Barat mengalami

peningkatan sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,82 persen. Peningkatan inflasi secara positif dapat mendorong peningkatan perekonomian, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan di tahun 2023 mengindikasikan bahwa inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat belum mampu meningkatkan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.36 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 - 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Menurut World Health Organization (WHO), keluarga sehat merupakan keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Untuk mengukur capaian keluarga sehat, Kementerian Kesehatan menyusun Indeks Keluarga Sehat (IKS). Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yang terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Adapun 12 indikator keluarga sehat mencakup: 1). keluarga mengikuti program KB, 2). ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3). bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, 4). bayi mendapat ASI eksklusif, 5). balita mendapat pemantauan pertumbuhan, 6). penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, 7). penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, 8). penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan, 9). anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10). keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional, 11). keluarga memiliki akses ke



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

sarana air bersih, 12). keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Namun, data Indeks Keluarga Sehat belum tersedia di level kabupaten/kota.

Pada Tahun 2023, Indeks keluarga sehat Provinsi Sulawesi Barat adalah 0,190 artinya hanya 19 persen keluarga sehat di Sulawesi Barat berdasarkan 12 indikator keluarga sehat atau masuk dalam kategori keluarga tidak sehat. Secara keseluruhan baik pada level Provinsi maupun Kabupaten masih berada pada kategori keluarga tidak sehat.

Tabel 2.24 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Persen)

NO	INDIKATOR	MAMUJU UTARA	MAMUJU	MAMASA	POLEWALI MANDAR	MAJENE	MAMUJU TENGAH	CAKUPAN SULAWESI BARAT
1	Keluarga mengikuti program KB *)	37,98	47,14	74,65	28,50	37,89	51,97	43,29
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	90,32	74,64	94,01	79,95	87,16	90,43	83,80
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	89,26	83,74	97,37	89,11	89,78	91,42	89,59
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	81,65	76,69	88,42	86,76	88,34	83,27	84,22
5	Pertumbuhan Balita dipantau	88,63	72,91	93,64	87,66	88,89	83,05	85,37
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	35,73	39,95	44,03	46,33	49,49	38,59	43,46
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	21,62	29,43	33,78	23,06	33,11	31,60	27,60
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	03,68	12,89	04,22	21,92	20,60	08,47	08,43
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	39,82	41,25	51,48	50,28	50,18	43,41	47,01
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	55,98	48,64	61,13	55,77	61,87	46,37	55,17
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	80,04	87,75	93,76	90,94	95,54	81,60	89,24
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	82,17	74,84	81,01	85,59	86,63	83,17	82,56
Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,147	0,142	0,263	0,184	0,239	0,169	0,190
Σ Keluarga dengan IKS > 0,800		4436	6724	10355	16866	8476	4586	51443
Σ Keluarga		30205	47210	39299	91685	35420	27202	271021

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2024

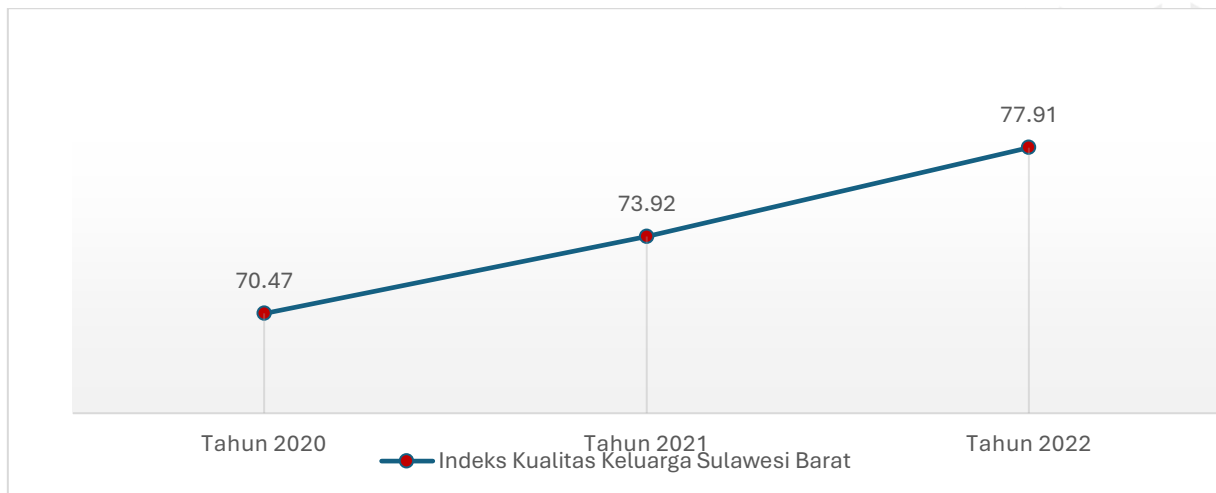
2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan kesejahteraan keluarga. Hasil dari IKK digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan keluarga di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan memahami dan memperbaiki indikator-indikator ini, kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. Indeks Kualitas Keluarga dibentuk untuk mengukur capaian kualitas keluarga. Terdapat lima dimensi dan 25 indikator yang membentuk IKK, yaitu:

1. Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), terdiri dari dua indikator, yaitu memiliki akta kelahiran dan keluarga tinggal Bersama
2. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), terdiri dari enam indikator, yaitu makan makanan sehat dan bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu
3. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas enam indikator, yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak tidak putus sekolah, dan perempuan bekerja
4. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas lima indikator, yaitu kekerasan terhadap anak, tidak menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator dobel untuk ayah dan ibu)
5. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) terdiri atas enam indikator, yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, pada lansia dalam rumah tangga, melakukan kegiatan keagamaan, dan mengakses internet bersama anak dan orang tua

Pada periode Tahun 2020 hingga 2022, terjadi tren positif dalam Indeks Kualitas Keluarga Sulawesi Barat. Dimulai dari nilai Tahun 2020 sebesar 70,47, terjadi peningkatan hingga mencapai 73,92 pada Tahun 2021. Tren positif ini berlanjut hingga Tahun 2022, di mana indeks mencapai nilai sebesar 77,91. Hal ini menunjukkan pertumbuhan dan perbaikan yang konsisten dalam kualitas keluarga di Sulawesi Barat.

Grafik 2.37 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Publikasi Indeks Keluarga Sehat Tahun 2023

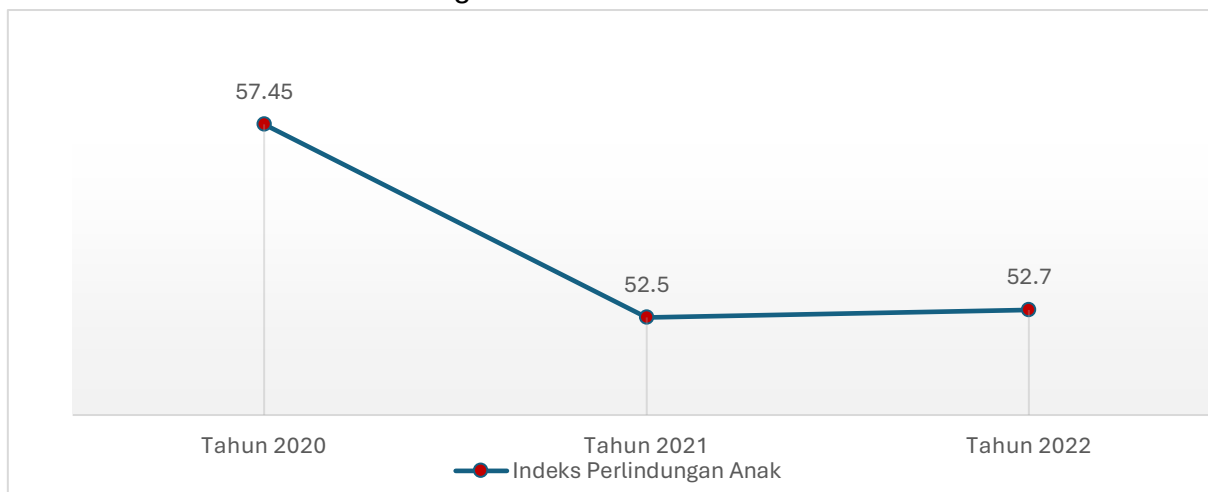
2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak

Anak merupakan aset bangsa, tetapi terkadang posisinya lemah sehingga mesti mendapatkan perlindungan dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Pasalnya, seringkali anak menjadi korban, baik dari keluarga sendiri maupun dari pihak lain di luar keluarganya. Untuk mengukur capaian perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terdapat lima klaster indikator yang membentuk IPA, yaitu 1). hak sipil dan kebebasan, 2). lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3). kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4). pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 5). perlindungan sosial. Upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa sebanyak 13 provinsi pada Tahun 2021 memiliki capaian IPA diatas nasional, sementara Tahun 2022, terdapat 15 provinsi yang memiliki capaian IPA di atas capaian nasional. Tiga provinsi dengan capaian IPA tertinggi Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2021, yaitu Provinsi DIY, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, hanya

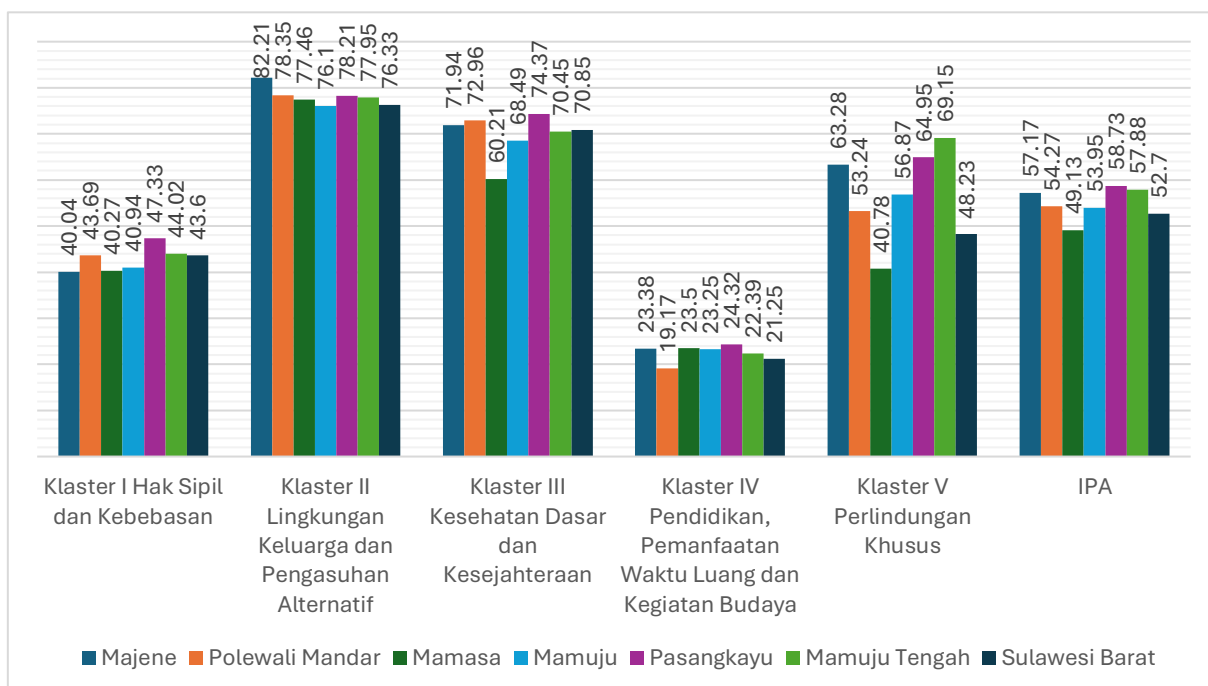
berbeda pada urutan. Provinsi D.I. Yogyakarta berada pada urutan teratas dengan capaian 71,08, kemudian DKI Jakarta (69,12), dan Jawa Timur (66,10). Sementara itu, provinsi dengan capaian IPA terendah selama Tahun 2021-2022 masih didominasi oleh ditempati oleh wilayah Indonesia bagian Timur, dengan tiga terendah pada Tahun 2022, yaitu Papua (43,43), Nusa Tenggara Timur (50,87), dan Sulawesi Barat (52,70).

Grafik 2.38 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Publikasi Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

Grafik 2.39 Hasil capaian IPA menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022

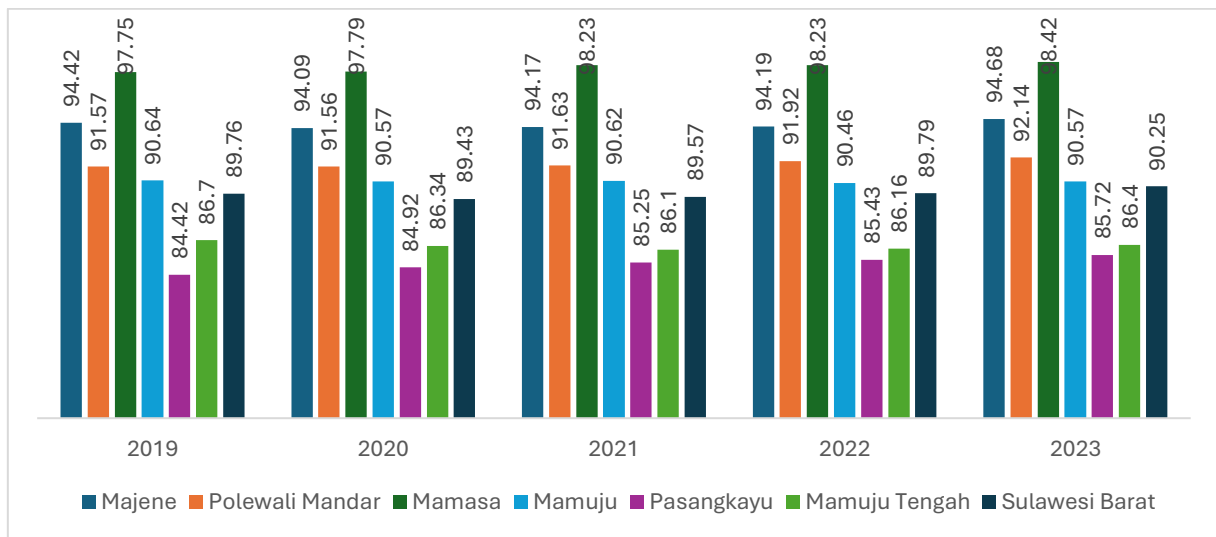


Sumber: Publikasi Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu ukuran Tingkat keberhasilan capaian Pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Isu terkait gender menjadi perhatian Masyarakat terutama yang berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh Perempuan. Kesenjangan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan Perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan data dari BPS, angka IPG Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 sebesar 90,25. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pembangunan Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat masih berada dibawah laki-laki meskipun demikian perkembangan IPG di Provinsi Sulawesi Barat selama lima Tahun terakhir mengalami tren yang meningkat.

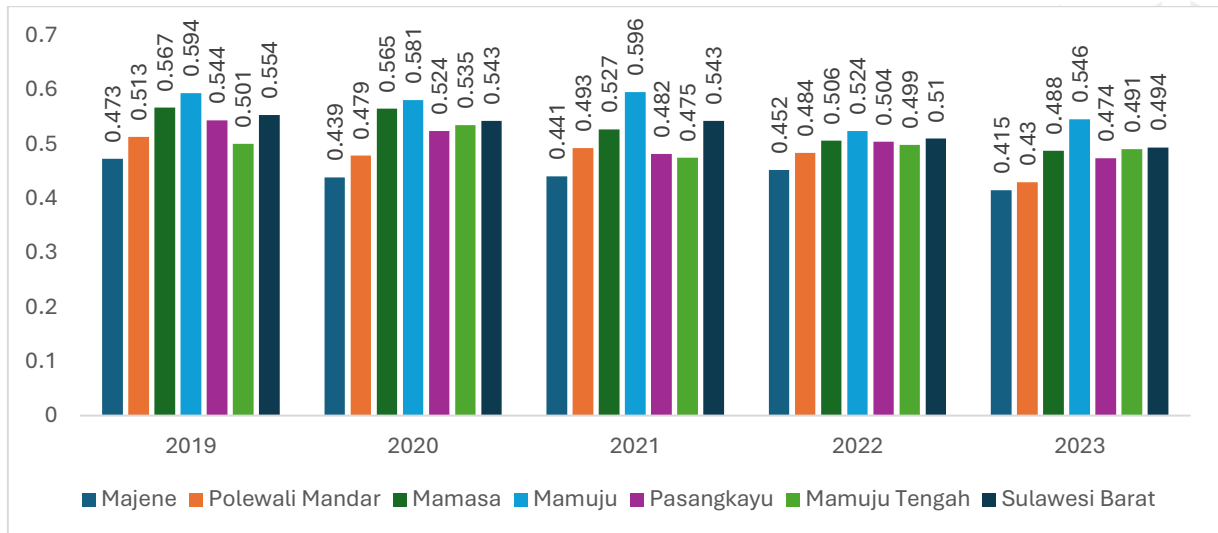
Grafik 2.40 Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Indeks ketimpangan gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Menurut data yang bersumber BPS indeks ketimpangan gender (IKG) di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dengan IKG Tahun 2023 sebesar 0,494 yang menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender.

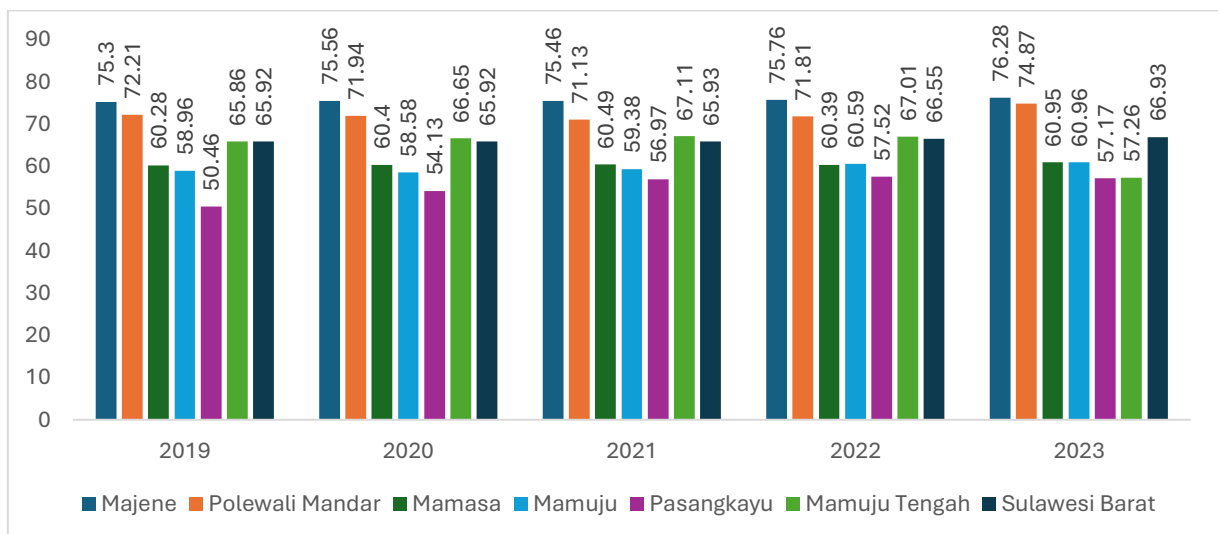
Grafik 2.41 Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Perempuan di Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun (2019-2023) mengalami Peningkatan dan ini menunjukkan bahwa Perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan Ekonomi dan Politik, dan indikator inilah yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.

Grafik 2.42 Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



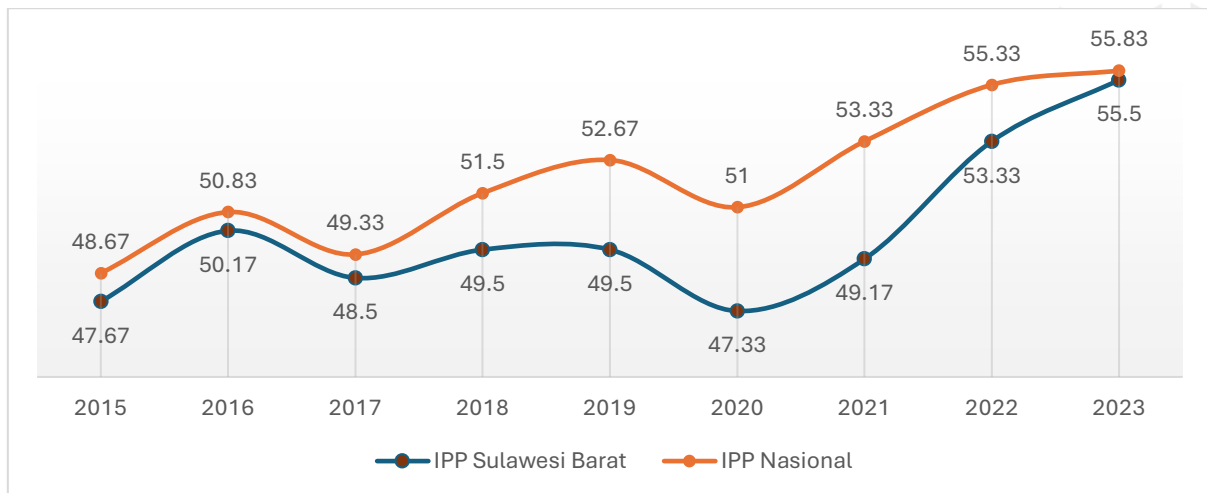
Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan agenda penting yang akan mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Pemuda merepresentasikan masa depan sebuah bangsa dan kelompok yang membawa perubahan. Sebagai generasi pemimpin berikutnya, sangatlah penting bagi kaum muda untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berinovasi. Pemuda yang sehat, sejahtera, berpendidikan, setara, dan partisipatif merupakan faktor yang menentukan potensi dan energi unik yang dapat mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan. Sesuai dengan rentang usia, pemuda merupakan kelompok usia produktif dan inovatif. Menyiapkan pemuda berarti menyiapkan masa depan. Dalam kerangka pembangunan, tidak hanya sebagai objek, pemuda juga merupakan subjek dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dimensi pembangunan pemuda mencakup banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi (sosial dan politik), hingga kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 aspek, yaitu: 1). pembangunan individu, 2). pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan (3) partisipasi dan diskriminasi

Dalam kurun waktu Tahun 2015-2023, IPP Sulawesi Barat masih mengalami Fluktuasi. Jika dibandingkan Tahun 2015, IPP Sulawesi Barat tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu dari 47,67 Poin menjadi 55,5 Poin. Pada Tahun 2020 merupakan angka terendah dalam 9 Tahun terakhir yaitu sebesar 47,33 Poin. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, IPP Sulawesi Barat kembali mengalami Kenaikan. Meskipun mengalami kenaikan, angka IPP Sulawesi Barat masih berada dibawah Nasional yang sebesar 55,83 Poin pada Tahun 2023.

Grafik 2.43 Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat Tahun 2015-2023



Sumber: Laporan IPP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2023

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) telah dirancang berdasarkan kerangka kerja Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam kerangka ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi-dimensi tersebut mencakup Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan pembangunan, tetapi juga memantau kinerja program yang tengah berjalan.

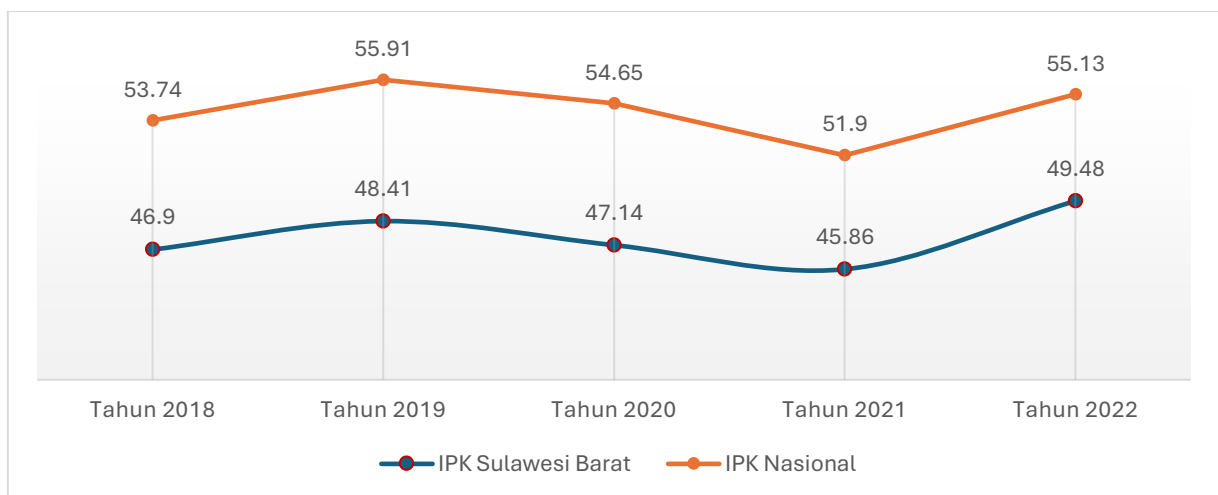
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek bahwa Skor IPK Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari 46,90 Poin di 2018 menjadi 48,41 Poin di 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan hampir seluruh dimensi, kecuali Dimensi Gender yang sedikit mengalami penurunan dari 59,19 Poin ke 57,46 Poin. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya memiliki skor tertinggi. Sebaliknya, Dimensi Ekonomi Budaya menjadi yang terendah.

Pada periode Pandemi Covid-19, Nilai IPK Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dua Tahun berturut-turut hingga titik terendahnya di Tahun 2021, dengan nilai IPK menjadi 45,86 Poin. Selama periode Covid, beberapa dimensi masih mampu

untuk tumbuh di 2020. Bahkan, peningkatan skor Dimensi Budaya Literasi mampu tumbuh lebih dari 3 poin. Lain halnya Dimensi Pendidikan yang sejak awal pandemi mengalami penurunan dari 66,72 Poin menjadi 61,63 Poin. Di Tahun 2021, mayoritas dimensi mengalami kontraksi. Dimensi Ekspresi Budaya turun lebih dari 12 poin. Dimensi Warisan Budaya menjadi salah satu komponen IPK yang tetap tumbuh bersama dengan Dimensi Ekonomi Budaya.

Skor IPK Sulawesi Barat pada 2022 mengalami peningkatan menjadi 49,48 Poin dan menjadi skor tertinggi pada periode Tahun 2018-2022. Seluruh dimensi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan adalah Dimensi Ekonomi Budaya yang naik lebih dari 14 poin. Sejak Tahun pertama IPK dirilis, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya memimpin skor tertinggi. Hal tersebut konsisten hingga Tahun kelima perhitungan IPK. Secara keseluruhan IPK Sulawesi Barat dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 selalu berada dibawah Nasional.

Grafik 2.44 Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat Tahun 2018-2022



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>, diakses Tahun 2024

Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat menurut Dimensi Tahun 2018-2022

Kode	Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022
D1	Ekonomi Budaya	3,72	4,83	1,81	7,03	21,41
D2	Pendidikan	65,54	66,72	61,63	61,22	62,13
D3	Ketahanan Sosial Budaya	76,72	78,28	79,4	71,52	73,00
D4	Warisan Budaya	29,54	31,49	29,87	35,84	37,75
D5	Ekspresi Budaya	32,56	34,13	34,14	21,88	30,29



D6	Budaya Literasi	44,77	47,71	51,07	47,61	50,90
D7	Gender	59,19	57,46	55,25	53,97	55,11
IPK Provinsi		46,90	46,9	48,41	47,14	49,48

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>, diakses Tahun 2024

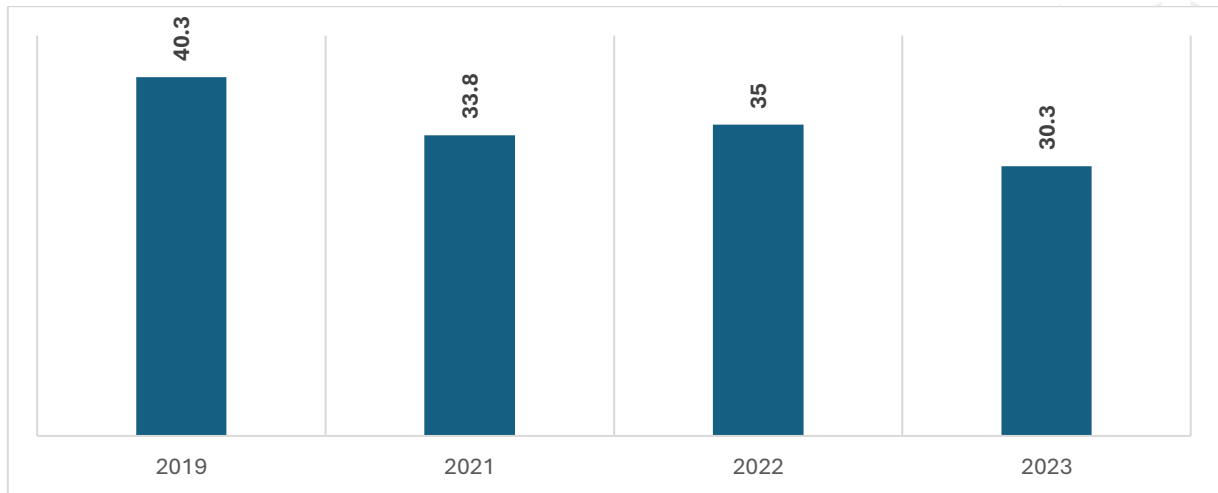
2.2.2.7. Stunting

Penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional dan masih tetap menjadi prioritas dalam jangka panjang. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 30,8 persen pada Tahun 2008 menjadi 19,00 persen pada Tahun 2024. Namun demikian, dalam Musrenbang RKP 2021 pada Bulan April 2020, Presiden menargetkan penurunan stunting ke angka 14 persen pada Tahun 2024. Stunting juga masuk dalam prioritas pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Dalam upaya penanganan stunting, Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah yang menjadi prioritas Nasional karena angka prevalensi stunting-nya termasuk salah satu yang paling tinggi secara Nasional. Berdasarkan hasil SSGI, Tahun 2019, prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat sempat mencapai angka 40,30 persen, menunjukkan bahwa dari 100 orang balita di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 40 orang yang mengalami stunting. Angka itu mengalami penurunan Tahun 2021 menjadi 33,80 persen. Penurunan tersebut tak berlanjut di Tahun 2022, karena alih-alih turun, prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat justru mengalami kenaikan menjadi 35 persen sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 30% persen

Salah satu penyebab tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah tingginya pernikahan dini. Menurut pemerintah dan pemerintah daerah, angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun masih tinggi. Data terbaru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkawinan anak usia 15 hingga 19 Tahun mencapai 1.347 kasus, pada periode Januari hingga Mei 2023. Angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat kini mencapai 17,71 persen, jauh di atas rata-rata Nasional sebesar 9 persen. Dengan demikian, hampir seperlima anak perempuan usia 15 hingga 19 Tahun menikah sebelum usia dewasa, 19 Tahun ke atas.

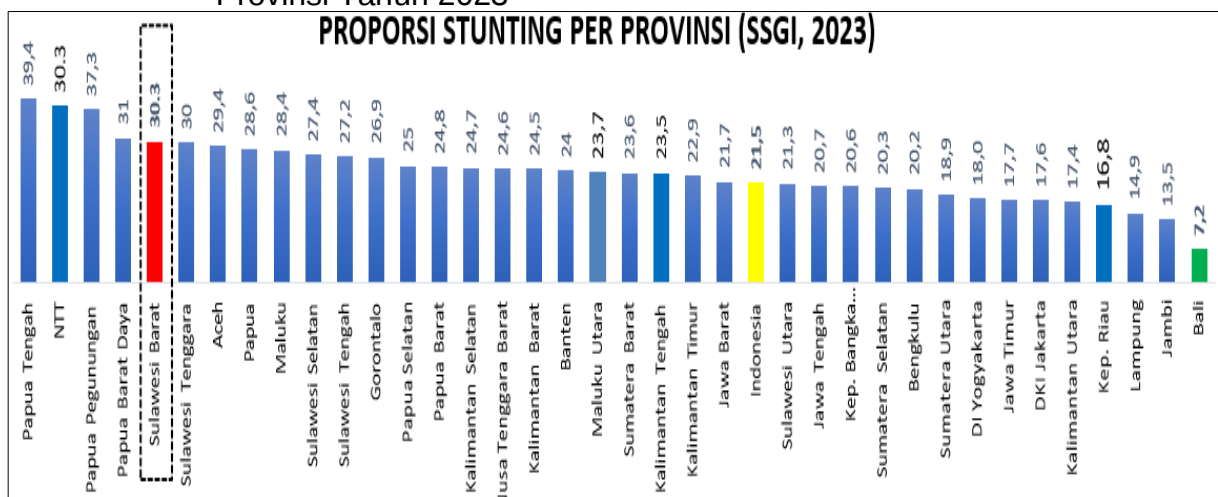
Grafik 2.45 Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: Hasil SSGI

Kenaikan angka prevalensi stunting Tahun 2022 menempatkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan prevalensi kedua tertinggi di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2023 angka prevalensi stunting mengalami penurunan yaitu 30,3 % dan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat turun ke peringkat 5 tertinggi setelah Papua, NTT, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat jauh di atas angka Nasional yaitu 21,5 persen.

Grafik 2.46 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi Tahun 2023



Sumber: Hasil SSGI

Pemerintah dalam Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) menyebutkan dua intervensi penting untuk penanganan stunting yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menyoroti penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Umumnya, intervensi ini dilakukan oleh sektor kesehatan. Dalam intervensi ini, ada tiga kelompok intervensi yaitu Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak langsung pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas; Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak secara tidak langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme perbaikan gizi dan kesehatan, yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi; dan Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu sesuai dengan kondisi, termasuk saat darurat bencana (program gizi darurat).

Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Ketahanan pangan (Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan); (b) Peningkatan akses pangan bergizi; (c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan (d) Peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan. Selain dua intervensi tersebut, bersinergi dalam penanganan stunting juga tak kalah penting. Selama ini penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif mulai dari pusat, daerah hingga tingkat desa belum konvergen, baik dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Hal itu disebabkan salah satunya karena lemahnya sinergi antar stakeholders.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

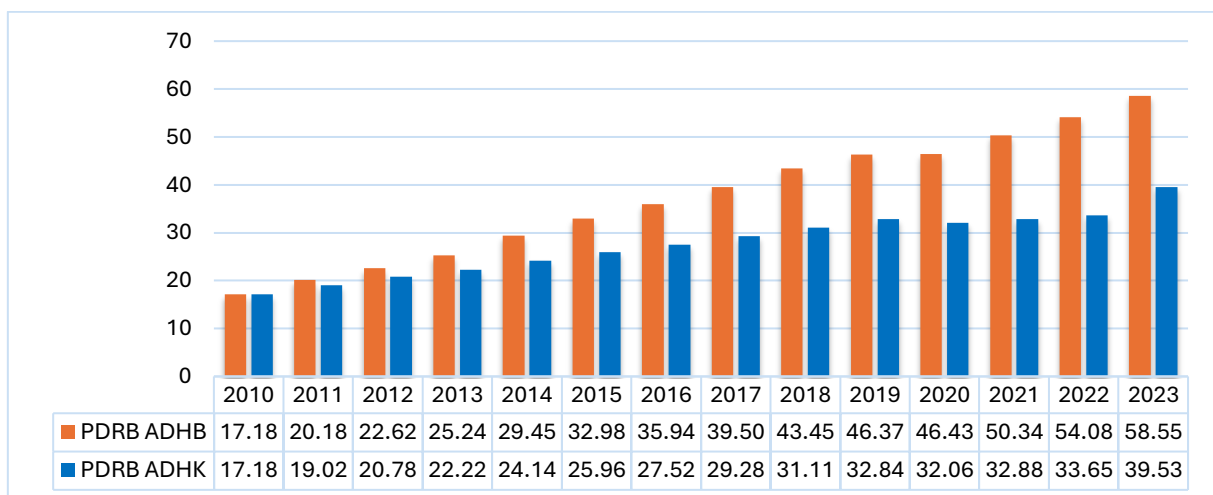
2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator yang digunakan untuk memberi gambaran makro mengenai kemajuan suatu wilayah adalah dengan memperhatikan perubahan PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Seiring dengan pertumbuhan penduduk, nilai PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang

signifikan dari tahun ke tahun. Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat 2023 yang diukur dengan PDRB ADHB mencapai Rp 58,55 Triliun dan PDRB ADHK mencapai Rp 39,53 Triliun. Selama kurang lebih 13 tahun terakhir, PDRB ADHB dan ADHK masing-masing meningkat sebesar Rp 36,88 Triliun dan Rp 16,47 Triliun.

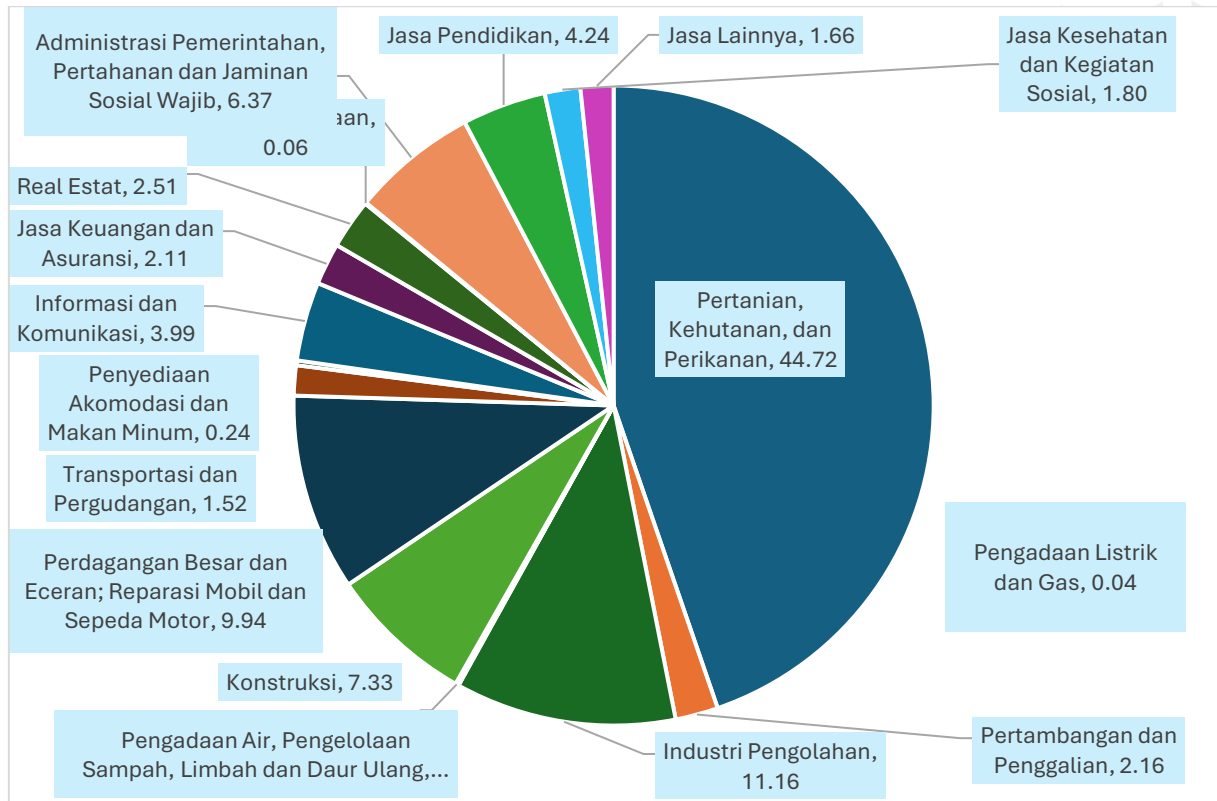
Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan perkembangan aktivitas perekonomian di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Akan tetapi tingginya capaian pertumbuhan ekonomi hendaknya dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat selama 13 tahun terakhir menunjukkan perkembangan aktivitas perekonomian yang semakin baik.

Grafik 2.47 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2010-2023 (dalam Rp Triliun)



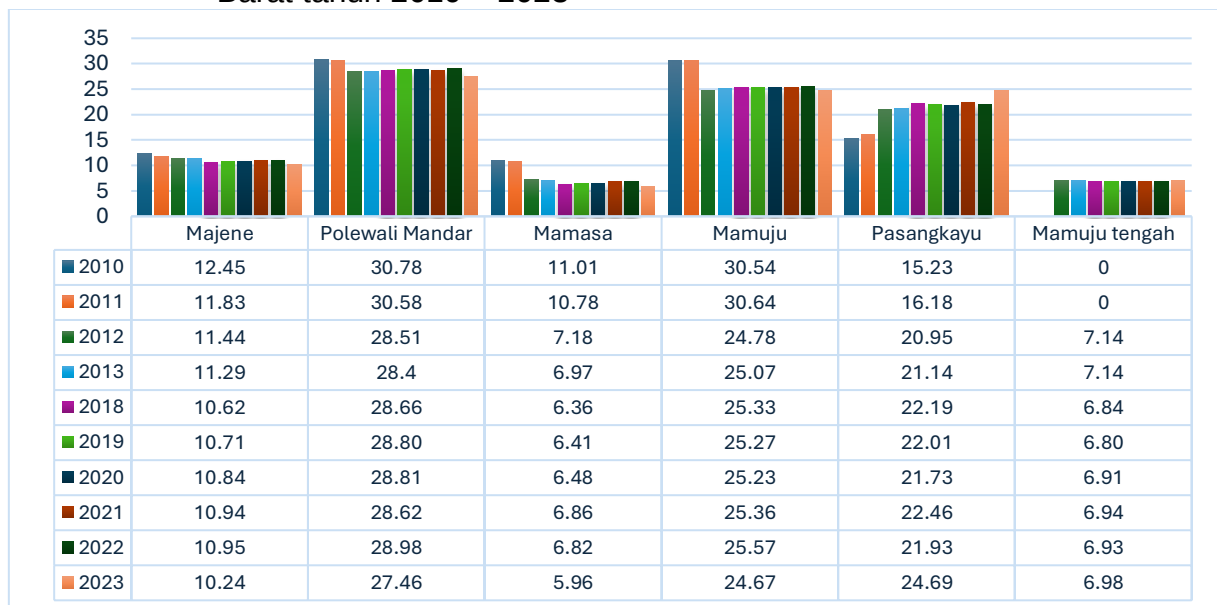
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Grafik 2.48 Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Grafik 2.49 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat



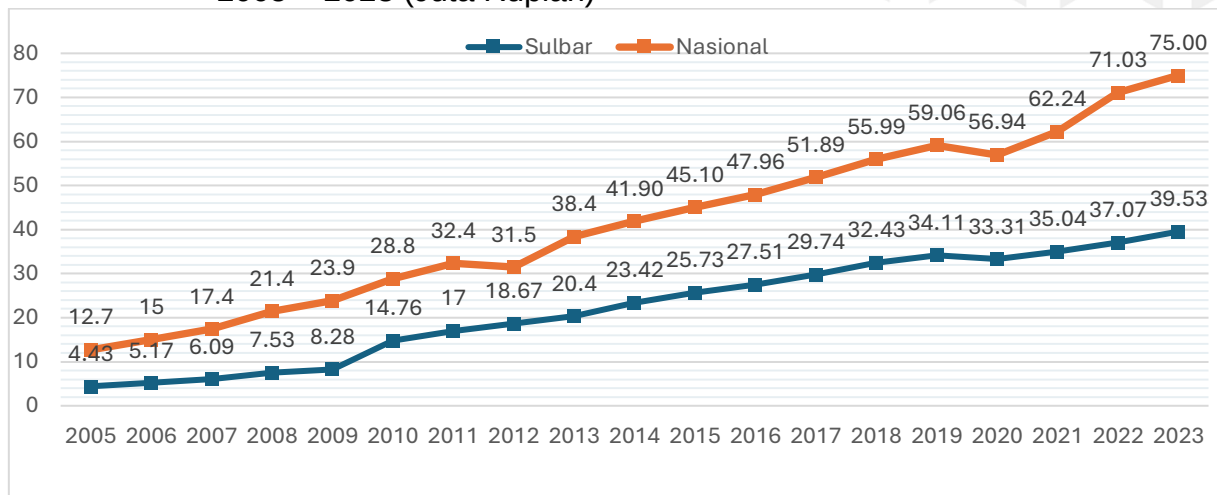
Di tahun 2023, struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 44,72 persen, industri pengolahan sebesar 11,16 persen, dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,94 persen. Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat namun mengalami tren penurunan dimana pada tahun 2010 sektor pertanian berkontribusi sebesar 47 persen. Di sisi lain, sektor industri pengolahan menunjukkan trend peningkatan dimana pada tahun 2010 hanya berkontribusi sebesar 8,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran jenis usaha di masyarakat dan diharapkan proses industrialisasi dapat terus berkembang di Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 27,46 persen di tahun 2023 disusul Kabupaten Pasangkayu sebesar 24,69 persen. Kabupaten Mamasa memiliki kontribusi terendah yakni sebesar 5,96 persen. Kabupaten Pasangkayu walaupun bukan merupakan kabupaten dengan kontribusi terbesar namun hingga tahun 2023 kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan trend peningkatan dibanding daerah lain yang cenderung mengalami penurunan kontribusi dari tahun ke tahun.

2.3.1.2. PDRB Per Kapita

Indikator kesejahteraan suatu daerah adalah angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini dimungkinkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk secara rata-rata, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.

Grafik 2.50 Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2005 – 2023 (Juta Rupiah)



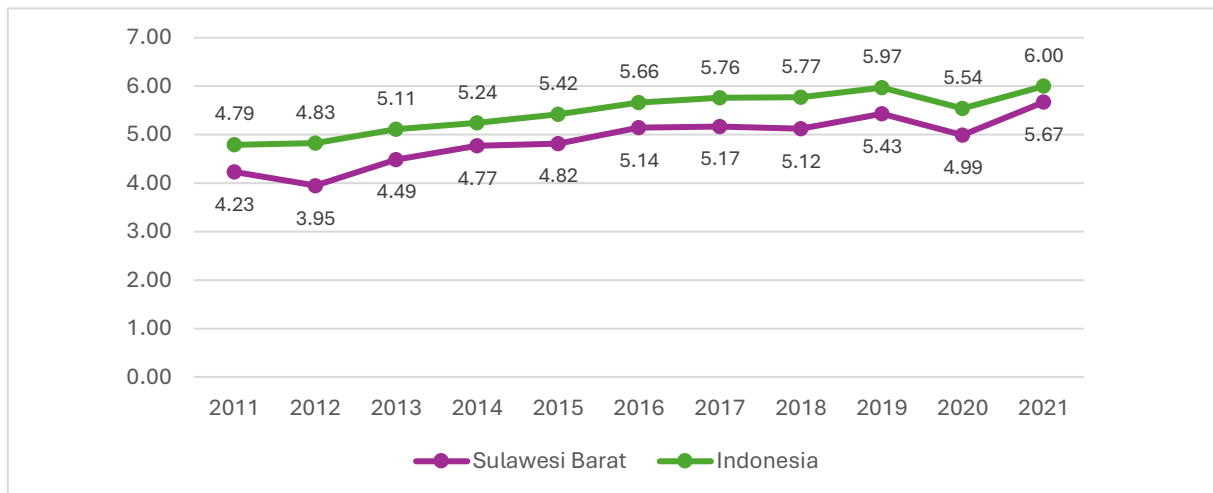
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar Rp 4,43 juta dan kemudian delapan kali lipat menjadi Rp 39,5 juta pada tahun 2023. Meski demikian, angka ini berada jauh dibawah angka Nasional yang telah mencapai Rp 75,0 juta. Rasio pendapatan per kapita antara Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2010 sebesar 51,25 persen kemudian meningkat menjadi 52,71 persen tahun 2023. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat meningkat lebih cepat dibandingkan Nasional.

2.3.1.3. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks ini mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari tiga pilar dan delapan sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Grafik 2.51 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2010-2022



Sumber: Bappenas RI

Jika merujuk pada data yang tersedia, pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat cenderung semakin inklusif. Setidaknya ini bisa diamati dari Indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Sulawesi Barat yang terus meningkat. Pada tahun 2011, indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Sulawesi Barat baru mencatat angka 4,23, kemudian bergerak naik menjadi 5,67 pada tahun 2021. Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah angka Nasional yang telah mencatat angka 6,00 pada tahun 2021.

2.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat.

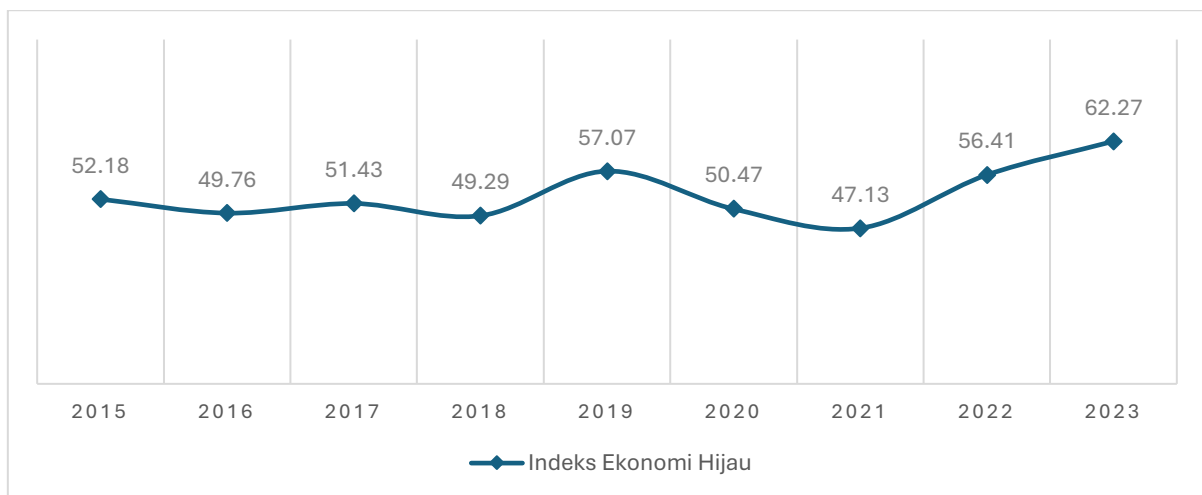
Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi. Hasil akhir dari perhitungan Indeks Ekonomi Hijau provinsi diklasifikasikan menjadi 6 kategori berikut:

- Kategori buruk pada rentang nilai (0,00 – 25,00)
- Kategori sedang tier 1 pada rentang nilai (25,01 – 37,50)
- Kategori sedang tier 2 pada rentang nilai (37,51 – 50,00)
- Kategori baik tier 1 pada rentang nilai (50,01 – 62,50)
- Kategori baik tier 2 pada rentang nilai (62,51 – 75,00)
- Kategori sangat baik pada rentang nilai (75,01 – 100)

Dalam kurun waktu Tahun 2015 hingga Tahun 2023, Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat masih berfluktuatif. Namun jika dibandingkan Tahun 2015, Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat Tahun 2023 mengalami Peningkatan dari 52,18 Poin menjadi 62,26 Poin. Dalam kurun waktu tersebut, Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat stabil berada pada kategori baik, kecuali pada tahun 2016, Tahun 2018, dan Tahun 2021 berada pada kategori sedang.

Grafik 2.52 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2023



Sumber : Bappenas RI, diolah oleh Tim Penyusun

Pada Tahun 2023, Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat sebesar 62,27 Poin. Skor pilar lingkungan sebesar 63,36 Poin atau dalam kategori Baik. Skor pilar ekonomi sebesar 65,63 atau berada pada kategori Baik, dan skor pilar Sosial sebesar 54,48 Poin atau dalam kategori baik.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 2.26 Indikator Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat Tahun 2023

Pilar	No.	Indikator	Unit	Tren positif	Nilai Tahunan	Skor Indeks
					2023	2023
Lingkungan	1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan	%	Naik	49,16	52,51
	2	Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer	%	Naik	22,63	53,88
	3	Kualitas air permukaan pada parameter BOD	mg/l	Turun	3,84	54,00
	4	Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut)	%	Turun	12,42	96,33
	5	Kualitas udara pada parameter NO2	µg/m3	Turun	5,37	92,84
	6	Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	%	Naik	30,03	30,61
		SKOR PILAR LINGKUNGAN:				63,36
Ekonomi	7	Intensitas emisi	Ton CO2e/ Milyar Rupiah (2010)	Turun	32,84	95,96
	8	Intensitas energi final	BOE/Milyar Rupiah (2010)	Turun	85,86	63,13
	9	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per kapita	USD/kapita	Naik	2537,83	44,98
	10	Produktivitas pertanian (padi, kelapa sawit, perikanan budidaya)				42,71
		a. Produktivitas padi	Ton/Ha/tahun	Naik	4,97	74,34
		b. Produktivitas kelapa sawit	Ton/Ha/tahun	Naik	3,50	49,94
		c. Produktivitas perikanan budidaya	Ton/Ha/tahun	Naik	3,62	3,86
	11	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	Rupiah (2010)/orang	Naik	142651778,11	85,32
	12	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	Rupiah (2010)/orang	Naik	82770655,07	61,68
		SKOR PILAR EKONOMI:				65,63
Sosial	13	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Naik	8,13	61,30
	14	Angka harapan hidup	Tahun	Naik	66,06	44,24
	15	Tingkat kemiskinan	%	Turun	11,49	12,38
	16	Tingkat pengangguran	%	Turun	2,27	100,00
		SKOR PILAR SOSIAL:				54,48
SKOR INDEKS EKONOMI HIJAU						62,27

Sumber: Bappenas, diolah oleh tim penyusun

Keterangan:

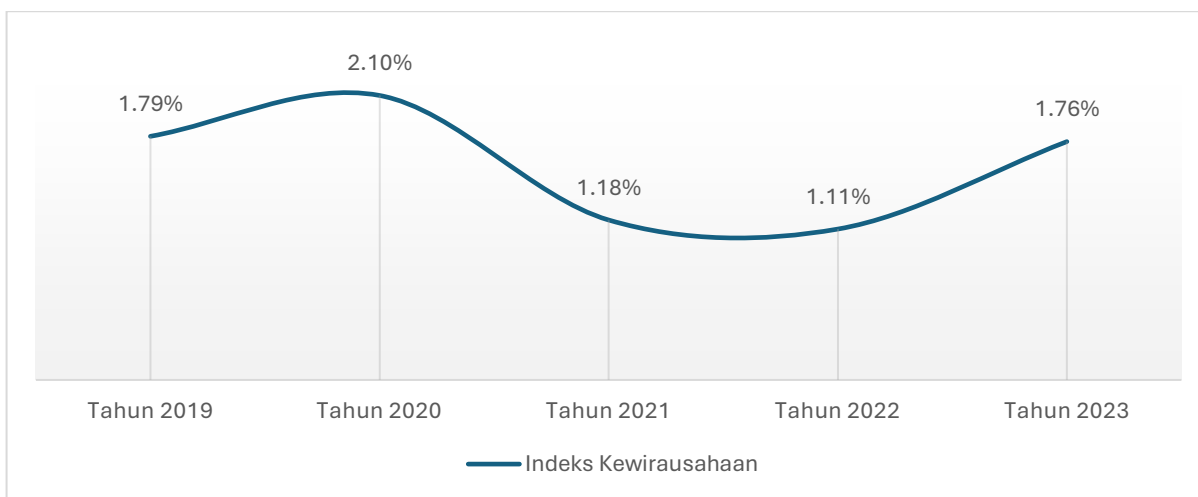
0 – 25 Buruk 25 - 50 Sedang 50 - 75 Baik 75 - 100 Sangat Baik

2.3.1.5. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada Tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Pada Tahun 2019, Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat berada di angka 1,79 Persen. Pada Tahun berikutnya, 2020, indeks ini mengalami peningkatan menjadi 2,10 Persen, yang merupakan puncak tertinggi dalam periode lima Tahun ini. Namun, pada Tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di 1,18 Persen. Pada Tahun 2022, indeks sedikit menurun menjadi 1,11 Persen, sebelum akhirnya naik kembali ke 1,76 Persen pada Tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan fluktuasi dalam aktivitas kewirausahaan selama lima Tahun terakhir, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan.

Grafik 2.53 Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



Sumber : sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024, diolah

2.3.2. Daya Saing SDM

2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu variabel pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam indeks pendidikan sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa.

Tabel 2.27 Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024

Uraian		2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan					
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,96	8,08	8,13	-
2	Harapan Lama Sekolah	12,86	12,87	12,88	-
3	Melek Huruf	90,54	99,76	99,84	-
4	Literasi:				
	SMA N/S	1,65	1,67	46,74	59,19
	SMK N/S	,65	1,65	31,11	47,2
5	Numerasi:				
	SMA N/S	1,61	1,59	36,19	55,46
	SMK N/S	1,56	1,59	26,83	46,64
6	SMA N/S				
	Iklim Keamanan Sekolah	Belum diukur	2,17	68,58	70,89
	Iklim Kebhinekaan	Belum diukur	2,01	67,01	73,03
	Inklusifitas	Belum diukur	1,77	55,12	56,00
7	SMK N/S				
	Iklim Keamanan Sekolah	Belum diukur	2,02	66,13	68,17
	Iklim Kebhinekaan	Belum diukur	2,07	64,93	67,73
	Inklusifitas	Belum diukur	1,08	53,96	53,39
8	Penyerapan Lulusan SMK	31,83	28,94	82,39	85,74
9	Kepuasan Dunia Kerja	57,01	57,01	57,01	46,21
10	APS 4-18	36,04	-	15,48	20,51
11	APS 16-18	71,22	-	70,88	71,57
12	APS 5-6	-	-	78,07	81,95
13	APS 7-15	-	-	95,41	95,57

2.3.2.2. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi adalah indikator yang mengukur kemampuan dasar seseorang dalam hal membaca, menulis, dan memahami angka. Ini sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama untuk menilai keterampilan siswa dalam memahami teks (literasi) dan melakukan perhitungan atau pemahaman kuantitatif (numerasi). Angka Literasi Merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan menganalisis teks. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga mencakup pemahaman dan kemampuan berpikir kritis dalam menafsirkan

informasi yang ada dalam teks. Pada siswa, angka literasi diukur untuk mengetahui seberapa baik mereka dalam memahami bacaan dan menerapkannya dalam konteks sehari-hari.

Angka Numerasi Mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan konsep-konsep matematika dasar, seperti operasi angka, pengukuran, dan pemecahan masalah sederhana. Numerasi tidak hanya melibatkan perhitungan matematis, tetapi juga keterampilan untuk menerapkan konsep angka dalam kehidupan sehari-hari, seperti memahami grafik, statistik, atau perbandingan. Secara keseluruhan, angka literasi dan numerasi digunakan untuk melihat seberapa siap seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari yang memerlukan pemahaman teks dan keterampilan matematika dasar. Di sekolah, indikator ini juga berfungsi sebagai salah satu alat evaluasi kualitas pendidikan dan perkembangan kemampuan siswa dalam dua bidang yang sangat mendasar tersebut.

Tabel 2.28 Angka Literasi/Numerasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Angka Literasi/Numerasi				
Literasi :				
SMA N/S	1,65	1,67	46,74	59,19
SMK N/S	,65	1,65	31,11	47,2
Numerasi :				
SMA N/S	1,61	1,59	36,19	55,46
SMK N/S	1,56	1,59	26,83	46,64

Berdasarkan data yang ditampilkan, berikut adalah narasi mengenai angka literasi dan numerasi untuk siswa SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, angka literasi berada di angka 1,65 dan sedikit meningkat menjadi 1,67 pada tahun 2022. Kemudian, terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 46,74. Pada tahun 2024, angka ini terus meningkat tajam menjadi 59,19. Sedangkan pada tahun 2021, angka literasi di SMK N/S berada pada 0,65 dan naik menjadi 1,65 pada tahun 2022. Di tahun 2023, angka ini mengalami kenaikan yang signifikan ke 31,11. Pada tahun 2024, angka literasi SMK N/S kembali meningkat menjadi 47,2.

Angka Numerasi di tahun 2021, mencapai 1,61 dan menurun sedikit menjadi 1,59 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan tajam ke 36,19. Pada tahun 2024, angka ini meningkat lagi menjadi 55,46. Sedangkan untuk SMK Pada tahun 2021, angka numerasi berada di 1,56 dan stabil di 1,59 pada tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan kenaikan signifikan hingga 26,83. Di tahun 2024, angka ini terus meningkat menjadi 46,64.

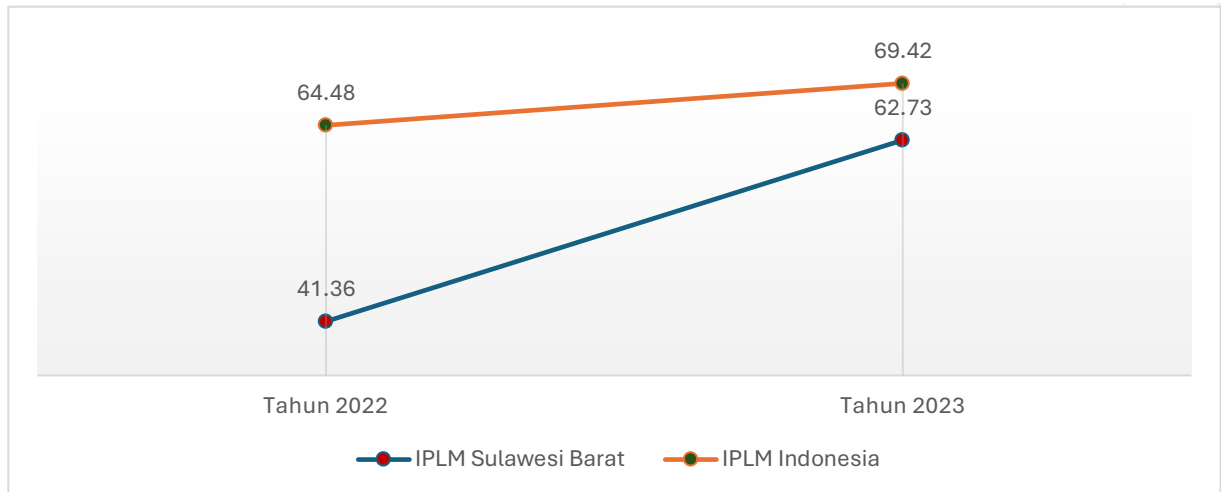
Secara keseluruhan, baik angka literasi maupun numerasi di tingkat SMA dan SMK mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan ini terutama terlihat jelas mulai tahun 2023, menunjukkan adanya upaya atau kebijakan yang berdampak pada perbaikan kemampuan literasi dan numerasi siswa di kedua jenjang pendidikan tersebut.

2.3.2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional menggambarkan usaha yang telah dilaksanakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM nasional akan menjadi bahan evaluasi dalam mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam meningkatkan pembangunan literasi Masyarakat. IPLM dibentuk dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat/hari, Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan.

Pada Tahun 2022, IPLM Sulawesi Barat berada di angka 41,36 poin (Kategori rendah). Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan di Sulawesi Barat dengan IPLM mencapai 62,73 Poin atau masuk dalam kategori sedang namun masih dibawah capaian Nasional yaitu 69,42 poin. Peningkatan yang lebih tajam di Sulawesi Barat menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan literasi di wilayah tersebut, meskipun masih ada kesenjangan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dan potensi untuk terus meningkatkan literasi di masa depan.

Grafik 2.54 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Barat Tahun 2022-2023



Sumber: Publikasi Perpustakaan Nasional Laporan Akhir IPLM Tahun 2022-2023

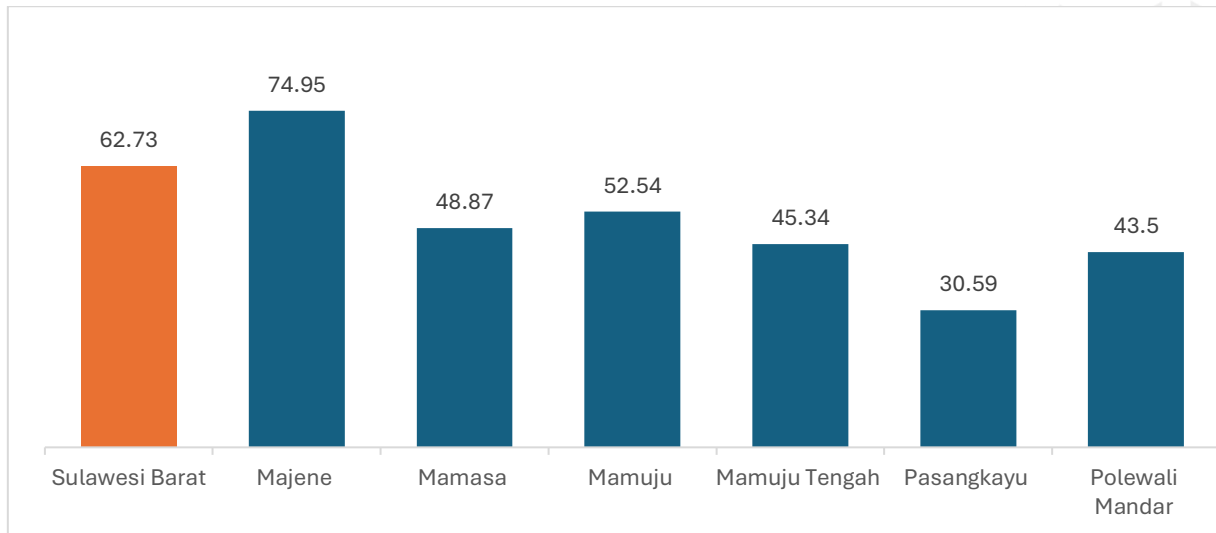
Tabel 2.29 Rekapitulasi UPLM per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023

PROVINSI/KAB	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
SULAWESI BARAT	0,3323	0,4918	0,8656	0,0540	0,6475	1,0000	1,0000	62,73
Majene	0,9927	0,3293	1,0000	0,0443	0,8801	1,0000	1,0000	74,95
Mamasa	0,1199	0,3636	0,3604	0,2421	0,3350	1,0000	1,0000	48,87
Mamuju	0,2888	0,2117	0,1838	0,0436	0,9503	1,0000	1,0000	52,54
Mamuju Tengah	0,3523	0,3858	0,1428	0,0375	0,2552	1,0000	1,0000	45,34
Mamuju Utara	0,3553	0,0951	0,0252	0,0038	0,0000	1,0000	0,6621	30,59
Polewali Mandar	0,1993	0,9474	0,1223	0,0243	0,5972	0,1545	1,0000	43,50

Sumber: Publikasi Perpustakaan Nasional Laporan Akhir IPLM Tahun 2023

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sulawesi Barat untuk Tahun 2023 berdasarkan kabupaten menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten. Dua Kabupaten dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kabupaten Majene 74,95 Poin dan Kabupaten Mamuju 52,54 Poin, sedangkan dua kabupaten dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kabupaten Mamuju Utara 30,59 Poin dan Kabupaten Polewali Mandar 43,50 Poin.

Grafik 2.55 Skor IPLM menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2023



Sumber: Publikasi Perpustakaan Nasional Laporan Akhir IPLM Tahun 2023

2.3.2.4. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan aman. Di Indonesia, pengukuran indeks ini dilakukan berdasarkan empat pilar utama yaitu Digital Skill (Keterampilan Digital), Digital Ethics (Etika Digital), Digital Safety (Keamanan Digital), dan Digital Culture (Budaya Digital). Setiap pilar memiliki peran penting dalam membentuk literasi digital yang komprehensif:

1. Keterampilan Digital: Mengukur kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital dan aplikasi untuk berbagai keperluan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi.
2. Etika Digital: Menilai pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi, termasuk privasi, hak cipta, dan perilaku online yang baik.
3. Keamanan Digital: Mengukur kesadaran dan tindakan individu dalam menjaga keamanan data pribadi dan menghindari ancaman cyber.
4. Budaya Digital: Menilai sejauh mana teknologi digital telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 0,24 poin pada Tahun 2021. Meskipun demikian, provinsi ini tetap berupaya

meningkatkan literasi digital masyarakatnya melalui berbagai program dan inisiatif. Penurunan skor ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Barat dalam meningkatkan literasi digital mereka. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penurunan ini termasuk akses yang terbatas ke teknologi, kurangnya pelatihan dan pendidikan digital, serta kesadaran yang rendah tentang pentingnya keamanan digital.

Tabel 2.30 Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2021	3,54	Skor Indeks 2022	3,49

Sumber: Kominfo, Publikasi Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2021-2022

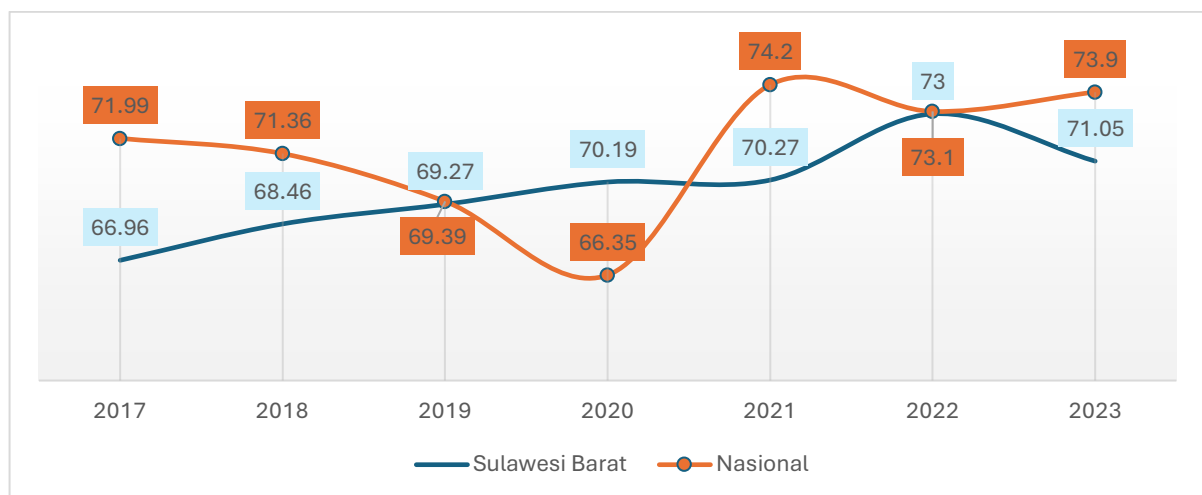
2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sering digunakan untuk menilai seberapa banyak orang dalam kelompok usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dalam kegiatan produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka semakin tinggi pula

partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan produktif, sehingga semakin besar potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja Sulawesi Barat masih mengalami tren kenaikan yang stabil kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Tingkat partisipasi Sulawesi Barat mengalami kenaikan tren dari 66,96 persen pada tahun 2017 menjadi 73 persen pada tahun 2022. Namun, pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 71,05 Persen, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi atau sosial. Perubahan ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja di Sulawesi Barat selama Tujuh Tahun terakhir. Kondisi Tingkat partisipasi angkatan kerja Sulawesi Barat berada dibawah Nasional kecuali pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang sempat berada diatas Nasional.

Grafik 2.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sulawesi Barat Tahun 2017-2023



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

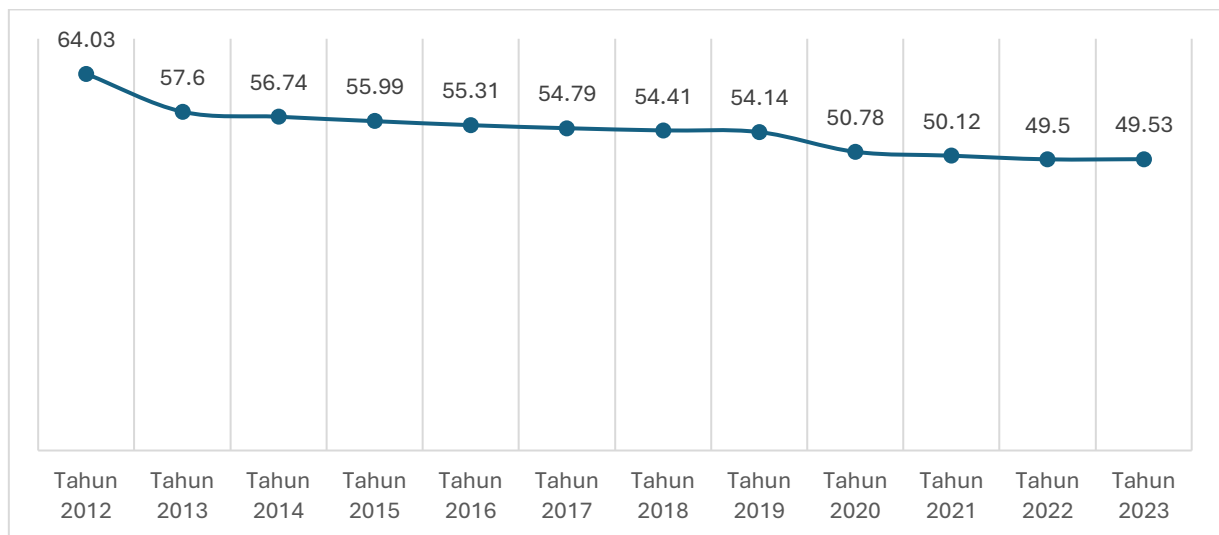
2.3.2.6. Angka Ketergantungan

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 Tahun dan 65 Tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 Tahun). Angka ini menjadi parameter penting untuk mengukur seberapa besar beban penduduk usia produktif dalam menanggung kehidupan penduduk usia belum dan tidak produktif.

Dalam kurun waktu Tahun 2012 hingga Tahun 2022, angka beban tanggungan Provinsi Sulawesi Barat stabil mengalami penurunan kecuali pada Tahun

2023 yang mengalami sedikit kenaikan. pada Tahun 2012 angka beban tanggungan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 64,03 Persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 Orang penduduk usia produktif harus menanggung 64 Orang penduduk usia belum dan tidak produktif mengalami penurunan menjadi 49,5 Persen pada Tahun 2022. Namun mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 49,53 Persen.

Grafik 2.57 Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2023



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Rasio ketergantungan yang rendah diinginkan oleh semua negara/daerah karena itu menunjukkan bahwa ada proporsional lebih banyak orang dewasa usia kerja yang dapat mendukung penduduk yang belum atau tak lagi bekerja (pensiun). Hal ini pada gilirannya menguntungkan sistem perawatan kesehatan dan program pensiun negara-negara dengan beban ketergantungan rendah. Selain itu, beban tanggungan juga berbanding terbalik dengan produktivitas penduduk usia kerja, semakin rendah beban tanggungan maka semakin tinggi produktivitas.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

2.3.3.1. Indeks Infrastruktur

Secara konseptual, Indeks Infrastruktur diperoleh dari lima indikator komposit, yaitu persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap listrik, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi (akses internet), dan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi. Di dalam perhitungan Indeks Infrastruktur, semua indikator memiliki bobot yang sama sehingga nilai Indeks Infrastruktur diperoleh dari penjumlahan angka kelima indikator lalu kemudian dibagi lima.

Selama periode 2019-2023, Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan secara konsisten. Indeks Infrastruktur bergerak naik dari 68,38 pada Tahun 2019 menjadi 77,94 pada Tahun 2023. Peningkatan paling signifikan terjadi pada Tahun 2021 akibat adanya peningkatan berarti pada beberapa indikator, yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi (akses internet).

Tabel 2.31 Indeks Infrastruktur menurut Komposit Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

No	Indikator Infrastruktur	2019	2020	2021	2022	2023	Sumber data
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	37,24	38,58	42,18	41,37	45,84	Dinas PUPR Prov. Sulbar
2	Persentase RT yang memiliki akses terhadap air minum layak	74,14	75,79	78,35	78,98	79,86	BPS Sulawesi Barat
3	Persentase RT yang memiliki akses terhadap listrik	98,03	87,80	99,14	99,32	98,71	Dinas ESDM Prov. Sulbar
4	Persentase RT yang memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi (akses internet)	59,09	66,03	75,32	82,09	84,56	Buku Statistik Indonesia
5	Persentase RT yang memiliki sanitasi	73,39	77,07	80,12	78,88	80,73	BPS Sulawesi Barat
	Indeks Infrastruktur	68,38	69,05	75,02	76,128	77,94	

Catatan: Indeks Infrastruktur dihitung oleh Tim Penyusun

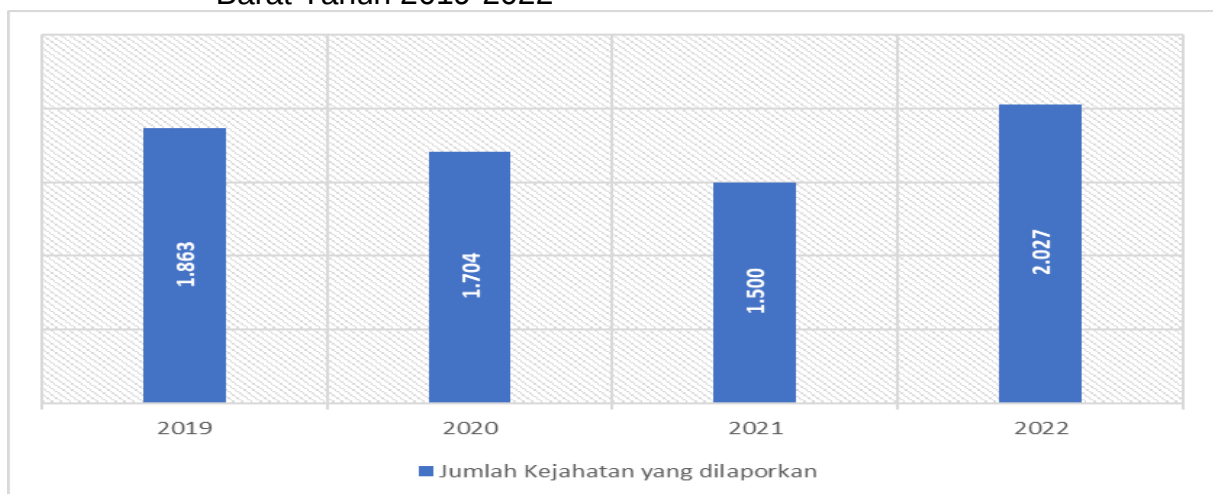
Masih rendahnya Indeks Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat terutama disebabkan oleh rendahnya indikator persentase panjang jalan dalam kondisi mantap yang baru mencapai 45,84 persen pada Tahun 2023, yang juga sekaligus menjadi indikator dengan nilai terendah dari lima indikator komposit. Sedangkan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik merupakan indikator dengan kinerja terbaik, yaitu mencapai 98,71 persen pada Tahun 2023.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas termasuk bagian dalam aspek daya saing yang berkaitan dengan variabel-variabel pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dari Universitas Gadjah Mada dan Diky Bintang Prakoso dari Institut Pertanian Bogor menemukan kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, kemiskinan dan aksesibilitas internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, sementara pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, dan pelaporan dan penanganan polisi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas (Kurniawan, 2020). Temuan Diky Bintang Prakoso (2016) mencatat bahwa provinsi dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, variabel tingkat ketidakamanan, PDRB perkapita konstan dan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap angka kriminalitas sedangkan persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan untuk kelompok provinsi dengan ketimpangan tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pada kelompok provinsi dengan ketimpangan pendapatan rendah, variabel tingkat ketidakamanan dan PDRB per kapita konstan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas sedangkan variabel persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap angka kriminalitas pada kelompok provinsi ini.

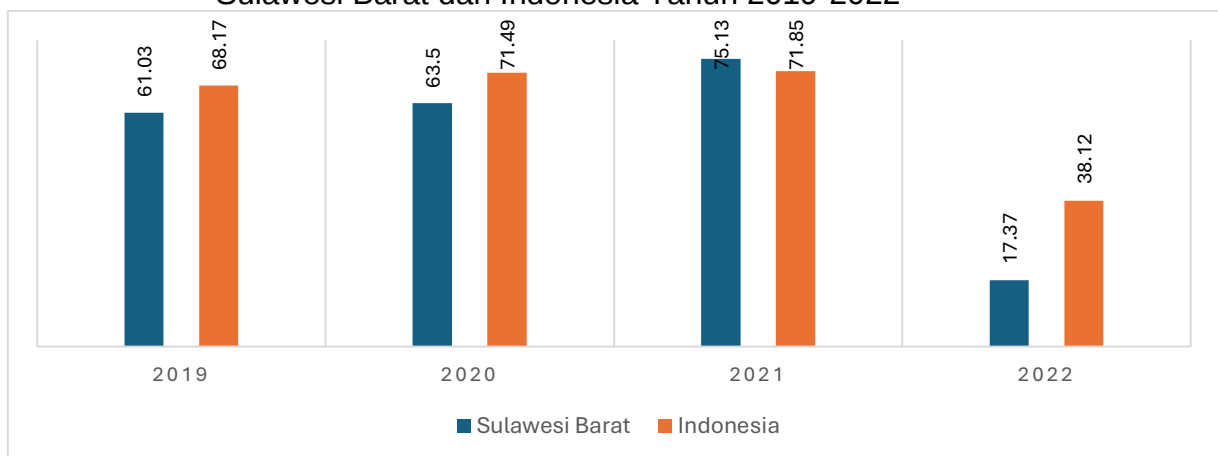
Grafik 2.58 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Polda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2022



Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

Publikasi Statistik Kejahatan yang diterbitkan oleh BPS mencatat jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2019 sebanyak 1.863 laporan, tapi dua Tahun setelahnya stabil mengalami penurunan masing-masing di Tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah laporan sebanyak 1.704 laporan dan 1.500 laporan. Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 termasuk tiga terendah di Indonesia bersama dengan Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Pada Tahun 2022 Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 2.027 Laporan. Secara Nasional, Sulawesi Barat merupakan salah satu dari tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit.

Grafik 2.59 Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

Dari total kejahatan yang dilaporkan, sebagian besar sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dapat dilihat dari indikator persentase penyelesaian kejahatan (clearance rate) di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sepanjang Tahun 2019 hingga 2022. Tahun 2019 hingga 2021, tingkat penyelesaian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan walaupun masih berada dibawah Nasional. menunjukkan bahwa lebih dari setengah laporan kejahatan yang masuk di kantor polisi berhasil diselesaikan. namun pada Tahun 2022 baik secara Nasional maupun Sulawesi Barat mengalami penurunan. Suatu tindak kejahatan dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:



1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
2. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas plichtmatigheid (kewajiban berdasarkan
4. Kewenangan hukum);
5. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian;
6. Tersangka meninggal dunia;
7. Kasus kadaluarsa.

Tabel 2.32 Proporsi Kejadian Kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Tahun 2022

No	Klasifikasi Kejahatan	Jumlah Kejahatan	Persentase
1	Kejahatan terhadap Nyawa	5	0,47
2	Kejahatan terhadap Fisik/ Badan	287	27,00
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	40	3,76
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	9	0,85
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	4	0,38
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	434	40,83
7	Kejahatan Terkait Narkotika	138	12,98
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	146	13,73
	Total Kejahatan	1063	100,00

Sumber : Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

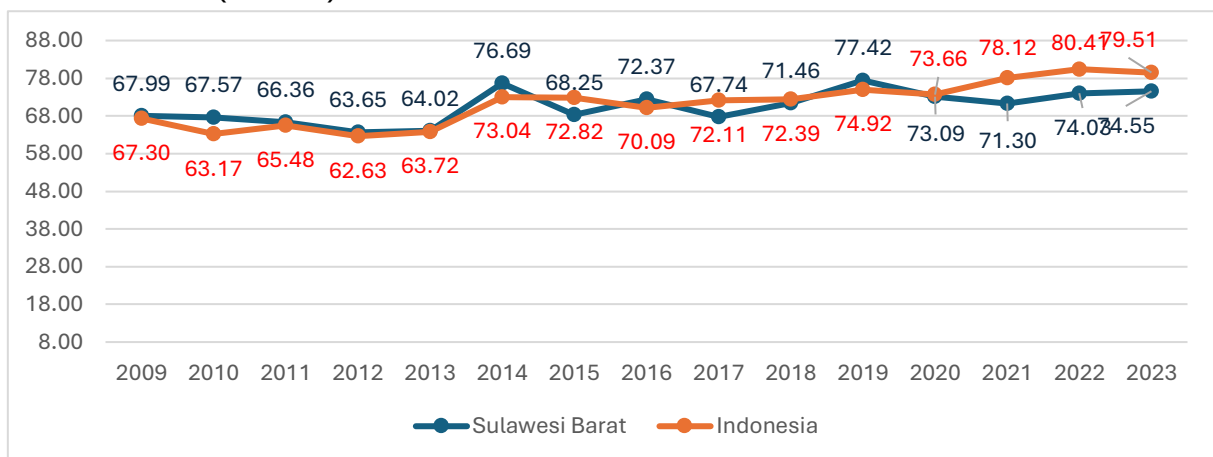
Sebagian besar kasus kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat merupakan kasus kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (Senpi), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (Sajam). Tahun 2022, proporsi kasus kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan mencapai 40,83 persen dari total kasus kejadian kejahatan atau setara dengan 1063 kejadian kejahatan. Tiga kasus kejahatan yang proposinya juga relatif tinggi adalah kejahatan terhadap fisik/badan, penipuan, penggelapan, dan

korupsi, dan Narkotika. Ketiga kasus ini berkontribusi masing-masing 27 persen, 13,73 persen, dan 12,98 persen terhadap total kejadian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat.

2.3.4.2. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Provinsi adalah sebuah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat demokrasi dalam sebuah negara. Indeks ini menggambarkan seberapa baik sebuah negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan sipil, proses pemilihan umum yang adil, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan media, dan partisipasi politik masyarakat. Pada Tahun 2023 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Naik menjadi 74,55 Poin dari 74,03 poin dari Tahun 2022 atau naik sebesar 0,53 Poin. Perkembangan Indeks Provinsi Sulawesi Barat merupakan gambaran kondisi demokrasi Indonesia melalui 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Grafik 2.60 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2009–2023 (Persen)



Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak Tahun 2009 (IDI 2009). Pada Tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial.

Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:

1. IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi)
2. IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga)
3. IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat)

IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: 1. Aspek Kebebasan (7 indikator); 2. Aspek Kesenjangan (7 indikator); 3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). IDI dikategorikan kedalam 3 kategori yaitu Kategori Tinggi (>80), Kategori Sedang (60-80), dan Kategori Rendah (<60).

Tabel 2.33 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek 2019–2023

Aspek IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kebebasan Politik	81.58	86.38	67,24	67,78	74,87
Hak-Hak Politik	70.22	61.09	81,75	83,46	81,68
Lembaga Demokrasi	83.60	75.45	62,80	68,90	65,72
Indeks Keseluruhan	77.42	73.09	71,30	74,03	74,55

Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024

Tabel ini menunjukkan Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019 hingga 2023, berdasarkan beberapa aspek: Kebebasan Politik, Hak-Hak Politik, Lembaga Demokrasi, dan Indeks Keseluruhan. Pada aspek Kebebasan Politik, Pada Tahun 2019, indeks ini berada di angka 81,58. Pada Tahun 2020, meningkat menjadi 86,38, namun mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 menjadi 67,24. Pada Tahun 2022, indeks ini sedikit naik menjadi 67,78 dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 74,87. Pada aspek Hak-Hak Politik, Indeks ini dimulai dari 70,22 pada Tahun 2019, turun menjadi 61,09 pada Tahun 2020, kemudian naik signifikan pada Tahun 2021 menjadi 81,75. Pada Tahun 2022, indeks ini mencapai 83,46 dan sedikit menurun menjadi 81,68 pada Tahun 2023. Pada aspek Lembaga Demokrasi, Pada Tahun 2019, indeks ini berada di angka 83,60. Pada Tahun 2020, turun menjadi 75,45 dan terus menurun pada Tahun 2021 menjadi 62,80.

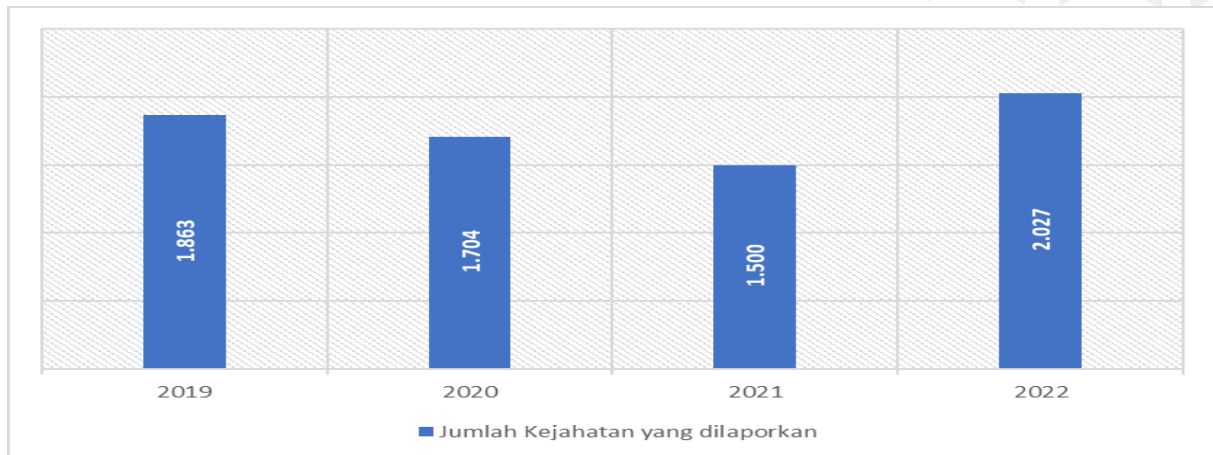
Pada Tahun 2022, indeks ini naik menjadi 68,90 dan sedikit menurun menjadi 65,72 pada Tahun 2023.

Indeks Demokrasi secara keseluruhan dimulai dari 77,42 pada Tahun 2019, turun menjadi 73,09 pada Tahun 2020, dan terus menurun menjadi 71,30 pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022, indeks ini naik menjadi 74,03 dan sedikit meningkat menjadi 74,55 pada Tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan dinamika demokrasi di Sulawesi Barat selama lima Tahun terakhir, dengan fluktuasi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan sosial.

2.3.4.3. Angka Kriminalitas

Kriminalitas termasuk bagian dalam aspek daya saing yang berkaitan dengan variabel-variabel pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dari Universitas Gadjah Mada dan Diky Bintang Prakoso dari Institut Pertanian Bogor menemukan kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, kemiskinan dan aksesibilitas internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, sementara pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, dan pelaporan dan penanganan polisi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas (Kurniawan, 2020). Temuan Diky Bintang Prakoso (2016) mencatat bahwa provinsi dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, variabel tingkat ketidakamanan, PDRB perkapita konstan dan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap angka kriminalitas sedangkan persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan untuk kelompok provinsi dengan ketimpangan tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pada kelompok provinsi dengan ketimpangan pendapatan rendah, variabel tingkat ketidakamanan dan PDRB per kapita konstan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas sedangkan variabel persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap angka kriminalitas pada kelompok provinsi ini.

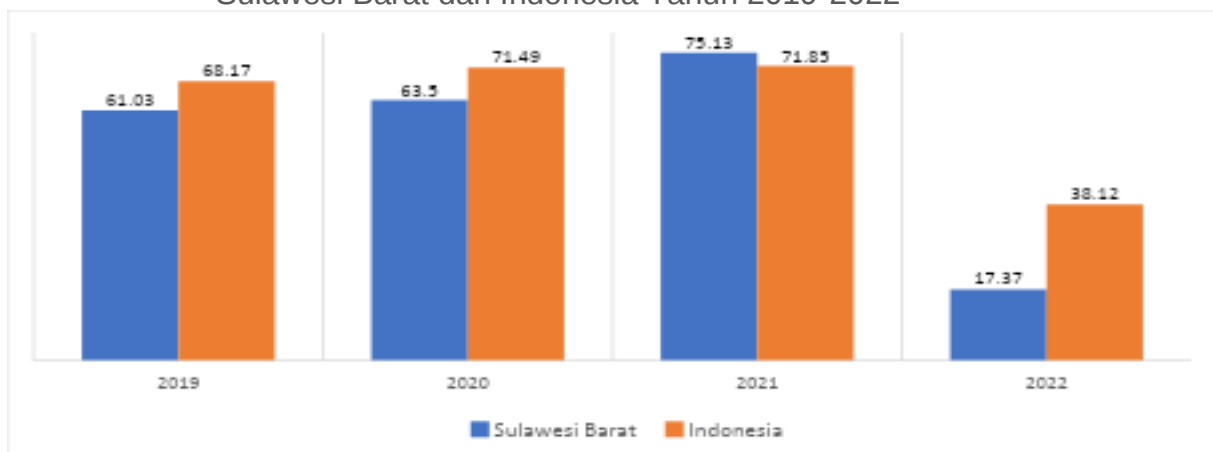
Grafik 2.61 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Polda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

Publikasi Statistik Kejahatan yang diterbitkan oleh BPS mencatat jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2019 sebanyak 1.863 laporan, tapi dua Tahun setelahnya stabil mengalami penurunan masing-masing di Tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah laporan sebanyak 1.704 laporan dan 1.500 laporan. Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 termasuk tiga terendah di Indonesia bersama dengan Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Pada Tahun 2022 Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 2.027 Laporan. Secara Nasional, Sulawesi Barat merupakan salah satu dari tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit.

Grafik 2.62 Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

Dari total kejahatan yang dilaporkan, sebagian besar sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dapat dilihat dari indikator persentase penyelesaian kejahatan (clearance rate) di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sepanjang Tahun 2019 hingga 2022. Tahun 2019 hingga 2021, tingkat penyelesaian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan walaupun masih berada dibawah Nasional. menunjukkan bahwa lebih dari setengah laporan kejahatan yang masuk di kantor polisi berhasil diselesaikan. namun pada Tahun 2022 baik secara Nasional maupun Sulawesi Barat mengalami penurunan. Suatu tindak kejahatan dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
2. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas plichtmatigheid (kewajiban berdasarkan
4. Kewenangan hukum);
5. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian;
6. Tersangka meninggal dunia;
7. Kasus kadaluarsa.

Tabel 2.34 Proporsi Kejadian Kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Tahun 2022

No	Klasifikasi Kejahatan	Jumlah Kejahatan	Persentase
1	Kejahatan terhadap Nyawa	5	0,47
2	Kejahatan terhadap Fisik/ Badan	287	27,00
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	40	3,76
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	9	0,85
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	4	0,38
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	434	40,83
7	Kejahatan Terkait Narkotika	138	12,98
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	146	13,73
	Total Kejahatan	1063	100,00

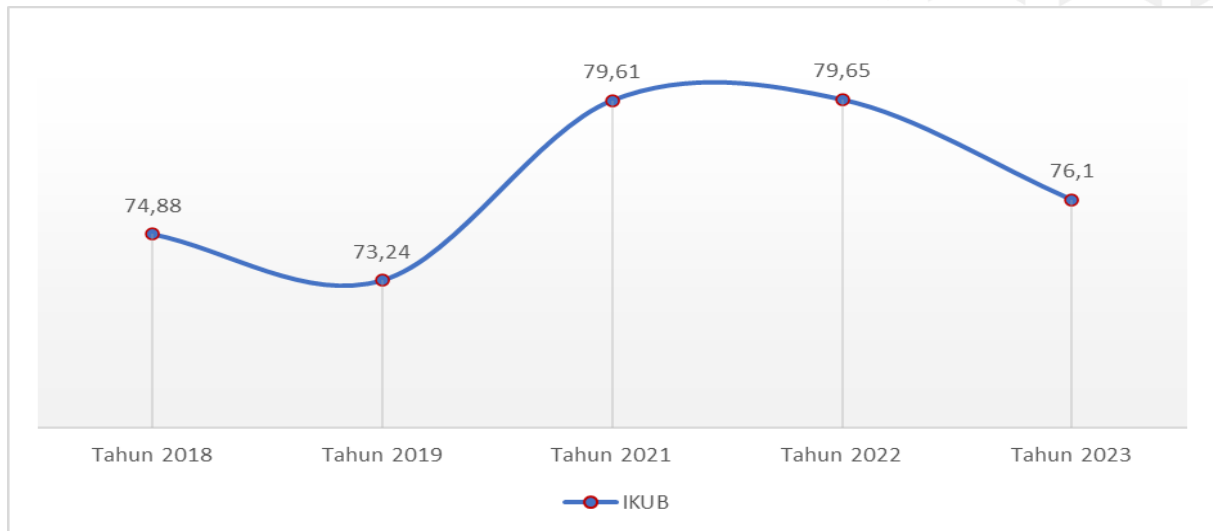
Sumber : Buku Statistik Indonesia Tahun 2024

Sebagian besar kasus kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat merupakan kasus kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (Senpi), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (Sajam). Tahun 2022, proporsi kasus kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan mencapai 40,83 persen dari total kasus kejadian kejahatan atau setara dengan 1063 kejadian kejahatan. Tiga kasus kejahatan yang proposinya juga relatif tinggi adalah kejahatan terhadap fisik/badan, penipuan, penggelapan, dan korupsi, dan Narkotika. Ketiga kasus ini berkontribusi masing-masing 27 persen, 13,73 persen, dan 12,98 persen terhadap total kejadian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat.

2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Dalam kurun Tahun 2018 sampai Tahun 2023, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Barat masih berfluktuatif. Pada Tahun 2018, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Barat mencapai puncaknya dengan nilai sekitar 74,88 Poin. Pada Tahun 2019, terjadi penurunan signifikan hingga mencapai nilai sekitar 73,24 Poin. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Barat. Pada Tahun 2020, data tidak ditampilkan dikarenakan data Nasional tidak tersedia. Pada Tahun 2021, indeks ini mulai menunjukkan peningkatan kembali dengan nilai sekitar 79,61 Poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kerukunan antar umat beragama. Pada Tahun 2022, Indeks Kerukunan Umat Beragama terus meningkat menjadi 79,65 Poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Barat mulai membuahkan hasil yang positif. Pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 76,1 Poin. Selama kurun waktu 2018 hingga 2023, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Barat stabil dalam kategori tinggi.

Grafik 2.63 Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, 2024

2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah

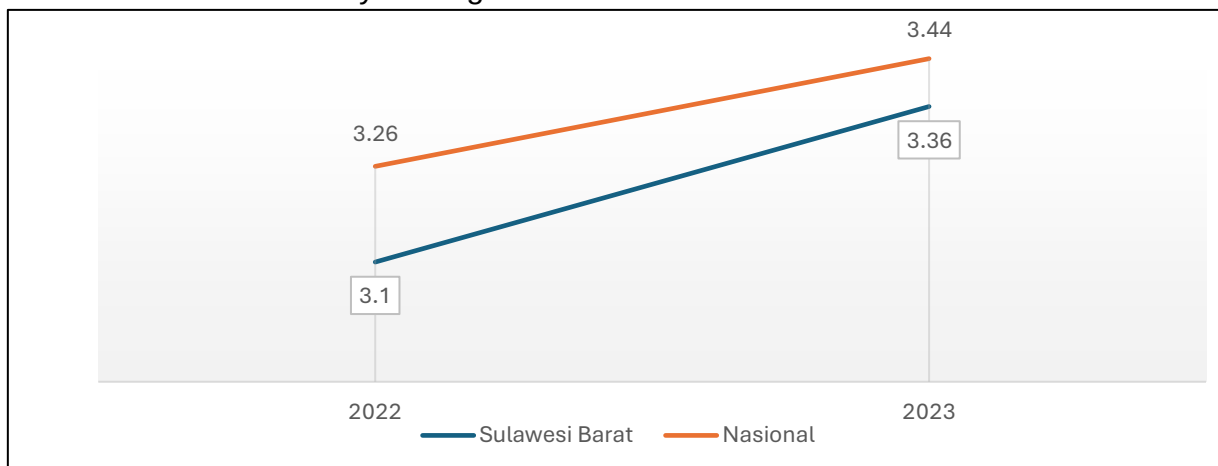
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen yang dirancang oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengukur daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan utama dari IDSD adalah untuk memperoleh ukuran yang komprehensif mengenai produktivitas dan kemampuan suatu daerah dalam bersaing, baik di tingkat nasional maupun global. Pengukuran IDSD mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran dari Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dikembangkan oleh World Economic Forum (WEF). IDSD terdiri dari empat komponen utama yang membentuk daya saing daerah, yaitu:

1. Lingkungan Pendukung: Infrastruktur, institusi, dan stabilitas makroekonomi yang mendukung aktivitas ekonomi.
2. Sumber Daya Manusia: Kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja.
3. Pasar: Efisiensi pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar keuangan.
4. Ekosistem Inovasi: Kemampuan daerah dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi.

Dengan mengukur keempat komponen ini, IDSD dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan suatu daerah, serta potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saingnya.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu Lingkungan Pendukung, Pasar, Sumber Daya Manusia dan Ekosistem Inovasi. IDSD dihitung menggunakan 12 Pilar, Provinsi Sulawesi Barat memiliki skor IDSD 3,36 Tahun 2023 meningkat dari Tahun 2022 yang sebesar 3,10; namun masih berada di bawah skor nasional 3,44. Pilar yang memiliki skor di atas nasional antara lain : Pilar 1. Institusi; Pilar 3. Adopsi TIK, Pilar 4. Kestabilan Ekonomi Makro, Pilar 7. Pasar Produk, dan Pilar 8. Pasar Tenaga Kerja. Sedangkan Pilar yang memiliki skor di bawah nasional yaitu Pilar 2. Infrastruktur; Pilar 5. Kesehatan, Pilar 6. Keterampilan (Pendidikan) , Pilar 9. Sistem Keuangan, Pilar 10. Ukuran Pasar, Pilar 11. Dinamika Bisnis, Pilar 12 Kapabilitas Inovasi. Indeks Daya Saing Daerah di targetkan Tahun 2025 sebesar 3,82 poin dan di Tahun 2029 sebesar 5,05 poin.

Grafik 2.64 Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022-2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Tabel 2.35 Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3	PILAR 4	PILAR 5	PILAR 6	PILAR 7	PILAR 8	PILAR 9	PILAR 10	PILAR 11	PILAR 12	
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Prov. Sulawesi Barat	4,4	2,22	3,63	3,85	3,39	3,54	3,87	3,96	2,32	3,81	3,16	2,21	3,36
Majene	4,36	1,61	3,55	3,07	3,24	3,38	2,41	3,94	1,13	3,66	4,41	3,01	3,15
Polewali Mandar	4,43	1,57	3,56	3,13	3,29	3,07	2,86	3,59	1,47	4,09	3,51	2,2	3,06
Mamasa	3,78	1,56	3,13	3,16	3,94	3,25	2,51	2,77	0,74	3,45	2,03	1,33	2,64
Mamuju	3,95	1,96	3,39	3,37	3,7	3,27	2,28	4,34	1,77	4,04	4,44	2,4	3,24
Mamuju Tengah	3,92	1,38	3,55	2,54	3,6	3,24	0,59	3,29	-	3,97	2,19	0,4	-
Pasangkayu	3,96	2,53	3,62	3,66	3,76	3,14	0,78	3,77	-	3,46	2,23	0,43	-

Sumber: Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Keterangan:

Pilar 1 : Institusi

Pilar 2 : Infrastruktur

Pilar 3 : Adopsi TIK

Pilar 4 : Stabilitas ekonomi makro

Pilar 5 : Kesehatan

Pilar 6 : Keterampilan

Pilar 7 : Pasar Produk

Pilar 8 : Pasar tenaga kerja

Pilar 9 : Sistem Keuangan

Pilar 10 : Ukuran pasar

Pilar 11 : Dinamisme bisnis

Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan isu yang santer digaungkan pasca reformasi, saat Indonesia tengah melakukan reformasi terhadap semua aspek bernegara. Para pengusung reformasi setuju bahwa birokrasi termasuk salah satu aspek yang mesti direformasi karena tata Kelola pada masa Orde Baru sangat buruk. Birokrasi pada masa itu mengabaikan praktik tata Kelola pemerintahan baik (*good governance*), sehingga dampaknya terlihat dari maraknya kasus korupsi, pelayanan publik yang lambat di daerah akibat pola pengambilan keputusan yang tersentralisasi, dll. Pemerintah pasca reformasi berulang-ulang menyebutkan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan bersih dan pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian, upaya utama pemerintah adalah meningkatkan kapasitas aparatur negara melalui reformasi birokrasi. Hal itu



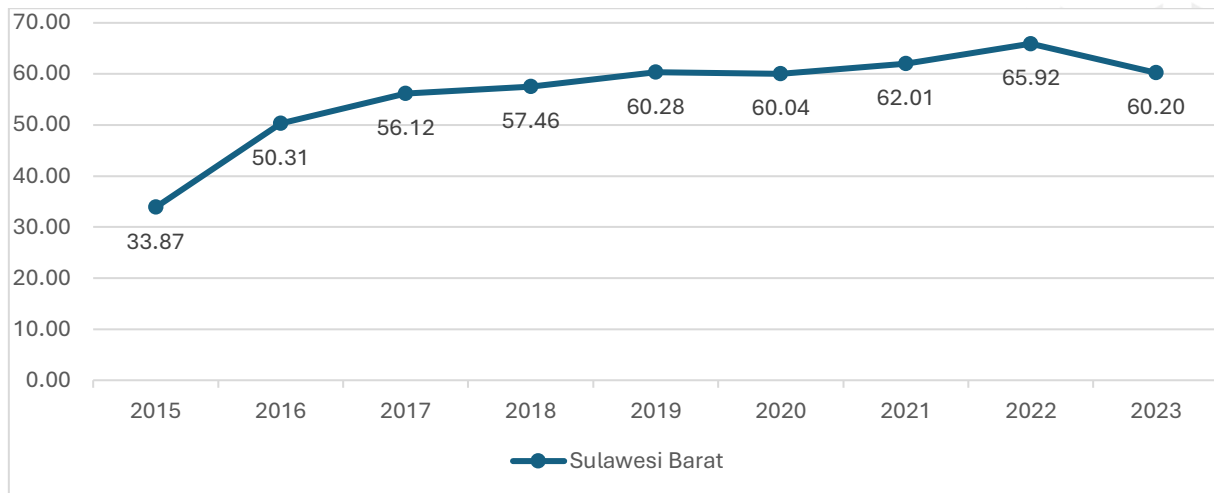
mulai menjadi perhatian pemerintah tahun 2004, sehingga tahun ini disebut sebagai tahun yang menandai gelombang pertama reformasi birokrasi Indonesia.

Agar reformasi birokrasi berjalan sistematis dan dilaksanakan oleh semua level pemerintahan, tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika berhasil menerapkan reformasi birokrasi dengan baik, maka pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; dapat menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Namun, kegagalan penerapan reformasi birokrasi akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi untuk mengatasi kompleksitas abad ke-21, trauma, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan Nasional.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi, baik pada level pemerintah maupun pemerintah daerah adalah indeks reformasi birokrasi (IRB).

Grafik 2.65 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2023



Sumber: Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Catatan: Data tahun 2022 adalah hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Dalam tujuh tahun terakhir, IRB Provinsi Sulawesi Barat konsisten mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam lingkup pemerintah provinsi terus berproses. Tahun 2015, Provinsi Sulawesi Barat diganjar IRB 33,87 atau termasuk dalam kategori “kurang”, hanya satu tingkat di atas kategori “sangat kurang”. Angka itu sekaligus menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Setahun kemudian, angkanya naik signifikan ke 50,31 atau naik satu tingkat ke kategori “cukup”. Kategori “cukup” bertahan hingga tahun 2018 dan naik menjadi kategori “baik” di tahun 2020 dengan angka indeks 60,04. Setahun kemudian, angkanya naik ke 62,01 tapi masih tetap pada kategori “baik”. Tahun 2023, berdasarkan Penilaian DARI Kementerian PANRB, IRB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 60,20 atau naik lagi satu level ke kategori “baik”. Pada level ini pemerintah provinsi sudah memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Meski begitu sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Perubahan IRB dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah kemampuan daerah dalam berinovasi dan kemampuan menerapkan sistem

pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Bersama dengan banyak variabel lain, kedua indikator tersebut termasuk bagian reformasi birokrasi general (RB General) yang termasuk masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.

2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 terus bertransformasi guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Kebijakan terkait Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) terkini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan hasil penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, dimana pada instrumen yang baru telah memuat ukuran kualitas pelayanan publik yang dapat memotret layanan pemerintah sesuai dengan perkembangan terkini.

Secara umum aspek yang digunakan masih sama seperti sebelumnya yang terdiri dari 6 (enam aspek), tetapi dengan penyempurnaan berbagai indikator pertanyaan. aspek dimaksud adalah: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi. Elaborasi aspek dan prinsip akan menghasilkan indikator pertanyaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi Gambar. 9 Aspek dan Prinsip Evaluasi masyarakat, sehingga Indeks Pelayanan Publik (IPP) bersifat representatif.

Dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai Tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik Sulawesi Barat stabil berada pada Kategori (B-) atau Kategori Baik dengan catatan. Dimana Pada Tahun 2021, IPP Sulawesi Barat sebesar 3.42 Poin, naik menjadi 3.49 Poin pada Tahun 2022, namun mengalami penurunan kembali pada Tahun 2023 menjadi 3.37 Poin.

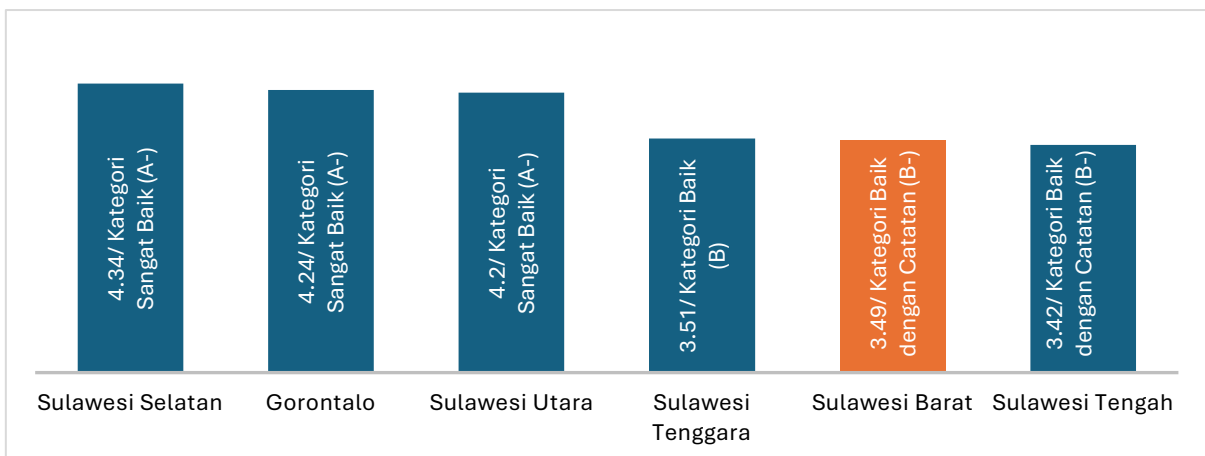
Grafik 2.66 Indeks Pelayanan Publik Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: KemenPANRB, 2024

Pada Tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik Sulawesi Barat menjadi terendah kedua di Regional Pulau Sulawesi. Dimana tiga Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori sangat baik (A-), Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kategori Baik (B). Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kategori Baik dengan Catatan (B-).

Grafik 2.67 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023



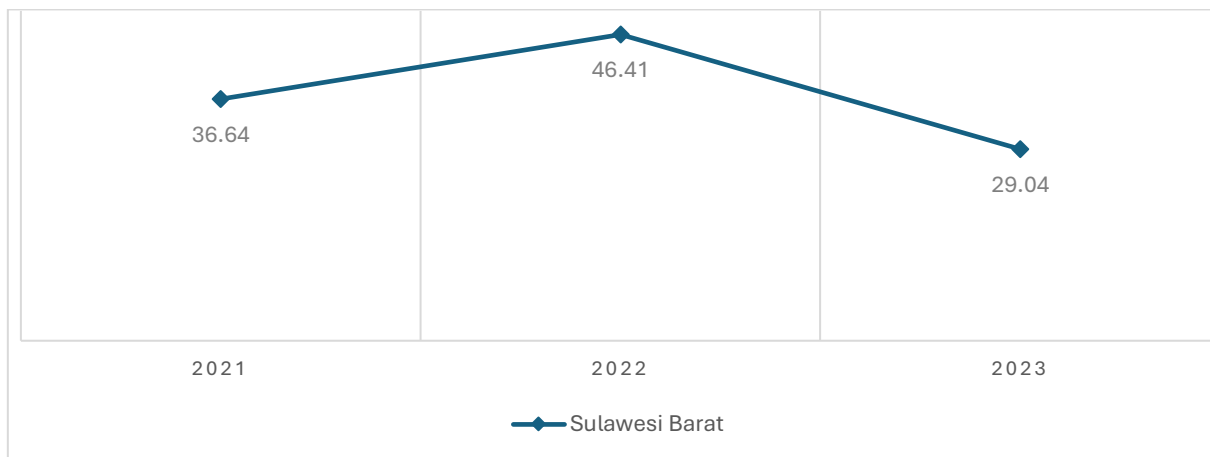
Sumber: KemenPANRB, 2024

2.4.3. Indeks Inovasi Daerah

Dalam konteks pemerintah daerah, selain urgensi inovasi dalam pelayanan publik, pemerintah daerah juga diwajibkan oleh regulasi. Setidaknya ada dua regulasi teknis yang mengatur tentang inovasi di tingkat pemerintah daerah yaitu PP No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No. 104 Tahun 2018 Tentang

Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Tujuan utama inovasi daerah dalam peraturan perundang-undangan adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka inovasi daerah diarahkan pada tiga hal yaitu peningkatan Pelayanan Publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

Grafik 2.68 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023

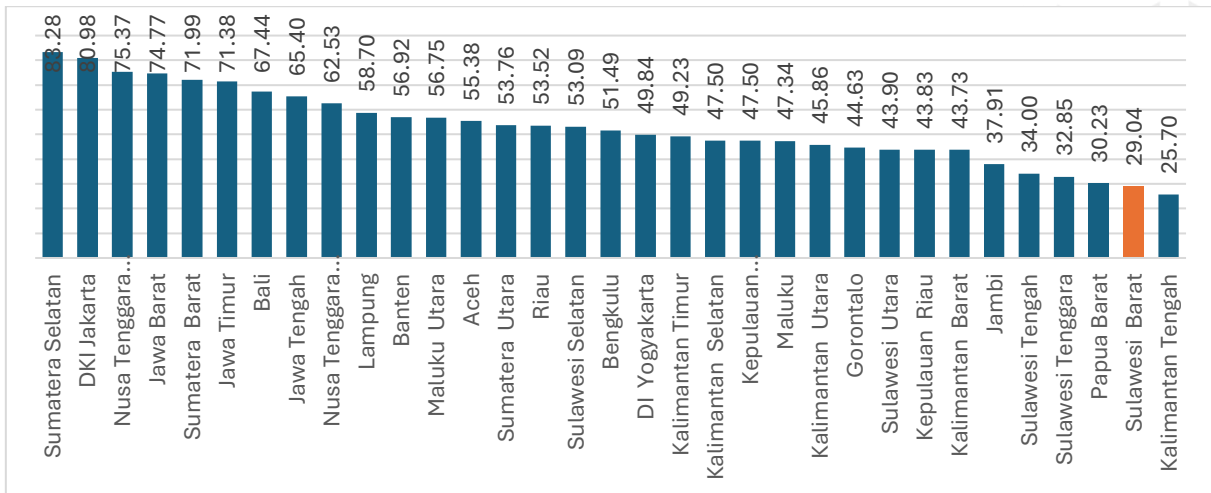


Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi diukur menggunakan indeks inovasi daerah (IID). Indeks ini pertama kali diuji coba tahun 2019, namun ada beberapa daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat yang belum memenuhi kebutuhan data sehingga tak dapat nilai IID. Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatat IID sebesar 36,64 atau masuk dalam kategori inovatif. Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat nilai IID sebesar 46,41 atau naik 9,77 poin, tapi masih berada pada kategori inovatif. Sedangkan Tahun 2023, mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai IID sebesar 29,04 atau turun 17,37 poin.

Meski mengalami kenaikan tahun 2023, tapi IID Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan pemerintah provinsi lain. Dari 33 provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berada pada peringkat ke-32, sangat tertinggal dari pemerintah provinsi lainnya. Angka IID Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 hanya lebih tinggi dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Grafik 2.69 Indeks Inovasi Daerah Berdasarkan Provinsi Tahun 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Andjar Prasetyo dkk (2023), ada beberapa dimensi yang mempengaruhi inovasi di tingkat daerah yaitu kepemimpinan, visi, dan misi; tingkat pendapatan dan belanja modal regional; tata kelola transparan dan mekanisme akuntabilitas; lingkungan regulasi; dan penyampaian layanan yang efisien. Temuan ini sejalan dengan indikator-indikator yang ditetapkan dalam menilai IID pemerintah daerah yang didalamnya juga terdapat visi kepala daerah tentang inovasi, dukungan anggaran, regulasi tentang inovasi daerah, ketersediaan sumberdaya manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintah provinsi perlu mengidentifikasi indikator-indikator apa saja yang masih lemah dalam pencapaian IID dan kemudian melakukan perbaikan pada indikator tersebut.

2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 memberikan penekanan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Instrumen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Tahun 2018, pemerintah mendesain sebuah indeks yang dikenal dengan Indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

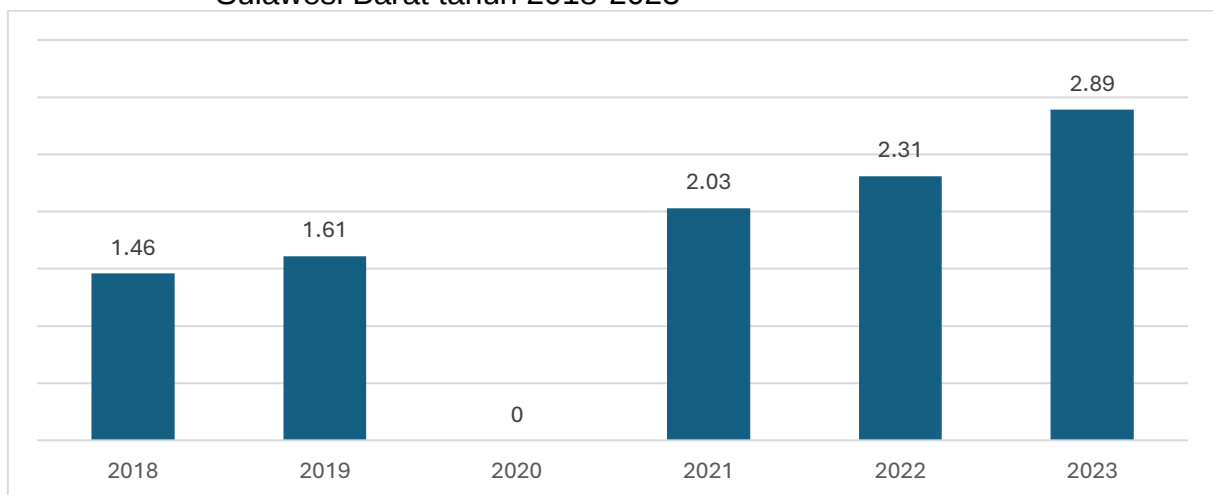
Menurut Kemenpan RB, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara Nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kehadiran SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pemerintah memasukkan pencapaian indeks SPBE sebagai prioritas dalam dokumen RPJMN 2020-2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki nilai indeks SPBE sebesar 2,6 (kategori 'baik'). Untuk mencapai target tersebut, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pencapaian indeks SPBE masing-masing menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian target tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan guna mendorong pencapaian indeks SPBE.

Sejak pertama kali diperkenalkan tahun 2018, indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat konsisten mengalami kenaikan. Tahun 2018, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat hanya diganjar nilai indeks 1,46 atau masuk dalam kategori "kurang". Indeks SPBE dengan kategori "kurang" menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menerapkan dengan baik SPBE karena empat domain yang dinilai yaitu kebijakan internal SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, dan tata kelola SPBE masih bermasalah. Setahun kemudian, indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat naik 0,15 poin menjadi 1,61, namun masih termasuk dalam kategori "kurang". Perubahan kategori nilai indeks terjadi di tahun 2021 yang sebelumnya "kurang" berubah menjadi kategori "cukup". Saat itu nilai indeks naik 0,42 poin menjadi 2,03. Kenaikan nilai indeks berlanjut di tahun 2022 dengan mencatatkan angka 2,31 atau naik 0,27 poin. Angka tersebut berhasil melampaui target RPD sebesar 2,20.

Meski naik, angka tahun 2022 masih termasuk dalam kategori nilai indeks “cukup” dan masih di bawah pencapaian Nasional yaitu 2,34, menunjukkan bahwa secara relatif, nilai indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat masih tertinggal dari banyak provinsi di Indonesia. Angka indeks 2,31 tahun 2022 hanya menempatkan Provinsi Sulawesi Barat di urutan ke-25, tertinggal dari provinsi se-pulau yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Peringkat indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat hanya lebih tinggi dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sementara di tahun 2023 nilai indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat mencapai 2,89 dengan kategori nilai “baik”.

Grafik 2.70 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab implementasi SPBE dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Barat. Faktor pertama adalah digital mindset penyelenggara pemerintahan masih kurang. Selama bertahun-tahun, ASN bekerja dalam sistem konvensional, sehingga cara berfikir mereka dalam memberikan pelayanan ke Masyarakat masih sama atau sulit diubah menjadi digital mindset. Faktor kedua adalah SPBE belum menjadi prioritas kebijakan dan kurang diperhatikan para pimpinan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi dalam perspektif para pengambil kebijakan masih diletakkan pada kategori

penting tapi tidak mendesak. Hal itu menyebabkan faktor ketiga yaitu Keterbatasan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan digitalisasi. Akibat dari keterbatasan anggaran adalah faktor keempat yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas SDM TIK serta tidak fokusnya pekerjaan tenaga yang ditunjuk. Faktor kelima atau terakhir adalah masih kuatnya ego sektoral dalam lingkup pemerintah provinsi dan belum optimalnya sinergitas antar stakeholder.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005–2025 Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 Tahun yang disusun dengan maksud untuk menilai capaian hasil kinerja pembangunan daerah, yang selanjutnya menjadi bahan dalam perumusan arah kebijakan strategis pembangunan daerah untuk 20 Tahun kedepan sekaligus menjadi acuan bagi semua pihak (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJPD Tahun 2025–2045 Provinsi Sulawesi Barat.

Arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJPD Tahun 2005–2025 Provinsi Sulawesi Barat difokuskan pada pencapaian visi: Terwujudnya Sulawesi Barat yang Sejahtera, Maju, dan Malaqbi, dengan 3 misi yaitu: (i) Mendorong pemenuhan hak dasar melalui pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan akses penduduk terhadap sumberdaya; (ii) Mendorong kemajuan daerah secara merata melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal serta pengembangan kerjasama antar daerah dan kemitraan antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya; dan (iii) Meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan kehidupan beragama, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan seni budaya dan olahraga. Selanjutnya dioperasionalkan pada 7 sasaran yaitu:

- a. Terpenuhinya hak-hak dasar Masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan Pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha, akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman;
- b. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan perkapita dan menurunnya jumlah penduduk miskin;



- c. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata;
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata;
- e. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal);
- f. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi dan berbudaya luhur, yang ditandai oleh terkondisikannya rasa aman, damai dan demokratis, terlestarikannya secara dinamis nilai-nilai, norma-norma dan kearifan lokal serta mengembangkan seni budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi, berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni sosial serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat, terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri, dan semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum; dan,
- g. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi, ditandai oleh angka melek huruf dan lama sekolah minimal sama dengan rata-rata nasional, angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional, kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional, dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi.

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan 7 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah, dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja pelaksanaan RPJPD Tahun 2005–



2025 Provinsi Sulawesi Barat sebesar 54,17 Persen pada kategori Rendah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan secara fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu 19,03 persen pada tahun 2007 menjadi 11,92 persen pada tahun 2022 (September) dan pada tahun 2023 (Maret) kembali mengalami penurunan menjadi 11,49 persentase meningkat 0,43 poin dibandingkan September 2022.
- b. Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 5,17 juta meningkat menjadi 37,07 juta pada tahun 2022 dimana peningkatannya mencapai 7 kali lipat akan tetapi masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 71,03 juta.
- c. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat sejak periode RPJPD 2005-2025 cenderung mengalami fluktuatif yakni dari 6,90 persen pada tahun 2006 meningkat menjadi 10,73 persen pada tahun 2011 di periode pertama, selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi menurun signifikan menjadi 6,01 persen di akhir periode kedua yaitu pada tahun 2016. Adanya Bencana Alam, Gempa Bumi serta wabah pandemi covid-19 melanda dunia termasuk negara Indonesia pada tahun 2019 menyebabkan hampir seluruh daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kontraksi, meski Provinsi Sulawesi Barat yang masih mampu tumbuh sebesar 5,31 persen di akhir periode ketiga pada tahun 2022. Capaian indikator ini mengindikasikan bahwa strategi kebijakan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi telah berjalan dengan baik.
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Barat sejak periode RPJPD 2005–2025 cenderung mengalami penurunan yakni dari 10,15 persen pada tahun 2005 menurun signifikan menjadi 4,61 persen pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,10 persen berkurang menjadi 3,77 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2022 berkurang menjadi 3,00 persen, serta diproyeksikan pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 2,61 persen.



- e. Angka indeks Williamson, dapat dilihat bahwa ketimpangan yang ada di provinsi Sulawesi Barat terjadi kondisi naik turun, dengan kondisi ketimpangan yang rendah di sekitar 0 hal ini disebabkan kemampuan wilayah kabupaten di provinsi Sulawesi Barat memiliki kemampuan yang berbeda beda pada sektor PDRB, sedangkan pada tahun 2020 naik hingga 0,52 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid yang sedikit berdampak pada ketimpangan pembangunan yang di provinsi Sulawesi Barat.
- f. Rasio Elektrifikasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rasio Elektrifikasi pada tahun 2017 sebesar 66,1 % dan terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 Rasio Elektrifikasi telah mencapai 98,67%.
- g. Rasio Desa Berlistrik Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami peningkatan dimana nilai Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2017 sebesar 79,54 % meningkat menjadi 95,37 % di tahun 2022. Bahkan terdapat 4 (tiga) kabupaten yang pencapaian Rasio Desa Berlistrik mencapai 100 % yaitu Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene dan Polewali Mandar.
- h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai 2022. Nilai terendah I Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 67,25 (cukup baik). Sedangkan capaian akhir untuk tahun 2022 adalah 76.77 (baik). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum.
- i. Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun mengalami Peningkatan. Pada Tahun 2011 Kategori C Nilai 34,29 dan pada Tahun 2022 Kategori B Nilai 68,68.
- j. Prinsip-prinsip good governance dan clean government terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian MCP KPK Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dan 2022 sudah menunjukkan kemajuan implementasi yang baik, dengan nilai masing-masing 78 di tahun 2021 dan 83 pada tahun 2022.
- k. Indeks Pembangunan Manusia, adanya peningkatan IPM dari tahun ke tahun.



Pada tahun 2015, capaian IPM Sulawesi Barat sebesar 62,96. Capaian ini masih jauh dari kondisi nasional yang pada saat itu telah mencapai 69,55. Artinya, masih terdapat ketimpangan antara capaian IPM Sulawesi Barat dan nasional sebesar 6,59 poin. Hingga tahun 2022, selisih capaian ini perlahan menyempit hampir menyentuh level 6 poin, dengan angka Sulawesi Barat mencapai 66,92 dan Indonesia sebesar 72,91.

- l. Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 angka melek huruf sebesar 92,85 persen mengalami peningkatan sebesar 93,59 persen di tahun 2019, turun kembali sebesar 93,17 persen di tahun 2020 dan turun kembali sebesar 93,09 persen di tahun 2021 dan meningkat menjadi 93,82 di tahun 2022.
- m. Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebesar 8,08 tahun, Dalam kurun tahun 2018-2022 pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat hanya tumbuh 2,03 persen per tahun sementara nasional tumbuh 1.42 persen per tahun.
- n. Indeks Kriminalitas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berada pada peringkat 3 terendah dengan jumlah 1.500. Jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi dari tahun 2007-2021 mengalami trend yang fluktuatif. Pada Tahun 2017 sejumlah 1.841 kasus dan Tahun 2021 sejumlah 1.500 kasus.
- o. Umur Harapan Hidup Sulawesi Barat jika dilihat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,77 tahun dari capaian tahun 2005 sebesar 66,40 tahun menjadi 65,63 Tahun pada tahun 2022.
- p. Angka Kematian Bayi, Jumlah kematian bayi di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2006 jumlah kematian bayi mencapai angka 225 kasus kematian bayi, namun pada tahun 2022 meningkat pada angka sebesar 302 kasus.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

2.5.1. Hasil Capaian Pembangunan

Tabel 2.36 Matriks Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)				
						Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	
Misi 1: Mendorong Pemenuhan Hak-hak Dasar melalui Pertumbuhan Ekonomi, Perluasan Lapangan Kerja, dan Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sumberdaya	1	Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat Sulawesi Barat	1	Angka Kemiskinan	19,03 (2007)	Dibawah Dua Digit atau Sama Dengan Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	13,58	11,90	11,50	11,49	N/A	N/A	N/A	Dua Digit dan Diatas Rata-rata Nasional
	2	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Sulawesi Barat	2	PDRB per-Kapita	14,75 (2010)	Sama Dengan Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	14,75	25,72	32,83	37,07	N/A	N/A	N/A	Dibawah Rata-rata Nasional
			3	Pertumbuhan Ekonomi	6,90 (2006)	Diatas Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	11,89	7,31	-2,40	7,50	N/A	N/A	N/A	Triwulan III 2023 Diatas 7% dan Diatas Rata-rata Nasional



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)				
						Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	
			4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45 (2006)	Dibawah Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	3,35	3,32	2,34	N/A	N/A	N/A	Dibawah Rata-rata Nasional
Misi 2: Mendorong Kemajuan Daerah secara Merata melalui Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal serta Pengembangan Kerjasama antar Daerah dan Kemitraan antar Pelaku dalam Pengelolaan	1	Terwujudnya Pembangunan yang Merata antar Sektor dan antar Wilayah	1	Persentase Daerah Tertinggal	33,33 (2016)	0 Daerah Tertinggal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	0	0	N/A	N/A	N/A	0 Daerah Tertinggal
			2	Indeks Williamson	0,13 (2005)	Turun Sebesar 5 Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	0,31	0,48	0,52	0,26	N/A	N/A	N/A	Naik 0,13 Poin
			3	Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur	N/A	Diatas 40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>40	>40	N/A	N/A	N/A	>40
			4	Rasio antara Belanja Operasi dan Belanja Publik	Ratio 30:70 (2010)	Ratio 30:70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70:30	57:43	75:25	N/A	N/A	N/A	Ratio 75:25
			5	Rasio Elektrifikasi	66,10 (2017)	50% RTS Berlistrik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,95	98,67	N/A	N/A	N/A	>50% RTS



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)					
(1) Sumberda ya	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)				(7)				(8)			
							Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
			6	Persentas e Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	71,99 (2018)	50% RT Air Minum Layak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77,07	76,67	N/A	N/A	N/A	>50% RT Air Minu m Layak
			7	Persentas e Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	59,48 (2017)	50% RT Sanitasi Layak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72,75	78,75	N/A	N/A	N/A	>50% RT Sanita si Layak
			8	Share Nilai PDRB Kabupate n terhadap PDRB Provinsi	2 Kabupaten Dominan (2005)	Seimbang Seluruh Kabupate n	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Kabupat en Domina n	3 Kabupat en Domina n	3 Kabupat en Domina n	3 Kabupat en Domina n	N/A	N/A	N/A	3 Kabup aten Domin an
	2	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjuta n	9	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup	84,13 (2012)	5 Besar Secara Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72,08	74,91	76,77	N/A	N/A	N/A	Diatas Rata- rata Nasio nal



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)				(7)				(8)			
							Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	3	Terwujudnya Pemerintahan yang Kuat dan Kehidupan Demokrasi yang Sehat dan Dinamis	10	Indeks Reformasi Hukum	N/A	Harmonis Dengan Per-UU-an Diatasnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Harmonis Dengan Per-UU-an Diatasnya
			11	SAKIP	34,29 (2011)	Seluruh SKPD Akuntabel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,23	63,14	68,68	N/A	N/A	N/A	4 OPD kategori BB
			12	Indeks Persepsi Anti Korupsi	83,87 (2022)	Clean Government Tanpa KKN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,87	N/A	N/A	N/A	83,87 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK
Misi 3: Meningkatkan Kualitas Manusia melalui Peningkatan Kehidupan Beragama, Perbaikan	1	Terwujudnya Karakter Manusia dan Masyarakat Sulawesi Barat yang Semakin Berakhlak Mulia, Bermoral Tinggi, dan Berbudaya Luhur	1	Indeks Pembangunan Manusia	59,74 (2010)	Peringkat ke-20 Secara Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	59,74	62,96	66,11	66,92	N/A	N/A	N/A	Peringkat ke-31 Secara Nasional



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)			
(1) Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)				(7)				(8)			
							Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
			2	Angka Melek Huruf	83,40 (2015)	Sama Dengan Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	88,48	N/A	99,47	99,52	N/A	N/A	N/A	Dibawah Rata-rata Nasional
			3	Angka Partisipasi Sekolah	66,80 (2015)	Sama Dengan Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,8	68,4	70,85	N/A	N/A	N/A	Dibawah Rata-rata Nasional
			4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,00 (2005)	Sama Dengan Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	6,63	6,94	7,89	8,08	N/A	N/A	N/A	Dibawah Rata-rata Nasional
			5	Angka Kriminalitas	16.387 (2007)	Dibawah Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	15.784	16.088	1.704	1.500	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Sulawesi Barat yang Berdaya Saing dengan Kualitas Pengetahuan dan Kesehatan yang Tinggi	6	Angka Harapan Hidup	66,40 (2005)	Sama Dengan Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	62,50	64,22	65,06	65,63	N/A	N/A	N/A	Dibawah Rata-rata Nasional	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)				(7)				(8)			
							Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
			7	Angka Kematian Bayi	225 (2006)	Sama Dengan Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	323	337	302	N/A	N/A	N/A	N/A
			8	Angka Kematian Ibu Melahirkan	63 (2006)	Sama Dengan Rata-rata Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	44	52	54	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		54,17
Predikat Kinerja																		Rendah

2.5.2. Rekomendasi berdasarkan hasil Evaluasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- A. Kemiskinan adalah masalah kompleks dan multidimensional yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Hal ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mengalami ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat pasca pandemi mengalami fluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. dimana pada tahun 2022 sebesar 11.92% berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9.57%. Belum lagi terkait kemiskinan ekstrem yang juga cukup tinggi di Sulawesi Barat yaitu sebesar 2.94% juga berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 2.04%. Masih tingginya angka kemiskinan tersebut membutuhkan langkah strategis yang perlu segera dilakukan sehingga dapat menekan angka kemiskinan secara cepat.

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Menurunkan beban pengeluaran, dalam strategi menurunkan beban pengeluaran berbagai upaya telah dilakukan seperti program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi dan BLT melalui program pusat maupun program yang ada di daerah.
2. Meningkatkan pendapatan. Adapun strategi dalam meningkatkan pendapatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, padat karya, bantuan peralatan UMKM, pelatihan pekerja, bantuan bibit dan fasilitasi akses modal serta program sanitasi, dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
3. Memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten melalui beberapa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan intervensi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
4. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sehingga membantu memastikan bahwa intervensi yang diambil telah memberikan dampak yang diinginkan dalam mengurangi kemiskinan.



- B. Pendapatan per-kapita penduduk setara dengan pendapatan per-kapita rata-rata nasional

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah dan tingkat nasional.

- C. Pertumbuhan Ekonomi

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan infrastruktur yang dapat menunjang konektivitas Dan efisiensi produksi.
2. Membuat kebijakan yang mengatur sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap perubahan kebijakan atau Kondisi pasar seperti komoditi sawit.
3. Meningkatkan produksi dan mutu serta pengelolaan pasca panen komoditas unggulan pertanian
4. Perlunya meningkatkan pengawasan terkait proses distribusi bahan pangan dan langkah konkrit untuk mengurangi banyaknya mafia harga (pemburu rente) dalam proses distribusi
5. Perlunya Meningkatkan Pengawasan Harga Pasar, setiap bulan
6. Perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Forkopimda Kabupaten
7. Mengupayakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga prosesnya berjalan secara efektif dan efisien Memaksimalkan Penggunaan E-katalog lokal dan bella pengadaan serta pemanfaatan produk dalam negeri dan TKDN.

- D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan Masyarakat, agar memiliki skill yang menunjang pekerjaan dan usaha kecil dan mikro
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan Masyarakat di Sulawesi Barat. Agar meningkatkan peluang memiliki pekerjaan di bidang formal



Arah Pembangunan

A. Pembangunan ketahanan pangan

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan agar mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Sulawesi Barat.
2. Mengatur harga pangan agar relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum.
3. Menghilangkan daerah rawan pangan

B. Pembangunan perumahan dan permukiman

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Fokus pada peningkatan Kapasitas dalam rangka mendukung urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Upaya – upaya melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan rumah tidak layak huni, dampak bencana serta kawasan kumuh, dan peningkatan akses sanitasi, air bersih yang layak dan aman.
3. Mengoptimalkan dukungan terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten se-Sulawesi Barat melalui kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan.
4. Selain itu dengan disahkannya Regulasi Kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. Pembangunan kesejahteraan sosial

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Membuat Kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Memaksimalkan pelayanan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan juga data lain yang menunjang kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan penyediaan mutu dan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

D. Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Peningkatan produksi, produktivitas serta mutu produk Pertanian
Perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good*



Agriculture Practices (GAP) dan *Good Handling Practices (GHP)*, serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Peningkatan SDM pertanian (Kapasitas kelembagaan petani dan Penyuluh Pertanian)

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat terintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan.

3. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan

Diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Diperlukan peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

4. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber- sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah

tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara untuk komoditi hortikultura, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi.

Selain bibit/benih, pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkan kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

c. Alih Fungsi Lahan serta status dan luas kepemilikan lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah untuk keperluan pemukiman atau fasilitas umum lainnya tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun, tetapi juga budaya pertanian dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas Garapan usaha tani sehingga petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pengembangan pertanian modern, pemanfaatan inovasi teknologi dan digitalisasi data/informasi pertanian yang akurat dan terkoneksi. Revolusi industri 4.0 merupakan kerangka teknologi yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mentransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kerangka ini sekaligus jawaban atas pesatnya modernisasi yang bisa memenuhi kebutuhan. Revolusi Industri 4.0 bertujuan untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030, dengan meningkatkan kegiatan ekspor. Sejak lama Kementerian Pertanian telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk berbagai alat dan mesin (Alsintan) pertanian seperti autonomous tractor, drone sebar benih, drone sebar pupuk granule, alsin panen olah tanah terintegrasi dan penggunaan robot tanam.

Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian berbasis kawasan (Pewilayahan Komoditas).

Seiring dengan ditetapkan peraturan menteri Pertanian tentang pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan

basis kawasan merupakan suatu peringatan bahwa usaha sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan perlu dibangun dengan sistem kawasan atau wilayah komoditas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar serta efektifitas dan efisiensi biaya produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Pembangunan pertanian juga harus berwawasan lingkungan, sehingga diperlukan upaya- upaya untuk mewujudkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian juga upaya pelestarian sumber daya hutan dan pengembangan kawasan-kawasan terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem.

E. Pembangunan perikanan dan kelautan

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Mengembangkan kerja sama regional untuk memicu pengembangan ekonomi lokal agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian
2. Mengembangkan produk komoditi unggulan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan daya dukung wilayah
3. Mengoptimalkan pengoperasian Pelabuhan perikanan

F. Pembangunan peternakan

Rekomendasi Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan Infrastruktur pemasaran hasil peternakan
2. Memenuhi Rasio SDM petugas terhadap jumlah ternak

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Tren Proyeksi Penduduk

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan Daerah. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan

2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Tabel 2.37 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.458.657	1.502.886	1.612.243	1.717.126	1.816.481	1.906.602

Berdasarkan Tabel 2.20 Proyeksi Jumlah Penduduk di atas hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat selama 20 Tahun mendatang terus meningkat yaitu 1.458.657 pada Tahun 2023 menjadi 1.906.602 Jiwa Pada Tahun 2045. Dengan rincian Pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1.502.886 Jiwa, Tahun 2030 sebesar 1.612.243, Tahun 2035 sebesar 1.717.126 Jiwa, Tahun 2040 sebesar 1.816.481 dan Tahun 2045 sebesar 1.906.602 Jiwa

2.6.1.2. Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.38 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	739.162	760.998	814.819	866.212	914.613	957.445
Perempuan	719.495	741.888	797.424	850.914	901.868	949.157
Rasio	103	103	102	102	101	101

Berdasarkan tabel proyeksi jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat diketahui rasio perbandingan Laki-laki dan Perempuan untuk 20 Tahun mendatang mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Pada Tahun 2023 Rasio Jumlah penduduk sebesar 103 penduduk laki-laki per 100 penduduk Perempuan, mengalami penurunan rasio menjadi 101 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan pada Tahun 2045.

2.6.1.3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.39 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	414.120	418.737	434.930	447.681	450.889	453.442
15-64 Tahun	971.836	1.004.756	1.076.422	1.141.869	1.206.956	1.261.152
>65 Tahun	72.701	79.393	100.891	127.576	158.636	192.008
Angka Ketergantungan	50,09	49,58	49,78	50,38	50,50	51,18

Berdasarkan tabel Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat bahwa Penduduk Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 Tahun mendatang di dominasi Kelompok umur Produktif rentang 15-64 Tahun sebesar 1.004.756 jiwa pada Tahun 2025 dengan angka ketergantungan 49,58 meningkat menjadi 1.261.152 jiwa pada Tahun 2045 dengan angka ketergantungan 51,18.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena perlu untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan manusia dapat berupa barang dan jasa. Barang adalah sesuatu yang berwujud, seperti makanan, minuman, rumah, pakaian dan sebagainya. Adapun jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, seperti pendidikan, liburan, rekreasi dan sebagainya. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan mempertimbangkan proyeksi kenaikan jumlah penduduk memberikan dampak bahwa kebutuhan minimal yang disediakan juga terus berkembang baik dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi legal bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari definisi legal, dapat kita simpulkan, pertama, pelayanan publik diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan barang, jasa dan administrasi warga negara dan penduduk. Kedua, pelayanan publik disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sederhananya, bahwa penyelenggara sebagai pihak yang memberikan pelayanan, masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat pelayanan. Agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pelayanan publik, maka masyarakat harus mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan cerdas dalam mengakses pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik adalah bukti kehadiran negara untuk masyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang Pelayanan Publik memberikan ruang dan porsi yang besar terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik.

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan rumah/ tempat tinggal

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pasal tersebut, negara bertanggung jawab akan hak kehidupan untuk memiliki hunian tempat tinggal bagi setiap warga negara. Sehingga perlu adanya lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam merencanakan perumahan dibutuhkan aspek pendukung di lingkungan sekitar perumahan seperti sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan perumahan. Standar pelayanan tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. Standar tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan digunakan untuk perencanaan perumahan agar sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan standar dalam perencanaan yang disusun dalam



Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Standar kecukupan luas minimum rumah bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam beraktivitas di dalam rumah, selain itu dapat memberikan kecukupan udara bagi penghuni rumah. Kebutuhan dasar ruang per orang berdasarkan aktivitas manusia di dalam rumah antara lain ruang tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu. Oleh karena itu, kebutuhan akan udara setiap penghuni rumah memiliki standar nasional yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.

Kebutuhan udara minimum per orang:

- a. Dewasa: 16-24 m³
- b. Anak-anak: 8-12 m³ Dengan menggunakan asumsi
 - Ketinggian plafon minimum ialah 2,5 m
 - Pergantian udara 2 kali dalam sehari

Diperoleh standar kecukupan luas minimum bangunan:

- 9,6 m² per orang dewasa
- 4,8 m² per anak

Sehingga dari standar luas minimum bangunan, dengan asumsi 1 KK memiliki 4 anggota membutuhkan luas bangunan rumah minimal dengan tipe 36 atau setara dengan 36m² untuk memenuhi standar kebutuhan udara setiap orang. Dengan standar luas perjiwa sebagai dasar kenyamanan ruang gerak diatur dalam Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002) Keputusan Menteri Kimpraswil Tentang Rumah Sederhana Sehat).

Metode pendekatan proyeksi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan komparatif ini mendeskripsikan perbandingan kondisi prasarana pada lokasi penelitian berdasarkan dengan standar yang didukung oleh penilaian masyarakat terhadap kualitas prasarana seperti jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan air bersih serta jaringan listrik (penerangan jalan) pada lokasi penelitian. Dengan standar yang digunakan yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang dilengkapi dengan standar Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam proyeksi kebutuhan akan perumahan di Kelurahan Koya Barat berdasarkan hasil proyeksi penduduk, perhitungan dengan ketentuan SNI 03-1733-2004. Dengan asumsi sesuai standar ketentuan bahwa luas bangunan rumah dengan luas 36m² akan terdiri 4 jiwa.

$$KR = P_{tp} - P_{ta} \times 4$$

Keterangan:

KR : Proyeksi kebutuhan rumah

P_{tp} : Jumlah penduduk proyeksi tahun ke - t

P_{ta} : Jumlah penduduk tahun awal

Catatan : Asumsi dalam satu rumah memiliki 4 jiwa untuk ukuran 36m².

Tabel 2.40 Proyeksi Kebutuhan Rumah Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Kondisi Tahun (2023)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.458.657	1.502.886	1.612.243	1.717.126	1.816.481	1.906.602
Proyeksi Kebutuhan Rumah	345.369	375.721	403.060	429.281	454.120	476.650

Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk Sulawesi Barat 20 Tahun mendatang, didapatkan proyeksi Kebutuhan Rumah. Kebutuhan rumah diasumsikan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2025 sebanyak 375.721 unit menjadi 476.650 unit pada Tahun 2045.

2.6.2.2. Proyeksi kebutuhan air bersih

Berdasarkan SNI No 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan Permukiman Perkotaan, Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu, lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air bersih lingkungan perumahan di perkotaan.

Kebutuhan akan air dikategorikan dalam kebutuhan air domestik dan non domestik. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga yaitu untuk keperluan minum, masak, mandi, mencuci

pakaian serta keperluan lainnya, sedangkan kebutuhan air non domestik digunakan untuk kantor, tempat ibadah, niaga dan lain-lain. Berdasarkan Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001 tentang Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, menyebutkan kebutuhan air bersih per orang yaitu 60-220 lt/orang/hari. Selain itu digunakan asumsi-asumsi guna menetapkan proporsi angka persentase pendistribusian volume air bersih/minum yang diproduksi, yaitu:

1. Kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan rata-rata minimum 60 liter/hari/kapita dan optimum 120 liter/hari/kapita
2. Kebutuhan untuk pelayanan sosial/pelayanan umum yaitu 5% - 10% dari kebutuhan total rumah tangga
3. Kebutuhan untuk komersial yaitu 10% - 20% dari kebutuhan total rumah tangga
4. Kebutuhan cadangan air minum minimal 10% dari kebutuhan total (rumah tangga dan fasilitas)
5. Kebutuhan untuk menanggulangi kebocoran dalam pendistribusian pada instalasi air yaitu 15% - 25% dari kebutuhan total (rumah tangga + fasilitas + cadangan)

Kebutuhan air bersih yang akan datang untuk suatu kawasan atau daerah pelayanan dapat diprediksi dengan menggunakan analisis regresi linier. Kebutuhan Air Bersih untuk suatu daerah pelayanan atau kawasan dapat digunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan air bersih (Q}_{md}) = Q_{md} = P_n \times q \times f_{md}$$

$$\text{Kebutuhan total air bersih (Q}_t) = Q_t = Q_{md} \times Q_{\text{non domestik}}$$

Keterangan:

Q_{md} = kebutuhan air bersih

P_n = jumlah penduduk tahun n

q = kebutuhan air per orang/hari

F_{md} = faktor hari maksimum (1,05 – 1,15)

Q_t = kebutuhan air total

Tabel 2.41 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (M3)

Uraian	Kondisi Tahun (2023)	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.458.657	1.502.886	1.612.243	1.717.126	1.816.481	1.906.602
Total Kebutuhan Air Minum	325,84	335,57	359,49	382,33	403,66	423,40

Berdasarkan hasil analisis Kebutuhan Air Minum Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 Tahun mendatang mengalami tren yang meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada Tahun 2025 Total kebutuhan air minum sebesar 335,57 M3 diproyeksikan meningkat pada Tahun 2040 sebesar 403,66 M3 dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada Tahun 2045 sebesar 423,40 M3.

2.6.2.3. Proyeksi kebutuhan Energi/Listrik

Prasarana listrik merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat saat ini. Dimana dalam masa modern sekarang rata-rata setiap alat bantu yang kita gunakan akan membutuhkan energi listrik untuk mengaktifkannya. Pada Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan pelayanan listrik di kawasan perencanaan sudah baik mengingat Rasio elektrifikasi telah mencapai angka. Hal ini juga dapat ditinjau dari terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh kawasan perencanaan. Berdasarkan SNI No 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan Permukiman Perkotaan, beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan jaringan kelistrikan yang harus dipenuhi adalah:

1) Penyediaan kebutuhan daya listrik

- setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan
- setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

2) Penyediaan jaringan listrik

- disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;
- disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
- disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;

- adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah;

Tabel 2.42 Proyeksi Kebutuhan Listrik 2025 – 2045

Uraian	Kondisi Eksisting (Tahun 2023)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.481.077	1.502.886	1.612.243	1.717.126	1.816.481	1.906.602
Proyeksi Kebutuhan Listrik (GWh)	518	691	1.390	2.796	4.890	11.311

Sumber: Data PT. PLN (Persero)

Pada tahun 2023, Konsumsi Listrik di Sulawesi Barat sebesar 518 GWh. Proyeksi kebutuhan listrik mengalami tren peningkatan yang stabil, searah dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, diperkirakan bahwa kebutuhan akan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan pertumbuhan industri seperti smelter, tambang dan lainnya mengingat Sulawesi Barat menjadi salah satu daerah penyangga IKN. Proyeksi kebutuhan listrik pada tahun 2025 sebesar 691 MWh, Meningkat pada tahun 2030 menjadi 1.390 GWh. Pada tahun 2035, kebutuhan Listrik diProyeksikan mencapai 2.796 GWh. Meningkat pada tahun 2040 dan 2045 menjadi 4.890 GWh dan 11.311 GWh.

2.6.2.4. Proyeksi kebutuhan Persampahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Sedangkan menurut Tchobanoglous (1977), sumber sampah berasal dari daerah permukiman, perdagangan, perkantoran atau pemerintahan, industri, lapangan terbuka atau taman, pertanian dan perkebunan. Kondisi penegakkan hukum/aturan masih belum optimal dalam implementasinya juga mempersulit pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengatasi permasalahan sampah.

Kebutuhan sarana dan prasarana sampah merupakan masalah masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, perlu diprediksi kebutuhan sarana dan prasarana sampah. Besarnya prediksi kebutuhan sarana dan prasarana sampah berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Proyeksi penduduk berdasarkan data series jumlah penduduk. Proyeksi produksi sampah di Provinsi Sulawesi Barat diperoleh dari asumsi produksi sampah individu yakni 0,5 Kg/Orang/Hari pada tahun 2025 hingga tahun 2035 kemudian pada tahun 2040 hingga 2045 diasumsikan produksi sampah individu sebanyak 0,6 Kg/Orang/Hari dikalikan dengan jumlah proyeksi pertumbuhan penduduk.

Target pengurangan dan penanganan sampah menurut Perpres 97 Tahun 2017 pada lampiran 1 adalah 70% sampah telah ditangani oleh pemerintah dan 30% telah dikurangi dengan berbagai program salah satunya adalah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Sehingga hasil proyeksi produksi sampah di tahun 2025-2045 dapat juga memperkirakan target penanganan sampah yang harus dicukupi di Provinsi Sulawesi Barat di tahun tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.43 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Ton)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Ton)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	1.458.657	1.502.886	1.612.243	1.717.126	1.816.481	1.906.602
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	226.634	274.277	294.234	313.375	397.809	417.546
Proyeksi Jumlah Kebutuhan TPST	0	4	4	5	6	6

Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Sulawesi Barat untuk 20 Tahun mendatang diproyeksikan mengalami peningkatan. Ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar 274.277 ton Proyeksi Timbulan Sampah sehingga membutuhkan sebanyak 4 TPST, Tahun 2030 dan Tahun 2035 proyeksi timbulan sampah sebesar 294.234 ton dan 313.375 Ton sehingga membutuhkan sebanyak 4 TPST dan 5 TPST, Tahun 2040 dan Tahun 2045 proyeksi timbulan Sampah sebesar 397.809 ton dan 417.546 Ton membutuhkan sebanyak 6 TPST.

2.6.2.5. Proyeksi kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya Kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan Kesehatan. Dalam usaha mewujudkan hak bagi masyarakat, dilakukan proyeksi pemenuhan kebutuhan sarana Kesehatan pada periode 2025-2045.

Tabel 2.44 Standar Pelayanan Kesehatan berdasarkan populasi dan radius pelayanan

No	Jenis Sarana	Threshold (Jiwa)	Radius layanan (m)
1	Puskesmas	120.000	3.000
2	Rumah Sakit	240.000	6.000

Tabel 2.45 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	1.458.657	1.502.886	1.612.243	1.717.126	1.816.481	1.906.602
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Puskesmas	98	100	105	105	108	109
Rumah Sakit	16	15	19	21	22	24

Kebutuhan pengelolaan Fasilitas Kesehatan kedepan meliputi Kebutuhan akan Fasilitas Puskesmas dan Fasilitas Rumah Sakit. Dari hasil proyeksi kebutuhan Fasilitas Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 Tahun mendatang mengalami peningkatan namun tidak signifikan, Pada Tahun 2025 di proyeksikan kebutuhan Puskesmas sebanyak 100 Unit dan 15 Unit RS, Tahun 2030 diproyeksikan 105 Unit Puskesmas dan 19 Unit RS, Tahun 2035 diproyeksikan 105 Unit Puskesmas dan 21 Unit RS, Tahun 2040 di Proyeksikan Kebutuhan 108 Unit Puskesmas dan 22 Unit RS dan 2045 diproyeksikan kebutuhan Puskesmas sebesar 109 Unit dan 24 Unit RS.

2.6.2.6. Proyeksi kebutuhan Pendidikan

Dalam 20 Game Changer Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 mengutamakan wajib belajar 13 tahun atau setara lulus SMA/MA ditambah 1 tahun pra sekolah. Untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan 13 tahun tersebut, dibutuhkan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang mendukung proses pembelajaran Sarana pendidikan yang terdapat di kawasan perencanaan yakni terdapat TK/Sederajat, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, serta PT/Sekolah Tinggi. Untuk mengetahui kebutuhan sarana pendidikan berdasarkan banyaknya populasi penduduk hingga tahun 2045 dan radius pencapaian minimalnya, kebutuhannya sudah diatur dalam Standar Nasional Indonesia, berikut merupakan penjabaran dari standar perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana Provinsi Sulawesi Barat sampai Tahun 2045.

Tabel 2.46 Tabel Perhitungan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Radius Pelayanan	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian	Luas Lahan Minimal (m ²)
1	Taman Kanak-Kanak	1.250	500 m ²	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	500
2	Sekolah Dasar	1.600	1000 m ²		2.000
3	SMP/MTS	4.800	1000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	9.000
4	SMA/SMK/MA	4.800	3000 m ²		12.500

Tabel 2.47 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (m ³)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	1.458.657	1.502.886	1.612.243	1.717.126	1.816.481	1.906.602
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK	1.495	1.202	1.290	1.374	1.453	1.525
SD/MI	1.403	939	1.008	1.073	1.135	1.192
SMP/MTS	518	313	336	358	378	397
SMA/MA/SMK	306	309	313	318	321	324
SLB	25	26	27	29	30	32

Kebutuhan pengelolaan Fasilitas Pendidikan kedepan meliputi Kebutuhan Fasilitas TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 20 Tahun mendatang diproyeksikan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2025 diproyeksikan dibutuhkan 1.202 TK, 939 Unit SD/MI, 313 Unit SMP/MTS, dan 324 Unit SMA/MA/SMK. Mengalami peningkatan sampai Tahun 2045 diproyeksikan 1.525 Unit TK, 1.192 Unit SD/MI, 397 Unit SMP/MTS, 324 unit SMA/MA/SMK dan 32 unit SLB.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Tujuan penataan ruang dalam konteks untuk pengembangan wilayah Sulawesi Barat dalam dua puluh tahun ke depan adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang aman, produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan,



berbasis pada kearifan lokal malaqbi menuju provinsi yang terkemuka. Guna mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan arah kebijakan penataan ruang meliputi:

1. pergeseran sektor basis perekonomian Provinsi Sulawesi Barat ke sektor perekonomian yang lebih kompetitif
2. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat permukiman yang berupa pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat
4. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
6. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar dan intra kawasan budidaya
7. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan

Arahan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi arahan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Struktur Ruang

Salah satu wujud penataan ruang adalah struktur ruang. Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman (Sistem pusat permukiman wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi, dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi terdiri atas sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi baik darat, laut maupun udara; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya.



a. Sistem Pusat Permukiman

Sistem permukiman merupakan susunan kawasan-kawasan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi. Sistem Pusat Permukiman yang ada di Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas PKN, PKW dan PKL.

Sistem Permukiman	Pusat Pengembangan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Mamuju yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Mamuju
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan Perkotaan Majene
	Kawasan Perkotaan Pasangkayu
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Mamasa di Kabupaten Mamasa
	Kawasan Perkotaan Mambi di Kabupaten Mamasa
	Kawasan Perkotaan Sumarorong di Kabupaten Mamasa
	Kawasan Perkotaan Papalang di Kabupaten Mamuju
	Kawasan Perkotaan Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah
	Kawasan Perkotaan Balanipa di Kabupaten Polewali Mandar
	Kawasan Perkotaan Polewali di Kabupaten Polewali Mandar
	Kawasan Perkotaan Sidodadi di Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan persebaran sistem pusat permukiman provinsi dan kontribusi wilayah yang dipengaruhi, maka arahan pengembangan kawasan di Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan berdasarkan letak dan potensi sumber daya alam wilayah, aspek transportasi dan keterjangkauan antar wilayah sehingga diharapkan akan memacu pertumbuhan kawasan sentra-sentra produksi dan interkoneksi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Wilayah pengembangan tersebut adalah wilayah Utara yang meliputi kabupaten Pasangkayu dan kabupaten Mamuju Tengah dengan PKW Pasangkayu sebagai pusat pengembangan kawasan dengan arahan pengembangan sektor unggulan: Sektor industri, perdagangan, pertanian dan perikanan. Wilayah tengah yang meliputi Kab. Mamuju dengan PKN matabe sebagai pusat pengembangan kawasan dengan arahan sektor unggulan: sektor pariwisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), Industri,



Perdagangan dan Perikanan serta wilayah Selatan yang meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa dengan PKW Majene sebagai pusat pengembangan kawasan dengan sektor unggulan: sektor industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata sosial budaya, pertanian dan perikanan

b. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi provinsi ini terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. Pengembangan sistem jaringan transportasi dalam wilayah provinsi bertujuan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan dan antar pusat-pusat permukiman dan mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat-pusat kegiatan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan pusat-pusat permukiman.

Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, dan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

c. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi secara umum terdiri atas Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terbagi lagi menjadi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan jaringan minyak dan gas bumi. Sementara, untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik masih terbagi lagi menjadi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan pipa/ kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik, dan gardu listrik. Infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu TBBM Palipi di Kabupaten Majene.

d. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari pembangkit listrik yang telah beroperasi dan terdapat juga yang masih dalam tahap perencanaan. Infrastruktur pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari:



1. Pembangkit listrik tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Mamuju
2. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju
3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten
4. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene
5. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Majene
6. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
7. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Pasangkayu

e. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Provinsi berupa jaringan tetap yang terdiri dari jaringan serat optik, jaringan telekomunikasi bawah laut, dan Stasiun Telepon Otomat (STO). Jaringan serat optik melewati seluruh wilayah kabupaten dan jaringan telekomunikasi kabel bawah laut meliputi Koridor Teluk Mandar-Polewali, Makassar-Kota Baru, Balikpapan-Mamuju, Mamuju-Balikpapan, Mamuju-Polewali, Doda Balikpapan INA-CBT, Makassar-Manado, Singapura-Amerika (Apricot), dan Singapura-Amerika (Bifrost). Sedangkan, Stasiun Telepon Otomat (STO) terdiri dari STO Majene, STO Mamasa, STO Mamuju, STO Pasangkayu, dan STO Polewali Mandar

f. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air bersih dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi dan Bangunan sumber daya air terdapat di seluruh kabupaten. Sedangkan Sistem jaringan air bersih meliputi pipa bawah laut air bersih Binuang – Pulau Battoa, pipa bawah laut air bersih Kalukku – Pulau Timor Bakengkeng, dan pipa bawah laut air bersih Mamuju – Pulau Karampuang.

2. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya. Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada suatu wilayah yang dalam hal ini wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Provinsi. Kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- 1) Badan air seluas kurang lebih 4.598 ha yang terdapat di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar dan Pasangkayu.
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas kurang lebih 452.544 ha terdapat di seluruh kabupaten.
- 3) Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 5.229 ha terdapat di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar dan Pasangkayu.
- 4) Kawasan konservasi meliputi Kawasan konservasi di darat dan di laut seluas kurang lebih 372.939 ha terdapat di kawasan konservasi Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar. Kawasan konservasi Taman Perairan Balabalakang di wilayah laut, dan kawasan konservasi Taman Pulau Kecil di Kabupaten Mamuju
- 5) Kawasan pencadangan konservasi di laut seluas kurang lebih 22.568 ha terdapat di wilayah laut
- 6) Kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 1.786 ha terdapat di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Wilayah laut.

Kawasan peruntukan budidaya Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya meliputi:

- 1) Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 53.017 ha terdapat di Majene, Mamasa, Pasangkayu dan Polewali Mandar.
- 2) Kawasan pertanian seluas kurang lebih 483.386 ha terdapat di seluruh kabupaten. Pada kawasan pertanian ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 37.572 ha yang terdapat di seluruh kabupaten



- 3) Kawasan perikanan seluas kurang lebih 1.783.397 ha terdapat di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Wilayah laut.
- 4) Kawasan pergaraman seluas kurang lebih 242 ha terdapat di Kabupaten Majene, Polewali Mandar dan Wilayah laut.
- 5) Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 30 ha terdapat di Kabupaten Mamuju.
- 6) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.893 ha terdapat di Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Polewali Mandar dan Wilayah laut.
- 7) Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 4.236 ha terdapat di seluruh kabupaten dan wilayah laut.
- 8) Kawasan permukiman seluas kurang lebih 45.554 ha terdapat di seluruh kabupaten dan di wilayah laut.
- 9) Kawasan transportasi seluas kurang lebih 3.661 ha terdapat di seluruh kabupaten dan wilayah laut.
- 10) Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 17 ha terdapat di Kabupaten Mamuju dan wilayah laut.

3. Kawasan Strategis

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat, Kawasan strategis provinsi terdiri dari kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi terpadu pelabuhan, bandara, industri, perdagangan dan Pergudangan Mamuju - Tampa Padang - Belang Belang (MATABE) di Kabupaten Mamuju
 - b. Kawasan strategis provinsi agropolitan, meliputi:
 - 1) Kawasan Strategis Agropolitan Wilayah Utara pada wilayah administrasi Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah



- 2) Kawasan Strategis Agropolitan Wilayah Selatan pada wilayah administrasi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene
- c. Kawasan strategis provinsi hortikultura pada wilayah administrasi Kabupaten Mamasa
- d. Kawasan strategis provinsi minapolitan, meliputi:
 - 1) Kawasan Strategis Minapolitan Pesisir Pantai Utara pada wilayah administrasi Kabupaten Pasangkayu
 - 2) Kawasan Strategis Minapolitan Pesisir Pantai Selatan pada Wilayah administrasi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene
- e. Kawasan Strategis Provinsi Kota Terpadu Mandiri Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah
- f. Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Tinggi Majene di Kabupaten Majene
2. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu KSP Kawasan Wisata Adat Mamasa di Kabupaten Mamasa
3. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan strategis provinsi kepulauan Bala Balakang pada wilayah administrasi Kabupaten Mamuju

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data pada bagian gambaran umum kondisi daerah, maka diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat yang membutuhkan intervensi jangka panjang. Permasalahan tersebut yaitu:

1. Belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren melambat sejak tahun 2018. Perlambatan semakin tajam pada saat terjadinya Pandemi Covid-19, dimana perekonomian mengalami kontraksi yang cukup dalam, lebih dalam dari angka Nasional. Ini untuk pertama kalinya, sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat berada di bawah angka Nasional. Pasca Pandemi Covid-19, proses pemulihan ekonomi Sulawesi Barat juga berjalan lambat. Bahkan pada tahun 2022, di saat pandemi Covid-19 dinyatakan sudah berakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat justru lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat terus berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dalam lima tahun terakhir karena semua sektor ekonomi (lapangan usaha) yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor dimaksud adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan. Padahal ketiga sektor ini, jika diakumulasikan, menyumbang hampir dua per tiga terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Penyebab lainnya adalah sektor konstruksi yang mengalami kontraksi yang cukup dalam sejak pandemi Covid-19. Akibatnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat terus menurun. Padahal sektor ini menjadi penyumbang terbesar keempat terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Mengkerutnya anggaran pemerintah, belum pulihnya dunia usaha, dan belum kembalinya daya beli masyarakat, menjadi penyebab utama melemahnya pembangunan konstruksi.

2. Masih tingginya angka kemiskinan

Provinsi Sulawesi Barat masih mencatat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi (dua digit). Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat berada di atas angka Nasional. Dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat masih menempati posisi ke-11 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi ketiga terbesar setelah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat cenderung meningkat terutama setelah Pandemi Covid-19. Pada Maret 2020, sebelum Pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 10,87 persen yang merupakan angka terendah sepanjang periode 2006-2023. Namun pada saat Pandemi Covid-19 angka kemiskinan bergerak naik dan kemudian mencapai angka 11,92 persen pada September 2022, kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 10,49 di tahun 2023 hingga tahun 2024 sebesar 11,21 persen.

Peningkatan angka kemiskinan terutama disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, rendahnya produktivitas tenaga kerja, semakin sulitnya memperoleh pekerjaan dengan balas jasa yang layak, terbatasnya akses penduduk miskin terhadap sumberdaya ekonomi, rendahnya kualitas angkatan kerja (tingkat pendidikan dan keterampilan), dll.

3. Belum meratanya pembangunan antar wilayah

Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari dua parameter yaitu kontribusi PDRB masing-masing kabupaten terhadap provinsi dan Indeks Williamson. Tahun 2009 (sebelum pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah), perekonomian Provinsi Sulawesi Barat dikontribusi sebagian besar oleh Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar masing-masing dengan proporsi 32,23 persen dan 28,79 persen. Jika diakumulasi, dua kabupaten ini menyumbang lebih dari setengah terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, sementara tiga kabupaten lain kontribusinya hanya di bawah 20 persen. Kondisi tersebut mengalami perubahan setelah 13 tahun kemudian, namun masih tetap menunjukkan ketimpangan kontribusi masing-masing daerah. Tahun 2022, tiga kabupaten yang memiliki kontribusi relatif besar terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Polewali Mandar sebesar 27,46 persen, Mamuju 24,75 persen, dan Pasangkayu 24,39 persen.

Kabupaten Majene hanya berperan 10,24 persen, sementara Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa peranannya di bawah 10 persen.

Selain kontribusi masing-masing kabupaten terhadap PDRB, ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat juga terlihat dari Indeks Williamson yang cenderung meningkat dalam 18 tahun terakhir. Tahun 2005, saat Provinsi Sulawesi Barat baru saja dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat ketimpangan pembangunan wilayahnya masih rendah, ditunjukkan dengan nilai indeks 0,13 (termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah). Namun seiring dengan perkembangan waktu, ada beberapa kabupaten yang berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten lainnya, sehingga membuat nilai indeksnya naik tajam, bahkan di tahun 2015 dan 2020 sempat mencapai angka 0,48 dan 0,52. Angka 0,48 menunjukkan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat sudah memasuki fase ketimpangan sedang, sementara angka 0,52 termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan tinggi. Meskipun angka indeksnya mengalami penurunan di dua tahun terakhir, bahkan di tahun 2022 cukup rendah yaitu 0,26, tapi dalam rentan 18 tahun terakhir ada kecenderungan meningkat.

Penyebabnya, karena Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamuju mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. Yang menarik, struktur perekonomian semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat relatif sama, ditopang sebagian besar oleh sektor pertanian, tapi progres pertumbuhan ekonomi mereka justru timpang. Khusus Kabupaten Pasangkayu, satu-satunya daerah yang cukup besar peranan sektor industri pengolahannya, di atas 20 persen sehingga menyebabkan nilai tambah ekonomi daerah ini bisa lebih tinggi dari daerah lain. Dari sisi pengeluaran, semua kabupaten mengandalkan konsumsi rumah tangga dan PMTB, namun ada beberapa pembeda yang membuat sebuah daerah memiliki nilai tambah lebih tinggi dari daerah lain. Kabupaten Pasangkayu misalnya, satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang net ekspornya positif, artinya kabupaten ini punya nilai ekspor lebih tinggi dari impornya.

Tingginya ekspor dan besarnya kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Pasangkayu disebabkan karena sebagian besar perusahaan berbasis kelapa sawit berlokasi di kabupaten ini. Hal ini menunjukkan besarnya investasi yang mengalir masuk ke Kabupaten Pasangkayu dibandingkan daerah lain di Provinsi

Sulawesi Barat. Begitupun dengan Kabupaten Polewali Mandar yang kontribusi sektor perdagangan besar dan ecerannya relatif tinggi dibandingkan daerah lain, memberi gambaran bahwa sebagian besar investasi pada sektor perdagangan besar dan eceran lebih dominan masuk di Kabupaten Polewali Mandar dibandingkan daerah lain.

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Ada empat indikator yang dijadikan acuan dalam menyimpulkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Angka Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dimana Tahun 2019 sebesar 60,28 kategori B (Baik), hingga di tahun 2022 sebesar 65,92 kategori B (Baik), namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 60,20 meskipun masih dalam kategori B (Baik) dari Kementerian PANRB. Meskipun mengalami kenaikan dan mencapai kategori Baik, tapi kategori menunjukkan bahwa pemerintah provinsi hanya memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Oleh karena itu, perbaikan masih perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Penyebab masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulawesi Barat adalah masih rendahnya capaian pemerintah provinsi pada aspek-aspek yang menjadi komponen perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi seperti RB General dan RB Tematik. Dimensi RB General terdiri dari dua komponen, yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Beberapa variabel yang termasuk dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah Indeks Pelayanan Publik, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan indeks inovasi daerah.

Indikator Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan kenaikan dalam sejak pertama kali indeks ini diberlakukan, angkanya di tahun 2022 mencapai 2,28. Meski naik, angka tahun 2022 masih termasuk dalam kategori nilai indeks “cukup” dan



masih di bawah pencapaian Nasional. Namun memasuki tahun 2023 nilai indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat meningkat menjadi 2,89 poin dengan kategori Baik.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan nilai indeks di Provinsi Sulawesi Barat. Pertama adalah digital *mindset* penyelenggara pemerintahan perlu ditingkatkan. Selama bertahun-tahun, ASN bekerja dalam sistem konvensional, sehingga cara berfikir mereka dalam memberikan pelayanan ke masyarakat perlu diubah menjadi digital *mindset*. Berikutnya adalah SPBE perlu menjadi prioritas kebijakan dan mendapat perhatian oleh para pimpinan. Selanjutnya adalah pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan digitalisasi perlu dioptimalkan. Serta kualitas dan kuantitas SDM TIK di daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung SPBE. Dan selanjutnya perlunya meredam ego sektoral dalam lingkup pemerintah provinsi dan meningkatkan sinergi antar *stakeholder*.

Pada indikator indeks inovasi daerah, Provinsi Sulawesi Barat juga tertinggal dari banyak provinsi lain. Indeks inovasi daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 hanya 46,41, termasuk kategori inovatif. Namun di tahun 2023 nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 29,04 poin pada kategori Provinsi Kurang Inovatif berada pada peringkat 32 Nasional dari 38 Provinsi. Masih relatif rendahnya angka Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya belum optimalnya pembinaan dan pendampingan untuk menciptakan Inovasi yang sesuai permasalahan pembangunan, termasuk beberapa Inovasi yang dilaksanakan tidak berkesinambungan / berkelanjutan. Demikian halnya dengan kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan) di dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih terbatas.

5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam proses pembangunan Sulawesi Barat, terutama dengan proyeksi populasi mencapai 1,9 juta jiwa pada tahun 2045 yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) memiliki peran kunci dalam proses pembangunan. Diperkirakan pada tahun 2030, rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Barat akan mencapai 49,78%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 49 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Peningkatan jumlah penduduk usia produktif

menimbulkan peluang sekaligus tantangan. Jika dimanfaatkan dengan baik, mereka dapat menjadi sumber daya pembangunan. Namun, jika tidak, mereka dapat menjadi hambatan.

Kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong rendah, berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat berada di bawah rata-rata nasional, mencapai 69,8 poin. Masih rendahnya angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal lain seperti angka stunting yang masih tinggi mencapai 30,3%, tertinggi kelima secara nasional. Demikian halnya dengan jumlah anak tidak sekolah di Sulawesi Barat cukup besar mencapai sekitar 48.105 jiwa, dan angka pernikahan usia anak mencapai 11,25%. Kualitas tenaga kerja juga masih rendah, dimana terdapat sebesar 60,1% penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan SLTP ke bawah.

6. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup

Ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat salah satunya adalah konflik dan degradasi kawasan hutan. Degradasi kawasan hutan mempengaruhi indeks tutupan lahan yang cenderung menurun dalam 13 tahun terakhir. Penurunan paling tajam dalam indeks tutupan lahan terjadi sepanjang tahun 2015 hingga 2019, karena pada periode ini angka indeks hanya berada di bawah 70, padahal pada periode sebelumnya Provinsi Sulawesi Barat sempat mencapai angka indeks di atas 80, bahkan tahun 2013 mencapai 99,20. Tahun 2020 hingga 2022, angkanya memang lebih tinggi dari periode 2015-2019, tapi selama tiga tahun tersebut tidak konsisten naik karena tahun 2022 mengalami penurunan dari 72,66 ke 71,88.

Konflik pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu penyebab penurunan indeks tutupan lahan. Kawasan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagian besar telah terdegradasi, akibatnya masyarakat di sekitar hutan telah melakukan aktivitas pemanfaatan hutan yang tidak mendukung fungsi kawasan hutan. Aktivitas tersebut diantaranya adalah penebangan liar, perambahan hutan seperti masyarakat yang berkebun secara berpindah-pindah di Kawasan Hutan Lindung. Selain itu, adanya aktifitas penambangan yang memiliki izin lingkungan maupun yang tidak memiliki izin lingkungan termasuk menjadi penyebab degradasi kawasan hutan. Degradasi hutan menyebabkan penurunan wilayah yang memiliki layanan lingkungan penting seperti pangan, air, kualitas udara, iklim, tata air, dan keanekaragaman hayati.

Masih rendahnya kualitas lingkungan juga tergambar dari rendahnya indeks kualitas air. Tahun 2012 hingga 2016, indeks kualitas air di Provinsi Sulawesi Barat terus menurun, mulai dari 60,84 di tahun 2012, menjadi 57,11 tahun 2013, dan di tahun 2015 mencapai angka paling rendah sebesar 45,13. Meski sempat mengalami kenaikan di tahun 2017 dan 2018 masing-masing menjadi 73,89 dan 82,43, tapi angkanya turun kembali pada tahun 2019 ke 56,15. Hingga tahun 2022, indeks kualitas air di Provinsi Sulawesi Barat tak pernah lagi mencapai angka 70, hanya mampu mencapai 56,41. Angka tersebut termasuk dalam kategori sedang. Ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya indeks kualitas air di Provinsi Sulawesi Barat yaitu masuknya sampah plastik ke wilayah perairan, tingginya tingkat pencemaran air yang dilihat dari semakin menurunnya nilai indeks pencemaran air (IPA) tiap kabupaten dari tahun ke tahun dan saat ini berada dalam posisi waspada, dan pencemaran bahan organik (terutama dari pengolahan kelapa sawit) ke perairan.

7. Masih Rendahnya Kapasitas Fiskal

Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan serius dalam hal kapasitas fiskal. Salah satu indikator yang mencerminkan masalah ini adalah pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD). Dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar ± 2 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 27,14% dari total pendapatan Sulawesi Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir tiga perempat dari pendapatan daerah bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang menggambarkan kelemahan dalam kemandirian fiskal daerah.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal, Sulawesi Barat perlu melakukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Intensifikasi PAD melibatkan upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti pajak daerah, retribusi, mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini bisa dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebocoran pendapatan.

Langkah berikut yang perlu dilakukan adalah Ekstensifikasi PAD. Sulawesi Barat bisa memanfaatkan potensi lokal yang belum tergarap, seperti pengembangan sektor pariwisata, optimalisasi aset daerah, dan inovasi dalam sektor ekonomi kreatif. Pengembangan potensi ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah,

masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.

8. Masih Rendahnya Investasi dan Kerjasama Daerah

Provinsi Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan investasi dan kerjasama daerah. Hal ini tercermin dari realisasi investasi yang masih relatif kecil, yaitu sebesar Rp 2,3 Triliun pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperbaiki untuk menarik lebih banyak investasi ke wilayah ini. Salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan investasi adalah minimnya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang. Misalnya, fasilitas bandara dan pelabuhan yang ada belum memadai untuk mendukung aktivitas investasi secara optimal. Ketidakseimbangan ini membuat investor sulit untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Barat karena biaya logistik dan transportasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki infrastruktur lebih baik.

Selain itu, belum adanya kawasan industri di Sulawesi Barat juga menjadi kendala signifikan. Kawasan industri memiliki peran penting dalam menarik investasi karena menawarkan lokasi yang strategis dan fasilitas yang lengkap untuk mendukung operasional perusahaan. Tanpa adanya kawasan industri, investor merasa kesulitan untuk menemukan tempat yang cocok untuk menjalankan kegiatan bisnis.

Dukungan kerjasama antar daerah dalam meningkatkan investasi juga belum berjalan optimal. Kerjasama antar daerah seharusnya dapat membuka peluang baru dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Namun, hingga saat ini, kerjasama tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan investasi di Sulawesi Barat. Regulasi dan kemudahan investasi juga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan regulasi yang mendukung investasi serta memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan dan proses administrasi lainnya. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan prosedur yang lebih sederhana, diharapkan akan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Sulawesi Barat.

9. Tingginya Resiko Bencana

Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan besar terkait tingginya resiko bencana alam. Sebagai wilayah yang secara geografis rentan terhadap berbagai jenis bencana, Sulawesi Barat sering kali mengalami bencana alam yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan tsunami merupakan ancaman nyata yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Sulawesi Barat berada di wilayah yang rawan gempa karena terletak di antara dua lempeng tektonik aktif. Selain itu, topografi yang berbukit-bukit dan memiliki banyak aliran sungai membuat wilayah ini rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali juga memperburuk kondisi alam sehingga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.

Berdasarkan kajian Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sulawesi Barat memiliki indeks resiko bencana tertinggi sebesar 160,08 poin dengan kategori tinggi. Berdasarkan kajian tersebut terdapat beberapa ancaman bencana di Sulawesi Barat diantaranya Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstim dan abrasi.

Pengukuran Indeks Risiko Bencana terdiri dari tiga komponen diantaranya (i) Komponen Bahaya terkait dengan probabilitas dan intensitas, selanjutnya adalah (ii) Komponen Kerentanan terkait dengan kondisi sosial meliputi kepadatan penduduk dan kelompok rentan, kondisi ekonomi meliputi luas lahan produktif, PDRB persektor, kondisi Fisik meliputi rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis, serta kondisi lingkungan yang meliputi hutan lindung, mangrove, hutan alam, semak dan rawa. Selanjutnya adalah (iii) komponen Kapasitas terkait dengan kapasitas masyarakat yang meliputi pengaruh kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat, ketidaktergantungan masyarakat dan partisipasi masyarakat

Kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan. Program mitigasi bencana yang belum optimal dan kurangnya edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya langkah-langkah pencegahan bencana turut berkontribusi terhadap tingginya risiko bencana di Provinsi Sulawesi Barat.

3.2 Isu-Isu Strategis

1. Isu Global

▪ Perubahan Paradigma Pembangunan Global

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri.

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu penting dunia saat ini, karena menyangkut ketersediaan aspek-aspek penting kehidupan manusia, seperti energi, kelestarian lingkungan dan ketersediaan air baku. Konsep pembangunan berkelanjutan juga mensyaratkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Dasar hukum dari pembangunan berkelanjutan adalah UU 32 tahun 2009 yang menggantikan UU nomor 23 Tahun 1997 yang membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan hidup, yang menjadi salah satu konsep utamanya. Konsep lain yang diusung meliputi upaya untuk memperbanyak sumber daya alam yang dapat diperbarui, menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia baik dalam waktu sekarang maupun di masa depan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang

Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Bappenas RI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga turut berupaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini terbukti dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022.

Berdasarkan data dari Bappenas, RAD SDGs Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023–2026 masih sedang proses yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Untuk pilar sosial, dari 87 indikator telah tercapai 54 indikator, untuk pilar ekonomi dari 89 indikator sudah tercapai 34 indikator, untuk pilar lingkungan dari 77 indikator sudah tercapai 14, untuk pilar hukum dan tata kelola dari 36 indikator sudah tercapai 12 indikator.

Tantangan capaian SDGs di Provinsi Sulawesi Barat adalah di sektor ekonomi yang belum begitu cepat. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah positif namun belum pesat karena tingkat kemiskinan di provinsi tersebut masih mencapai 11,92

persen. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat masih 66,92 dimana angka ini masih jauh di bawah IPM nasional. Angka stunting juga masih menjadi tantangan pencapaian SDGs karena masih tinggi yaitu 35 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah di angka 67,64 persen.

Salah satu capaian SDGs Provinsi Sulawesi Barat yakni rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak yang mengalami peningkatan hingga mencapai 76,67 persen di tahun 2021. Namun capaian ini masih berada di bawah capaian Nasional yakni 90,21 persen. Dari sisi kesehatan, capaian SDGs Provinsi Sulawesi Barat yakni angka kematian ibu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 angka kematian ibu sebesar 271 menurun menjadi 179 di tahun 2020. Selanjutnya untuk capaian Industri, inovasi, dan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat dengan indikator jalan nasional dengan kondisi mantap mengalami peningkatan sejak tahun 2014 dengan panjang jalan 567,88 Km meningkat hingga mencapai 1.387,41 Km di tahun 2021. Peningkatan capaian SDGs di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertekad untuk turut andil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.

▪ **Kebijakan Pro-Lingkungan yang memperhatikan Perubahan Iklim**

Pemanasan global (global warming) menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi, kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar infra merah diserap oleh udara dan permukaan bumi.

Sebagian sinar infra merah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kontribusi besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia.

Gambar 3.2 Proses Perubahan Iklim



Sumber: BMKG Indonesia

Pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencairnya lapisan es di kutub Utara dan Selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global, hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Permukiman penduduk dilanda banjir rob akibat air pasang yang tinggi, dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus menerus maka akibatnya dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat.
2. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi

penduduk, kelaparan, lapangan kerja bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup.

3. Punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban, kadar air dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembaban udara dan berdampak pada pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna.
4. Habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembaban dan produktivitas primer sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Migrasi burung akan berubah disebabkan perubahan musim, arah dan kecepatan angin, arus laut (yang membawa nutrisi dan migrasi ikan).
5. Peningkatan muka air laut, air pasang dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir.
6. Ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya.
7. Perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak pada hasil perikanan tangkap.
8. Berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu, kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Jenis-jenis larva yang berubah resistensinya terhadap perubahan musim dapat meningkatkan penyebaran organisme ini lebih luas. Ini menimbulkan wabah penyakit yang dianggap baru.
9. Mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina. Dikhawatirkan merusak kehidupan masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Masyarakat lokal yang pertama kali menjadi korban akibat kerusakan terumbu karang ini. Untuk menyelamatkan kerusakan terumbu karang akibat pemanasan global ini, maka para aktivis lingkungan dari enam negara tersebut telah merancang protokol adaptasi penyelamatan terumbu karang. Lebih dari 50 persen spesies terumbu karang dunia hidup berada di kawasan segitiga ini.

Berdasarkan data *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), sebanyak 30 persen terumbu karang dunia telah mati akibat badai el nino pada 1998 lalu. Diprediksi, pada 10 tahun ke depan akan kembali terjadi kerusakan sebanyak 30 persen.

Salah satu dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global yakni naiknya permukaan air laut. Hal ini turut dirasakan oleh penduduk di wilayah pesisir Provinsi Sulawesi Barat. Setidaknya 88.000 penduduk pesisir terancam paparan gelombang ekstrim dan abrasi, berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2023.

Sejak 2021, bencana yang disusul banjir laut itu setidaknya merusak 18 hektar dan menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah, di tengah kapasitas rendah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan data indeks risiko bencana pada 2010, tinggi gelombang di pesisir pantai bagian selatan mencapai 1-1,25 meter, sedikit lebih tinggi daripada bagian utara, 0,75-1 meter. Sedangkan, data terkini dari Januari 2021 hingga Oktober 2023, ketinggian maksimum dari gelombang di pesisir pantai mencapai 2,3 meter.

Abrasi yang terjadi berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah pesisir Provinsi Sulawesi Barat. Sumber-sumber air tawar atau air bersih terpengaruh air laut. Air sumur menjadi asin sehingga warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Selain itu, terjadinya banjir rob di Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2021 dan 2022 merupakan bukti bahwa perubahan iklim dan pemanasan global telah mengancam daerah ini. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam menangani dampak perubahan iklim.

▪ **Adaptasi Teknologi (*Society 5.0*)**

Perkembangan teknologi adalah majunya teknologi dari masa ke masa menjadi lebih canggih atau lebih baik. Teknologi merupakan salah satu hal yang digemari oleh masyarakat mulai dari kalangan anak kecil sampai dengan orang dewasa. Hal ini menjadikan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Melihat pada perkembangan teknologi saat ini, dapat dibayangkan apa yang dapat dirasakan pada perkembangan teknologi yang terjadi, seperti jauhnya jarak yang tidak akan lagi terasa, mencari sesuatu lebih mudah dilakukan dengan satu kali klik, pekerjaan manusia terasa lebih mudah dengan cara dikontrol dari jauh.

Pada kehidupan masyarakat saat ini teknologi dijadikan sebagai bagian penting yang sangat dibutuhkan. Masyarakat menjadikan teknologi sebagai sarana dalam komunikasi agar terasa lebih mudah dan praktis. Masyarakat juga menjadikan alat komunikasi sebagai sarana hiburan agar tidak bosan saat beraktivitas. Dalam lingkungan sosial di masyarakat Perkembangan teknologi juga memberi inovasi terbaru dalam bersosialisasi. Untuk Indonesia, kemajuan pada bidang teknologi sangat berdampak terhadap berbagai aspek contohnya kemajuan pada sektor ekonomi dan juga sosial.

Perkembangan teknologi dalam kehidupan sosial masyarakat tidak selalu menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan masyarakat, berkembangnya teknologi juga memudahkan pekerjaan dalam kegiatan sosial masyarakat serta membantu masyarakat agar lebih aktif bersosialisasi sehingga kehidupan sosial terasa lebih mudah dan efisien.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang signifikan atas tercapainya dunia yang terglobalisasi. Akses informasi tentang dunia melalui berbagai media tersalurkan dengan cepat, jarak bukan tidak jadi, penghalang, waktu tidak lagi menjadi penghambat. Maka tidak heran jika globalisasi dianggap sebagai suatu keadaan yang menciptakan koneksi. Globalisasi dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang mampu membangun kesejahteraan dan membawa hidup ke jenjang yang lebih modern.

Salah satu hal yang sedang menjadi trend saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah *e-learning*, *e-banking*, *e-library*, *e-laboratory*, *e-mail* dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas, dimensi ruang dan waktu tidak lain menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin menjadi efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, pager, PDA, laptop hingga palmtop sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih.

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan Provinsi Sulawesi Barat. Guna merespon kemajuan teknologi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada



penyelenggaraan pemerintahan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya SPBE maka tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, guna menjembatani kesenjangan digital antara kota dan desa serta mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan kegiatan pelatihan literasi digital tingkat desa.

Tentunya kemajuan teknologi juga didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi. Di tahun 2021 penerimaan sinyal internet telepon seluler di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dimana sebanyak 356 desa dengan kapasitas 4G/LTE, 80 desa dengan kapasitas 3G/H/H+/EVDO, 44 desa dengan kapasitas 2,5G/E/GPRS, dan 74 desa yang belum menerima sinyal internet.

Pada awal Januari 2019, muncul sebuah gagasan baru dari peradaban Jepang, yaitu Society 5.0, yang disampaikan pada Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul sebagai respon atas Revolusi Industri 4.0. Berbeda dengan konsep Revolusi Industri 4.0 yang telah menciptakan perubahan dalam cara orang bekerja dan berinteraksi di tempat kerja, Society 5.0 membawa konsep ini lebih jauh dengan mengubah dinamika sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Society 5.0 sebuah konsep yang berpusat pada manusia (*human-centered*) yang berbasis pada penggunaan teknologi (*technology based*). Society 5.0 berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan berpusat pada manusia, yang berusaha menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik. Pada era Society 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya (siber/virtual). Kemudian di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk.

Seperti halnya Revolusi Industri 4.0, Society 5.0 juga mengalami revolusi. Dimulai dari Society 1.0 dimana manusia masih berada di era berburu (*hunting society*). Pada Society 2.0, manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam (*farming society*). Lalu pada Society 3.0, manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari (*industrial society*). Kemudian berlanjut ke Society 4.0, dimana manusia mulai mengenal komputer, handphone, hingga internet (*information*

society). Terakhir Society 5.0, dimana manusia mulai mengenal *internet of things*, *big data*, *artificial intelligence*, dan *robotic (super smart society)*. Society 5.0 merupakan era baru dalam kehidupan masyarakat yang telah terintegrasi dengan sistem teknologi paling mutakhir.

Seluruh revolusi ini mempengaruhi secara signifikan kehidupan manusia dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Diharapkan kemajuan ini dapat membantu masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Society 5.0, antara lain: (i) perkembangan teknologi secara massif akan mempercepat proses perkembangan peradaban manusia; (ii) tatanan sosial masyarakat akan berubah seiring dengan proses adaptasi manusia terhadap kemajuan teknologi; (iii) hilangnya berbagai jenis pekerjaan konvensional di satu sisi, tetapi munculnya beragam jenis pekerjaan baru yang berbasis teknologi di sisi lain; (iv) berkurangnya kesenjangan regional, bahasa, usia, dan gender; (v) pendidikan akan berkembang ke arah yang lebih interaktif dengan menggunakan konsep virtual; (vi) informasi mengenai kondisi kesehatan akan lebih diperoleh dari perangkat teknologi; (vii) berbagai bentuk layanan publik akan lebih mudah di akses; dan (viii) dunia kerja akan semakin kompetitif dan kompleks akibat kemajuan teknologi ke arah yang tak terduga.

▪ **Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Kawasan Hijau**

Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Kawasan Hijau adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau kawasan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan ini: (i) Penggunaan Energi Terbarukan: Infrastruktur yang lebih hijau mengutamakan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau air. Ini termasuk penerapan panel surya di jalan-jalan, turbin angin di sepanjang jalur transportasi, atau pembangkit listrik tenaga air untuk memasok energi bagi infrastruktur transportasi. (ii) Desain Ramah Lingkungan: Infrastruktur dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, memperhatikan efisiensi energi, dan mengurangi limbah

konstruksi. Selain itu, desain jalan, jembatan, dan lainnya juga memperhitungkan pengaruhnya terhadap ekosistem lokal. (iii) Pengelolaan Air dan Limbah: Pembangunan infrastruktur lebih hijau juga memperhatikan pengelolaan air dan limbah. Ini termasuk implementasi sistem pengelolaan air hujan yang terintegrasi, penggunaan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, dan praktek-praktek pengelolaan limbah konstruksi yang bertanggung jawab. (iv) Transportasi Berkelanjutan: Infrastruktur konektivitas yang lebih hijau mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan pejalan kaki. Ini dapat diwujudkan melalui pengembangan jaringan transportasi yang ramah lingkungan, penyediaan jalur sepeda, dan promosi penggunaan transportasi publik. (v) Penghijauan Ruang Terbuka: Selain membangun infrastruktur, pengembangan ruang terbuka hijau juga menjadi bagian dari strategi ini. Penghijauan kawasan sekitar jalan, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan kualitas udara, menyediakan habitat bagi satwa liar, serta memberikan ruang rekreasi dan relaksasi bagi masyarakat. (vi) Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Pendekatan ini juga melibatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat dan pihak terlibat dalam pembangunan. Program-program pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan mendorong partisipasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Kawasan Lebih Hijau memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

▪ **Penggunaan Sistem Keuangan Digital**

Penggunaan sistem keuangan digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kegiatan keuangan, termasuk perbankan, pembayaran, investasi, dan manajemen keuangan pribadi maupun bisnis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem keuangan digital: (i) Perbankan Digital: Perbankan digital menghadirkan layanan perbankan melalui platform digital seperti aplikasi perbankan mobile dan internet banking. Melalui

platform ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk keuangan, dan monitoring saldo serta aktivitas rekening secara real-time. (ii) Pembayaran Digital: Sistem pembayaran digital memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik, baik melalui kartu kredit/debit, dompet digital, atau transfer uang elektronik. Contoh inklusifnya adalah pembayaran tagihan listrik, air, telepon, pembelian barang dan jasa online, serta pembayaran di toko fisik menggunakan aplikasi pembayaran digital. (iii) Investasi Digital: Investasi digital memungkinkan individu untuk melakukan investasi secara online, termasuk investasi saham, reksa dana, obligasi, dan mata uang kripto. Platform investasi digital menyediakan akses mudah ke pasar keuangan global, serta menyediakan berbagai alat analisis dan informasi untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. (iv) Manajemen Keuangan Pribadi: Aplikasi manajemen keuangan pribadi membantu individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Ini mencakup pemantauan pengeluaran, pembuatan anggaran, perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta pelacakan tujuan keuangan. Beberapa aplikasi juga menawarkan fitur analisis pengeluaran dan saran investasi. (v) Fintech: Inovasi teknologi keuangan (fintech) memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis, terutama di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Contohnya termasuk layanan pinjaman peer-to-peer (P2P lending), crowdfunding, insurtech, dan wealthtech. (vi) Keamanan dan Privasi: Penggunaan sistem keuangan digital juga menyoroti pentingnya keamanan dan privasi data. Penyedia layanan keuangan digital harus mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan transaksi finansial pengguna dari ancaman siber seperti peretasan dan pencurian identitas. Penggunaan sistem keuangan digital memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses, efisiensi operasional, dan inklusi keuangan yang lebih luas. Namun, tantangan seperti keamanan data dan ketidaksetaraan akses internet juga perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan.

2. Isu Nasional

▪ **Pembangunan Ibukota Nusantara dalam Kerangka Superhub Ekonomi Nusantara**

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara Indonesia akan berpindah lokasi ke area seluas 256.142 hektar di wilayah Kalimantan Timur. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan bertempat di Kecamatan Sepaku seluas 6.671 hektar. Tepatnya, sebagian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Regulasi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini pun telah diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Tahapan pertama pembangunan IKN direncanakan pada tahun 2022-2024.

Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah tanpa argumen pendukung yang kuat dan valid. Hal ini didasari atas fakta antara lain bahwa beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Dari data penduduk yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sinkronisasi dari hasil Sensus Penduduk 2020 dengan data administrasi kependudukan (Adminduk) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94 persen penduduk Indonesia berada di Jawa. Proporsi penduduk Indonesia yang berada di Sumatera mencapai 21,73 persen. Sebanyak 7,43 persen penduduk Indonesia berada di Sulawesi. Kemudian, 6,13 persen penduduk Indonesia berada di Kalimantan. Tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi menimbulkan berbagai permasalahan turunan diantaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah demikian pula dengan polusi udara dan air.

Sebagai ilustrasi beban berat kemacetan lalu lintas di Jakarta menurut riset World Bank 2019 telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar adalah Rp 65 triliun per tahun. Jakarta masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen. Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia. Akibat kemacetan tersebut, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya bisa meningkatkan 1,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.



Kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi atau “Jawasentris”. Hal ini dapat dicermati dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.

Selain populasi, pemerintah menganggap ketersediaan air bersih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jawa khususnya Jakarta mengalami krisis air yang cukup parah. Sebagaimana kita ketahui bersama isu mengenai tenggelamnya Jakarta telah lama dibahas. Sejumlah kajian pun menyebutkan bahwa Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 – 12 sentimeter per tahun yang diikuti dengan krisis air bersih. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, *green economy*, *green energy*, *smart transportation*, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai *milestone* transformasi besar bangsa Indonesia.

Dalam perjalannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa *multiplier effect* dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarkan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50 persen wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan



provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa.

Sebelum Indonesia, beberapa negara telah mengubah ibu kota mereka dan menoreh beragam dampak positif. Salah satu negara yang pernah melakukan pergantian ibu kota adalah Brazil, dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pemindahan ibukota yang dilakukan oleh Brazil didasarkan pada beberapa faktor, terutama kelebihan penduduk yang dialami oleh ibu kota sebelumnya.

Sebagai pulau terdekat dengan IKN di Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Provinsi Sulawesi Barat dapat berperan sebagai daerah mitra yang nantinya bisa mendukung prasarana pembangunan IKN salah satunya dengan men-*supply* kebutuhan pangan dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Dari sektor perikanan, sebagian besar nelayan di Provinsi Sulawesi Barat lebih memilih menjual hasil tangkapannya ke Provinsi Kalimantan Timur karena harga yang ditawarkan lebih baik. Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Barat yang berseberangan dengan lokasi calon ibukota baru menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu lebih *concern* terhadap isu infrastruktur dan konektivitas dari dan ke IKN untuk menangkap peluang potensi ekonomi.

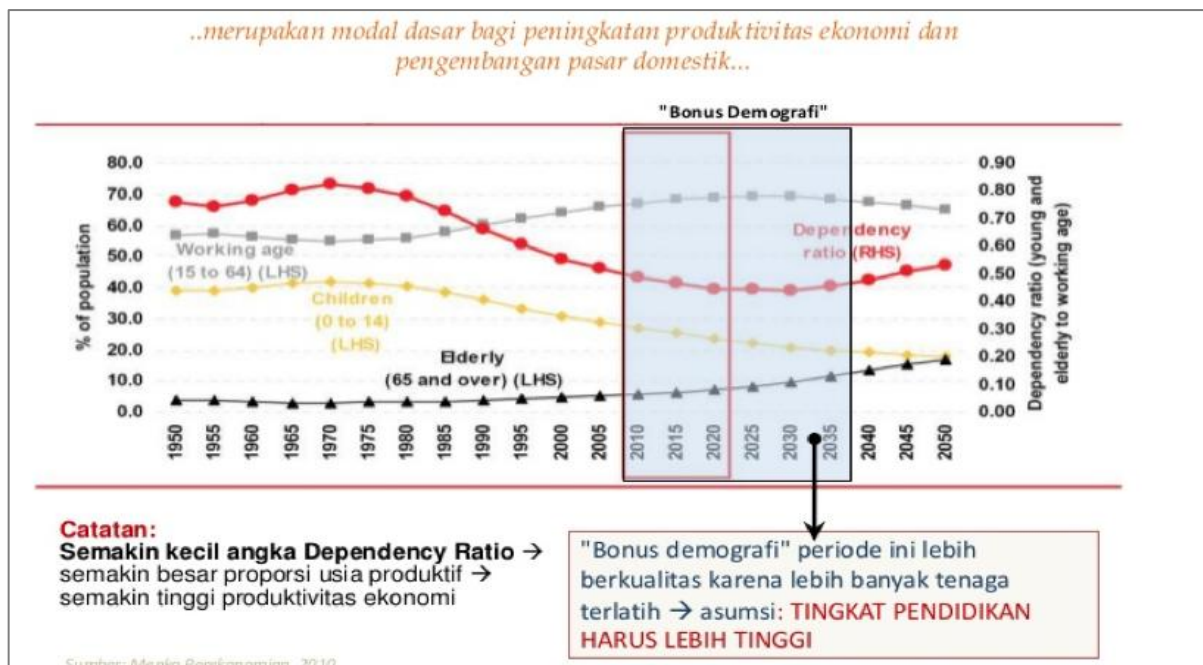
▪ **Bonus Demografi dengan SDM yang Berkualitas**

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Peningkatan tersebut diikuti pula dengan menurunnya angka kelahiran serta kematian. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun. Kesempatan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk memajukan bangsa.

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Momentum tersebut tentu saja harus dihadapi dengan perencanaan yang matang.

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Apalagi, tahun 2030 terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah mencanangkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas. Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik.

Grafik 3.1 Kesempatan Emas Demografi Indonesia 2020 - 2035



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Bonus demografi adalah peluang berharga bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi penduduknya. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, Indonesia harus mengatasi tantangan-tantangan seperti pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan demografi. Dengan lebih banyak tenaga kerja yang tersedia, negara memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonominya. Lebih banyak pekerja berarti lebih banyak kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi juga menciptakan potensi untuk dividen



demografi, yaitu peningkatan penghematan dan investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jika pendapatan nasional digunakan dengan bijak, negara dapat meraih kekayaan yang signifikan. Peningkatan jumlah pekerja dalam usia produktif juga menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk mengisi posisi pekerjaan yang tersedia. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan sektor bisnis dan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 1.42 juta jiwa. Secara *trend* populasi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020-2035 diproyeksikan mencapai 1,74 juta jiwa atau bertambah 323,31 ribu orang. Pada tahun 2035 penduduk Provinsi Sulawesi Barat mengalami perubahan demografi begitu cepat, pada periode itu Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi Provinsi dengan angkatan kerja semakin banyak, namun pada saat yang bersamaan angka penduduk usia tua meningkat. BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat pada fase 15 tahun ke depan, penduduk lanjut usia dalam jangka menengah akan menuju penuaan tahun 2035, dengan persentase penduduk lanjut usia 60 tahun ke atas sebesar 11,79 persen dari total penduduk. Tahun 2020 penduduk lanjut usia sebanyak 107,234 ribu jiwa atau sebesar 7,58 persen, kemudian tahun 2035 mencapai 204,85 ribu jiwa. Komposisi penduduk umur 15 – 64 tahun diproyeksikan mencapai 156,74 ribu orang tahun 2035 dengan kecenderungan proporsi yang meningkat menjadi 67,56 persen. Dengan proporsi penduduk penduduk usia produktif yang hampir mencapai 70 persen tersebut, Provinsi Sulawesi Barat berpotensi meraih percepatan pembangunan melalui bonus demografi.

Bonus demografi dapat menjadi hal yang menguntungkan sekaligus merugikan bagi Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat perlu memanfaatkan bonus demografi yang ada sehingga akan lebih banyak memberikan keuntungan. Jangan sampai bonus demografi berlalu dengan sia-sia dan hanya menyisakan jumlah penduduk yang besar.

▪ **Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Lebih Cepat**

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Dalam mengakselerasi pengembangan KTI, beberapa strategi dapat



diterapkan diantaranya Infrastruktur dimana Investasi besar dalam pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama untuk menghubungkan dan mempercepat aksesibilitas ke wilayah KTI. Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya menjadi prioritas untuk memperlancar arus barang dan orang. Kedua ialah Pemberdayaan Sumber Daya Alam. KTI kaya akan sumber daya alam yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan secara berkelanjutan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di daerah tersebut. Ketiga adalah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat KTI. Pembangunan sekolah, rumah sakit, serta pelatihan tenaga kerja lokal menjadi prioritas. Keempat yaitu Promosi Investasi. Pemerintah perlu aktif mempromosikan KTI sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Insentif fiskal dan kemudahan birokrasi perlu disediakan untuk menarik investasi swasta yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kelima Penguatan Keterlibatan Masyarakat Lokal. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan pembangunan. Dan keenam Pengembangan Pariwisata. KTI memiliki potensi pariwisata yang besar dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pengembangan KTI lebih cepat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif semua pihak menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

- **Hilirisasi Industri yang mengedepankan prinsip *Green Economy* dan *Blue Economy***

Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi.

Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Program hilirisasi atau *downstreaming* merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, selain itu, program ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas di daerah-daerah pusat industri program tersebut berjalan. Namun, untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan biaya investasi untuk penelitian dan pengembangan produk yang tidak sedikit, disamping itu, dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu mempermudah proses dari program tersebut. Program hilirisasi industri yang diinisiasi Kementerian Perindustrian sejak tahun 2010 dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha di Indonesia.

Sebagai gambaran, dalam kurun tahun 2008-2011, ekspor bauksit meningkat dari 8 juta ton menjadi 39 juta ton, nikel dari 4 juta ton menjadi 34 juta ton, dan bijih besi dari 1,5 juta ton menjadi 12 juta ton. Melalui hilirisasi industri, diharapkan komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi. Pabrik pengolahan diperlukan di daerah tempat bahan baku berada.

Program hilirisasi memiliki banyak manfaat untuk Indonesia, berikut adalah manfaat-manfaat utama tersebut:

1. Memberikan Nilai Tambah Pada Produk. Produk awal yang masih mentah akan melalui tahap pengolahan tambahan sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Produk yang telah diolah ini akan memiliki kualitas dan harga jual yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan daya saing di pasar.
2. Menciptakan Lapangan Pekerjaan Baru. Proses hilirisasi memerlukan banyak tenaga kerja terampil dan terlatih, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah sekitarnya. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari Tingkat Daerah sampai Nasional. Produk yang telah diolah akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. Dengan demikian, program

tersebut dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah hingga tingkat nasional.

4. Menciptakan Produk Baru yang Bisa Dipasarkan di Pasar Internasional. Dengan dilakukannya hilirisasi, produk yang telah diolah akan memiliki kualitas dan standar yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dengan adanya produk baru yang dapat dipasarkan di pasar internasional, maka akan membuka peluang baru untuk meningkatkan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Alam yang Tersedia. Sumber daya alam yang ada akan dioptimalkan penggunaannya, sehingga tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga meminimalisir limbah yang dihasilkan. Dengan demikian, hilirisasi juga dapat memberikan manfaat lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara, hilirisasi menjadi salah satu solusi yang efektif. Dengan memberikan nilai tambah pada produk, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan produk baru yang bisa dipasarkan di pasar internasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, maka program tersebut menjadi strategi yang tepat untuk diimplementasikan.

Program hilirisasi di berbagai sektor masih terus diupayakan oleh Provinsi Sulawesi Barat guna meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya melimpah di sektor perikanan, Provinsi Sulawesi Barat akan membangun pabrik es dan *cold storage* di tahun 2024 sebagai bentuk pemenuhan fasilitas untuk menunjang kegiatan hilirisasi di sektor perikanan. Salah satu pabrik es yang dibangun di Desa Sumare memiliki kapasitas 10 ton per hari, sedang *cold storage* memiliki kapasitas 12 ton per hari. Ke depan diharapkan hasil tangkapan sektor perikanan dapat terjaga kualitasnya dengan adanya pabrik ini dan dapat diolah menjadi berbagai macam varian sehingga memiliki nilai tambah tanpa mengurangi nilai gizinya.

Dari sisi industri pertambangan, masih banyak terdapat aktivitas penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah pertambangan rakyat (WPR)

Provinsi Sulawesi Barat dengan persentase 44,09 persen di tahun 2021, sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu tahun 2023. Kegiatan penambangan ilegal bukan hanya memberikan kerugian dari sisi ekonomi namun juga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang serius. Berdasarkan data BPS, terdapat 95 lokasi pertambangan dan telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Barat yang tersebar di seluruh kabupaten dimana Kabupaten Polewali Mandar yang terbanyak dengan 28 lokasi disusul Kabupaten Mamuju 25 lokasi namun belum ada pembangunan *smelter*. Pembangunan *smelter* perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar dapat meningkatkan aktivitas pertambangan di Provinsi Sulawesi Barat.

3. Isu Regional

▪ Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam (SDA) karena sejumlah faktor kunci: (i) Keanekaragaman Sumber Daya Alam: Sulawesi kaya akan sumber daya alam seperti tambang mineral (nikel, emas, tembaga), kehutanan yang melimpah, serta potensi pertanian yang subur. Keanekaragaman ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan industri berbasis SDA di pulau tersebut. (ii) Kawasan Logistik dan Transportasi: Sulawesi memiliki posisi geografis yang strategis di antara kepulauan Indonesia. Dengan infrastruktur transportasi yang berkembang, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, Sulawesi dapat menjadi pusat logistik yang penting untuk distribusi barang dan jasa di kawasan Nusantara. (iii) Potensi Industri Pengolahan: SDA yang melimpah memberikan peluang besar untuk pengembangan industri pengolahan di Sulawesi. Misalnya, nikel dan tembaga dapat diolah menjadi logam, kayu dapat dijadikan bahan bangunan dan furnitur, sementara hasil pertanian seperti kakao dan kelapa dapat diolah menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. (iv) Investasi dan Pengembangan Infrastruktur: Untuk mendukung peran Sulawesi sebagai superhub ekonomi dan pusat industri berbasis SDA, diperlukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan dan rel, perluasan pelabuhan dan bandara, serta penyediaan energi dan air bersih

yang memadai. (v) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inisiatif Pemerintah: Pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan industri berbasis SDA di Sulawesi melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK menyediakan insentif pajak, fasilitas infrastruktur, dan kemudahan investasi untuk menarik investor domestik dan asing ke daerah tersebut. (vi) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Sulawesi. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik akan mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing regional.

Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong investasi serta pengembangan industri berbasis SDA, Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

▪ **Konektivitas Antar Wilayah (Darat, Laut dan Udara)**

Terhubungnya wilayah dalam suatu negara disebut dengan konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara. Misalnya Indonesia meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan cara membangun jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangunan angkutan masal seperti MRT. Umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, di mana pembangunan di kota berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah. Sehingga dibutuhkan konektivitas antar wilayah untuk pemeratakan pembangunan tersebut.

Manfaat konektivitas antar wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas wilayah. Manfaat pertama dari konektivitas antar wilayah adalah kemudahan akses dari suatu wilayah lainnya. Membuat suatu wilayah yang awalnya terjamah menjadi lebih mudah didatangi. Dengan peningkatan aksesibilitas suatu wilayah, pengembangan dari wilayah tersebut dapat dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. Kemudahan akses sumber daya. Konektivitas daerah memudahkan akses sumber daya maupun berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang maupun sumber daya dapat dikirim dari tempat asalnya ke wilayah lain.



3. Peningkatan pelayanan umum. Konektivitas daerah dapat meningkatkan pelayanan umum masyarakat. Misalnya pasokan air bersih, aliran listrik, penanggulangan sampah dan limbah, pendidikan, kantor imigrasi, pembuatan surat izin mengemudi, kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), keamanan, juga penjara. Pemerataan pelayanan umum terutama di bidang pendidikan dapat menciptakan generasi muda bangsa yang terdidik. Pemerataan pelayanan umum di bidang kesehatan, memberikan masyarakat kemudahan untuk berobat saat sakit, mengalami kecelakaan, maupun akan melahirkan.
4. Peningkatan investasi. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, peluang pembukaan bisnis menjadi lebih tinggi. Perkembangan bisnis yang bagus dalam suatu wilayah menarik para investor untuk memberikan modal, hal ini jelas dapat memajukan ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan kesempatan kerja. Dengan berkembangnya bisnis dan ketersediaan investor, lapangan kerja baru akan tersedia. Peningkatan kesempatan kerja bisa menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita.
6. Pengembangan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal tersebut jelas menjadi peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana akan lebih cepat karena mudahnya transportasi dan juga dana yang tersedia lebih besar. Mudahnya akses ke suatu wilayah, membuat turis dalam negeri walaupun luar negeri bisa berkunjung dengan aman dan nyaman ke berbagai tempat wisata.
8. Penurunan konflik antar wilayah. Konektivitas antar wilayah dapat menurunkan konflik antar wilayah, baik konflik antar warga maupun konflik pembangunan antar pemerintah suatu wilayah. Hal tersebut karena konektivitas antarwilayah membuat wilayah-wilayah saling bekerja sama untuk memajukan daerah bukannya saling berselisih.

▪ **Kerjasama Regional Sulawesi**

Kerjasama regional adalah kerjasama antara daerah-daerah di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Faktor pendorong



kerja sama ini biasanya berdasarkan kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan, persamaan latar belakang sejarah (historis), sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk ekspor.

Sebagai daerah yang berada dalam wilayah daratan Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat perlu mengembangkan kerjasama regional yang saling menguntungkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Potensi kerjasama yang dapat dikembangkan, antara lain, pengembangan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup, hingga mitigasi bencana alam.

Sejak tahun 2000, secara kelembagaan telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) untuk mengkoordinasikan kerjasama antar provinsi di Pulau Sulawesi guna memajukan provinsi-provinsi yang menjadi anggotanya. Kantor Sekretariat BKPRS berada di Kota Makassar dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sedangkan Ketua BKPRS adalah para Gubernur yang dipergilirkan setiap periode tertentu. Selain sebagai wadah untuk menjalin kerjasama antar provinsi, keberadaan BKPRS ini juga bisa menguatkan *positioning* pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi dalam menyampaikan aspirasi dan dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat.

Keberadaan BKPRS menjadi semakin penting dan strategis untuk mengembangkan kerjasama antar daerah, bukan hanya di Pulau Sulawesi tetapi juga dengan Pulau Kalimantan, terutama sejak pemerintah pusat menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Sebagai pulau terdekat dari IKN, Sulawesi berpeluang untuk menjadi penopang utama IKN, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun pemerintah provinsi di Sulawesi mesti berkolaborasi dan saling mendukung untuk mengoptimalkan potensi yang ada di masing-masing wilayah.

Dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan Pengembangan sektor Transportasi udara yaitu Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang, Pembangunan Bandara baru di Polewali Mandar, serta Pengembangan rute penerbangan dari Mamuju-Surabaya, Mamuju – Bali, Mamuju – Banjarmasin, dan rute lainnya terutama di wilayah penyangga IKN. Pada sektor Transportasi Laut yaitu Pengembangan Pelabuhan, beberapa pelabuhan akan diusulkan menjadi Pelabuhan Internasional untuk peningkatan pelayanan seperti Pelabuhan Tanjung Silopo, Pelabuhan Belang-Belang

diusulkan masuk dalam PSN yaitu pelabuhan kontainer (pelabuhan pusat ekspor) sebagai daerah penyangga kawasan industri, serta pembangunan pelabuhan di Pulau Sabakkatan (Pulau Bala Balakang), karena pulau sabakkatan ini masuk trayek kapal perintis. Pelabuhan ini juga menjadi pelabuhan singgah. Pada sektor darat yaitu peningkatan Kualitas jalan, Pembangunan dan Pengembangan Terminal, serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Di tahun 2019 pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan belanja infrastruktur untuk pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi dan lain lain. Isu infrastruktur dan konektivitas seperti kondisi jalan dan jembatan serta pengembangan kapasitas bandara perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelum peluang ekonomi tersebut lebih dahulu ditangkap oleh daerah lain yang lebih siap.

▪ **Kebencanaan dan Lingkungan Hidup**

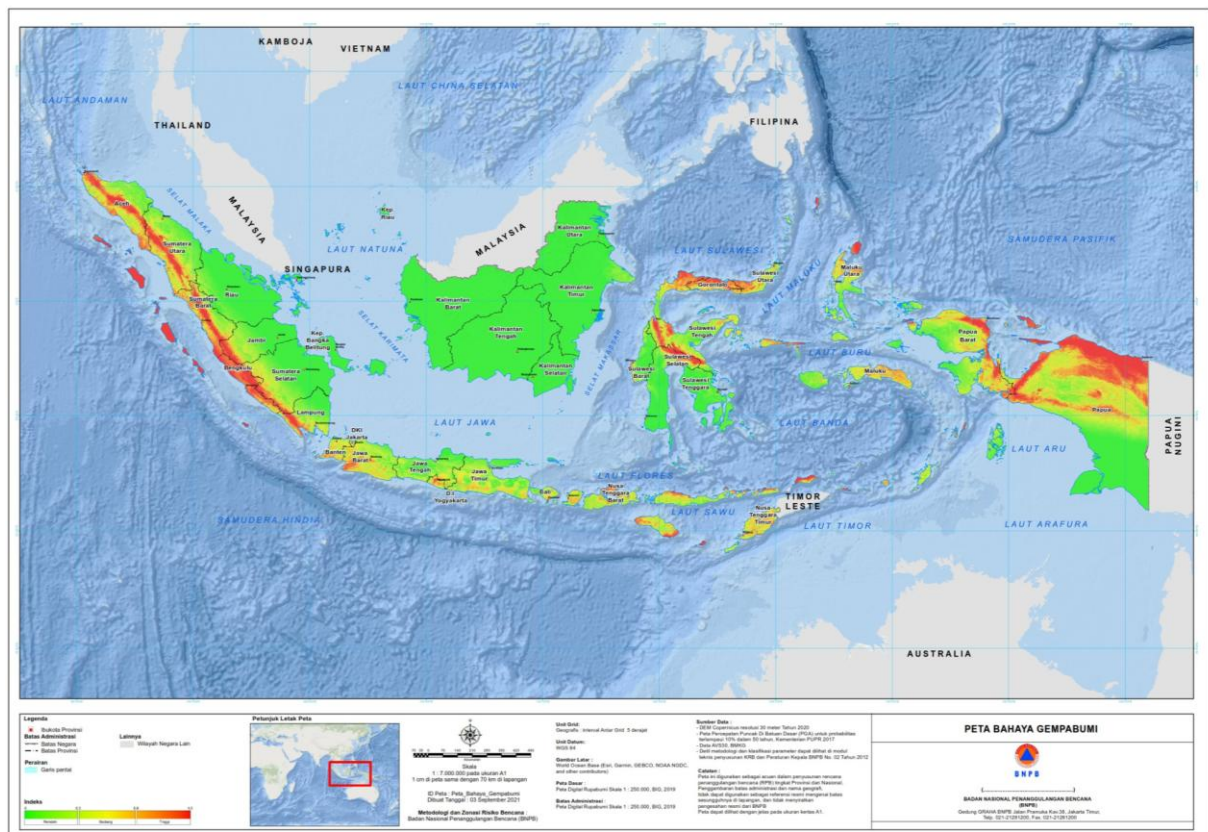
Bencana merupakan isu strategis regional yang dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pulau Sulawesi termasuk dalam kategori wilayah rawan bencana, terutama bencana gempa bumi dan tsunami. Salah satu kejadian bencana yang pernah terjadi di Pulau Sulawesi adalah gempa bumi di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September tahun 2018. Beberapa daerah yang terkena dampaknya adalah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter dan berpusat di 119,85 Bujur Timur atau 27 kilometer timur laut Donggala.

Saat kejadian bencana tersebut, PBB mencatat setidaknya ada 4.845 orang meninggal, 172.999 pengungsi, dan 110.214 rumah yang rusak. Tercatat total kerugian akibat bencana multidimensi ini adalah Rp 18,48 triliun dengan rincian Kota Palu sebesar Rp 8,3 triliun, Kabupaten Sigi sebesar Rp 6,9 triliun, Kabupaten Donggala sebesar Rp 2,7 triliun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp 640 miliar.

BNPB sudah melakukan kajian terkait dengan risiko bencana yang dihadapi oleh Indonesia tahun 2015. Hasil kajian tersebut menunjukkan Pulau Sulawesi termasuk dalam Kawasan bencana. Peta rawan bencana gempa bumi menunjukkan beberapa daerah di Pulau Sulawesi termasuk dalam kategori rasio yang sangat tinggi. Peta itu (berwarna merah), menunjukkan Sebagian besar daerah tersebut berada di Provinsi

Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Meski tak banyak, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Barat juga ditandai sebagai daerah rawan bencana dengan kategori indeks risiko tinggi. Jika bencana gempa bumi terjadi di Pulau Sulawesi, akan ada 8.888.200 jiwa terdampak, dengan kerugian fisik dan ekonomi masing-masing Rp 58,57 triliun dan Rp 42,52 triliun.

Gambar 3.3 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



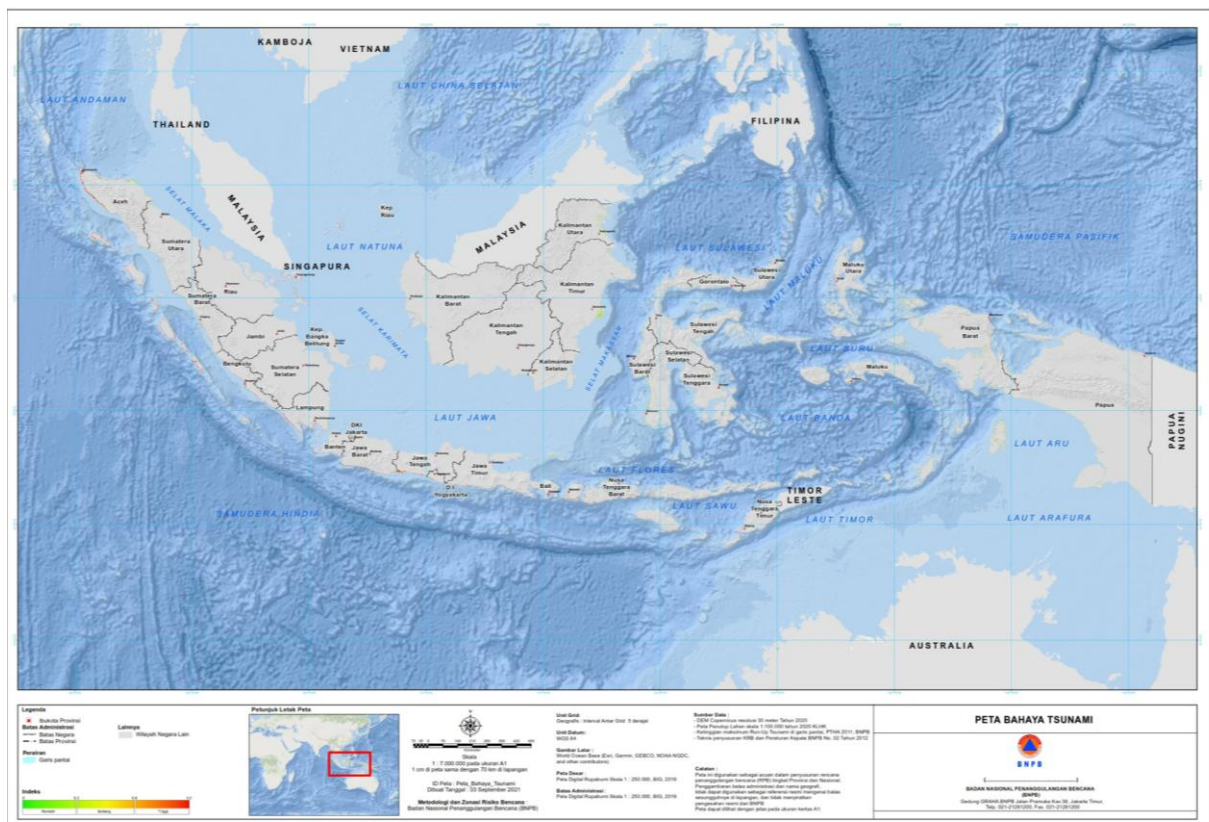
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Selain bencana gempa bumi, Pulau Sulawesi juga termasuk rawan bencana tsunami. Peta rawan bencana tsunami yang dirilis oleh BNPB menunjukkan bahwa semua daerah di Pulau Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar berpotensi menghadapi tsunami, termasuk di sepanjang wilayah pantai di Provinsi Sulawesi Barat. Kota Palu dan sekitarnya sudah merasakan gempa bumi yang diikuti oleh tsunami tahun 2018. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, disebutkan bahwa di pesisir pantai Sulawesi sudah terjadi sebanyak 21 kali tsunami dalam 20 tahun terakhir, salah satu yang terparah adalah gempa, tsunami,

dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah. Menurut catatan UNICEF, Lebih dari 1.500 sekolah rusak dan menyebabkan sekitar 184.000 pelajar yang tidak bisa belajar, ada sekitar 152.000 orang yang kekurangan akses ke air bersih, sanitasi dasar, dan barang-barang kebersihan.

Provinsi Sulawesi Barat juga mesti mewaspadai kejadian bencana agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Menurut catatan BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat sudah mengalami 145 kali kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Jenis bencana yang jumlah kejadiannya paling banyak adalah bencana banjir. Selain paling sering terjadi, banjir juga merupakan jenis bencana yang memberikan kerugian paling besar dari jenis bencana lainnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk keselamatan jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lahan pertanian. Ancaman bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat adalah gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan gelombang ekstrim dan abrasi.

Gambar 3.4 Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Data IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Provinsi Sulawesi Barat, daerah ini mendapat indeks 169,23 tahun 2022. Angka itu menunjukkan bahwa risiko bencana di Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam kategori “tinggi”. Lima Kabupaten yang memiliki IRBI kategori tinggi adalah Majene, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, dan Mamasa, sementara IRBI Kabupaten Polewali Mandar termasuk kategori “sedang”. Jika tak berhasil diantisipasi, maka kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat akan berpotensi berdampak pada 1.058.857 jiwa (hampir semua penduduk Provinsi Sulawesi Barat), dengan potensi kerugian fisik dan ekonomi masing-masing senilai Rp 6,66 triliun dan Rp 3,55 triliun. Sebagai daerah rawan bencana, Provinsi Sulawesi Barat mesti memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan sebagai bentuk upaya antisipasi terhadap kejadian bencana.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada beberapa isu lingkungan yang dihadapi dan perlu diselesaikan di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku. Isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku pada tahun 2021 terdiri dari alih fungsi lahan, perubahan iklim global, penurunan kualitas air, risiko bencana alam, dan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku sangat berkaitan erat dengan sumber daya pesisir dan laut, membuat isu kerusakan sumber daya pesisir dan laut menjadi salah satu isu prioritas.

Salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam Kawasan Ekoregion Sulawesi Maluku adalah alih fungsi hutan dan lahan. Menurut data KLHK, Tutupan hutan di Ekoregion Sulawesi Maluku mengalami penurunan dalam periode 2019-2020. Penurunan lahan hutan terjadi secara signifikan, terutama di dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Penurunan lahan hutan di Sulawesi Tenggara mencapai 17 persen tahun 2020, sementara di Provinsi Sulawesi Barat menurun 12 persen dari tahun 2019. Kenaikan luas tutupan lahan non-hutan sebagai permukiman dan industri semakin mendorong adanya program reklamasi pantai di Pulau Sulawesi.

Isu lingkungan yang terjadi dalam wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama pada isu deforestasi karena Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah yang luas wilayahnya sebagian



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

besar adalah kawasan hutan. Selain itu penurunan kualitas air, risiko bencana alam, perubahan iklim global, dan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik juga perlu menjadi perhatian. Untuk menghadapi isu lingkungan di kawasan, Provinsi Sulawesi Barat mestinya bersinergi dengan daerah lain, terutama dalam wilayah Pulau Sulawesi.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 tahun ke depan (2045) dirumuskan dengan memperhatikan capaian pembangunan daerah yang telah diraih dalam dua dekade terakhir, mencermati berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih terjadi saat ini yang membutuhkan penyelesaian di tahun-tahun mendatang, dan mengamati sejumlah isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di masa depan, baik isu global dan nasional, maupun isu regional Pulau Sulawesi.

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perumusan Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun ke depan juga memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, perumusan Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat juga memperhatikan Visi pembangunan jangka panjang sebelumnya (2025), yaitu Terwujudnya Sulawesi Barat yang Sejahtera, Maju, dan Malaqbi.

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, maka Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045 adalah:

“Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang inklusif”

Visi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Malaqbi dimaknakan sebagai keinginan untuk mencapai derajat manusia mulia dan bermartabat, dimana seluruh sikap dan perilakunya mencerminkan manusia yang beradab, yang mengedepankan nilai-nilai akhlak, etika, moral, dan agama. Manusia mulia dan bermartabat dimaksud merupakan manifestasi dari nilai-nilai historis-kultural yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat serta nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang inklusif. Di tingkat daerah, Visi Malaqbi terefleksikan secara terukur pada kehidupan religius-spiritual, tidak adanya



kasus korupsi, tindakan kriminalitas, konflik sosial, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bingkai ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif. Untuk indikator yang terkait dengan Visi Malaqbi diharapkan capaiannya menjadikan Sulawesi Barat yang terbaik di Pulau Sulawesi.

Maju dimaknakan sebagai pencapaian kondisi daerah yang maju dan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Daerah yang maju ditandai dengan meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana daerah, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar dan kebutuhan hidup masyarakat, membaiknya taraf hidup masyarakat, dan meningkatnya pemerataan pembangunan antar daerah, wilayah, dan kelompok masyarakat dalam bingkai ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif. Visi maju termanifestasikan pada daya saing daerah, angka kemiskinan, angka pengangguran, pendapatan per kapita, kualitas pembangunan manusia, pemerataan pembangunan secara menyeluruh dan sebagainya.

Berkelanjutan dimaknakan bahwa pembangunan ekosistem ekonomi hijau dan biru Provinsi Sulawesi Barat mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengharmonisasikan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan tata-kelola. Prinsip pembangunan berkelanjutan penting bagi Provinsi Sulawesi Barat mengingat pembangunan ekonominya masih bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi merusak lingkungan. Visi Berkelanjutan tercermin pada kualitas lingkungan hidup (tanah, air, dan udara) yang inklusif.

Ekosistem ekonomi Hijau dimaknakan kondisi perekonomian Sulawesi Barat yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya serta inklusif secara sosial sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, pengurangan resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi melalui pengelolaan lingkungan dan potensi sumberdaya alam dalam rangka pencapaian Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan secara menyeluruh.

Ekonomi Biru dimaknakan upaya pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif melalui berbagai sektor penting diantaranya

perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, serta mitigasi perubahan iklim guna tercapainya Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan.

Tabel 4.1. Penyelarasan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat

Visi RPJP Nasional	Visi RPJPD Sulawesi Barat
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Barat Malaqbi, Maju Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang inklusif

Penyelarasan sasaran visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat 2025–2045 adalah langkah strategis yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional dan daerah.

Tabel 4.2. Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat

RPJP Nasional				RPJPD Sulawesi Barat			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per kapita (US\$)	5.500	23.300-30.000	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	42,67-42,00	142,11-182,56
					Pertumbuhan ekonomi	5,25-5,79	5,22-6,82
	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,64	45,66
	Kontribusi PDB Manufaktur	20,8	28,0		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,16-11,21	15,36-16,37
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,00-9,73	0,16-0,66
	Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320		Rasio Gini (Indeks)	0,345-0,349	0,283-0,334
	Kontribusi PDB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDB Nasional (%)	0,28	0,19
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (Peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,20	4,0



RPJP Nasional				RPJPD Sulawesi Barat			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Daya saing sumberdaya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,50	0,66
Intensitas emisi grk menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	61,65	97,89
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	84,82	90,25

Sasaran Visi RPJPD Sulawesi Barat dirancang untuk mencapai Visi RPJPD yaitu “Sulawesi Barat Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru Yang Inklusif dengan uraian sebagai berikut: **Maju**, diuraikan dalam sasaran visi (1) Peningkatan pendapatan per kapita (2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang (3) Peningkatan Daya saing Daerah. **Malaqbi** direfleksikan ke dalam sasaran visi (4) Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Daerah, Serta **Berkelanjutan** Dalam **Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru** direfleksikan pada sasaran visi (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission dan (6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

4.2. Misi Daerah

Untuk mencapai Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045, maka ditetapkan sejumlah Misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Terwujudnya Transformasi Sosial

Dalam dua dekade ke depan, pembangunan di Sulawesi Barat akan dihadapkan pada perubahan besar yang memerlukan transformasi sosial yang mendasar. Ini mencakup perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan signifikan termasuk perubahan dalam struktur demografi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, gejolak geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan ini, memungkinkan masyarakat Sulawesi Barat untuk

menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik dan beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika yang terjadi.

Sulawesi Barat Mengambil Misi Terwujudnya Transformasi Sosial Dengan tujuan untuk menciptakan Masyarakat Sulawesi barat yang memiliki berbagai keunggulan, karakter yang baik, dan kesejahteraan yang merata di wilayah tersebut. Transformasi sosial bertujuan untuk merombak struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, gejolak geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Dengan masyarakat yang unggul, berkarakter, dan sejahtera, diharapkan Sulawesi Barat dapat mengembangkan potensinya secara optimal, memajukan kualitas hidup penduduknya, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat tanpa kecuali mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah atau dapat menikmati hasil-hasil pembangunan daerah dengan memberikan akses yang luas dan adil kepada masyarakat untuk menjangkau sumberdaya ekonomi, mendapatkan layanan infrastruktur dasar yakni Pendidikan, Kesehatan dan sosial.

2. Terwujudnya Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi merujuk pada perubahan fundamental dalam struktur, pola, dan kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Terwujudnya transformasi ekonomi mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan dalam struktur sektor ekonomi, pergeseran teknologi dan inovasi, hingga perubahan dalam pola perdagangan, investasi, dan konsumsi. Misi ini diarahkan untuk mengupayakan taraf hidup masyarakat agar terus membaik dari waktu ke waktu. Peningkatan taraf hidup dimaksud, bukan hanya menyangkut aspek fisik-material, tetapi juga aspek sosial-kultural. Upaya ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih berkualitas. Selain itu, daerah perlu fokus pada diversifikasi ekonomi agar dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*), yaitu mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dan inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Juga, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui

pendidikan dan pelatihan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan pasar global. Upaya mewujudkan transformasi ekonomi di Sulawesi Barat bertujuan untuk membangun fondasi ekonomi yang tangguh, dengan memanfaatkan komoditas unggulan daerah dan meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi.

3. Terwujudnya Transformasi Tata Kelola

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, adil, efektif, dan efisien, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi secara terstruktur dan sistematis, dalam rangka menjamin terlaksananya perwujudan Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi. Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tata kelola juga dapat mengubah cara pemerintah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang pada saatnya akan dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Tantangan perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Untuk dapat mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa elemen kunci yang perlu untuk diperhatikan antara lain: (i) Transparansi; (ii) Akuntabilitas; (iii) Partisipasi Publik; (iv) Efektivitas dan Efisiensi; (v) Penegakan Hukum; (vi) Responsivitas; (vii) Keadilan; (viii) Integritas; serta (ix) Desentralisasi. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi menjadi sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

4. Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Di era globalisasi dan kompleksitas tantangan keamanan, sebuah daerah yang tangguh memerlukan fondasi yang kuat, yang dibangun dari keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat. Keamanan bukanlah hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan hasil dari kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan lingkungan, pertukaran informasi, dan partisipasi dalam program-program keamanan akan membentuk pertahanan yang kuat terhadap berbagai ancaman. Demokrasi yang kokoh adalah prasyarat penting dalam memastikan partisipasi seluruh warga dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ini mencakup proses pemilihan yang bebas dan adil, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta mekanisme untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara efektif.

Stabilitas ekonomi makro merupakan landasan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, dan mempromosikan investasi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang bijaksana, pengelolaan anggaran yang transparan, dan pemantauan yang ketat terhadap pasar keuangan, stabilitas ekonomi dapat dipertahankan.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar untuk menciptakan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang kuat, dan stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

a) Penguatan Keamanan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan aparat keamanan untuk meningkatkan kehadiran dan responsivitas keamanan di seluruh wilayah. Ini meliputi peningkatan jumlah personel keamanan, pembentukan kelompok keamanan masyarakat, dan penerapan teknologi keamanan modern untuk memantau dan merespons situasi keamanan dengan cepat.



b) Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keamanan, seperti ronda malam dan program-program pemantauan lingkungan, akan memperkuat jaringan keamanan lokal. Pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keamanan di tingkat lokal.

c) Penguatan Institusi Demokrasi

Memastikan proses demokratis yang inklusif dan transparan adalah penting untuk memperkuat demokrasi di provinsi ini. Ini termasuk memastikan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dan adil, mendukung partisipasi politik masyarakat, dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan lembaga pengawas pemilihan.

d) Pemberdayaan Ekonomi

Mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif akan membantu meningkatkan stabilitas ekonomi makro di provinsi Sulawesi Barat. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur ekonomi, pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja lokal, serta promosi investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

e) Kemitraan dan Kolaborasi

Mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil akan memperkuat upaya menciptakan keamanan daerah, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, berbagai pemangku kepentingan dapat saling melengkapi dan meningkatkan dampak dari program-program yang dilaksanakan.

5. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan.

Hubungan timbal balik antara sistem sosial budaya dan ekologi selalu mencari keseimbangan dan membentuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Manusia dan lingkungan pada hakikatnya hidup di dalam suatu ekosistem agar saling menguntungkan dan menjaga keberlangsungan bersama. Jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan eksploitasi dan kerusakan lingkungan terus terjadi, sementara daya pulih alam tidak secepat peningkatan kebutuhan tersebut. Perubahan iklim dan bencana juga berdampak nyata, membawa kerugian tidak hanya ekonomi, tetapi juga penghidupan, tempat tinggal, bahkan nyawa. Di sisi lain, akibat globalisasi terjadi pelemahan nilai-nilai positif pada sebagian kelompok masyarakat seperti kejujuran, empati, kesukarelawanan, dan toleransi, serta perubahan pola interaksi yang semakin individualis. Hal ini mengakibatkan timbulnya degradasi moral, konflik, rasa tidak aman, kerentanan yang mengancam harmoni dan keberfungsian sosial dalam keluarga juga masyarakat, serta kerusakan lingkungan dan alam sekitar.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertumpu pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk beradaptasi, pulih, dan terus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan, membangun kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya, dan keluarga yang berkualitas, dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan kerusakan alam sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam Pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam Masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan Masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

6. Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah, Aspek Sosial, Ekonomi Untuk Menunjang IKN

Misi ini diarahkan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana wilayah, pembangunan sosial, dan pembangunan ekonomi secara merata antar untuk meningkatkan kesejahteraan agar dapat menunjang IKN sebagai kunci dalam peningkatan aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan investasi secara luas di seluruh wilayah dan Sulawesi Barat khususnya perannya Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN.

7. Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui peningkatan dan perluasan akses layanan sarana prasarana permukiman seperti air minum, sanitasi persampahan. Misi tersebut diharapkan dapat menunjang kualitas hidup manusia yang ramah lingkungan.

8. Menjaga Kestinambungan Pembangunan

Misi ini diarahkan untuk melestarikan lingkungan hidup dengan terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup (tanah, air, dan udara) dan mencegah terjadinya praktik-praktik pengrusakan lingkungan (*illegal logging*, *illegal fishing*, penambangan liar). Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah di Indonesia, penyelarasan misi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Tabel 4.3. Penyelarasan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat

No	Kelompok Agenda/Misi	Misi RPJP Nasional	Misi RPJPD Sulawesi Barat
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Terwujudnya Transformasi Sosial
2		Transformasi Ekonomi	Terwujudnya Transformasi Ekonomi
3		Transformasi Tata Kelola	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

No	Kelompok Agenda/Misi	Misi RPJP Nasional	Misi RPJPD Sulawesi Barat
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan dan Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah, Aspek Sosial, Ekonomi Untuk Menunjang IKN
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Menjaga Kesenambungan Pembangunan

Penyelarasan misi RPJPN dan RPJPD bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif melalui pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian misi yang menyesuaikan dengan isu strategis. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD sehingga dibagi kedalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Penyelarasan tahapan arah Pembangunan dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Penyelarasan Arah Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat

Dokumen	Arah Pembangunan Nasional/ Arah Kebijakan Daerah			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
RPJPN	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
RPJPD	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Sulawesi Barat Yang Berdaya Saing	Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekonomi Biru dan Hijau yang Inklusif Tercapainya Indonesia Emas

Berikut merupakan pentahapan Arah Kebijakan memperhatikan tematik pada RPJPN Tahun 2025-2045, sebagaimana tertuang di dalam Tabel 5.2.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 5.2. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang inklusif	Terwujudnya Transformasi Sosial	Pembangunan sumber daya manusia lebih difokuskan pada aspek kuantitas, kualitas dan pemerataan. Pada tahapan ini, peningkatan dan perluasan layanan pendidikan berkualitas harus fokus pada aspek permintaan dan penawaran, ditunjang dengan penguatan kelembagaan. Selain itu, penting untuk menyelesaikan layanan kesehatan dasar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memperkuat tata kelola, serta memperluas cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial.	Dalam rangka akselerasi perlu memperhatikan Akselerasi partisipasi pendidikan, akselerasi pemerataan akses dan mutu kesehatan yang inklusif untuk mewujudkan ketahanan kesehatan di daerah, dan akselerasi penyelenggaraan perlindungan sosial yang menyeluruh. Semua upaya ini bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.	Dalam mewujudkan transformasi sosial perlu memperkuat partisipasi dan mutu pendidikan berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, diversifikasi dan pemantapan pelayanan kesehatan perlu dilakukan untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat, mendukung industri kesehatan, dan memperkuat ekosistem kesehatan secara keseluruhan. Tidak kalah pentingnya, penyelenggaraan perlindungan sosial yang berkelanjutan juga harus ditegakkan.	Perwujudan transformasi sosial diwujudkan melalui sumber daya manusia yang sejahtera di Sulawesi Barat ditandai oleh kualitas hidup yang baik, yaitu melalui pengembangan individu yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya, maju, unggul, dan memiliki daya saing. Hal ini tercapai melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu yang inklusif, peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, serta penguatan ketahanan kesehatan daerah. Selain itu, perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif juga menjadi bagian penting dalam upaya ini.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Penguatan riset, inovasi, dan sektor unggulan melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri kreatif dan digital, peningkatan investasi, sektor pariwisata berbasis budaya lokal, serta penguatan industri berbasis rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.	Percepatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan kawasan industri terpadu melalui penguatan konektivitas, akses pasar internasional, infrastruktur merata, serta modernisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berbasis teknologi.	Pemantapan Pertumbuhan ekonomi daerah yang terintegrasi dengan jaringan nasional melalui penguatan ekspor produk unggulan, peningkatan daya saing industri, pengembangan kawasan ekonomi khusus, peran UMKM, pemanfaatan teknologi modern, serta percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan penguatan kelembagaan petani/nelayan.	Perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas, inovasi teknologi, ekonomi hijau, efisiensi energi, peremajaan perkebunan rakyat, serta kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang mandiri.
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Penguatan transformasi tata kelola melalui peningkatan kualitas, dan integritas penyelenggara pemerintahan, manajemen ASN berdasarkan kompetensi, Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, penataan pengelolaan asset yang akuntabel, peningkatan tatakelola pengadaan barang/jasa, Pengembangan kawasan bebas korupsi, Penetapan regulasi yang efektif dan digitalisasi pelayanan publik, serta	Akselerasi mewujudkan ASN kompeten, sejahtera dan berintegritas serta manajemen karir berbasis meritokrasi, Kelembagaan yang kolaboratif, semakin meluasnya kawasan bebas korupsi, menguatnya pengelolaan asset yang akuntabel, semakin menguatnya transparansi pengadaan barang/jasa, peningkatan kualitas regulasi, percepatan pelayanan publik berbasis sistem informasi, serta	Perluasan transformasi tata kelola melalui kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, regulasi efektif, efisien dan akuntabel, ASN kompetitif, sejahtera dan berintegritas, pengelolaan barang/jasa yang profesional, manajemen organisasi Modern berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang aktif dan akuntabel.	Perwujudan Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang berintegritas, inovatif, inklusif, adaptif, kolaboratif, modern, serta bebas korupsi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
		peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait	masyarakat sipil yang partisipatif.		
	Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mengoptimalkan Pelaksanaan Hukum dengan Penerapan Perda yang Konsisten dan Cipta Kondisi yang Tertib dan Menghadirkan Rasa Aman	Memperkuat Penegakan Hukum dan Terciptanya Kondisi yang Tertib dan Aman	Memantapkan Pelaksanaan Hukum dan Mewujudkan Landasan menuju Masyarakat yang Kokoh	Masyarakat yang Berdaulat, Aman dan Damai
	Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Pendorong Pembangunan Sosial Ekonomi yang Setara dan Inklusif	Mewujudkan Ketangguhan Manusia, Masyarakat serta Alam dan Lingkungan dalam Menghadapi Perubahan	Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Bahagia dan Sejahtera
	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah, Aspek Sosial, Ekonomi Untuk Menunjang IKN	Pemerataan peningkatan kualitas infrastruktur dan terbukanya konektivitas antar daerah melalui peningkatan jalan dan jembatan serta melakukan percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)), penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata	Akselerasi pemerataan kualitas infrastruktur didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, penguatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pelaksanaan reforma agraria	Pemantapan pemerataan kualitas infrastruktur pelabuhan laut dan udara didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agraria	Perwujudan pemerataan pembangunan di wilayah Sulawesi Barat didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agraria



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
		ruang, percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria			
	Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, peningkatan keterjangkauan pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan melalui penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman	Peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, pemerataan simpul transportasi, inisiasi pemanfaatan teknologi transportasi dan pengembangan integrasi antarmoda serta sinergi peningkatan keselamatan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman	Pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, pemantapan efektivitas pergerakan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan penurunan fatalitas kecelakaan, pemantapan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, penyediaan rumah layak huni untuk semua, serta pemantapan kawasan permukiman layak	Pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, perwujudan pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan ber- kelanjutan, jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas, pemenuhan rumah layak huni terjangkau dan ber- kelanjutan, serta perwujudan kawasan permukiman layak
	Menjaga Kestinambungan Pembangunan	Penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah	Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah melalui pembiayaan inovatif termasuk KPB dan <i>Blended Finance</i>	Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah	Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat dengan sinergi dan pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin optimal

5.1.1. Terwujudnya Transformasi Sosial

Dalam mewujudkan Transformasi Sosial perlu dipertimbangkan beberapa tantangan dan perubahan besar yang merubah struktur, institusi, nilai, norma dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan yang mempengaruhi ialah karakteristik penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, gejolak politik, pergeseran ekonomi dan budaya yang berkembang. Guna menghadapi perubahan mendasar tersebut, masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dalam berbagai hal secara cepat dan juga tepat. Dalam 20 tahun kedepan Pemerintah Sulawesi Barat akan mengembangkan strategi jangka panjang untuk mendorong transformasi sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam perwujudan transformasi sosial, strategi yang krusial adalah pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang berfokus pada keterampilan teknis dan kewirausahaan, serta memfasilitasi program pelatihan kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia industri. Program ini akan membantu masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam sektor manufaktur, teknologi, dan layanan industri lainnya. Selanjutnya untuk Kesehatan, layanan Kesehatan akan dilakukan melalui pemanfaatan layanan berbasis teknologi yang diharapkan dapat menjangkau pelayanan Kesehatan keseluruhan masyarakat.

Perubahan dalam 20 tahun kedepan ini akan mencakup transformasi sosial dari masyarakat agraris kepada masyarakat industri, yang nantinya akan bertransformasi lagi dari masyarakat industri menjadi masyarakat yang berbasis jasa dan teknologi informasi. Perubahan ini yang perlu didukung oleh kesiapan pemerintah dalam menghadapi perjalanan RPJPD 20 tahun mendatang. Perwujudan kesiapan transformasi sosial dapat dinilai dengan aksesibilitas pada aspek Kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang dapat diperoleh masyarakat secara adil dan merata sebagai berikut:

1. Tahap I (2025–2029):

Pada tahapan pertama RPJPD, pembangunan kebutuhan dikuatkan pada pelayanan dasar yang bersifat fisik dan non fisik. Pembangunan sumber daya manusia



lebih difokuskan pada aspek kuantitas, kualitas dan pemerataan. Pada tahapan ini, peningkatan dan perluasan layanan pendidikan berkualitas harus fokus pada aspek permintaan dan penawaran, ditunjang dengan penguatan kelembagaan. Selain itu, penting untuk menyelesaikan layanan kesehatan dasar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memperkuat tata kelola, serta memperluas cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial.

2. Tahap II (2030–2034):

Akselerasi transformasi sosial dilakukan dengan tujuan mempercepat kemajuan aspek sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam rangka akselerasi perlu memperhatikan Akselerasi partisipasi pendidikan, akselerasi pemerataan akses dan mutu kesehatan yang inklusif untuk mewujudkan ketahanan kesehatan di daerah, dan akselerasi penyelenggara-an perlindungan sosial yang menyeluruh. Semua upaya ini bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Akselerasi Pendidikan perlu dilakukan melalui kolaborasi dan reformasi Pemerintah daerah dan institusi Pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru dan pengajaran. Pelatihan berkala dan pembaharuan kurikulum dapat membantu meningkatkan kompetensi guru dan relevansi materi pembelajaran. Akselerasi dalam bidang Kesehatan dan perlindungan sosial dilakukan dengan melakukan transformasi layanan rujukan dan sistem ketahanan Kesehatan. Transformasi layanan rujukan diantaranya memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sekunder, meningkatkan level layanan di Puskesmas, merencanakan pelayanan kesehatan spesialis seperti Rumah Sakit Daerah unggulan, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Ibu Anak, dan Rumah Sakit Gigi Mulut. Transformasi sistem ketahanan Kesehatan dilakukan dengan memperkuat lembaga kebencanaan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan sistem penanggulangan bencana, melakukan pendataan daerah rawan bencana dan mendirikan Desa Tangguh Bencana serat meningkatkan jumlah dan kualitas SDM manajemen kebencanaan. Akselerasi ini tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan pada transformasi sosial.



3. Tahap III (2035–2039):

Dalam mewujudkan transformasi sosial perlu memperkuat partisipasi dan mutu pendidikan berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, diversifikasi dan pemantapan pelayanan kesehatan perlu dilakukan untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat, mendukung industri kesehatan, dan memperkuat ekosistem kesehatan secara keseluruhan. Tidak kalah pentingnya, penyelenggaraan perlindungan sosial yang berkelanjutan juga harus ditegakkan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif dan inovatif, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.

4. Tahap IV (2040–2045):

Pada periode terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Provinsi Sulawesi Barat perwujudan transformasi sosial perwujudan sumber daya manusia yang sejahtera di Sulawesi Barat ditandai oleh kualitas hidup yang baik, yaitu melalui pengembangan individu yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya, maju, unggul, dan memiliki daya saing. Hal ini tercapai melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu yang inklusif, peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, serta penguatan ketahanan kesehatan daerah. Selain itu, perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif juga menjadi bagian penting dalam upaya ini.

Dalam menuju Masyarakat unggul, berkarakter dan Sejahtera dilakukan dengan mengedepankan inovasi dan pembaharuan dari pelayanan primer yang disediakan dengan beradaptasi pada transformasi yang terjadi. Keunggulan Sumber Daya Manusia yang dicita-citakan pada akhir periode tidak boleh lepas dengan manusia yang berkarakter sesuai dengan visi jangka Panjang Sulawesi Barat yakni mewujudkan Sulawesi Barat yang malaqbi, maju dan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan representatif dari kata malaqbi yang menjunjung nilai dan norma sosial tradisional. Keunggulan dan karakter manusia yang menjadi modal tersebut diharapkan dapat mengantar masyarakat kita pada kesejahteraan.

5.1.2. Terwujudnya Transformasi Ekonomi

Perwujudan Transformasi Ekonomi dalam kurun 20 tahun kedepan akan menghadapi dan dipengaruhi perubahan besar seperti, perubahan struktur penduduk dimana Sulawesi Barat akan menghadapi bonus demografi, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan perubahan iklim. Perwujudan misi ini akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan arahan RPJPN 2025-2045 dimana Pulau Sulawesi berperan semoga penunjang Ekonomi Ibukota Nusantara dan Industri berbasis Sumber Daya Alam, lebih rinci lagi Sulawesi Barat diarahkan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan Industri Pertanian tanaman panga, Kawasan industri perkebunan kakao, Kawasan industri perkebunan kopi dan Kawasan perikanan budidaya.

1. Tahap I (2025–2029):

Tahapan Pertama terkait penguatan fondasi transformasi periode 2025-2029, fokus pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja untuk memperkuat proses penambahan nilai suatu komoditas melalui pengolahan atau pengembangan lebih lanjut. Dalam konteks ekonomi, hilirisasi sering kali mengacu pada pengembangan industri pengolahan yang memperkuat nilai tambah dari sumber daya alam atau bahan mentah yang diekspor, dengan memperhatikan Pengembangan industri kreatif dan digital, peningkatan investasi di sektor unggulan yang ada di setiap daerah, penguatan sektor pariwisata berbasis Unggulan dan budaya lokal, pengembangan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan Peningkatan daya beli masyarakat (pengendalian harga kebutuhan pokok), penguatan industri berbasis rakyat serta penguatan industri berbasis rakyat terutama di wilayah perdesaan.

2. Tahap II (2030–2034):

Pada tahapan kedua terkait Akselerasi Ekonomi periode 2035-2039, tujuan utama dari akselerasi ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai akselerasi ekonomi antara lain: Peningkatan Produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi pengembangan kawasan industri terpadu, Peningkatan akses pasar internasional untuk produk lokal, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan



sektor-sektor baru untuk menciptakan pertumbuhan Penguatan konektivitas dan logistik, pembangunan infrastruktur fisik yang merata di seluruh wilayah pembangunan daerah berbasis teknologi modernisasi dan digitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya dengan system perbenihan berbasis masyarakat.

3. Tahap III (2035–2039):

Pada tahapan ketiga periode 2035-2039 untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang berdaya saing, salah satu langkah strategis melalui ekspansi daerah menjadi strategi kunci yang perlu diperhatikan dan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang untuk meratakan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Barat dalam rangka mewujudkan Sulawesi Barat yang berdaya saing, melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang terintegrasi jaringan rantai nasional dan persiapan ekspor produk unggulan, penguatan ekspor produk unggulan, peningkatan daya saing industri nasional, pengembangan kawasan ekonomi khusus, penguatan peran UMKM dalam ekonomi nasional, peningkatan pemanfaatan teknologi modern untuk mendorong peningkatan nilai tambah produksi, percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada bidang ekonomi yaitu transportasi, jalan, jembatan, irigasi, dan pelabuhan serta perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan dan penguatan vokasi pertanian.

4. Tahap IV (2040–2045):

Pada tahap ke empat periode 2040-2045 dalam menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, dan Berkelanjutan dioptimalkan dalam pemenuhan Perekonomian daerah yang kuat dan berkelanjutan, penguatan ekonomi berbasis komunitas peningkatan daya saing global melalui inovasi dan teknologi penguatan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan, peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan, peremajaan perkebunan rakyat secara intensif, progresif dan berkelanjutan.

5.1.3. Terwujudnya Transformasi Tata Kelola

Terdapat 4 tahapan arah kebijakan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan di provinsi Sulawesi Barat:

1. Tahap I (2025–2029):

Penguatan fondasi transformasi tata kelola merupakan proses untuk meningkatkan dasar-dasar yang mendukung perubahan dan perbaikan dalam sistem tata kelola pemerintahan, hal ini menjadi langkah penting dan strategis untuk memastikan bahwa peran pemerintah daerah dapat beroperasi secara optimal, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan, dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2. Tahap II (2030–2034):

Akselarasi transformasi tata kelola ditujukan untuk mempercepat proses perubahan dan peningkatan dalam sistem tata kelola pemerintahan, guna mempercepat inovasi dan peningkatan kinerja, mempercepat respon terhadap perubahan, meningkatkan daya saing, optimalisasi proses dan pengurangan birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengelolaan risiko, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pemangku kepentingan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan peluang pasar. Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah dalam mengakselerasi transformasi tata kelola pemerintahan agar dapat lebih cepat dan lebih efisien dalam melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan ditengah dinamika dan tantangan lingkungan yang selalu berubah.

3. Tahap III (2035–2039):

Untuk mewujudkan transformasi tata kelola yang berdaya saing, berbagai upaya dan hasil yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, menuntut untuk tidak hanya berorientasi pada efektivitas dan efisiensi tetapi juga mampu bersaing dalam lingkungan global dan nasional yang sangat dinamis. Dengan penciptaan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan inovatif, akan mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan serta memungkinkan untuk bersaing secara efektif di kawasan regional, nasional, bahkan global.

4. Tahap IV (2040–2045):

Pada tahap akhir ini, perwujudan transformasi tata kelola yang unggul dan sesuai dengan nilai-nilai lokal, progresif, dan mampu bertahan dalam jangka panjang telah dapat dicapai. Nilai-nilai dan budaya lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yakni Malaqbi, telah diintegrasikan kedalam sistem tata kelola pemerintahan dalam rangka menghormati nilai-nilai dan budaya lokal, meningkatkan kualitas layanan dan kinerja, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas. Selain itu, sistem tata kelola pemerintahan juga telah berorientasi progresif dan inovatif, melalui adopsi teknologi terbaru dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas terhadap perubahan, pengembangan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan untuk mendorong kemajuan, serta mampu bersaing di kawasan regional, nasional, bahkan global yang menekankan pada kualitas, inovasi, dan kecepatan dalam merespon perubahan. Untuk keberlanjutan dalam jangka panjang, sistem tata kelola pemerintahan telah berorientasi pada pengelolaan sumber daya secara bijak dengan memperhatikan keberlanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

5.1.4. Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Terdapat 4 tahapan arah kebijakan dalam Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah di provinsi Sulawesi Barat:

1. Tahap I (2025-2029):

Tahapan Pertama terkait Mengoptimalkan Pelaksanaan Hukum dengan Penerapan Perda yang Konsisten dan Cipta Kondisi yang Tertib dan Menghadirkan Rasa Aman periode 2025-2029. Penerapan peraturan daerah (Perda) yang konsisten dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan hukum di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memiliki Perda yang jelas dan konsisten, akan lebih mudah memahami aturan yang berlaku dan mematuhi. Selain itu, menciptakan kondisi yang tertib juga merupakan langkah penting, ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum yang adil dan tegas hingga penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung keamanan dan ketertiban. Pentingnya menghadirkan rasa



cenderung lebih produktif dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Upaya untuk meningkatkan keamanan melalui penerapan hukum yang adil dan efektif sangatlah penting. Dengan menerapkan Perda yang konsisten, menciptakan kondisi yang tertib, dan menghadirkan rasa aman, sebuah daerah dapat memperkuat sistem hukumnya dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh warganya.

2. Tahap II (2030-2034):

Pada tahapan kedua terkait Memperkuat Penegakan Hukum dan Terciptanya Kondisi yang Tertib dan Aman periode 2035-2039. Memperkuat penegakan hukum dan menciptakan kondisi yang tertib serta aman menjadi landasan utama bagi kemajuan sebuah daerah. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, berbagai langkah strategis telah diambil untuk meraih tujuan. Pertama-tama, reformasi hukum dan regulasi menjadi fokus utama. Evaluasi mendalam dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang ada, dengan tujuan menghasilkan landasan hukum yang jelas, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Peraturan yang disusun secara baik menjadi pondasi kuat dalam menegakkan hukum dengan adil dan efektif. Selanjutnya, penguatan institusi penegak hukum menjadi prioritas. Investasi ditingkatkan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan diperkuat untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menangani berbagai bentuk kejahatan. Pendekatan holistik juga diadopsi dalam penanganan kejahatan. Selain melakukan penegakan hukum secara tegas, upaya pencegahan dan rehabilitasi juga diperkuat. Kemitraan erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam menanggulangi berbagai masalah keamanan. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kekuatan besar dalam memperkuat penegakan hukum. Sistem pemantauan modern, analisis data cerdas, dan aplikasi teknologi lainnya digunakan untuk mempercepat respons terhadap kejahatan serta memperkuat keamanan publik secara keseluruhan. Tidak kalah pentingnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penentu dalam penciptaan kondisi yang aman dan tertib. Melalui pendidikan hukum, sosialisasi, dan program partisipasi masyarakat, kesadaran akan hukum ditingkatkan, sehingga masyarakat menjadi mitra yang kuat dalam menjaga keamanan wilayahnya.

3. Tahap III (2035-2039):

Pada tahapan ketiga periode 2040-2039 untuk Memantapkan Pelaksanaan Hukum dan Mewujudkan Landasan menuju Masyarakat yang Kokoh. Fokus utamanya adalah memantapkan pelaksanaan hukum untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kemajuan masyarakat secara berkelanjutan. Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, langkah-langkah strategis telah diambil untuk meraih tujuan ini. Diperlukan upaya untuk memperkuat sistem hukum dengan meninjau ulang dan memperbaharui peraturan-peraturan yang ada. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi dinamika zaman. Peraturan yang jelas, konsisten, dan adil menjadi pondasi yang kuat dalam menegakkan hukum dengan baik. Selanjutnya, penguatan institusi penegak hukum menjadi kunci. Investasi dalam peningkatan kapasitas, sumber daya manusia, dan infrastruktur lembaga-lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan peradilan dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Pendekatan preventif juga diperkuat dalam upaya memantapkan pelaksanaan hukum. Program-program pencegahan kejahatan dan rehabilitasi diperkuat, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta kerjasama lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta menjadi penting dalam menangani berbagai tantangan keamanan. Pentingnya kesadaran hukum di masyarakat juga ditekankan. Melalui program pendidikan dan sosialisasi hukum yang luas, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka. Hal ini akan menciptakan budaya kepatuhan terhadap hukum yang kuat dalam masyarakat.

4. Tahap IV (2040-2045):

Sehingga pada tahap ke empat periode 2040-2045 periode terciptanya Masyarakat yang Berdaulat, Aman dan Damai. Terciptanya masyarakat yang berdaulat, aman, dan damai adalah cita-cita yang diidamkan oleh setiap komunitas di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan keadaan di mana warga memiliki kontrol atas nasib dan keamanan mereka sendiri, serta hidup dalam kedamaian dan harmoni. Masyarakat yang berdaulat berarti bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat. Ini berarti adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan. Keberagaman pendapat dihargai dan

semua suara didengar dalam sebuah sistem yang transparan dan inklusif. Keamanan dan kedamaian adalah pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang berdaulat. Hal ini mencakup keamanan fisik, ekonomi, sosial, dan politik. Penegakan hukum yang adil dan efektif serta perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan komponen kunci dalam menciptakan suasana yang aman dan damai bagi semua. Keterlibatan aktif dalam pembangunan ekonomi juga merupakan bagian integral dari menciptakan masyarakat yang berdaulat, aman, dan damai. Dengan memastikan akses yang adil terhadap peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, masyarakat dapat mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin muncul. Dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan individu, terciptanya masyarakat yang berdaulat, aman, dan damai bukanlah suatu impian yang tidak tercapai. Melalui komitmen yang kokoh terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian, masyarakat dapat menjadi tempat di mana setiap individu dapat berkembang secara maksimal dalam suasana yang sejahtera dan harmonis.

5.1.5. Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Terdapat 4 tahapan arah kebijakan dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi di provinsi Sulawesi Barat:

1. Tahap I (2025-2029):

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim, memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi menjadi fundamental bagi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara aspek sosial, budaya, dan ekologi untuk menciptakan fondasi yang kokoh dan berkelanjutan bagi pembangunan. Pada tahap I Difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

2. Tahap II (2030-2034):

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi merupakan fondasi penting bagi pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga aspek ini saling terkait dan mempengaruhi keberlanjutan serta kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan yang setara dan inklusif, penting untuk memperkuat ketahanan di ketiga bidang tersebut untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan disrupsi budaya

Pada tahap II difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.

3. Tahap III (2035-2039):

Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, serta alam dan lingkungan dalam menghadapi perubahan merupakan upaya strategis yang sangat penting dalam era globalisasi dan perubahan iklim saat ini. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kapasitas individu, komunitas, dan sistem lingkungan untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, perubahan iklim, serta dinamika sosial dan ekonomi. Pada tahap III difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan

efisiensi; serta pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan.

4. Tahap IV (2040-2045):

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, menciptakan masyarakat yang berkualitas dan menjadi pusat peradaban yang berkelanjutan adalah sebuah keharusan. Hal ini bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahap IV difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif; lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, produk pangan termasuk produk olahan Sulawesi Barat yang menembus pasar Nasional, sumber daya hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan farmakologi, dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission.

5.1.6. Mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah, Aspek Sosial, Ekonomi Untuk Menunjang IKN

Terdapat 4 tahapan arah kebijakan dalam Mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah, Aspek Sosial, Ekonomi Untuk Menunjang IKN di provinsi Sulawesi Barat:

1. Tahap I (2025-2029):

Pemerataan peningkatan kualitas infrastruktur dan terbukanya konektivitas antar daerah melalui peningkatan jalan dan jembatan serta melakukan percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)), penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria.



2. Tahap II (2030-2034):

Akselerasi pemerataan kualitas infrastruktur didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, penguatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pelaksanaan reforma agrarian.

3. Tahap III (2035-2039):

Pemantapan pemerataan kualitas infrastruktur pelabuhan laut dan udara didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agrarian.

4. Tahap IV (2040-2045):

Perwujudan pemerataan pembangunan di wilayah Sulawesi Barat didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agraria

5.1.7. Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Terdapat 4 tahapan arah kebijakan dalam Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan di provinsi Sulawesi Barat:

1. Tahap I (2025-2029):

Peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, peningkatan keterjangkauan pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan melalui penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman.

2. Tahap II (2030-2034):

Peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, pemerataan simpul transportasi, inisiasi pemanfaatan teknologi transportasi dan pengembangan integrasi antarmoda serta sinergi peningkatan keselamatan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman



3. Tahap III (2035-2039):

Pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, pemantapan efektivitas pergerakan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan penurunan fatalitas kecelakaan, pemantapan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, penyediaan rumah layak huni untuk semua, serta pemantapan kawasan permukiman layak

4. Tahap IV (2040-2045):

Pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, perwujudan pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan ber- kelanjutan, jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas, pemenuhan rumah layak huni terjangkau dan ber- kelanjutan, serta perwujudan kawasan permukiman layak

5.1.8. Menjaga Kestinambungan Pembangunan

Terdapat 4 tahapan arah kebijakan dalam Menjaga Kestinambungan Pembangunan di provinsi Sulawesi Barat:

1. Tahap I (2025-2029):

Penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

2. Tahap II (2030-2034):

Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah melalui pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *Blended Finance*.

3. Tahap III (2035-2039):

Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah.

4. Tahap IV (2040-2045):

Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat dengan sinergi dan pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin optimal.



5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk jangka waktu 20 tahun ke depan diturunkan dari Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat. Sasaran Pokok dimaksud bersifat makro daerah dan berdimensi jangka panjang serta dinyatakan secara kuantitatif. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunann hasil Penyelarasn RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Arah Kebijakan Transformasi Daerah berupa Arah Kebijakan Transformasi menurut Provinsi sesuai Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan Transformasi sesuai karakteristik daerah dalam melaksanakan keotonomiannya, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) berupa indikator hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD dan Indikator Daerah sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian Daerah.

Tabel 5.3. Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang inklusif	Terwujudnya Transformasi Sosial	IE1	Kesehatan Untuk Semua	1. Perluasan upaya promotif-preventif pembudayaan perilaku hidup sehat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,31	77,95	Kesehatan Untuk Semua
				2. Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.	Kesehatan Ibu dan Anak: a. Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	211 26,2	23 6,1	
				3. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya daerah perdesaan yang sulit diakses.	Penanganan Tuberculosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage) (%)* b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) (%)*	71 93,09	95 98	
				4. Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	
				5. Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).				
		IE2	Pendidikan Unggul dan Berdaya Saing	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun Pendidikan	Hasil Pembelajaran: a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum	0,00 – 16,67 0,00 - 16,67	66,67 - 66,67 66,67 - 66,67	Pendidikan Unggul dan Berdaya Saing



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				dasar dan pendidikan menengah)	pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
				2. Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi	i) Literasi Membaca ii) Numerasi			
				3. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	18,46- 20,46 14,48- 16,48	60,38 - 62,38 57,78 - 59,78	
				4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti Perkebunan, perikanan dan industri pengolahan serta ketertarikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,81 – 8,83	11,10 – 11,22	
				5. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil	d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,12- 13,13	14,47 – 14,55	
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	13,8	13,80-28,17	
					Persentase Pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di bidang keahlian Menengah Tinggi	77,44	90,00	
		IE3	Perlindungan Sosial yang Inklusif	1. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. Perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi. Untuk daerah perdesaan, pesisir, dan kepulauan.	Tingkat Kemiskinan	9,00 – 9,73	0,16 - 0,66	
				2. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. Perluasan jaminan sosial meliputi Kesehatan, insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	31,67	87,82	
					Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	5	30	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				keamanan ekonomi untuk penduduk lansia 3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 4. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. 5. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 6. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 7. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.				
	Terwujudnya Transformasi Ekonomi	IE 4	IpTek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan. 2. pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya dalam mewujudkan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. 3. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan 12. Pengembangan Pariwisata: i) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ii). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara iii). Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (Ribu Orang) 13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan	11,16 - 11,21 0,25 0,19 7 8,77 0,58	15,36 - 16,37 0,43 0,48 10 10,74 1,18	Terwujudnya IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok			
				tampung lingkungan hidup.	Menengah pada Level Provinsi						
				4. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan.	iii. Rasio Kewirausahaan Daerah	1,23	3,29				
				5. Peningkatan produktivitas BUMD berbasis potensi dan inovasi.	iv. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,59	3,61				
					v. Return on Aset (ROA) BUMD	0,64	4,32				
				6. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik						
					i. Tingkat Pengangguran Terbuka	1,41 - 2,00	0,86 - 1,89				
					ii. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	25	50				
					iii. Nilai Tukar Petani	151,08	314,01				
				7. penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	iv. Nilai Tukar Nelayan	108,24	137,63				
					15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,65	73,30				
				8. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.	16. Indeks Inovasi Ddaerah	2,5	4,5				
				9. Penerapan teknologi dan kemitraan usaha.							
				10. Peningkatan kapasitas dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan riset berbasis bioekonomi dan bioteknologi, disertai peningkatan manajemen sumber daya							
				IE 5	Penerapan Ekonomi Hijau	1. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif.	17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau
						2. Peningkatan kontribusi pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	i. Indeks Ekonomi Hijau Daerah		68,42	80,02	
		3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	ii. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			46	69,20				
		IE 6	Transformasi Digital	1. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.	18. Adopsi TIK	5,55	7,30	Terwujudnya Transformasi Digital			
2. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh											



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.				
		IE 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan.	19. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi 20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 21. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,07 27,19 13,82	0,07 28,98 20,21	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		IE 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif. 2. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 3. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 4. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 5. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii)	22. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Ibukota Provinsi terhadap Nasional (%) b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	- 70,29	- 70,29	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (iv) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (v) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (vi) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (vii) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	c) Persentase Desa Mandiri (%)	0,00	6,43	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	IE 9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1.Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 3.Penguatan integritas partai politik. 4.Peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 5.Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan asset daerah 6.Percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan pemerintahan digital 7.peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Indeks Reformasi Hukum Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Pelayanan Publik Indeks Integritas Nasional	97,5 3,90 3,42 74,13	100 5 5 89,30	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	
				melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital 8. pengawasan proses pengembangan karir promosi mutase ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi,					
	Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	IE10	Hukum Berkeadilan, Keadamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	
					Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65	85		
					Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	77,03	94,41		
					Indeks Demokrasi Provinsi	Sedang	Tinggi		
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 2. Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,24	3,60	Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
					Tingkat Inflasi (%)	1,7 – 2,4	0,6 – 2,0		
					Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
					a) Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	12,04	66,60		
					b) Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,21	12,87		
					c) Nilai Transaksi Saham per-Kapita per-Provinsi (Rupiah)	379.310,95	4.753.489,58		
	IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	d) Total Kredit / PDRB (%)	22,4	64			
				Inklusi Keuangan (%)	85,69	98,40			
		Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 2. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat 3. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan 4. internalisasi kurikulum kebudayaan Sulawesi Barat di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam	Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD)	51,56 – 51,6	59,97 - 60,36	Terciptanya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)						76,11 – 76,13	83,45 - 83,98		

272



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				keanekaragaman hayati (bioprospeksi) di tingkat genetik dan spesies 4. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan 5. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya 6. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau 7. Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada pengelolaan lahan berkelanjutan; 8. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga kearifan lokal (indigenous knowledge) untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup 9. Pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, dengan fokus pemilahan sampah di rumah tangga, peningkatan sampah yang terangkut dan tertangani di TPST, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular 10. Pengelolaan limbah B3 dan limbah medis yang berkelanjutan dari hulu ke hilir, dengan fokus pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha 11. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah 12. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman				
		IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi terutama gas dan listrik 2. Pengembangan energi baru dan terbarukan; 3. Peningkatan riset, inovasi, dan eksplorasi	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) -Intensitas Energi Primer (SBM/ Rp Miliar) Prevalensi Ketidacukupan	377 55 7,44	2930,0 39,0 0,39	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				potensi dan cadangan baru energi, termasuk sumber energi yang berasal dari laut	Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)			
				4. Perbaikan regulasi dan kelembagaan konservasi energi. Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air	Indeks Ketahanan Pangan	78	83,95	
				5. Perluasan pemanfaatan elektrifikasi dan gas pada lingkup rumah tangga, industri, dan transportasi	Skor Pola Pangan Harapan	81	95	
				6. Mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi di daerah	Ketahanan Energi - Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,00	2,14	
				7. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (Food, Energy, and Water) Nexus				
				8. Penerapan upaya konservasi air hujan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik				
				9. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat				
				10. Penguatan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu dan konservasi non vegetatif (pembangunan sumur resapan, kolam retensi, dan bangunan penangkap air lainnya)				
				11. Modernisasi sistem irigasi untuk mendorong efisiensi penggunaan air irigasi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan(%)	28	100,00	
				12. Pemanfaatan sumber daya air dengan menggunakan prinsip akuntansi air (water accounting) untuk aspek pelestarian lingkungan pada rantai pasok air				
				13. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan				
				14. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan				
				15. Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK),				



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah 3TP, atau terkena dampak bencana 16. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan 17. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste) 18. penguatan sistem rantai dingin, hulu-hilir perikanan, serta jaminan kualitas dan ketelusuran produk perikanan				
		IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pasca bencana 2. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan dan penggunaan teknologi seperti flood early warning system 3. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok rentan 4. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai dan konservasi mangrove di pesisir 5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, dan gempa bumi, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi 6. Mewujudkan pembangunan rendah karbon dengan dekarbonisasi sektor industri, energi, dan transportasi, pengelolaan lahan berkelanjutan, penanganan limbah melalui daur ulang dan pengomposan, pemanfaatan teknologi Waste to Energy (WtE), peningkatan sanitasi dan pengolahan sampah, transisi ke energi terbarukan, serta penggunaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)* Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	165,23 20,22 33,85	139,76 - 118,86 50,11% 65,15%	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
				transportasi rendah emisi 7. Meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi, baik struktural maupun nonstruktural, dengan fokus pada sektor air, kelautan, pesisir, pertanian, kesehatan, dan bencana 8. Pewujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim 9. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim 10. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim				

Dengan mengacu pada Visi, misi, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat, maka ditetapkan 17 (tujuh belas) Sasaran Pokok yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan, yaitu:

1. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Barat bertujuan menciptakan masyarakat sehat, mandiri, dan produktif melalui perlindungan sosial berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan beberapa prasyarat, seperti infrastruktur kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, serta sumber daya manusia yang berkualitas dan tersebar merata. Program kesehatan komprehensif dan berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, regulasi yang mendukung sistem kesehatan dan ekosistem kesehatan yang berkembang akan mendukung pelayanan yang inklusif, menjamin akses dan kualitas layanan yang adil. Dengan sumber daya yang memadai dan pendekatan holistik, sistem kesehatan yang lebih baik dapat tercapai di Sulawesi Barat.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan akses dan layanan kesehatan yang merata dan inklusif di Sulawesi Barat adalah : 1) Perluasan upaya promotif-preventif bertujuan untuk membudayakan perilaku hidup sehat di masyarakat melalui

program edukasi, kampanye kesehatan, dan penguatan fasilitas umum. Upaya ini melibatkan multisektor dan masyarakat, guna mencegah penyakit, meningkatkan kesadaran, serta menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat secara berkelanjutan. hal tersebut dapat di gambarkan pada indikator Usia Harapan Hidup (UHH); 2) Percepatan penanganan stunting dan eliminasi penyakit menular seperti malaria dapat dicapai melalui pendekatan integrasi multisektor yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Selain itu, rekayasa lingkungan habitat vektor perlu dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit, serta meningkatkan gizi dan akses kesehatan, guna mencapai masyarakat yang lebih sehat. arah kebijakan tersebut di ukur dalam beberapa indikator sebagai berikut : Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup), Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%), Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%), Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*; 3) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) di daerah perdesaan, terpencil, dan kepulauan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Melalui unit kesehatan bergerak, masyarakat yang sulit dijangkau dapat menerima pelayanan medis dasar, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, arah kebijakan tersebut mendukung peningkatan pada indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage), Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate); 4) Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP. arah kebijakan tersebut mendukung peningkatan pada indikator Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage), Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate); 5) Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) secara merata dan tepat sasaran yang capaiannya dapat dihitung dengan indikator Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%).



2. Pendidikan Unggul dan Berdaya Saing.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dari suatu bangsa serta kunci upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, oleh karena itu melalui Pendidikan yang unggul dan berdaya saing difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas yang menciptakan masyarakat yang kompeten di era digital dengan memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan. Selain itu, pemerataan pendidikan sangatlah penting karena melalui pendidikan, individu dapat berdaya saing tinggi dan berorientasi pada kualitas. Pemerataan pendidikan merupakan penyediaan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan sehingga pendidikan itu menjadi wahana pembangunan Sumber Daya Manusia untuk menunjang pembangunan. Pendidikan yang merata dan berkualitas ditentukan oleh kualitas dan kompetensi pendidik dalam lingkungan keluarga (pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal) dan masyarakat (pendidikan non-formal). Pendidik dalam ketiga level ini berperan dan berpartisipasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pendidik juga bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan dalam segala dimensinya.

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Sulawesi Barat dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada transformasi pendidikan, yang mencakup transformasi tata kelola pendidikan, akses terhadap layanan pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada nilai, relevansi, dan berbasis teknologi. Arah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas secara inklusif dalam dua puluh tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui: (a) pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi, (b) perluasan bantuan pembiayaan pendidikan, (c) perluasan jangkauan layanan Pendidikan di pegunungan dan kepulauan dengan melakukan pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan, (d) melakukan kampanye Gerakan Kembali bersekolah; 2) Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi melalui (a) pemberian bantuan pembiayaan Pendidikan, (b) pembekalan bagi siswa kelas XII; 3) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif; 4)

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, perikanan, dan industri pengolahannya, serta ketertarikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); 5) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil.

Pendidikan unggul dan berdaya saing dapat digambarkan melalui persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi, persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, harapan lama sekolah, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi serta persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

Pada dasarnya Pendidikan Sulawesi Barat yang unggul dan berdaya saing tidak hanya sistem pendidikan yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang memungkinkan mereka bersaing secara efektif dalam pasar global yang kompetitif, namun pendidikan ini juga harus inklusif, artinya akses dan kesempatan pendidikan harus tersedia bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang setara hingga metode pengajaran yang inklusif dan mendukung untuk semua siswa. Dengan pendidikan yang unggul dan berdaya saing, diharapkan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

3. Perlindungan Sosial yang Inklusif.

Perlindungan sosial di Sulawesi Barat bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan Inklusif. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kerentanan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penyakit, bencana alam, dan ketidakmampuan bekerja karena usia atau disabilitas.



Dalam 20 tahun ke depan, berdasarkan Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Perlindungan Sosial yang Inklusif di Sulawesi Barat akan fokus pada beberapa aspek penting. 1). Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran, untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, mengidentifikasi masyarakat rentan dan memastikan mereka menerima layanan perlindungan sosial 2). Perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi sangat penting untuk mendukung seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah perdesaan, pesisir, dan kepulauan. Dalam konteks ini, perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko, termasuk bencana alam dan perubahan iklim. 3) Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. 4) Perluasan jaminan sosial meliputi Kesehatan, insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, dan penyandang disabilitas. 5) Peningkatan akses rumah Layak Huni dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah yang beragam, termasuk topografi, demografi, dan kondisi sosial ekonomi seperti : Melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi kawasan yang paling membutuhkan rumah layak huni dan terjangkau, Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan lokal untuk menyediakan kredit perumahan dengan bunga rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Meningkatkan aksesibilitas jalan, air bersih, dan sanitasi di kawasan perumahan baru. 6). Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial dengan aktivitas sebagai berikut : Melakukan identifikasi kebutuhan sosial dan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di melalui survei dan data statistic, Menyusun program-program prioritas terkait perlindungan sosial (seperti bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan dasar, dan program jaminan sosial) yang dapat diintegrasikan dalam APBD. 7). Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi



dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya pusat pemerintahan, Pusat Perbelanjaan dan perumahan bersubsidi.

Tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi barat dapat dibedakan menjadi dua kategori utama perdesaan dan perkotaan. Menggabungkan kedua kategori ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemiskinan di Sulawesi Barat proporsi kemiskinan di daerah perdesaan dan perkotaan menunjukkan tantangan yang berbeda. Meskipun persentase kemiskinan secara keseluruhan menurun, ada peningkatan dalam jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan yang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya terfokus di daerah pedesaan tetapi juga meningkat di kawasan urban.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah indikator penting untuk menilai sejauh mana pekerja di suatu wilayah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat, terlindungi oleh program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, serta pelayanan terkait peristiwa seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan kematian. Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan beberapa program jaminan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Secara umum, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua kategori: peserta aktif dan non-aktif.

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Provinsi Sulawesi Barat sangat penting untuk dipahami, karena hal ini mencerminkan tingkat inklusivitas dan kesetaraan dalam dunia kerja. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal tidak hanya merupakan implementasi dari hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan, tetapi juga berperan dalam mengurangi stigma serta stereotip negatif terhadap mereka. Dengan demikian, hal ini mendorong perubahan budaya organisasi menuju lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Lebih jauh, partisipasi aktif penyandang disabilitas di sektor formal diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Memanfaatkan potensi dan kontribusi mereka dalam pasar kerja dapat membantu

menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam dan produktif. Meskipun saat ini masih terdapat tantangan, seperti rendahnya aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung, upaya untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal harus terus dilakukan. Ini termasuk penyediaan pelatihan dan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat berkompetisi secara adil di pasar tenaga kerja.

Tabel 5.4. Sasaran Pokok Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Transformasi Sosial

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
1.	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,31	72,306	74,298	76,622	77,95
			Kesehatan Ibu dan Anak: a. Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	211	183	127	61	23
			b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	26,20	23,19	17,16	10,12	6,10
			Penanganan Tuberculosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>treatment coverage</i>)	%	71	74,6	81,8	90,2	95
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (<i>treatment success rate</i>)	%	93,09	93,82	95,29	97,01	98
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98	98,22	98,67	99,2	99,5
2.	Pendidikan Unggul dan Berdaya Saing	Pendidikan Unggul dan Berdaya Saing	Hasil Pembelajaran: a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	%	0 – 16,67 0 – 16,67	16,67 – 33,34 16,67 – 33,34	33,35 – 50,00 33,35 – 50,00	50,00 – 66,67 50,00 – 66,67	66,67 – 83,34 66,67 – 83,34
			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	%	18,46 – 20,46 14,48 – 16,48	29,42 – 31,42 25,97 – 27,48	40,38 – 42,38 37,46 – 39,46	51,34 – 53,34 48,96 – 50,46	60,38 – 62,38 57,78 – 59,78
			c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,81 – 8,83	9,18 – 9,20	9,87 – 9,89	10,69 – 10,71	11,10 – 11,22
			d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,12 – 13,13	13,32 – 13,33	13,72 – 13,73	14,20 – 14,21	14,47 – 14,55
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang	%	13,8	16,02	20,46	25,63	28,17



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
			berkualifikasi pendidikan tinggi						
			Persentase Pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di bidang keahlian Menengah Tinggi	%	77,44	79,32	83,09	87,48	90,00
3.	Perlindungan Sosial yang Inklusif	Perlindungan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	%	9,00 - 9,73	7,67 - 8,37	5,02 - 5,65	1,93 - 2,47	0,16 - 0,66
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kab/Kota	%	31,67	40,09	56,94	76,59	87,82
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	5	8,75	16,25	25	30

4. Terwujudnya IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.

Salah satu upaya perwujudan transformasi ekonomi melalui pengetahuan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan produktifitas ekonomi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bertujuan untuk mendorong infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menyeluruh, guna mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengetahuan dan teknologi terbaru agar sektor-sektor ekonomi dengan produktivitas rendah dapat bertransformasi menjadi sektor-sektor yang lebih produktif. Upaya ini juga menggerakkan sumber daya manusia untuk menjadi lebih produktif dan inovatif, sehingga mampu menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah yang mampu bersaing di pasar global. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dijadikan prioritas, memanfaatkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi hingga generasi mendatang.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan terwujudnya IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Sulawesi Barat dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan pada: 1). Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, melalui (a) peremajaan perkebunan rakyat secara intensif, progresif, dan berkelanjutan. (b) efisiensi dan integrasi antara infrastruktur on-farm dengan distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. (c) penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian yang



bernilai tinggi dan berbasis ekspor. (2) Pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya dalam mewujudkan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan: (i) Rasio PDRB Industri Pengolahan 2). Peningkatan kontribusi pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah. 3). Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri melalui (a) digitalisasi industri pengolahan, (b) peningkatan penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru. (c) pengembangan industri berbahan baku lokal, 4) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi (b) penguatan sistem perlindungan tenaga Kerja (c) penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri. 5) Peningkatan produktivitas BUMD berbasis potensi dan inovasi. 6). Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi melalui pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa. 7) Penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 8) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui (a) Peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) (b) peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global, 9) Penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 10). Peningkatan kapasitas dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan riset berbasis bioekonomi dan bioteknologi, disertai peningkatan manajemen sumber daya. 11) Peningkatan kapasitas dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan riset berbasis bioekonomi dan bioteknologi, disertai peningkatan manajemen sumber daya melalui (a) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor (b) penguatan kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah. Untuk mencapai terwujudnya IPTEK, Inovasi dan produktivitas ekonomi dapat diukur melalui indikator antara lain: (i) Rasio PDRB Industri Pengolahan, (ii) Pengembangan pariwisata yang terdiri dari Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum dan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara. (iii) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD, diantaranya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non

Pertanian pada, Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi, Rasio Kewirausahaan Daerah, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, Return on Aset (ROA) BUMD. (iv) Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik, diantaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal. (v) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. (vi) Tingkat Penguasaan IPTEK. (vii) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal. (viii) Indeks Inovasi Daerah.

5. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau.

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Terwujudnya penerapan ekonomi hijau menjadi sebuah tujuan yang penting dalam upaya membangun keberlanjutan ekonomi di Sulawesi Barat. **Arah Kebijakan Transformasi** untuk mewujudkan ekonomi hijau di Sulawesi Barat sebagai berikut: 1) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif melalui pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian, 2) Peningkatan kontribusi pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui: (a) penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur EBT, (b) desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau, inklusif, dan pendampingan energi 3) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Untuk mencapai terwujudnya Ekonomi Hijau di Sulawesi Barat diantaranya: (i) Indeks Ekonomi Hijau Daerah dan (ii) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.

6. Terwujudnya Transformasi Digital.

Transformasi digital memungkinkan Sulawesi Barat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal, meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, dan memperluas akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Melalui

pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan akses internet yang merata, masyarakat Sulawesi Barat dapat terhubung dengan dunia digital, membuka akses ke informasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang bisnis yang lebih luas. untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (i) regulasi dan institusi. **Arah Kebijakan Transformasi** dalam mewujudkan transformasi digital diantaranya 1) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan. 2) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (a) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (b) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (C) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). (d) penguatan promosi pariwisata antara lain melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. Untuk mewujudkan transformasi digital dapat diukur melalui indikator pembangunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

7. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.

Integrasi ekonomi domestik dan global membawa beragam manfaat bagi Sulawesi Barat. **Arah kebijakan transformasi** untuk mendorong perekonomian Sulawesi Barat tumbuh semakin optimal yaitu dengan 1) Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan melalui (a) Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah

secara lebih terintegrasi, (b) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global. Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global di Sulawesi Barat yang dapat diukur melalui indikator pembangunan diantaranya (i) Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi, (ii) Pembentukan Modal Tetap Bruto, (iii) Ekspor Barang dan Jasa.

8. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Salah satu strategi penting untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di daerah adalah dengan mengembangkan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan kota dan desa yang maju, inklusif, serta berkelanjutan. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dapat diwujudkan melalui **Arah Kebijakan transformasi** sebagai berikut: 1) Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif. 2) Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 3) Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 4) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 5) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (a) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (b) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (c) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (d) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (e) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (f) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (g) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (h) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (i) pengembangan skema



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan dapat dilihat dari pencapaian indikator pembangunan diantaranya, (i) Proporsi kontribusi PDRB wilayah ibukota provinsi terhadap Nasional; (ii) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; (iii) Persentase desa mandiri.

Tabel 5.5. Sasaran Pokok Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Transformasi Ekonomi

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
1.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	12. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11,16 - 11,21	11,79-11,98	12,87-13,30	14,34-15,10	15,36 - 16,37
			12. Pengembangan Pariwisata:						
			i) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,25	0,277	0,331	0,394	0,43
			ii). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	0,19	0,26	0,28	0,35	0,48
			iii). Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (Ribu Orang)	Ribu Orang	93	151	267	403	480
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	7	7,45	8,35	9,4	10
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
			i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada	%	8,77	9,07	9,66	10,35	10,74
			ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	0,58	0,67	0,85	0,88	1,18
			iii. Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,23	1,54	2,16	2,88	3,29
			iv. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,59	1,04	1,95	3,01	3,61
			v. Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,64	1,19	2,30	3,58	4,32
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik						
			i. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,41 - 2,00	1,33-1,98	1,16-1,95	0,97-1,91	0,86 - 1,89
			ii. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal		25	28,75	36,25	50	50
			iii. Nilai Tukar Petani	Point	125,63	126,60	127,81	129,20	130,00
			iv. Nilai Tukar Nelayan	Point	108,24	110,00	111,21	112,33	115,00



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
			15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,65	61,70	65,79	70,57	73,30
			16. Indeks Inovasi Daerah	Skor	2,5	2,8	3,4	4,1	4,5
2.	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
			(i) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Point	68,42	70,16	73,64	77,70	80,02
			(ii) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	46	51,80	57,60	63,40	69,20
3.	Transformasi Digital	Transformasi Digital	18. Adopsi TIK	%	5,55	5,81	6,34	6,95	7,30
4.	Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	19. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
			20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,19	27,46	28,00	28,62	28,98
			21. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13,82	14,78	16,70	18,93	20,21
5.	Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	22. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
			a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Ibukota Provinsi terhadap Nasional (%)	%	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0,0001
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	70,29	80,78	93,01	100,00	70,29
			c) Persentase Desa Mandiri (%)	%	0,00	0,96	2,89	5,14	6,43

9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.

Transformasi tata kelola ditujukan agar terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, dengan berfokus pada (i) optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah; (ii) peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; (iii) penguatan integritas partai politik; (iv) peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat; (v) pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; (vi) percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan pemerintahan digital; (vii) peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; dan (viii) pengawasan proses

pengembangan karier promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.6. Sasaran Pokok Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Transformasi Tata Kelola

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
1.	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,50	98,5	99,5	100	100
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,52	3,657	4,131	4,684	5
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,90	4,2	4,5	4,75	5
			Indeks Integritas Nasional	Poin	74,13	76,405	80,956	86,266	89,30

10. Tegaknya Hukum yang Berkeadilan, serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Penegakan Hukum adalah pilar utama dalam membangun ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tegaknya hukum yang berkeadilan bukanlah hanya tanggung jawab dari pihak berwenang semata. Masyarakat juga turut serta dalam menjaga ketertiban dengan mematuhi aturan, serta melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat solidaritas antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan bersama. Upaya Provinsi Sulawesi Barat dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban masyarakat adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum yang adil, efisien, dan transparan akan menguatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sementara itu, menjaga ketertiban dan ketentraman memerlukan partisipasi aktif dari setiap individu dalam masyarakat. Dengan upaya bersama, Provinsi Sulawesi Barat dapat mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan berkeadilan, di mana setiap warga negara merasa dilindungi dan dihargai dalam menjalani kehidupannya. Arah kebijakan transformasi Tegaknya Hukum yang Berkeadilan, serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Sulawesi Barat dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan pada: 1). Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.

11. Terjaganya Stabilitas Makro Daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyadari pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan

ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tujuan Pembangunan berkelanjutan. Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di daerah adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Sinergi antara perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dan prioritas nasional untuk menciptakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan penguatan pengendalian inflasi daerah yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, Masyarakat dan sektor swasta. Melalui pemantauan harga yang ketat, penguatan infrastruktur distribusi, diversifikasi pasokan bahan pokok, serta kerjasama dengan Bank Indonesia dan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mengurangi dampak negatif inflasi terhadap perekonomian lokal. Upaya ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi lokal dan edukasi kepada Masyarakat.

12. Memperkuat Kapasitas dan Hubungan Kerja Sama Antar Daerah.

Upaya Provinsi Sulawesi Barat dalam ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keamanan di kawasan. Melalui peningkatan kapasitas diplomasi, penguatan sistem pertahanan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor keamanan, Sulawesi Barat dapat memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat regional. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat, provinsi ini dapat memastikan bahwa wilayahnya tetap aman, damai, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Arah kebijakan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Sulawesi Barat dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan pada Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Tabel 5.7. Sasaran Pokok Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
1.	Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Hukum Berkeadilan, Keaamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	65	70,00	75,00	80,00	85,00
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	77.03	81,38	85,72	90,07	94,41
			Indeks Demokrasi Indonesia		Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
		Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,24	1,594	2,302	3,128	3,60
			Tingkat Inflasi	%	1,7 - 2,4	1,42 - 2,3	1,2 - 2,2	1 - 2,1	0,6 - 2,0
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	12,04	20,224	36,592	55,688	66,60
			b. Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,21	2,109	5,907	10,338	12,87
			c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa nilai rata-rata tahunan	Rupiah	379.310,95	1.035.437,74	2.347.691,33	3.878.653,85	4.753.489,58
			d. Total Kredit/PDRB	%	22,4	28,64	41,12	55,68	64
			Inklusi Keuangan	%	85,69	87,5965	91,4095	95,858	98,40
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	%	50	55	70	80	90
			Indeks Ketahanan Nasional	poin	2,99	3,14	3,45	3,80	4

13. Terciptanya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.

Agama yang berpihak pada maslahat dan budaya yang maju mencerminkan integrasi harmonis antara nilai-nilai spiritual dan kemajuan sosial. Ini bukan sekadar tentang melaksanakan praktik keagamaan secara benar; lebih dari itu, penting untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat mewujudkan pembangunan yang progresif dan inklusif, berfokus pada manfaat bersama. Terciptanya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju diukur melalui persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs



Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Penguatan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju tersebut akan diwujudkan melalui arah **kebijakan transformasi**: (1) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, (2) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, (3) pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan, (4) internalisasi kurikulum kebudayaan Sulawesi Barat di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Sulawesi Barat pada anak-anak sekolah, (5) Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

14. Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Terciptanya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah cita-cita yang mencerminkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya membangun lingkungan yang mendukung perkembangan setiap individu tanpa diskriminasi, memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama masyarakat, serta memastikan kesempatan yang setara bagi semua orang.

Kebijakan transformasi agar terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif Sulawesi Barat melalui: (1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, (2) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, (3) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, (4) Pemberdayaan dan pelibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan, (5) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak.

15. Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas.

Lingkungan hidup yang baik adalah keadaan di mana alam dan masyarakat saling mendukung untuk kesejahteraan manusia serta kelestarian ekosistem. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keadaan fisik lingkungan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan keberlanjutan. Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas di Sulawesi Barat diukur dengan Indikator Utama Pembangunan yaitu Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Indikator Pengelolaan Sampah

Kebijakan transformasi untuk meningkatkan Lingkungan Hidup Berkualitas di Sulawesi Barat dari aspek Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mencakup: (1) Perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, luasan hutan, serta wilayah jelajah satwa spesies dilindungi; (2) Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi; (3) Peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui eksplorasi, ekstraksi dan penapisan keanekaragaman hayati (bioprospeksi) di tingkat genetik dan spesies; (4) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan; (5) Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya; (6) Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; (7) Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada pengelolaan lahan berkelanjutan; (8) peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga kearifan lokal (indigeneous knowledge) untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan transformasi untuk meningkatkan Lingkungan Hidup Berkualitas di Sulawesi Barat dari aspek Persampahan dan Sanitasi mencakup: (1) Pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, dengan fokus pemilahan sampah di rumah tangga, peningkatan sampah yang terangkut dan tertangani di TPST, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular; (2) Pengelolaan limbah B3 dan limbah medis yang

berkelanjutan dari hulu ke hilir, dengan fokus pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; (3) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah; (4) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.

16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan mewujudkan provinsi Sulawesi Barat yang mandiri, berkelanjutan, dan adaptif dalam menghadapi tantangan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga aspek ini saling terintegrasi dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan di Sulawesi Barat diukur dengan Indikator Utama Pembangunan yaitu Konsumsi Listrik per-Kapita, Intensitas Energi Primer, Indeks Ketahanan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan, Kapasitas Air Baku, dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.

Kebijakan transformasi untuk mencapai Sulawesi Barat yang Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan dari aspek Aspek ketahanan Energi mencakup: (1) Perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi terutama gas dan listrik; (2) Pengembangan energi baru dan terbarukan; (3) Peningkatan riset, inovasi, dan eksplorasi potensi dan cadangan baru energi, termasuk sumber energi yang berasal dari laut; (4) Perbaikan regulasi dan kelembagaan konservasi energi. Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air; (5) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi dan gas pada lingkup rumah tangga, industri, dan transportasi; (6) Mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi di daerah; (7) Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (Food, Energy, and Water) Nexus.

Kebijakan transformasi untuk mencapai Sulawesi Barat yang Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan dari aspek Aspek ketahanan Air mencakup: (1) Penerapan upaya konservasi air hujan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik; (2) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat; (3) Penguatan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu dan konservasi non vegetatif (pembangunan sumur resapan, kolam

retensi, dan bangunan penangkap air lainnya); (4) Modernisasi sistem irigasi untuk mendorong efisiensi penggunaan air irigasi; (5) Pemanfaatan sumber daya air dengan menggunakan prinsip akuntansi air (water accounting) untuk aspek pelestarian lingkungan pada rantai pasok air; (6) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan.

Kebijakan transformasi untuk mencapai Sulawesi Barat yang Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan dari aspek Aspek Kemandirian Pangan mencakup: (1) Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; (2) Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah 3TP, atau terkena dampak bencana; (3) Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; (4) pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste); (5) penguatan sistem rantai dingin, hulu-hilir perikanan, serta jaminan kualitas dan ketelusuran produk perikanan.

17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan sistem, komunitas, atau individu untuk bertahan, pulih dengan cepat, mengurangi kerentanan, dan menjadi lebih kuat setelah menghadapi krisis. Ini mencakup respons saat krisis, upaya pencegahan, adaptasi jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan lingkungan. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diukur melalui Indikator Utama Pembangunan yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Persentase Penurunan Emisi GRK.

Kebijakan transformasi untuk mencapai resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Sulawesi Barat dari aspek Kebencanaan mencakup: (1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pasca bencana; (2) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan dan penggunaan teknologi seperti flood early warning system; (3) Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok rentan; (4) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir

seperti perkuatan tanggul alami di sungai dan konservasi mangrove di pesisir; (5) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, dan gempa bumi, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.

Kebijakan transformasi untuk mencapai resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Sulawesi Barat dari aspek Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim mencakup: (1) Mewujudkan pembangunan rendah karbon dengan dekarbonisasi sektor industri, energi, dan transportasi, pengelolaan lahan berkelanjutan, penanganan limbah melalui daur ulang dan pengomposan, pemanfaatan teknologi Waste to Energy (WtE), peningkatan sanitasi dan pengolahan sampah, transisi ke energi terbarukan, serta penggunaan transportasi rendah emisi; (2) Meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi, baik struktural maupun nonstruktural, dengan fokus pada sektor air, kelautan, pesisir, pertanian, kesehatan, dan bencana; (3) Pewujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim; (4) Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim; (5) Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.

Tabel 5.8. Sasaran Pokok Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target Daerah			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
1.	Terciptanya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD)	Poin	51,56 - 51,6	52,82 - 52,91	55,35 - 55,54	58,29 - 58,61	59,97 - 60,36
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	76,11 - 76,13	77,19 - 77,31	79,39 - 79,67	81,97 - 82,41	83,45 - 83,98
2.	Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	67,25 - 67,29	67,94 - 68,02	69,32 - 69,47	70,94 - 71,16	71,86 - 72,13
			b) Indeks Perlindungan Anak	Poin	54,53-55	55-58	59-63	64-70	71-79



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target Daerah			
						Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
			c) Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	56,5-58,5	60,5 - 64,5	64,5 - 67,5	68-75	76 - 80
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,470 - 0,468	0,433 - 0,429	0,360 - 0,350	0,275 - 0,258	0,226 - 0,205
3.	Terciptanya Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Daerah	Poin	0,540	0,549	0,569	0,586	0,598
			42. Kualitas Lingkungan Hidup						
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	84,51	85,02	85,64	86,27	87,02
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persen	5	11,75	27,5	41	50,0
			c) Pengelolaan Sampah						
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	12	23,1	49	71,2	86,0
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	13	26,1	56,5	82,6	100,0
4.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
			a) Ketahanan Energi						
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	377	760,0	1653,5	2419,4	2930,0
			- Intensitas Energi Primer (SBM/ Rp Miliar)	SBM/ Rp Miliar	55	52,6	47,0	42,2	39,0
			b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Persen	7,44	6,4	3,9	1,8	0,39
			- Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78	79,97	81,61	83,01	83,95
			- Skor Pola Pangan Harapan	Poin	81	83,1	88	92,2	95
			c) Ketahanan Air						
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,00	0,32	1,07	1,71	2,14
5.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	a) Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	153-150	148,33-145,33	140,43-134,43	131,09-125,09	123,86-118,86
			b) Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
			c) Kumulatif	Persen	20,22	26,10	34,06	42,10	50,11
			d) Tahunan	Persen	33,85	51,39	65,15	81,01	90,32

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah Sulawesi Barat diarahkan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat yang aman, produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, berbasis pada kearifan lokal malaqbi menuju provinsi yang terkemuka. pusat pengembangan ekonomi kelautan, sebagai lumbung pangan padi nasional, pusat perkebunan kakao berbasis bisnis, pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, Bahari, ekowisata, kawasan perbatasan, jaringan transportasi antarmoda untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, kelestarian kawasan lindung Arah Pengembangan Spasial Provinsi Sulawesi Barat

1. Pergeseran sektor basis perekonomian Provinsi Sulawesi Barat ke sektor perekonomian yang lebih kompetitif
2. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat permukiman yang berupa pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat
4. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
6. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar dan intra kawasan budidaya
7. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan

Strategi pergeseran sektor basis perekonomian Provinsi Sulawesi Barat ke sektor perekonomian yang lebih kompetitif, yaitu

1. pengembangan pola ruang kawasan pertanian, perikanan, industri manufaktur, dan pariwisata sebagai sektor perekonomian basis baru



2. pengembangan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi sumber daya air serta prasarana lainnya pendukung pergeseran sektor basis ekonomi
3. pengembangan sarana pendukung pergeseran sektor basis ekonomi yang lebih kompetitif
4. pemberian kemudahan berusaha dalam pengembangan sektor perekonomian yang lebih kompetitif berupa kemudahan dalam Persetujuan KKPR

Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat permukiman yang berupa pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, yaitu

1. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di wilayah provinsi Sulawesi Barat, serta antar pusat pusat permukiman wilayah di Provinsi Sulawesi Barat dengan pusat-pusat permukiman wilayah eksternal
2. mengembangkan pusat permukiman baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat permukiman eksisting
3. mengembangkan pusat permukiman kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan
4. mendorong pusat-pusat permukiman agar lebih kompetitif dan lebih efektif
5. mengembangkan pelayanan pusat-pusat permukiman yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, perdagangan dan wisata secara berkelanjutan
6. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan

Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu

1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dengan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara
2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di pusat-pusat permukiman yang terisolasi
3. meningkatkan jaringan energi dan pembangkit listrik untuk memanfaatkan energi listrik terbarukan seperti sinar matahari, air dan angin dan tak terbarukan seperti batubara, diesel secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga Listrik



4. membangun infrastruktur minyak dan gas bumi regional yang optimal
5. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air
6. mengembangkan kapasitas jaringan prasarana pengelolaan persampahan

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu

1. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi
2. mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang mendukung wilayah pulau Sulawesi agar luas kawasan lindung tersebut paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional
3. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah
4. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung
5. mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran Sungai

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup

1. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
2. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
3. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya
4. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan
5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan



6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar dan intra kawasan budidaya, yaitu

1. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah
2. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya
3. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi
4. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
5. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim
6. mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan
7. mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut, dan wilayah dasar laut kewenangan provinsi Sulbar untuk kemandirian ekonomi regional dan mendukung kedaulatan ekonomi nasional
8. mengakomodir ketentuan pertahanan dan keamanan nasional di wilayah udara provinsi Sulawesi Barat

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yaitu



1. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim
2. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak
3. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
4. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau pulau kecil
5. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi
6. menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan
7. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota besar
8. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan memperlimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan
9. mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai

Kebijakan Kawasan Prioritas

Arahan Pengembangan PKN Mamuju

1. Pengembangan perkotaan Mamuju dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sehingga dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan Pembangunan yang lebih luas
2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamuju sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan dan sekitarnya



3. Pengembangan Kawasan perkotaan Mamuju pada sentra-sentra produksi yang melibatkan investasi dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas produksi, seperti jalan, Pelabuhan, bandara dan fasilitas logistik lainnya
4. Peningkatan terhadap konektivitas yang baik secara internal maupun eksternal, salah satunya dengan dukungan jaringan transportasi yang memadai dan akses yang baik ke pusat-pusat ekonomi

Kawasan Pertanian Sulbar

1. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra sentra hilirisasi pertanian
2. meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian
3. peningkatan keterhubungan antara sentra produksi pangan dan wilayah dengan permintaan pangan tinggi masih perlu diperkuat

DPP Toraja Lorrelindu dsk

1. deliniasi meliputi KPPN Sengkang dsk, KPPN Toraja dsk, KPPN Palopo dsk, KPPN Majene dsk, KPPN Palu dsk, KPPN Lote Lindu dsk, KPPN Danau Poso dsk
2. Diversifikasi kegiatan pariwisata yang mencakup: (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (heritage tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Cultural Heritage Regeneration, dan wisata desa); (3) wisata buatan (meeting-incentive conventionexhibition/MICE, dan wisata olah raga)
3. Pengembangan amenities dan atraksi wisata juga melibatkan industri dan partisipasi Masyarakat
4. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi

Berdasarkan uraian diatas, pengembangan Provinsi Sulawesi Barat difokuskan pada pengembangan kawasan perkotaan Mamuju (PKN Mamuju), pengembangan sektor pariwisata, optimalisasi dukungan untuk pertanian

Kebijakan penataan ruang Provinsi Sulawesi Barat berfokus pada pengembangan kawasan perkotaan khususnya PKN dan PKW, pengembangan industri pengolahan, pertahanan fungsi sebagai lumbung pangan, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan konektivitas dan keterpaduan transportasi antarmoda untuk mendukung



sektor-sektor unggulan tersebut, serta dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana. Kebijakan sektor berfokus pada pengembangan sektor pengembangan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional melalui pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) serta peningkatan kualitas kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berbasis ketahanan bencana. Kebijakan global berfokus pada terlaksananya pembangunan kawasan strategis yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap risiko serta dampak bencana. Setelah dilakukan iterasi terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan empat konteks perencanaan di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki lokus kawasan prioritasnya masing-masing. Keempat konteks perencanaan tersebut meliputi: 1) Pertanian tanaman pangan; 2) Pariwisata alam dan bahari; dan 3) Pelayanan dasar kawasan perkotaan.

Strategi pengembangan wilayah Sulawesi Barat didasarkan atas sintesa dokumen kebijakan, perumusan isu strategis, analisis PESTLE (Political, Economic, Sociological, Technological, Legal dan Environment).

fokus pertanian di Sulawesi Barat dikembangkan dengan strategi agresif, yakni strategi:

1. Peningkatan produktivitas pemanfaatan lahan pertanian yang didukung oleh diversifikasi varietas komoditas pertanian
2. Penguatan pertanian sebagai leading sector Sulawesi Barat melalui dukungan infrastruktur dasar pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan Nasional
3. Pemerataan penerapan teknologi dan rekayasa pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian

kawasan prioritas pada sektor pertanian yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Pasangkayu. Daftar lokus kawasan yang menjadi prioritas dinilai memiliki potensi hilirisasi komoditas pertanian

kawasan prioritas pada sektor pariwisata yaitu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Majene di Kabupaten Majene. Prioritas selanjutnya yaitu Gandang Dewata Geopark

kawasan



prioritas pada sektor perkotaan dan mitigasi bencana yaitu PKN Mamuju. Prioritas selanjutnya yaitu PKW yang terdapat di Sulawesi Barat, yaitu PKW Majene, PKW Pasangkayu, PKW Polewali Mandar, PKW Mamasa

Pertanian:

1. Sentra Pertanian Mamuju
2. Sentra Pertanian Mamasa
3. Sentra Pertanian Polewali Mandar

Pariwisata:

1. KPPN Majene
2. Gandang Dewata Geopark

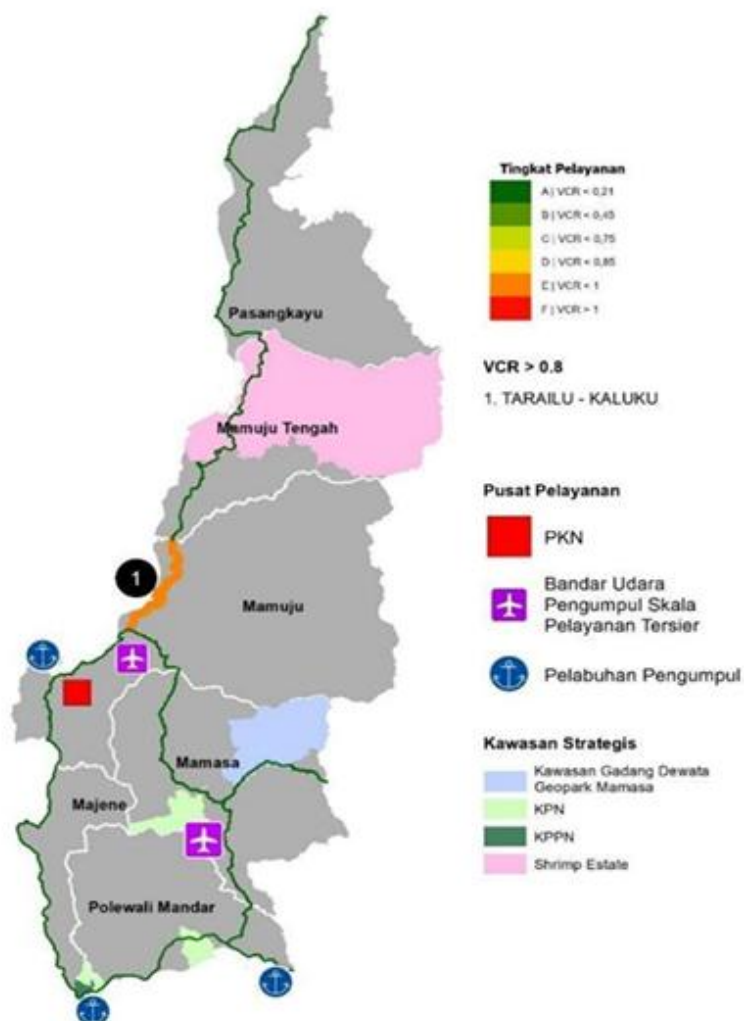
Infrastruktur Perkotaan

1. PKN Mamuju
2. PKW Majene
3. PKW Pasangkayu
4. PKW Polewali Mandar
5. PKW Mamasa

Industri Pengolahan

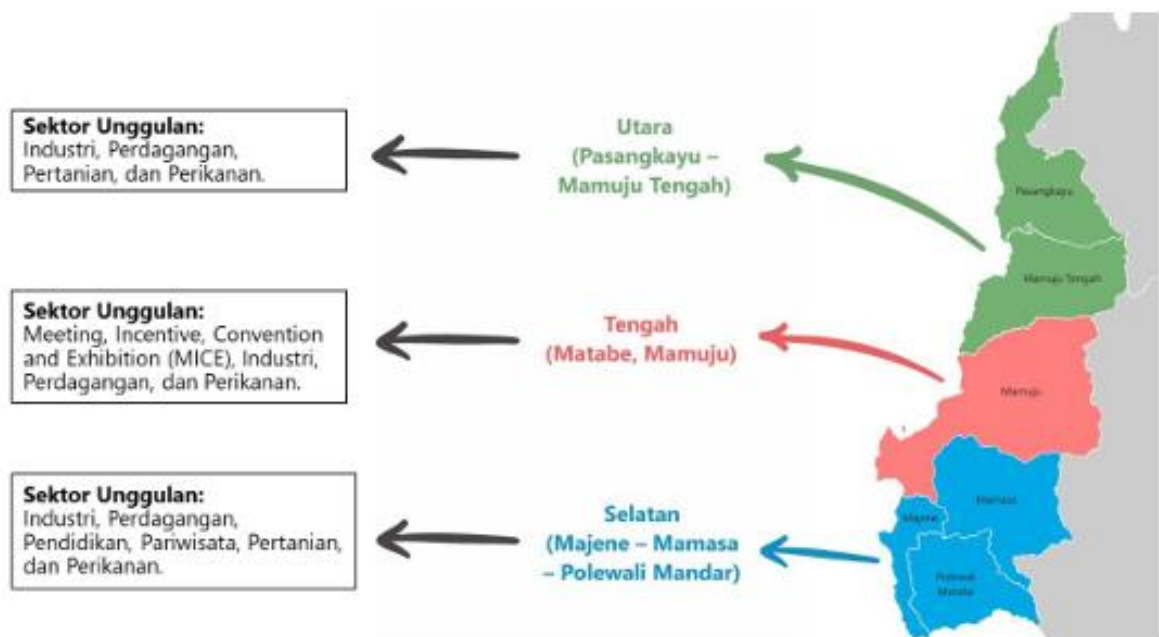
1. KI Belang-Belang
1. Wilayah perkotaan dikembangkan dengan penguatan fungsi pusat kegiatan perkotaan yang didukung oleh penyediaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana
 - a) Pengoptimalan kawasan perkotaan Mamuju yang menjadi pusat kegiatan terpadu pelabuhan, bandara, industri, perdagangan, dan peti kemas
 - b) Infrastruktur perhubungan yang terintegrasi dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi Kota Mamuju sebagai outlet dan pintu masuk komoditi dari dan keseluruhan wilayah Sulawesi Barat, serta wilayah KTI
2. Wilayah selatan dikembangkan sebagai kawasan pertanian untuk mendukung IKN
 - a) Provinsi Sulawesi Barat merupakan produsen beras terbesar keempat se-KTI, sehingga diproyeksikan untuk menjadi lumbung pangan nasional

- b) Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Barat memiliki letak strategis, karena Sulawesi Barat dilalui jalur konektivitas yang menghubungkan pusat-pusat pertanian dan perkebunan melalui jalan trans
 - c) Untuk memanfaatkan peran sebagai lumbung pangan dan letak strategisnya, maka perlu dilakukan pengembangan infrastruktur untuk mendukung hilirisasi komoditas pertanian pada lumbung pangan nasional Sulawesi Barat
3. Provinsi Sulawesi Barat memiliki Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional di Kabupaten Majene, keadaan strategis Sulawesi Barat yang terdiri dari pesisir pantai berpotensi dikembangkan sebagai wisata Bahari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang beragam guna mendukung pariwisata bahari Sulawesi Barat



arahana pengembangan kawasan di Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan berdasarkan letak dan potensi sumber daya alam wilayah, aspek transportasi dan keterjangkauan antar wilayah sehingga diharapkan akan memacu pertumbuhan kawasan sentra-sentra produksi dan interkoneksi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Wilayah pengembangan tersebut adalah wilayah Utara yang meliputi kabupaten Pasangkayu dan kabupaten Mamuju Tengah dengan PKW Pasangkayu sebagai pusat pengembangan kawasan dengan arahan pengembangan sektor unggulan: Sektor industri, perdagangan, pertanian dan perikanan. Wilayah tengah yang meliputi Kab. Mamuju dengan PKN matabe sebagai pusat pengembangan kawasan dengan arahan sektor unggulan: sektor pariwisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), Industri, Perdagangan dan Perikanan serta wilayah Selatan yang meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa dengan PKW Majene sebagai pusat pengembangan kawasan dengan sektor unggulan: sektor industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata sosial budaya, pertanian dan perikanan.





BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan dan Pembiayaan Pembangunan

Dokumen RPJPD 2025–2045 Provinsi Sulawesi Barat Ini adalah dokumen perencanaan strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatur arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, dan menjadi pedoman bagi penyusunan program dan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Dokumen ini mencakup visi, misi, strategi, dan target pembangunan yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu yang ditentukan.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, konsistensi antar dokumen perencanaan sangat penting untuk memastikan keselarasan dan kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat daerah. Ini berarti bahwa rencana keuangan harus sesuai dengan kemampuan pendanaan yang tersedia dan sebaliknya. Dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Dokumen (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan secara Nasional.

Dokumen perencanaan turunan harus mencerminkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJP Nasional. Dokumen RPJPD juga harus berpedoman pada RPJP nasional, serta menyesuaikan prioritas nasional dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu dalam merumuskan kebijakan pemerintah harus menerapkan prinsip yang didasarkan pada pengarusutamaan gender dan keberpihakan pada kelompok inklusif sebagai bentuk komitmen dan pemberian kesempatan kepada semua kelompok tanpa terkecuali sebagaimana tertuang dalam tujuan SDGS. Rencana dan program-program yang diusulkan dalam dokumen perencanaan turunan haruslah sinkron dengan target-target dan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJP Nasional.

Dalam penyusunan dokumen RPJPD diterapkan prinsip kerangka kerja logis yang menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact*. agar agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan, dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

6.1.2. Kerangka Pengendalian Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka menjamin tujuan Pembangunan daerah dibutuhkan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan sistem elektronik yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan secara terintegrasi dari level perencanaan sampai kelevel pelaksanaan yang mendorong kebijakan Pembangunan berbasis bukti. Ruang lingkup pengendalian Pembangunan yaitu pengendalian perencanaan dimana memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas Pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun swasta sedangkan pengendalian pelaksanaan yaitu menjamin implementasi Pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian Pembangunan perlu didukung dengan penyusunan regulasi yang berjalan efektif dengan menyelaraskan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian dan manajemen risiko yang menjadi pedoman sistem kinerja pemerintah.

6.1.3. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan suatu pendekatan dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan kondisi tertentu atau ancaman. Dalam melakukan manajemen risiko maka perlu dikembangkan strategi dalam mengenali, menilai, mengelola dan memitigasi risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Manajemen risiko memerlukan sumber daya untuk dapat dilaksanakan dan menemukan strategi yang tepat. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Dalam menerapkan perencanaan pembangunan jangka panjang melalui RPJPD, diperlukan kemampuan Sumber Daya Manusia, dalam melakukan

manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pembangunan jangka panjang dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah disusun.

6.1.4. Sistem Insentif

Sistem insentif merupakan strategi atau mekanisme yang dirancang untuk mendorong pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan memaksimalkan partisipasi aktif semua unsur pelaku Pembangunan secara luas sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas Pembangunan. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran.

6.1.5. Mekanisme Perubahan

Mekanisme perubahan dalam dokumen perencanaan jangka panjang di daerah menjadi ruang penyesuaian dan kereaktifan terhadap perubahan situasi politik, kebijakan ekonomi, serta faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga dapat di mutakhirkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

6.1.6 Komunikasi Publik

Komunikasi Publik merupakan aspek penting untuk memastikan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan dan responsive komunikatif serta dukungan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan komunikasi public yang baik diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan mengundang partisipasi oleh publik. Target komunikasi publik ialah masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia dilakukan berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik berprinsip tidak ada yang tertinggal dan partisipasi yang bermakna yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Komunikasi kepada pemerintah pusat dapat dilakukan melalui musyawarah dan rapat koordinasi yang dapat memberikan masukan terkait prioritas Pembangunan.

komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Skema pembiayaan peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dapat mencakup beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sektor publik pertama penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, teknologi digital proses bisnis, inovasi mekanisme pelaksanaan, kedua perluasan Kerjasama bilateral dan multilateral keuangan untuk pengembangan pembiayaan, ketiga penguatan instrument kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha khususnya dari aspek regulasi tata Kelola dan kelembagaan.

Peningkatan kapasitas sektor nonpublic dilakukan dengan mekanisme insentif pajak, keringanan regulasi, atau penyediaan infrastruktur yang mendukung untuk mendorong investasi swasta yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Mendorong pembentukan kemitraan publik-swasta yang kuat untuk mendukung implementasi program-program Pembangunan.

Sistem manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan dapat digunakan secara optimal dengan Langkah penajaman identifikasi investasi publik, proses penyempurnaan dan penilaian proyek investasi daerah, pemantauan dan pengendalian proyek investasi publik, keterlibatan Masyarakat dalam siklus investasi, tata kelembagaan dan regulasi serta kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen investasi publik, transparansi dan akuntabilitas aspek investasi publik.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024